



Pemerintah Kota Bukittinggi



PEMERINTAH
KOTA BUKITTINGGI

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
KOTA BUKITTINGGI**

**TAHUN
2018**





WALIKOTA BUKITTINGGI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia yang telah diberikan-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Bukittinggi Tahun 2018 dapat selesai tepat waktu. Penyusunan LKIP sebagai wujud Implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Substansi laporan ini merupakan wujud Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan dengan menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas serta sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan kepada Masyarakat dan kepada Pemerintah sesuai dengan amanat yang diterima.

Laporan Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018 merupakan Laporan Kinerja Tahun ketiga implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2021. Materi laporan antara lain menguraikan capaian sasaran yang diukur berdasarkan



M. RAMLAN NURMATIAS, SH
WALIKOTA BUKITTINGGI



Indikator Kinerja Utama yang dituangkan dalam RPJMD Kota Bukittinggi dengan target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018.

Secara keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Bukittinggi telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih ada beberapa indikator kinerja yang belum maksimal pencapaiannya. Keberadaan laporan ini dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih efektif dan efisien, baik dari sisi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, manajemen keuangan dan koordinasi pelaksanaannya serta monitoring evaluasi sebagai umpan balik untuk perbaikan dan penyempurnaan.

Akhir kata, kami berharap agar Laporan Kinerja Pemerintah ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja dan komitmen bagi seluruh aparatur Pemerintah Kota Bukittinggi dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan.

Bukittinggi, Maret 2019

WALIKOTA BUKITTINGGI,

M. RAMLAN NURMATIAS





IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018 merupakan laporan kinerja tahun pertama dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Bukittinggi 2016-2021. Rencana dan target kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018, untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Bukittinggi telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2018 yang terdiri dari 17 sasaran strategis yang pencapaiannya diukur dengan 26 indikator kinerja utama dan mengacu pada lima misi yang ingin diwujudkan dalam tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut :

Misi pertama terdiri dari 2 sasaran dengan 2 indikator sasaran

Misi kedua terdiri dari 1 sasaran dengan 5 indikator sasaran

Misi ketiga terdiri dari 4 sasaran dengan 6 indikator sasaran

Misi keempat terdiri dari 2 sasaran dengan 5 indikator sasaran

Misi kelima terdiri dari 7 sasaran dengan 8 indikator sasaran

Pencapaian target Misi Renstra Tahun 2018

No	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target (>100%)		Sesuai Target (100%)		Belum Mencapai Target (<100%)	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 1	2	2	115	-	-	-	-
2	Misi 2	5	2	140	3	100	-	-
3	Misi 3	5	4	116	-	-	1	72
4	Misi 4	5	1	109	-	-	4	88
5	Misi 5	8	8	150	-	-	-	-
	Jumlah	25	17	126	3	100	5	80

- Capaian pada misi pertama, sebanyak 2 indikator kinerja melampaui target 2 indikator atau 115%, dan sesuai target dan yang belum tercapai tidak ada.



- Capaian pada misi kedua, sebanyak 5 indikator kinerja melampaui target 2 indikator atau 140% sesuai target ada 3 indikator atau 100% dan belum mencapai target tidak ada.
- Capaian pada misi ketiga, sebanyak 5 indikator kinerja melampaui target 4 indikator atau 116% sesuai target ada tidak ada dan belum mencapai target 1 indikator atau 72%.
- Capaian pada misi keempat, sebanyak 5 indikator kinerja melampaui target 1 indikator atau 109% sesuai target tidak ada dan belum mencapai target 4 indikator atau 88%.
- Capaian pada misi kelima, sebanyak 8 indikator kinerja melampaui target 8 indikator atau 150% sesuai target tidak ada dan belum mencapai target tidak ada.



Daftar Isi

Halaman

Kata Pengantar

Ikhtisar Eksekutif

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan

1.1	Latar Belakang	I-1
1.2	Pemerintahan Kota Bukittinggi	I-2
1.3	Sejarah Singkat Kota Bukittinggi	I-6
1.4	Isu Strategis Pemerintah Kota Bukittinggi	I-8
1.5	Dasar Hukum	I-20
1.6	Maksud dan Tujuan	I-22
1.7	Sistematika Penyajian	I-22

Bab II Perencanaan Kinerja

2.1	Visi dan Misi	II-1
2.2	Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2015	II-3

Bab III Akuntabilitas Kinerja

3.1	Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja	III-1
3.2	Hasil Pengukuran Kinerja	III-2
3.3	Analisis Capaian Kinerja	III-4

Bab IV Penutup

	Penutup	IV-1
--	---------	------

Lampiran



BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang dimaksud dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Ketentuan ini merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk pelaporan kinerja, sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Keberadaan aturan ini akan mendorong percepatan mewujudkan tatanan pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam sistem manajemen pemerintahan, sebagai agenda penting dalam reformasi birokrasi. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Implementasinya diterapkan dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), untuk menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel, efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.

Akuntabilitas merupakan kata kunci dari sistem tersebut, yang dapat diartikan sebagai perwujudan dari kewajiban seseorang atau instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik. Secara teknis, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah diatur dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bukittinggi ini merupakan implementasi dari kebijakan nasional dan daerah, sebagai laporan penerapan tahun kedua RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 - 2021. Keberadaan LKIP ini akan menjadi indikator untuk mengukur keberhasilan pemerintah Kota Bukittinggi berdasarkan Perjanjian target kinerja yang telah ditetapkan dan ditandatangani Walikota Bukittinggi dan dilaksanakan oleh SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.

1.2. PEMERINTAHAN KOTA BUKITTINGGI

Seiring dengan penetapan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Implementasi terhadap aturan ini telah menerbitkan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bukittinggi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bukittinggi sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah, membawahi:
 - a. Asisten Administrasi Pemerintahan Umum, membawahi:
 - 1) Bagian Pemerintahan Umum.
 - 2) Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan
 - 3) Bagian Hukum dan Hak Azasi Manusia
 - b. Asisten Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
 - 1) Bagian Perekonomian
 - 2) Bagian Pembangunan
 - 3) Bagian Hubungan Masyarakat
 - c. Asisten Administrasi Umum, membawahi:
 - 1) Bagian Organisasi



- 2) Bagian Umum dan Perlengkapan
 - 3) Bagian Keuangan
2. Sekretariat DPRD, dipimpin oleh Sekretaris DPRD;
 3. Inspektorat Daerah, dipimpin oleh seorang Inspektur;
 4. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, dipimpin oleh seorang Kepala Badan;
 5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dipimpin oleh seorang Kepala Badan;
 6. Badan Keuangan, dipimpin oleh Seorang Kepala Badan;
 7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas;
 8. Dinas Kesehatan, Dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas;
 9. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas;
 10. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas;
 11. Dinas Sosial, dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas;
 12. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas;
 13. Dinas Kebakaran, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas;
 14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas;
 15. Dinas Perhubungan, dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas;
 16. Dinas Komunikasi dan Informatika, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas;
 17. Dinas Lingkungan Hidup, dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas;
 18. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan, dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas;
 19. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja, dipimpin oleh seorang Kepala Badan,

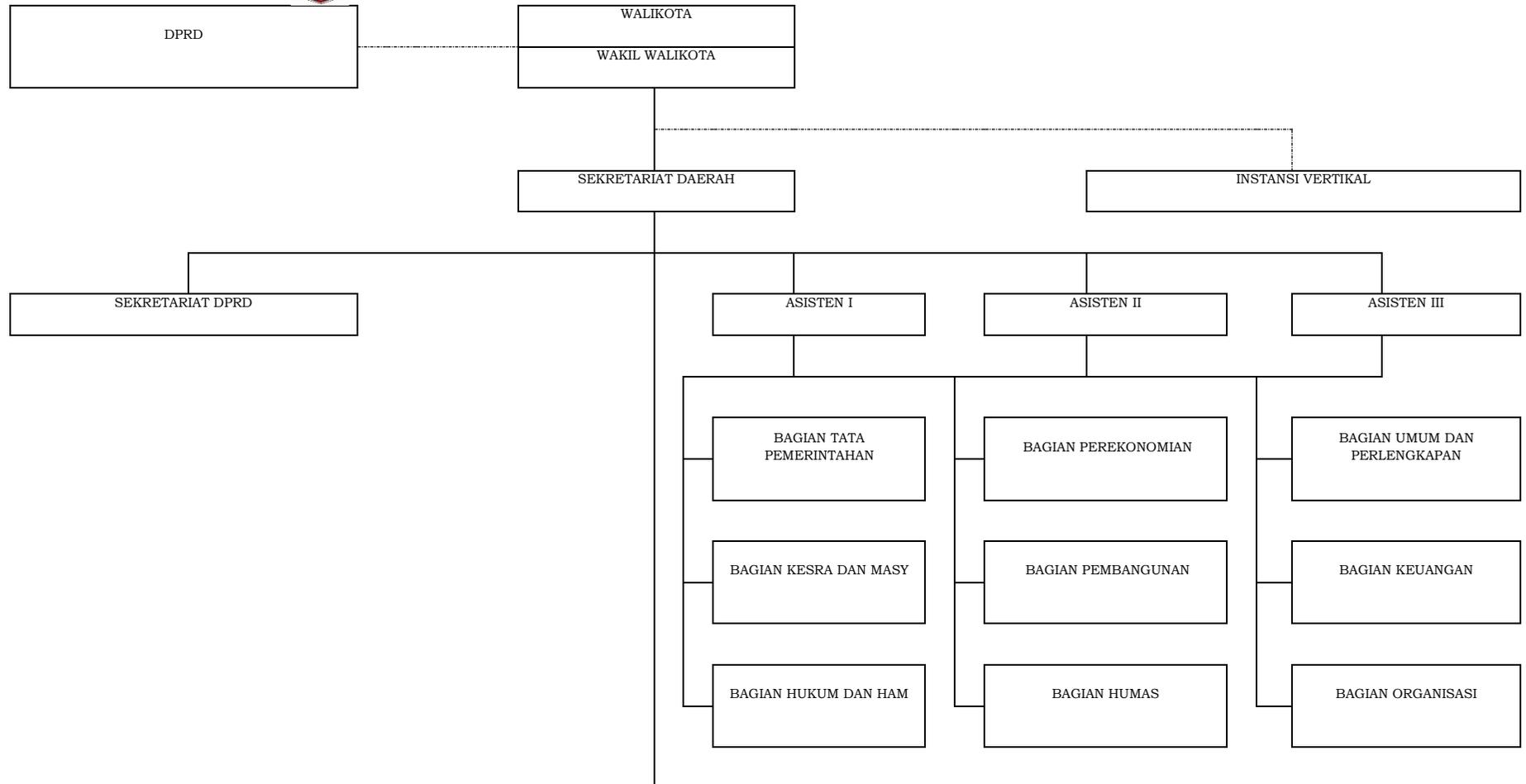


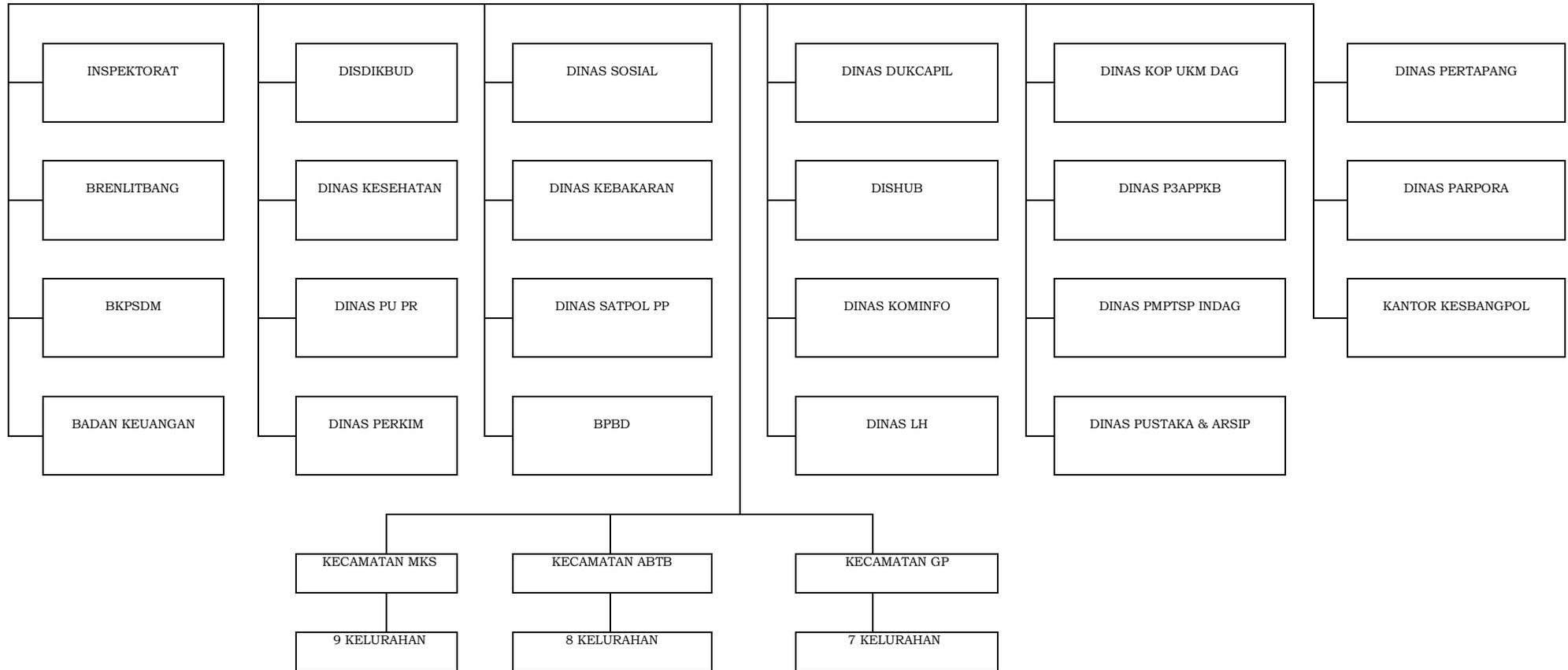
20. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas,
21. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas;
22. Dinas Pertanian dan Pangan, dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas;
23. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas;
24. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, dipimpin oleh Seorang Kepala Kantor;
25. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Pelaksana;
26. Kecamatan, dipimpin oleh seorang Camat, terdiri dari 3 Kecamatan:
 - (a) Kecamatan Guguk Panjang membawahi 7 kelurahan
 - (b) Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, membawahi 8 Kelurahan
 - (c) Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, membawahi 9 Kelurahan

Struktur Organisasi Pemerintahan Kota Bukittinggi selanjutnya dapat dilihat pada Bagan Struktur sebagaimana tercantum pada bagan berikut ini :



SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI





KETERANGAN

- - - - - = KOORDINASI
- _____ = LINE DAN STAF



Pemerintah Kota Bukittinggi



1.3. SEJARAH SINGKAT KOTA BUKITTINGGI.

Kota Bukittinggi mulai berdiri seiring dengan kedatangan Belanda yang kemudian mendirikan kubu pertahanan pada tahun 1825 pada masa Perang Padri disalah satu bukit yang terdapat dalam kota ini, dikenal sebagai Benteng *Fort de Kock*, kemudian berkembang menjadi sebuah *Stadsgemeente* (kota), dan juga berfungsi sebagai ibukota *Afdeeling Padangsche Bovenlanden* dan *Onderafdeeling Oud Agam*.

Pada masa pendudukan Jepang, Kota Bukittinggi dijadikan sebagai pusat pengendalian pemerintahan militernya untuk kawasan Sumatera, kota ini menjadi tempat kedudukan komandan militer ke 25 Kenpeitai, dibawah pimpinan Mayor Jenderal Hirano Toyoji. Kemudian kota ini berganti nama dari *Stadsgemeente Fort de Kock* menjadi Bukittinggi. Setelah kemerdekaan Indonesia, Bukittinggi ditetapkan sebagai wilayah pemerintahan kota berdasarkan Ketetapan Gubernur Provinsi Sumatera Nomor 391 tanggal 9 Juni 1947, sekaligus menjadi ibukota Provinsi Sumatera, dengan gubernurnya Mr. Teuku Muhammad Hasan.

Kota Bukittinggi berperan sebagai kota perjuangan pada masa mempertahankan kemerdekaan Indonesia, dimana pada tanggal 19 Desember 1948, kota ini ditunjuk sebagai ibukota negara Indonesia setelah Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda atau dikenal dengan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Dikemudian hari, peristiwa ini ditetapkan sebagai Hari Bela Negara, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tanggal 18 Desember 2006.

1.3.1. DASAR HUKUM PEMBENTUKAN KOTA BUKITTINGGI

Dalam perkembangannya Kota Bukittinggi terbentuk atas Dasar Hukum sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Undang-undang Nomor 22 tahun 1948 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah;



- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah dan Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong dan Sekretariat Daerah.
- 3) Undang-Undang nomor 61 Tahun 1958, Penetapan Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi Dan Riau;
- 4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah;
- 5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1966 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6) Ketetapan Gubernur Propinsi Sumatera Nomor 391 Tanggal 9 Juni 1947 Tentang Pembentukan Kota Bukittinggi Sebagai Kota Yang Berhak Mengatur Dirinya Sendiri.

1.3.2. GAMBARAN UMUM DAERAH

A. Geografi Kota Bukittinggi

Kota Bukittinggi terletak pada rangkaian Bukit Barisan yang membujur sepanjang pulau Sumatera, dikelilingi tiga gunung berapi yaitu Gunung Singgalang, Gunung Marapi dan Gunung Sago, serta berada pada ketinggian 909 – 941 meter di atas permukaan laut, jarak Kota Bukittinggi dengan Ibukota provinsi Sumatera Barat adalah sekitar 90 Km.

Wilayah Kota Bukittinggi terdiri atas 3 (tiga) kecamatan dan 24 (dua puluh empat) kelurahan dengan masing-masing luas wilayah sebagai berikut:

Kecamatan	Kelurahan	Luas Daerah (Km ²)	Prosentase Luas Kecamatan	Posisi Geografis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Guguk Panjang	7	6.831	27.07	100°, 22' 50" BT 0°, 18' 40"



Kecamatan	Kelurahan	Luas Daerah (Km ²)	Prosentase Luas Kecamatan	Posisi Geografis
				LS
Mandiangan Koto Selayan	9	12.156	48.16	100°, 22' 32" BT 0°, 17' 29" LS
Aur Birugo Tigo Baleh	8	6.252	24.77	100°, 23' 21" BT 0°, 19' 16" LS
Bukittinggi	24	25.239	100.00	100°, 22' 03" BT 0°, 17' 08" LS

1.4. ISU STRATEGIS PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

1.4.1. Penerapan ABS-SBK dan Pemberdayaan Masyarakat;

Isu ini menjadi penting meskipun selama ini kegiatan agama dan budaya tumbuh dan berkembang dengan baik, namun tantangan degradasi akhlak dan moral juga semakin besar. Aspek ini perlu diberikan penekanan dan perhatian utama dalam rangka mewujudkan Kota Bukittinggi sebagai kota terkemuka berbasis sumber daya manusia yang agamis.

Memberikan pemahaman yang seimbang dan sejalan dengan kultur budaya yang berkembang di masyarakat merupakan gerakan yang mesti dilakukan bersama dan terintegrasi. Bahwasanya segala sesuatu yang memberikan kemaslahatan bagi masyarakat sangat penting dari sisi agama dan pembangunan untuk memajukan daerahnya tanpa merusak tatanan budaya adat yang hidup di masyarakat. Kekuatan ini menjadi modal besar dan positif bagi kemajuan masyarakat dalam rangka mengimbangi berbagai dampak negative yang akan merusak karakter dan mental sebagai bangsa yang bermartabat.

Disamping itu pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi agar tercipta masyarakat yang berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial agar mampu memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Berdasarkan pemahaman mengenai pengertian pemberdayaan masyarakat, upaya pemerintah untuk mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan di Kota Bukittinggi



memerlukan penguatan agar potensi masyarakat yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan kota.

Modal besar yang perlu dibudayakan tersebut adalah falsafah *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah, Syara' Mangato, Adaik Mamakai*. Falsafah ini telah mampu mengangkat derajat dan martabat masyarakat Minangkabau termasuk Bukittinggi. Persoalannya untuk tatanan perkotaan, nilai-nilai tersebut rentan terdegradasi. Karena itu dibutuhkan upaya maksimal dan dilakukan melalui pemberdayaan seluruh elemen masyarakat.

1.4.2. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Reformasi Birokrasi pada dasarnya terdiri atas tiga elemen utama. *Pertama*, reformasi keuangan daerah yaitu sebuah mekanisme penganggaran yang tepat sasaran dan langsung menyentuh pada kepentingan masyarakat luas. Mekanisme ini tertuju pada proses kerja pemerintahan yang menentukan siapa berbuat apa, tenggat waktu serta target yang tepat. *Kedua*, reformasi sumber daya aparatur daerah yaitu sebuah kerangka kerja yang memastikan keberlangsungan sebuah program kerja dengan memusatkan perhatian kepada kesiapan sumber daya manusia. *Ketiga*, reformasi pelayanan publik; yaitu sebuah kondisi ideal pelayanan publik yang tersampaikan dari pemerintah kepada masyarakat sebagai hasil akhir dari reformasi keuangan daerah dan reformasi sumber daya aparatur. Dengan anggaran yang tepat dan profil aparat yang tepat, maka pelayanan publik ideal dapat diwujudkan dan selalu ditingkatkan dari waktu ke waktu sesuai dengan tuntutan dan standar layanan yang diinginkan masyarakat.

Tata pemerintahan yang baik merupakan isu yang paling mengemuka dalam teori dan praktek administrasi publik sesuai dengan perkembangan paradigma dari *rule government* menjadi *good governance* dan *clean government*. Membangun *good governance* bukan semata-mata masalah memperbaiki kondisi institusi pemerintah, akan tetapi yang lebih penting adalah membangun persoalan etika, sikap dan perilaku.

Perbaikan tata pemerintahan ini meliputi transparansi pemerintahan, profesionalisasi aparatur daerah, peningkatan pelayanan publik, ketaatan



terhadap hukum dan lain-lainnya. Karena itu, reformasi birokrasi dalam hal ini merupakan upaya pokok yang perlu diperkuat dalam periode 5 tahun mendatang.

Pengelolaan tata pemerintahan yang baik, harus dimulai dari sumber daya manusianya. Sebagus apapun sistem yang di buat, kalau SDM tidak memadai tetap akan menjadi sebuah kendala besar. Input terhadap sebuah subjek, akan sangat menentukan kepada output dan outcomes. Pola tata kelola dan sarana prasarana akan mendukung semakin mantapnya jalan roda sebuah pemerintahan yang tentu saja akan sangat berdampak besar terhadap pembangunan. Ada beberapa isu yang berkaitan dengan pengelolaan tata pemerintahan yang baik dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, demokratis dan tepercaya, yaitu:

- a. Transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan
- b. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi
- c. Peningkatan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik
- d. Peningkatan semangat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK)
- e. Perlunya semua stakeholder untuk dapat melakukan inovasi, yaitu semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inisiatif inovasi dapat berasal dari kepala daerah, anggota DPRD, aparatur sipil negara, Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat.
- f. Penyediaan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah. Informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah wajib diumumkan kepada masyarakat. Informasi Pemerintahan Daerah dikelola dalam suatu sistem informasi Pemerintahan Daerah.

Penggunaan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk mendukung administrasi pemerintahan juga harus dilaksanakan untuk memberikan pelayanan yang lebih efisien, efektif, transparan, dan memuaskan kepada masyarakat. Teknologi informasi dapat dipahami sebagai teknologi yang berhubungan dengan pengumpulan, penyimpanan, pengolahan dan



penyebaran informasi. Teknologi informasi terdiri dari hardware dan software. Hardware berupa perangkat komputer dan jaringannya, sementara software adalah aplikasi-aplikasi dan sistem yang digunakan. Dan yang penting juga disiapkan dalam pengelolaannya adalah brainware berupa sumber daya manusia aparatur yang professional dan berintegrasi.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan juga dituntut transparansi dan akuntabel yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat, terutama dalam pengelolaan keuangan. Kemudian secara bersamaan pemerintah juga dituntut untuk mampu meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan public. Disinilah pentingnya reinventing government dimiliki oleh seluruh aparatur penyelenggara pemerintahan. Selanjutnya hubungan kerja dan koordinasi antar lembaga pemerintahan, termasuk antar pemerintah daerah juga menjadi focus untuk dioptimalkan.

1.4.3. Peningkatan Infrastruktur, Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi;

Infrastruktur fisik merupakan komponen dasar perekonomian dan aspek utama dalam pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur juga merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi sehingga penyediaan infrastruktur yang memadai menjadi kebutuhan yang harus disediakan oleh pemerintah. Termasuk dalam penyediaan infrastruktur adalah jalan, jembatan, drainase, penyediaan air bersih, pengelolaan limbah dan lain-lain. Pembangunan sarana dan prasarana daerah merupakan isu penting bagi peningkatan peranan Kota Bukittinggi sebagai Kota Pariwisata, perdagangan dan jasa, kota pendidikan dan Kota Kesehatan. Terbatasnya daya dukung kota membutuhkan perencanaan pembangunan infrastruktur yang matang dan sekaligus mampu menjawab berbagai persoalan kota.

Rencana Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menghidupkan kembali jalur Kereta Api dari Padang ke Payakumbuh juga perlu didukung karena berdampak positif untuk meningkatkan kunjungan ke Bukittinggi dan pemenuhan kebutuhan transportasi massal yang murah dan representative.



Menyambut kebijakan tersebut, Bukittinggi juga perlu meningkatkan infrastruktur kota menjadi kota yang indah, bersih, rapi dan menyenangkan. Di samping itu, juga dibutuhkan sarana prasarana berupa pusat perbelanjaan, perhotelan, gedung konvensi dan peningkatan daya tarik wisata.

Sebagai kota jasa, dukungan teknologi informasi menjadi amat penting dalam konsep *smart city*. Sejalan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*, pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar dapat mengeliminasi sekat-sekat birokrasi organisasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi pemerintah bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses dan transparansi ke semua informasi dan layanan publik. Karena itu, gubernur dan bupati/walikota diharuskan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing guna terlaksananya pengembangan e-government secara nasional.

1.4.4. Lingkungan Hidup

Peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat tidak hanya meliputi aspek pendapatan, pendidikan dan kesehatan saja, tetapi juga termasuk mempertahankan kualitas dan daya dukung lingkungan. Tanpa penjagaan kualitas lingkungan hidup yang baik, kemajuan ekonomi dan sosial menjadi kurang berarti dan malah akan menjadi persoalan baru karena berkurangnya daya dukung lingkungan.

Isu lingkungan menempati posisi strategis dalam konteks Pembangunan berkelanjutan yang berprinsip untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan (Brundtland Report dari PBB, 1987). Faktor penting untuk mencapai berkelanjutan adalah pembangunan dengan tetap memperhitungkan faktor lingkungan. Penanganan yang tepat terhadap permasalahan lingkungan yang muncul sebagai dampak dari pembangunan menjadi tugas pemerintah.



Dinamika kota yang sangat tinggi akan semakin menguras daya dukung lingkungan berupa bertambahnya luas lahan terbangun dan terjadinya polusi. Kondisi saat ini menunjukkan kemampuan daya tampung kota semakin menurun sebagai dampak dari kegiatan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pembenahan dan penambahan daya dukung kota pada lokasi-lokasi yang masih memungkinkan.

Pengendalian dan pemeliharaan kualitas lingkungan kota tidak terlepas dari penyediaan ruang terbuka hijau kota. Upaya pemenuhan kebutuhan RTH sampai saat ini dilakukan dengan membangun dan meningkatkan taman kota, pelestarian dan peningkatan terhadap hutan kota, jalur hijau, sempadan sungai, dan mendorong peningkatan RTH privat. Konsep green city juga menjadi bagian penting untuk terus dikembangkan, dengan dukungan pemerintah melalui lembaga dan kementerian terkait.

1.4.5. Pelaksanaan MEA

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) mulai diberlakukan pada akhir Desember 2015, dimana ASEAN akan menjadi pasar tunggal dan satu kesatuan basis produksi, sehingga akan terjadi aliran bebas barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja terampil antar negara ASEAN. Hal ini merupakan peluang sekaligus tantangan yang perlu disikapi oleh Kota Bukittinggi secara cermat dan terintegrasi. Edukasi masyarakat tentang peluang MEA 2015, peningkatan daya saing perekonomian daerah, serta peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja di daerah akan menjadi aset berharga bagi Daerah untuk meraih keberhasilan dalam memperoleh manfaat dari MEA bagi kepentingan pembangunan daerah.

Pemerintah Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing perekonomian daerah untuk menghadapi implementasi MEA 2015 dan meningkatkan peran aktif kalangan dunia usaha dalam mengoptimalkan manfaat dari implementasi MEA. Terkait dengan pelaksanaan MEA tersebut, perlu adanya peningkatan efektivitas sosialisasi, komunikasi, serta layanan edukasi terhadap masyarakat dan para pelaku bisnis mengenai pemahaman



dan pemanfaatan Masyarakat Ekonomi ASEAN bagi kepentingan pembangunan di daerah.

Beberapa upaya yang mesti dilakukan daerah untuk mengambil manfaat dalam pelaksanaan MEA tersebut adalah: peningkatan iklim usaha dan investasi yang kondusif, peningkatan daya saing produk unggulan daerah, peningkatan infrastruktur, peningkatan daya saing sumber daya manusia, serta peningkatan kapasitas UMKM di daerah. Peningkatan daya saing perekonomian daerah untuk menghadapi implementasi MEA melalui: peningkatan peran aktif berbagai pemangku kepentingan di daerah, maupun kalangan dunia usaha dalam mengoptimalkan manfaat dari implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Peningkatan daya saing perekonomian daerah perlu didukung oleh kebijakan pemerintah daerah yang kondusif, yang tidak menciptakan ekonomi biaya tinggi. Peningkatan infrastruktur akan dititikberatkan pada upaya untuk meningkatkan kelancaran distribusi barang dan jasa yang akan meningkatkan efisiensi ekonomi dan kelancaran arus barang dan jasa keluar masuk Kota Bukittinggi.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu diarahkan untuk menciptakan lulusan pendidikan yang lebih berkualitas, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, serta mendorong sertifikasi kompetensi pekerja di daerah agar dapat berdaya saing di pasar ASEAN. Selain itu Pemerintah daerah diharapkan dapat mendorong penciptaan nilai tambah ekonomi yang lebih tinggi, mengurangi perizinan yang menghambat investasi sehingga terjadi peningkatan investasi masuk ke Daeraantara lain dengan pengembangan sistem inovasi daerah dan penerapan inovasi pelayanan publik.

1.4.6. Peningkatan Mutu Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan

Pendidikan merupakan sarana untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang menjadi objek dan subjek pembangunan. Dari hasil penelitian terungkap bahwa pembangunan sektor pendidikan dengan manusia sebagai fokusnya telah memberikan kontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara, melalui peningkatan keterampilan dan kemampuan produksi tenaga kerja. Untuk itu, Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus di bidang pendidikan agar setiap warga masyarakat memiliki hak



yang sama dalam mendapatkan akses pendidikan. Secara umum, indikator kinerja standar pelayanan bidang pendidikan Kota Bukittinggi telah memenuhi target pencapaian. Akses layanan pendidikan yang merata dan berkeadilan bagi semua lapisan masyarakat harus lebih ditingkatkan lagi dalam rangka meningkatkan capaian target indeks pendidikan. Untuk itu diperlukan upaya dalam mengurangi ketimpangan kualitas sekolah dengan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan infrastruktur sekolah, meningkatkan kapasitas tenaga pendidik, memberlakukan standar manajemen yang sama, serta menjalankan rotasi dan mutasi guru/kepala sekolah secara berkala sehingga setiap sekolah dapat memberikan kualitas pelayanan secara merata bagi setiap lapisan masyarakat. Di samping itu, dengan adanya rotasi dan mutasi secara berkala diharapkan akan terjadi transfer informasi manajemen sekolah yang dibutuhkan dalam rangka mengurangi disparitas kualitas pendidikan sekolah.

Disamping pendidikan, faktor kesehatan masyarakat juga sangat penting dalam pelaksanaan program pembangunan. Kualitas kesehatan yang baik akan memberikan sumber daya manusia yang siap untuk melaksanakan pembangunan suatu negara. Penanganan kesehatan yang sinergis dengan faktor lingkungan menjadi penting, karena tindakan preventif dalam bidang kesehatan perlu dikembangkan disamping upaya kuratif berupa pengobatan. ada pula upaya promotif dan preventif sebagai upaya peningkatan kualitas dan menjaga kesehatan masyarakat agar tidak mudah terjangkiti penyakit. Konsep penanganan kesehatan secara promotif dan preventif mendorong adanya pemahaman bahwa faktor kesehatan lingkungan merupakan aspek penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Diperlukan peningkatan layanan kesehatan promotif dalam bentuk peningkatan higienitas dan sanitasi lingkungan yang ruang lingkupnya meliputi penyediaan air bersih rumah tangga, metode pengelolaan dan pembuangan sampah, penanganan kotoran dan air limbah rumah tangga sehingga dapat dipahami bahwa kesehatan lingkungan adalah upaya promotif yang harus dijalankan lintas sektoral. Upaya preventif juga promotif dalam konsep penanganan kesehatan adalah melalui kegiatan Posyandu yang menitikberatkan kepada penanganan kesehatan balita.



1.4.7. Pembangunan Kependudukan

Masalah Kependudukan dan Keluarga Berencana merupakan tantangan bagi pembangunan kesejahteraan di Kota Bukittinggi. Berdasarkan pendataan keluarga tahun 2015 jumlah penduduk Kota Bukittinggi sebesar 101.024 Jiwa, terdiri dari 50.630 jiwa laki laki atau 50,12% dan 50.394 jiwa perempuan atau setara dengan 49,88%. Sedangkan jumlah anak sebesar 18.168 jiwa terdiri dari 9.311 anak laki – laki atau 5,25% dan 8.857 anak perempuan atau 48,75%. Apabila kita tambahkan jumlah penduduk perempuan dan jumlah anak di Kota Bukittinggi mencapai 68.562 jiwa atau 67,88%. Artinya struktur penduduk Bukittinggi telah dengan jelas mereferensi Pemerintah Kota Bukittinggi untuk memfokuskan manfaat pembangunan kesemua penduduk terutama perempuan dan anak, Karena baiknya sebuah Kota bahkan Negara memang lebih banyak ditentukan oleh kualitas perempuannya dan pola asuh keluarga terhadap anak sebagai generasi penerus bangsa.

Apalagi dikaitkan dengan puncak bonus demografi tahun 2028, dimana struktur penduduk Kota Bukittinggi jumlah penduduk produktif (18 - 65 tahun) lebih besar dibandingkan dengan penduduk non produktif (≤ 17 sampai ≥ 66 tahun). Artinya kebijakan pembangunan yang tidak memastikan penduduk produktif memiliki kompetensi dan berkualitas, justru akan mendatangkan permasalahan yang sangat kompleks. Pemerintah harus memastikan, penduduk produktif harus memiliki pekerjaan dan tabungan, harus berpendidikan, harus sehat, harus memiliki fondasi agama dan budaya yang kuat. Sehingga dengan kondisi tersebut, struktur penduduk tahun 2028 tersebut dipastikan memberikan bonus. Apabila kondisi tersebut tidak terjadi maka yang di tahun 2028 kondisi yang ada justru bencana demografi, karena jumlah penduduk yang besar tersebut tidak berkualitas. Apabila ditarik ketahun 2017, maka penduduk yang berumur mulai 7 tahun sampai dengan penduduk berumur 54 tahun harus dipastikan mendapat porsi pembinaan dan pembangunan yang terintegrasi dan memastikan mereka memiliki kualitas dan kompetensi yang baik.

Grand Desain Kependudukan yang telah dilegalisasi dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 25 Tahun 2015 tentang Grand Desain



Kependudukan tahun 2010 s/d 2035 menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Pembangunan di Kota Bukittinggi, sehingga pembangunan Kota Bukittinggi belum kuat berwawasan kependudukan. Grand Design kependudukan telah merinci 5 (lima) aspek pembangunan kependudukan yaitu Pengendalian kuantitas penduduk, Peningkatan Kuantitas penduduk, Pengarahan mobilitas penduduk, Pembangunan Keluarga dan Pembangunan data Base Kependudukan. Laju Pertumbuhan Penduduk masih di strata 1,77, yang disebabkan faktor urbanisasi sebagai akibat atau eksekusi dari Bukittinggi sebagai kota wisata, Kota Perdagangan, Kota Pendidikan dan Kota Kesehatan. Urbanisasi berasal dari masyarakat *hinterland* atau masyarakat di sekitar kota Bukittinggi seperti Agam, Lima Puluh Kota, Padang Pariaman bahkan dari Sumatera Utara dan Riau semakin hari semakin besar, dan nyaris tidak terkendali. Akibat tidak adanya strategi pengembangan ekonomi yang mampu memproteksi atau mengurangi pendatang. Rata-rata Kepadatan penduduk Kota Bukittinggi telah mencapai 4.774 jiwa/km², dan untuk Kecamatan Guguk panjang kepadatan penduduk telah mencapai 6.601 Jiwa / Km². Meningkatnya indeks harapan hidup tidak dibarengi dengan program dan kegiatan yang membuat seorang lansia tangguh dan memiliki nilai manfaat. Apabila ini tidak menjadi konsentrasi Pemko Bukittinggi, ini justru akan menjadi beban baru. Bonus Demografi tahun 2028, mengharuskan ketepatan kebijakan dan program, agar bonus demografi benar – benar dapat dicapai. Tinggi pertumbuhan ekonomi tidak berdampak signifikan kepada penanggulangan kemiskinan karena pertumbuhan penduduk tidak menjadi prioritas program. Garapan program KB terhadap Pasangan Usia Subur sebenarnya sudah baik yaitu 69,16%, namun karena laju pertumbuhan penduduk dari faktor urbanisasi strata PUS sangat tinggi ke Bukittinggi, membuat kinerja garapan program KB ke PUS terkesan stagnasi, sehingga benar benar diperlukan strategi arus masuk penduduk ke Kota Bukittinggi yang lebih berpihak kepada program kependudukan, Karena tanpa adanya regulasi yang jelas, maka LPP Kota Bukittinggi sulit diturunkan. Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan suami istri yang istrinya berumur 15-49 tahun, atau pasangan suami istri yang istrinya berumur kurang dari 15 tahun dan sudah haid (datang bulan), juga termasuk istri berumur lebih dari 50 tahun tetapi masih haid.



1.4.8. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Fungsi kodrati hak perempuan dan anak melalui program pengarusutamaan Gender, perlindungan hak-hak perempuan, serta menjamin hak dasar anak dalam rangka menjamin kesetaraan hak laki-laki dan perempuan dalam hidup sebagai anugerah Tuhan yang maha kuasa, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga serta perlindungan terhadap anak dan kepada perempuan, telah ditegaskan dalam UUD 1945. Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan jaminan setiap warga Negara Indonesia dan berhak mendapat rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan dan penindasan sesuai falsafah Pancasila

Untuk meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, wajib melaksanakan PUG kedalam seluruh proses pembangunan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat pusat dan daerah dengan cara mengintegrasikan dimensi kesetaraan dan keadilan gender dalam seluruh tahapan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pembangunan. Isu-isu yang terkait dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, adalah urusan wajib yang dilaksanakan oleh Pemerintah mulai dari Pusat sampai ke daerah yang meliputi Pengarusutamaan gender, Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak

Untuk urusan pemberdayaan perempuan dan anak, Kota Bukittinggi telah melakukan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak baik berupa pelatihan, sosialisasi, pembinaan yang ditujukan bagi kaum perempuan dan anak, serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk penanganan dan penanggulangan masalah KDRT. Walaupun semua pengaduan dapat ditanggulangi dengan baik namun tidak semua kasus yang ada di masyarakat terpantau dengan baik, karena tidak dilaporkan ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Hal ini menunjukkan pengetahuan dan



wawasan masyarakat terhadap penanganan kasus KDRT dan perlindungan anak, masih perlu ditingkatkan. Masih tingginya tindakan KDRT, menunjukkan peran masyarakat dan lembaga kemasyarakatan belum kuat.

Partisipasi perempuan di Kota Bukittinggi dapat dilihat di segala bidang kehidupan, baik politik dan lembaga legislatif, pemerintah dan lembaga eksekutif, yudikatif maupun organisasi kemasyarakatan lainnya bahkan menjadi pelaku ekonomi. Namun demikian, partisipasi perempuan dalam kehidupan publik tidak cukup diimbangi dengan meningkatnya jumlah perempuan sebagai pengambil keputusan. Keterlibatan perempuan pada sektor publik di Kota Bukittinggi, khususnya Pegawai Negeri Sipil perempuan yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi berjumlah 2.227 orang atau 60,40% dari jumlah seluruh ASN yang ada, yaitu sebesar 3.683 orang pegawai. Dilihat dari perbandingan perempuan bekerja di lembaga pemerintah dengan pegawai yang ada, sudah memperlihatkan angka yang sangat baik, bahkan melampaui batas amanah UU yaitu 30%. Namun apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan usia kerja (umur 20 sampai 60 tahun) yang berjumlah sebesar 29.341 jiwa, persentase perempuan yang bekerja pada pemerintah hanya mencapai 7,6%, disatu pihak amanat Undang – Undang , mengamanatkan kuota perempuan sebesar 30 %, kondisi ini harus di akui sebagai belum tuntasnya program pengarusutamaan gender di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi, tentu hal ini perlu mendapat perhatian khusus dari Pemerintah, bahwa pada kenyataannya, kesetaraan dan keadilan gender masih perlu ditingkatkan.

Secara keseluruhan, artinya program pengarusutamaan gender, Pemberdayaan Perempuan masih perlu menjadi konsentrasi Pemerintah Kota Bukittinggi dan bersifat terintegrasi dan melibatkan semua pihak.

Selanjutnya dalam pemenuhan hak anak yakni 5 klaster hak anak (KHA) dengan 31 indikator telah dibuat gugus tugas Kota Layak anak (KLA). Untuk perlindungan dari kekerasan juga telah dibuat gugus tugas GN-AKSA dan P2TP2A. Bahkan saat ini Bukittinggi telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan anak. Hal ini



tentu sebagai komitmen nyata Pemerintah Kota Bukittinggi, untuk urusan Perempuan dan Anak.

1.4.9. Penanggulangan Kemiskinan.

Kemiskinan dan pengangguran merupakan persoalan ekonomi makro yang berpengaruh terhadap mutu hidup manusia baik dari sisi kesehatan maupun pendidikan. Persoalan ini mempengaruhi kehidupan ekonomi berupa menurunnya daya beli masyarakat dan semakin sulitnya alokasi rumah tangga. Kondisi ini telah berakibat terhadap anggaran pembangunan yang tersedia agar mengarah kepada pembenahan persoalan kemiskinan dan pengangguran. Percepatan pencapaian tujuan *Millenium Development Goals* (MDGs) merupakan amanah dari Inpres Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional dan Inpres Nomor 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan. Pencapaian target *Millenium Development Goals* (MDGs) akan berakhir pada tahun 2015, terdapat fenomena pada beberapa negara yang targetnya dikhawatirkan tidak tercapai. Namun dengan ditetapkannya *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai kelanjutan agenda global pasca MDGs, kekhawatiran ini tidak terjadi. Agenda SDGs ini relevan dengan garis kebijakan empat pilar pemerintah yang telah mencanangkan tercapainya pertumbuhan ekonomi, penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan, dan perbaikan lingkungan hidup. Berkaitan dengan hal tersebut, kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Bukittinggi setelah tahun 2015, sudah barang tentu akan menindaklanjuti agenda SDGs ini. Prioritas penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran diarahkan untuk membuka seluas-luasnya lapangan kerja melalui pendidikan dan pelatihan tenaga kerja dan kemudahan permodalan, yang pada gilirannya nanti akan dapat mewujudkan 1) penurunan tingkat pengangguran; 2) ketersediaan tenaga kerja terampil; 3) peningkatan pendapatan masyarakat, 4) meningkatnya produktivitas usaha; 5) pemberdayaan perempuan warga lansia untuk usaha-usaha produktif.

Disamping isu strategis diatas, maka tak kalah pentingnya yang harus menjadi pekerjaan yang berat adalah Pengalihan Kewenangan Urusan



Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terjadi beberapa perubahan mendasar terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, terdapat beberapa urusan yang dialihkan kewenangannya dari kewenangan daerah menjadi kewenangan Provinsi/Pusat (urusan konkuren). Adapun urusan pemerintah konkuren tersebut meliputi penyelenggaraan sub urusan:

- a. Pengelolaan pendidikan menengah;
- b. Pengelolaan terminal penumpang tipe A dan tipe B;
- c. Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara;
- d. Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi;
- e. Pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan;
- f. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan Provinsi;
- g. Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan;
- h. Pengelolaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB);
- i. Pengelolaan tenaga pengawas ketenagakerjaan;
- j. Penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional; dan
- k. Penyediaan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan.

1.5. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2015 ini didasarkan kepada :

- 1) Undang–Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
- 2) Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;



- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 6) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 8) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 9) Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- 10) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 11) Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2008 tentang
- 12)
- 13) Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14) Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 – 2025;
- 15) Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2010 – 2015;



- 16) Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bukittinggi;
- 17) Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2017;
- 18) Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017;
- 19) Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 80 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 64 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 80 Tahun 2017.

1.6. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2018 ini dimaksudkan untuk mengungkap pertanggungjawaban tingkat pencapaian pengukuran kinerja dan Evaluasi Pemerintah Kota Bukittinggi dalam mewujudkan visi dan misi berdasarkan pencapaian tujuan dan sasaran serta strategi berupa kebijakan dan program yang terdiri atas kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kota Bukittinggi tahun 2018.

Adapun tujuan penyusunan LKIP ini secara umum adalah sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak terkait, meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah, serta meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam mewujudkan visi dan misi pemerintah kota. Akhirnya penyusunan LKIP ini diharapkan dapat membantu upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.7. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018 ini menjelaskan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan Pemerintah Kota



Bukittinggi Tahun 2018. Capaian kinerja tersebut merupakan perbandingan antara target kinerja yang ditetapkan dengan realisasi kinerja sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kota Bukittinggi. Analisis atas capaian kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja memungkinkan diidentifikasi dari sejumlah celah kinerja guna perbaikan kinerja dimasa yang akan datang. Berdasarkan kerangka pikir tersebut, sistematika penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Bab I *Pendahuluan*

Pada bab ini memuat penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi

Bab II *Perencanaan Kinerja*

Dalam bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

Bab III *Akuntabilitas Kinerja*

Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran strategis, Indikator Kinerja, Metodologi Pengukuran Kinerja, Analisis Pencapaian Kinerja, Capaian Kinerja, Kendala yang dihadapi dan Aspek Keuangan.

Bab IV *Penutup.*

Mengemukakan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.



Pemerintah Kota Bukittinggi



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2. 1. VISI DAN MISI

2.1.1 VISI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi tahun 2016 – 2021, dinyatakan bahwa visi daerah adalah:

VISI

**“TERWUJUDNYA BUKITTINGI KOTA TUJUAN PARIWISATA,
PENDIDIKAN, KESEHATAN, PERDAGANGAN DAN JASA, BERLANDASKAN
NILAI AGAMA DAN BUDAYA”**

Makna yang terkandung dari visi di atas, adalah sebagai berikut:

1. Bukittinggi kota tujuan pariwisata mempunyai makna bahwa Bukittinggi merupakan salah satu sentral wisata di wilayah Indonesia bagian barat yang disemangati dengan budaya yang bermartabat, masyarakat yang religius, kegiatan perdagangan yang maju, alam yang indah, kuliner yang berkelas, tertata, bersih dan sehat.
2. Bukittinggi kota pendidikan mengandung makna bahwa Bukittinggi mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas dan mempunyai daya saing yang tinggi.
3. Bukittinggi kota kesehatan mengandung makna bahwa masyarakat kota Bukittinggi mempunyai lingkungan yang sehat dengan derajat kesehatan yang tinggi dan sentra pelayanan kesehatan daerah sekitarnya
4. Bukittinggi kota perdagangan dan jasa mengandung makna bahwa semua pelaku ekonomi mempunyai jiwa kewirausahaan yang berdaya saing tinggi
5. Bukittinggi sebagai kota yang berlandaskan nilai-nilai agama mengandung makna bahwa masyarakat Bukittinggi menjadikan agama sebagai landasan dalam tata-tatanan kehidupan bermasyarakat dan berusaha.
6. Bukittinggi sebagai kota yang beradat dan berbudaya mengandung makna dalam menjalankan kehidupan sehari-hari berdasarkan filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah

2.1.2. MISI



Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2016-2021 ditetapkan sejalan dengan RPJPD Kota Bukittinggi. Ada 5 Misi yang telah ditetapkan sebagai perwujudan dan penjabaran dari Visi. Adapun Misi dimaksud adalah sebagai berikut:

MISI

1. Mengembangkan dan memberdayakan partisipasi berbagai potensi pemangku kepentingan (Pemerintah, Dunia usaha dan Masyarakat).
2. Meningkatkan kinerja Pemerintahan secara profesional, transparan, akuntabel dan mempunyai jiwa kewirausahaan.
3. Meningkatkan pembangunan, penataan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana secara terpadu dan berwawasan lingkungan.
4. Mengembangkan sistem ekonomi perkotaan secara lebih berdaya guna.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa serta kesejahteraan sosial masyarakat

2.1.3. PERENCANAAN KINERJA

Tahun 2017 merupakan tahun kedua implementasi RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2021, yang penyusunannya dilakukan melalui penyempurnaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017, dimana pada waktu penyusunan awalnya masih memperhatikan RKPD yang lama. Dengan ditetapkannya RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2021, dilakukan penyempurnaan perencanaan tahunan dimaksud, berikut Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

Prioritas Pembangunan Kota Bukittinggi tahun 2018 berdasarkan RPJMD Kota Bukittinggi tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan mental, Penerapan ajaran agama, adat dan budaya;
2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik;
3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan



4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
5. Pengembangan Pariwisata
6. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)
7. Penanggulangan Kemiskinan
8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur
9. Pelestarian lingkungan hidup

2.2. PENETAPAN KINERJA PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2018

Dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018 yang telah ditetapkan berpedoman pada RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018, dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bukittinggi.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET
1	2		3		4
1	Melibatkan Pemangku kepentingan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah	a	Persentase usulan pemangku kepentingan yang diakomodir dalam Perencanaan Pembangunan	%	90
2	Meningkatnya dukungan pembiayaan pemangku kepentingan dalam pembangunan		Rasio Corporate Social Responsibility dengan Belanja Langsung APBD dalam pembiayaan	%	1,75



			Pembangunan		
3	Terlaksana reformasi birokrasi	a	Nilai SAKIP	nilai	BB
		b	Peringkat LPPD	peringkat	40
		c	Indeks RB	nilai	B
		d	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	nilai	WTP
		e	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan public	%	75
4	Terpenuhinya RTH Kota	A	Persentase RTH Publik	%	14
5	Fasilitas publik yang memenuhi standar lingkungan	a	Persentase fasum yang representatif dan memenuhi standar lingkungan	%	65
6	Pemenuhan target universal access (sanitasi, air bersih dan permukiman kumuh)	a	Persentase Penyediaan air minum layak	%	90
		b	Kawasan Kumuh	ha	6
		c	Persentase sanitasi layak	%	95



7	Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Kota	a	Kesesuaian pemanfaatan ruang kota	%	65
8	Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi	a	Pertumbuhan ekonomi	%	6,30
		b	PDRB Perkapita	jumlah	53,25 juta
		c	Indeks Gini	jumlah	<0,3
		d	Jumlah Investasi	%	40
9	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	a	Tingkat Kemiskinan	nilai	3,5
10	Meningkatkan pelayanan pariwisata	a	Kunjungan Wisatawan	jumlah	533.555 orang
11	Meningkatnya akses layanan bidang pendidikan	a	Harapan lama sekolah	%	14,9
12	Meningkatkan kualitas pendidikan	a	Persentase Sekolah yang berakreditasi A tingkat SD	%	78,50
		b	Persentase Sekolah yang berakreditasi A tingkat SMP	%	70,75
13	Peningkatan kualitas layanan kesehatan	a	Angka Harapan Hidup	%	72,85
14	Meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan serta sumber daya kesehatan	a	Persentase Puskesmas yang terakreditasi	%	70



15	Terjaganya stabilitas harga	a	Tingkat Inflasi	%	5
16	Terkendalinya jumlah penduduk	a	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,55



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018 merupakan Perwujudan kewajiban Pemerintah Kota Bukittinggi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber dana lainnya, dalam rangka mencapai misi pemerintah daerah secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2017. Akuntabilitas Kinerja ini mencakup 17 sasaran strategis dengan 26 indikator kinerja.

3.1. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja

Pengukuran Kinerja merupakan pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2017. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Bukittinggi serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis diukur dengan capaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini.

Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan

Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2017

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	85% - 100%	Sangat Baik
2	69% - 84%	Baik
3	53% - 68%	Cukup
4	<53%	Gagal



3.2. Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil pengukuran capaian target indikator, dari 16 sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2017, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET	REALISAI	%
1	Melibatkan Pemangku kepentingan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah	1	Persentase usulan pemangku kepentingan yang diakomodir dalam Perencanaan Pembangunan	90%	98%	108,8%
2	Meningkatnya dukungan pembiayaan pemangku kepentingan dalam pembangunan	2	Rasio Corporate Social Responsibility dengan Belanja Langsung APBD dalam pembiayaan Pembangunan	1,75%	1,58%	105%
3	Terlaksanya reformasi birokrasi	3	Nilai SAKIP	BB	BB	100%
		4	Peringkat LPPD	40	29	137,9%
		5	Indeks RB	B	BB	125%
		6	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP	WTP	100%
		7	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan public	75%	87,35%	116%
4	Terpenuhinya RTH Kota	8	Persentase RTH Publik	14%	1,079%	7,7%



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET	REALISAI	%
5	Fasilitas Publik yang memenuhi standar lingkungan	9	Persentase Fasum yang representative dan memenuhi standar lingkungan	65%	67,94%	104
6	Pemenuhan target universal access (sanitasi, air bersih dan permukiman kumuh)	10	Persentase Penyediaan air minum layak	90%	92	102
7	Pemenuhan target universal access (sanitasi, air bersih dan permukiman kumuh)	11	Kawasan Kumuh	6 ha	8,2 ha	73
		12	Persentase sanitasi layak	95%	96	101
8	Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Kota	13	Kesesuaian pemanfaatan ruang kota	65%	60%	93
9	Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi	14	Pertumbuhan ekonomi	6,30%	6,04	95
		15	PDRB Perkapita	53,25 juta	58,73	110
		16	Indeks Gini	<0,3	0,32	93
		17	Jumlah Investasi	40%	27%	67
10	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	18	Tingkat Kemiskinan	3,5	5,48	68
11	Meningkatkan pelayanan pariwisata	19	Kunjungan Wisatawan	533.555	577.857	108
12	Meningkatnya akses layanan bidang pendidikan	20	Harapan lama sekolah	14,9	14,92	100,8
13	Meningkatkan kualitas pendidikan	21	Persentase Sekolah yang berakreditasi A tingkat SD	78,50%	72,88	92,8



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET	REALISAI	%
		22	Persentase Sekolah yang berakreditasi A tingkat SMP	70,75%	61,53	86,9
14	Peningkatan kualitas layanan kesehatan	23	Angka Harapan Hidup	72,85	72,88	92,8
15	Meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan serta sumber daya kesehatan	24	Persentase Puskesmas yang terakreditasi	70	61,53	86,9
16	Terjaganya stabilitas harga	25	Tingkat Inflasi	5	1,37	437,9
17	Terkendalnya jumlah penduduk	26	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,55	1,56	100

Dari tabel diatas dapat dilihat, capain rata-rata dari 25 indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian 15 sasaran strategis yang ditetapkan tahun 2017 sebesar 115,99% Sesuai dengan Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan **Sangat baik**.

3.3. Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil capaian terhadap pengukuran indikator kinerja Kota Bukittinggi Tahun 2017 yang telah dicantumkan pada tabel pengukuran kinerja, selanjutnya pada sub bab ini disajikan analisis capaian kinerja per sasaran strategis untuk mewujudkan masing-masing misi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

MISI I : MENGEMBANGKAN DAN MEMBERDAYAKAN PARTISIPASI BERBAGAI POTENSI PEMANGKU KEPENTINGAN (PEMERINTAH, DUNIA USAHA, DAN MASYARAKAT)

Sesuai Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2017, misi ini dicapai melalui 1 tujuan dan 2 sasaran strategis yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan pada seluruh SKPD terkait. Adapun tujuan dan sasaran tersebut adalah sebagai berikut:



No	Tujuan	No	Sasaran Strategis
1.1	Meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan dalam pembangunan	1.1.1	Melibatkan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah
		1.1.2	Meningkatnya dukungan pembiayaan pemangku kepentingan dalam pembangunan

Analisis terhadap capaian sasaran strategis pada misi 1 akan dibahas berdasarkan capaian terhadap indikator kinerja masing-masing sasaran pada masing-masing tujuan sebagai berikut:

TUJUAN 1.1 : MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PEMBANGUNAN

Tujuan pertama pada misi 1 ini terdiri dari sasaran strategis sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS 1.1.1

Melibatkan Pemangku Kepentingan Dalam Proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah

Capaian sasaran strategis 1.1.1 ini diukur berdasarkan capaian terhadap satu Indikator Kinerja utama seperti pada tabel dibawah ini :

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN 1.1.1

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase usulan pemangku kepentingan yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	90%	98%	108,8%
Rata-rata Capaian				108,8%



Dari tabel dapat dilihat, rata-rata capaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis sebesar 108,8%. Sesuai dengan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan, keberhasilan pencapaian sasaran Strategis termasuk kategori **sangat baik**.

1. PERSENTASE USULAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PROSES PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1. 1. Perbandingan Target Realisasi

$$\frac{\text{Persentase usulan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah}}{\text{jumlah usulan pemangku kepentingan yang diakomodir pada RKPD/ Jumlah usulan pemangku kepentingan musrenbang dan lainnya}} = 98\%$$

Proses pengusulan dari masyarakat sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan diantaranya adalah melalui musyawarah perencanaan pembangunan dan reses anggota DPRD, melalui proses musrenbang dilakukan secara bertingkat mulai dari kelurahan, kecamatan, tingkat kota hingga nasional. Usulan masyarakat yang termuat dalam RKPD Kota Bukittinggi adalah yang akan dibiayai dengan anggaran daerah, sementara yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi maupun nasional diajukan melalui mekanisme musrenbang tingkat provinsi. Pada tahun 2018 Pemerintah Kota Bukittinggi telah menyediakan instrumen yang tepat untuk menyeleksi aspirasi masyarakat baik melalui musrenbang maupun reses dewan.

Kriteria yang digunakan adalah melalui penyesuaian dengan prioritas daerah, kemampuan fiskal, kewenangan pemerintah dan mendorong keterlibatan masyarakat secara langsung untuk pengadaan barang dan jasa terutama yang tidak bisa dianggarkan daerah sesuai ketentuan pengelolaan keuangan, berdasarkan hal tersebut seluruh usulan masyarakat yang sampai ke tingkat musrenbang kota sudah dapat ditampung dalam RKPD Kota Bukittinggi sebanyak 100%, sementara usulan yang tidak termasuk kriteria yang ditetapkan disepakati dilaksanakan melalui partisipasi masyarakat dalam bentuk swadaya. Usulan yang terkait dengan pemerintah provinsi maupun nasional dilakukan dengan penyesuaian dengan rencana pembangunan kota yang diusulkan untuk dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan nasional dan disampaikan melalui mekanisme musrenbang tingkat provinsi.



1.2. Realisasi Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi Capaian Kinerja Persentase usulan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tahun	Persentase usulan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah
	Capaian Kinerja
2017	125%
2018	108%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian realisasi dari Persentase usulan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah Kota Bukittinggi telah sesuai dengan target yang diharapkan sesuai target perjanjian kinerja pada tahun masing-masing yang telah berjalan. Semenjak awal RPJMD tahun 2016 telah diperoleh Persentase usulan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah Kota Bukittinggi sesuai dengan target RPJMD yang telah ditetapkan.

1.3. Realisasi Capaian Target Dari Awal RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan

Realisasi capaian indikator Persentase usulan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah Kota Bukittinggi dibandingkan dengan target akhir RPJMD :

INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD	REALISASI TAHUN 2018	KONDISI AKHIR RPJMD
Persentase usulan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah	80%	98%	100%



Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Persentase usulan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah Kota Bukittinggi tahun 2018 dengan realisasi 98%, jika dibandingkan dengan kondisi akhir RPJMD dengan capaian 100% maka Pemerintah Kota Bukittinggi tengah berupaya meningkatkan kinerja pemerintah daerah dengan melakukan peningkatan dalam mengakomodir segala usulan dalam rangka perbaikan perencanaan pembangunan sehingga diharapkan pemerataan pembangunan disegala bidang.

1.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Indikator

Penyebab keberhasilan indikator Persentase usulan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah di Kota Bukittinggi berjalan dengan baik dikarenakan pemerintah kota bukittinggi telah membuat instrumen untuk mengarahkan usulan pembangunan kota sesuai dengan usulan masyarakat ditingkat kelurahan sesuai dengan prioritas pembangunan kota

Usulan langsung dibahas oleh skpd terkait sesuai dengan kewenangannya dan bagi yang diluar kewenngna pemerintah melalui skpd dicarikan solusinya melalui swadaya csr ataupun kegiatan manunggaldan untuk yang menjadi kewenangan provinsi dan pusat diajukan melaului mekanisme musrenabng procinsi sebagai usulan tingkat kota

Usulan masyarakat telah harus membuat pernyataan kejelasan dan kepastian lahan dan program bisa dilaksanakan.

Pernyataan dari LPM bahwa mereka bertanggungjawab untuk mendukung secara moral sesuai dengan kewenangannya usulan tersebut dilaksanakan.

1.5. Analisis Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dari indikator Persentase usulan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah

- Telah dibuat tim yang bertanggung jawab sebelum pelaksanaan musrenbang di tingkat kelurahan bahkan dirembuk warga dan bertanggung jawab atas pelaksanaan musrenbang dan bersama mengontrol agar usulan tidak keluar dari prioritas kota dan pagu logis kelurahan.
- Telah dilakukan penguatan LPM dan aparatur untuk bisa menyelenggarakan kegiatan serta menyeleksi kegiatan yang muncul dari rt rw dan kelurahan serta lembaga kemasyarakatan yang muncul.



1.6. Analisis Program/ Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator

Adapun kegiatan pendukung dari indikator Persentase usulan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah ini antara lain :

- Penyusunan Rancangan Dan Penetaan RKPD Kota Bukittinggi
- Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
- Penyusunan Perubahan RKPD Kota Bukittinggi 2018
- Monitoring Dan Evaluasi RKPD Kota Bukittinggi
- Monitoring Dan Evaluasi Pokok-Pokok Pikiran Dprd
- Evaluasi RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021
- Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan Daerah Tahun 2018-2021
- Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif
- Penyusunan Strategis Penanggulangan Kemiskinan Daerah(SPKD) Kota Bukittinggi
- Penyusunan Revisi RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2006-2021

SASARAN STRATEGIS 1.1.2

Meningkatnya Dukungan Pembiayaan Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan

Capaian sasaran strategis 1.1.2 ini diukur berdasarkan capaian terhadap satu Indikator Kinerja utama seperti pada tabel dibawah ini :

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN 1.1.2

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Rasio Corporate Social Responsibility dengan Belanja Langsung APBD dalam pembiayaan Pembangunan	1,5%	1,58%	105%
Rata-rata Capaian				105%

Dari tabel dapat dilihat, rata-rata capaian indikator kinerja sasaran strategis adalah sebesar 105%. Sesuai dengan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan, keberhasilan pencapaian sasaran Strategis termasuk kategori **sangat baik**.



Pencapaian kinerja indikator tersebut dihitung berdasarkan formulasi dan nilai capaian seperti rumus berikut ini.

2. RASIO CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DENGAN BELANJA LANGSUNG APBD DALAM PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

2.1. Perbandingan Target Realisasi

<i>Rasio Corporate Social Responsibility dengan Belanja Langsung APBD dalam pembiayaan Pembangunan</i>	<i>Jumlah anggaran CSR/ jumlah belanja langsung APBD</i>
=	Rp. 7.071.571.909 /
	Rp. 446.972.085.273
	(1,58%)

Data CSR 2018 rilis april 2018

Kegiatan/ pembangunan yang dibiayai melalui dana CSR tahun 2017 diantaranya :

1. Melalui Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi melalui PT. Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) dengan nilai Rp. 200.000.000,- dengan melakukan pembangunan wahana sepeda gantung di benteng fort de kock dan sedang dalam proses pemasangan oleh vendor telkomsel yakni PT. Alsindo Padang, dengan estimasi selesai pada pertengahan bulan Februari 2018, wahana permainan hammock di benteng fort de kock, pembuatan tema foto selfie tema (I U) di taman Panorama, Pembuatan spot foto selfie flower di panorama, dan pembuatan spot foto selfie love di panorama.
2. Melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dengan nilai 5.433.000,- oleh PT. PLN (Persero) dengan melakukan sambungan listrik gratis di Kelurahan Pula Anak Aia, Kelurahan Manggih Gantiang dan Kelurahan Ladang Cakiah sehingga ada 3 (tiga) unit rumah yang telah dibantu.
3. Melalui Dinas Lingkungan Hidup oleh PT. PLN (Persero) berupa mobil unit penyapu jalan dengan harga Rp. 1.448.700.000,-.
4. Melalui Dinas Lingkungan Hidup oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) berupa keranjang belanja sebanyak 10.000,- serta dari Bank Rakyat Indonesia sebanyak 200 buah, dan dari Bank Nagari sebanyak 800 buah dengan harga satuan keranjang Rp. 10.000,- dengan total Rp. 110.000.000,-



5. Melalui Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan yaitu bantuan pembangunan kios penampungan pasar atas (78 petak) oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Barat dan BAZNAS Kabupaten/ Kota se Sumatera Barat dengan total bantuan Rp 1.500.000.000,-, oleh Yayasan Padusi Minang (21 petak) dengan nilai Rp. 239.297.646, oleh PT. Semen Padang (44 petak) dengan nilai Rp. 500.000.000,- dan PT. Bank Nagari berupa pembangunan pagar pengaman pasar atas senilai Rp. 285.830.000,- dan pembangunan kios penampungan pasar atas (80 petak) Rp. 911.610.080,-, dari Bank BRI pembangunan kios (103 petak) Rp. 1.173.697.978,-, Bank Nagari BPD (25 petak) Rp. 284.878.150,-, Badan Musyawarah Perbankan Daerah Sumbar (25 petak) Rp. 45.580.504,-, PT. Jasa Raharja (11 petak) Rp. 125.346.386,-, dan PT. Taspen (14 petak) Rp. 159.531.764,-.
6. Melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan oleh PT. PLN melalui dana untuk pendidikan senilai Rp. 6.250.000,- ke SMAN 2 Bukittinggi.
7. Melalui Ikatan Keluarga Pensiun PLN oleh PT. PLN berupa sosialisasi keagamaan senilai Rp. 75.416.401,-.

Besaran Belanja Langsung pada APBD-P Kota Bukittinggi Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 446.972.085.273,- dengan dana CSR senilai Rp. 7.071.571.909,- dan persentase (perbandingan dengan belanja langsung dengan APBD 2017 1,58%. Dari target yang ditetapkan telah melebihi tingkat pencapaiannya.

2.2. Realisasi Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi Capaian Kinerja Rasio Corporate Social Responsibility dengan Belanja Langsung APBD dalam pembiayaan Pembangunan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tahun	Rasio Corporate Social Responsibility dengan Belanja Langsung APBD dalam pembiayaan Pembangunan
	Capaian Kinerja
2017	105%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian realisasi dari Rasio Corporate Social Responsibility dengan Belanja Langsung APBD dalam pembiayaan Pembangunan Kota Bukittinggi telah sesuai dengan target yang diharapkan sesuai terget perjanjian kinerja pada tahun berjalan.



2.3. Realisasi Capaian Target Dari Awal RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan

Realisasi capaian indikator Rasio Corporate Social Responsibility dengan Belanja Langsung APBD dalam pembiayaan Pembangunan Kota Bukittinggi dibandingkan dengan target akhir RPJMD :

INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD	REALISASI TAHUN 2017	KONDISI AKHIR RPJMD
Rasio Corporate Social Responsibility dengan Belanja Langsung APBD dalam pembiayaan Pembangunan	1%	1,58%	2,5%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Rasio Corporate Social Responsibility dengan Belanja Langsung APBD dalam pembiayaan Pembangunan dari awal RPJMD dengan target 1% telah terealisasi sampai dengan tahun 2017 sebesar 1,58% dan untuk akhir masa RPJMD ditargetkan 2,5%. Pemerintah Kota Bukittinggi terus berupaya untuk membuka peluang bagi BUMN dan perusahaan swasta untuk meningkatkan pembangunan di Kota Bukittinggi.

2.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Indikator

Penyebab keberhasilan dari indikator Rasio Corporate Social Responsibility dengan Belanja Langsung APBD dalam pembiayaan Pembangunan Kota Bukittinggi dipengaruhi oleh :

- Pro aktif dari kepala daerah untuk menawarkan program pembangunan yang dibiayai oleh perusahaan baik perusahaan BUMN maupun perusahaan swasta lainnya
- Keterlibatan seluruh perusahaan mempromosikan layanan produk dan jasa
- Memberikan fasilitasi dalam bentuk perizinan dan layanan kewenang daerah yang dibutuhkan

2.5. Analisis Penggunaan Sumber Daya

Program yang akan di csr langsung dihandle setelah disetujui kepala daerah dan diakomodir secara berkala oleh perekonomian

2.6. Analisis Program/ Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator



Program dan kegiatan penunjang indikator ini langsung melekat dengan program kegiatan masing-masing SKPD yang diarahkan untuk melaksanakan csr dimonitor dengan kegiatan rutin yang ada di sekretariat daerah.

MISI II : MENINGKATKAN KINERJA PEMERINTAH SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN MEMPUNYAI JIWA KEWIRAUSAHAAN

Pencapaian misi 2 yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018, terdiri dari dua tujuan dan tiga sasaran strategis sebagai berikut:

No	TUJUAN	No	SASARAN STRATEGIS
2.1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	2.1.1	Terlaksanya reformasi birokrasi

Analisis terhadap capaian sasaran strategis pada misi 2 akan dianalisis berdasarkan capaian terhadap indikator kinerja masing-masing sasaran pada masing-masing tujuan sebagai berikut:

TUJUAN 2.1 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

Tujuan pertama pada misi 2 ini terdiri dari sasaran strategis sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS 2.1.1
Terlaksanya Reformasi Birokrasi

Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 2.1.1 terdiri atas 5 (lima) indikator kinerja utama, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini :

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN 2.1.1

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
----	-------------------	--------	-----------	---------



1.	Nilai SAKIP	BB	BB	100%
2.	Peringkat LPPD	40	29	137,9%
3.	Indeks RB	B	BB	116%
4.	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP	WTP	100%
5.	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan public	75%	87,35%	116%
Rata-rata Capaian				114%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian 5 (lima) indikator kinerja utama sasaran strategis adalah sebesar 114%, sesuai dengan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan, keberhasilan pencapaian sasaran Strategis termasuk kategori **sangat baik**.

3. Nilai SAKIP

3.1. Perbandingan Target Realisasi

$$\text{Nilai SAKIP} = \frac{\text{Peringkat yang diperoleh dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah BB}}{\text{Target}}$$

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bukittinggi memperoleh nilai 70,39 atau predikat “BB”. Penilaian tersebut

Menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kota Bukittinggi sudah menunjukkan hasil yang baik, namun masih memerlukan perbaikan. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut :

	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai		
			2016	2017	2018
A	Perencanaan Kinerja	30	16,54	19,44	22,00
B	Pengukuran Kinerja	25	10,31	13,48	16,16



	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai		
			2016	2017	2018
C	Pelaporan Kinerja	15	9,65	10,22	10,58
D	Evaluasi Internal	10	4,34	6,94	7,83
E	Capaian Kinerja	20	9,5	10,13	13,81
Nilai Hasil Evaluasi		100	50,34	60,21	70,39
Tingkat Kinerja	Akuntabilitas		CC	B	BB

Uraian hasil evaluasi adalah sebagai berikut :

1. Secara umum, implementasi manajemen berbasis kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi telah mengalami peningkatan, hal ini terlihat dari komitmen pimpinan daerah bersama dengan Kepala SKPD.
2. Perencanaan kinerja secara terintegrasi maupun uraian kinerja (cascade down) telah dilakukan dari level pemerintah kota sampai dengan level eselon4, meskipun belum seluruhnya menggambarkan hubungan causalitas kinerja dengan level di atasnya, serta masih terdapat uraian kinerja yang belum sesuai dengan levelnya.
3. Kualitas indikator kinerja sudah baik, namun masih belum seluruhnya SMART dan relevan untuk menjadi alat ukur keberhasilan/ ketercapaian kinerja yang diperjanjikan.
4. Laporan kinerja, baik di level Pemda maupun OPD, belum sepenuhnya menggambarkan analisis pencapaian kinerja, utamanya analisis tentang program/ kegiatan yang relevan/ tidak relevan atas ketercapaian kinerja.
5. Pemerintah Kota Bukittinggi telah memanfaatkan sistem informasi dalam manajemen kinerja, mulai dari perencanaan sampai dengan monev, akan tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal.
6. Telah dilakukan analisis dan refocusing terhadap program/kegiatan dan anggaran di lingkungan Pemda, dengan nilai efisiensi anggaran sebesar Rp. 64.856.103.314 atau 22,10% dari belanja langsung setelah dikurangi belanja pegawai Rp. 293.424.543.282.



Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja, KemenPAN RB merekomendasikan kepada Walikota Bukittinggi untuk memperhatikan dan menindaklanjuti beberapa hal sebagai berikut :

1. Memastikan budaya kinerja tetap berjalan dilingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi, dengan penguatan keterlibatan pimpinan beserta jajaran secara aktif mulai dari proses perencanaan pelaporan sampai dengan evaluasi atas implementasi manajemen kinerja.
2. Melakukan penyempurnaan indikator kinerja, mulai dari level OPD sampai dengan level individu, sehingga dapat terwujud keselarasan kinerja dari level organisasi sampai dengan individu.

3.2. Realisasi Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi Capaian Kinerja Nilai SAKIP dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tahun	Nilai SAKIP
	Capaian Kinerja
2015	75%
2016	100%
2017	100%
2018	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian realisasi dari nilai SAKIP Kota Bukittinggi telah sesuai dengan target yang diharapkan sesuai target perjanjian kinerja pada tahun masing-masing yang telah berjalan. Semenjak awal RPJMD tahun 2016 telah diperoleh nilai SAKIP Kota Bukittinggi sesuai dengan target RPJMD yang telah ditetapkan.

3.3. Realisasi Capaian Target Dari Awal RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan

Realisasi capaian indikator nilai SAKIP Kota Bukittinggi dibandingkan dengan target akhir RPJMD :

INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD	REALISASI TAHUN 2018	KONDISI AKHIR RPJMD
-------------------	--------------------	----------------------	---------------------



Nilai SAKIP	C	BB	A
-------------	---	----	---

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai SAKIP Kota Bukittinggi tahun 2018 dengan realisasi nilai BB, jika dibandingkan dengan kondisi akhir RPJMD dengan nilai A ada satu tingkatan lagi untuk mendapatkan nilai SAKIP A. Pemerintah Kota Bukittinggi tengah berupaya meningkatkan kinerja pemerintah daerah dengan melakukan peningkatan dalam efisiensi anggaran serta perencanaan yang baik dan terintegrasi.

3.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Indikator

- Intensitas peningkatan pemahaman dari pimpinan sampai level pejabat yang ada di SKPD
- Intensitas konsultasi dengan narasumber dari kementerian
- Kesiapan untuk melakukan perbaikan menyeluruh terhadap seluruh dokumen perencanaan pelaporan dan perencanaan
- Memperkuat kualitas revidi oleh inspektorat

3.5. Analisis Penggunaan Sumber Daya

- Memperkuat tim SAKIP kota Bukittinggi yang terdiri dari bagian organisasi, Bapelitbang, dan Inspektorat.
- Memperkuat penempatan seluruh subbag perencanaan SKPD
Komitmen implementasi sakip yang memiliki konsekuensi efisiensi anggaran, sehingga berorientasi penuh pada peningkatan pelayanan publik dan pemenuhan infrastruktur dasar daerah dan bisa menghemat belanja pemerintah sebesar 64 milyar yang dialihkan untuk infrastruktur kota

3.6. Analisis Program/ Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator

Adapun kegiatan pendukung dari indikator nilai SAKIP ini antara lain :

- Program peningkatan kinerja pelaporan dan keuangan dengan kegiatan penyusunan LKIP Kota Bukittinggi
- Program revidi dokumen perencanaan keuangan yang ada di Inspektorat Kota Bukittinggi
- Kegiatan diklat yang diarahkan pimpinan melalui BKPSDM untuk melakukan

4. Peringkat LPPD



4.1. Perbandingan Target Realisasi

<i>Peringkat LPPD</i>	=	<i>Skor evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 3,2205 dengan peringkat 29</i>
-----------------------	---	---

Berdasarkan keputusan Menteri dalam negeri nomor 100-53 tahun 2018 tentang peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah secara nasional, memusurkan Kota Bukittinggi dengan nilai skor 3,2205 dengan status kinerja sangat tinggi dengan atribut bintang dua berada pada peringkat 29 dari 93 kota se Indonesia. Sementara untuk hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2018 pada tingkat provinsi berada pada peringkat satu untuk kota se Sumatera Barat, sedangkan untuk peringkat nasional akan diumumkan pada peringatan hari otonomi daerah pada tanggal 25 April 2019 mendatang.

Usaha yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja pemerintah daerah dengan membentuk tim penilai evaluasi kinerja mandiri penyelenggaraan pemerintah daerah, sebagaimana amanat dari PP Nomor 6 tahun 2008 tentang pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditetapkan melalui keputusan Walikota Bukittinggi dengan tugas utamanya melakukan *save assesman/pemilain* sendiri terhadap kinerja pemerintah daerah sebelum dilakukan evaluasi oleh Pemerintah Provinsi dan Nasional. Dengan adanya tim ini diharapkan lebih awal dapat mengukur capaian kinerja dan dapat mengukur strategi untuk meningkatkan kinerja secara nasional.

Upaya yang dilakukan selama tahun 2018 yakni :

1. Membentuk Tim Penilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2017
2. Melakukan interview langsung dengan SKPD terkait dengan data IKK yang disampaikan serta membandingkan dengan data tahun sebelumnya.
3. Melakukan konsultasi yang intensif dengan BPKP dan Biro Pemerintahan
4. Adanya komitmen dan dukungan pimpinan agar SKPD meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Pelaksanaan Self Assesment (Penilaian Mandiri) yang dilaksanakan langsung oleh pihak kementerian dalam negeri sebelum pelaksanaan validasi secara resmi oleh



Kemendagri (Pemerintah Kota Bukittinggi ditunjuk sebagai salah satu daerah untuk pelaksanaan self assessment).

4.2. Realisasi Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi dan Capaian Kinerja Peringkat LPPD dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tahun	Peringkat LPPD
	Capaian Kinerja
2015	Peringkat 65 atau 96%
2016	Peringkat 33 atau 166%
2017	Peringkat 29 atau 137%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian peringkat LPPD Kota Bukittinggi sejak tahun 2015 mengalami kenaikan yang signifikan ke tahun 2016, pada tahun 2017 realisasi capaian mengalami penurunan dari 166% ke 137% namun masih berada jauh diatas target dengan peringkat 40 realisasi peringkat 29.

4.3. Realisasi Capaian Target Dari Awal RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan

Realisasi capaian indikator peringkat LPPD Kota Bukittinggi dibandingkan dengan target akhir RPJMD :

INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD	REALISASI TAHUN 2018	KONDISI AKHIR RPJMD
Peringkat LPPD	65	29	30

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa peringkat LPPD tahun 2018 penilaian tahun 2017 telah melebihi peringkat akhir masa RPJMD dengan peringkat 30.

5. Indeks RB

5.1. Perbandingan Target Realisasi

$$\text{Indeks RB} = \frac{\text{Indeks RB (evaluasi mandiri Inspektorat)}}{\text{BB}}$$



Berdasarkan hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Bukittinggi pada Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018 yang tertuang dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE Template PMPRB) diperoleh nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kota Bukittinggi sebesar 71,68 dengan predikat BB. Predikat BB yang diperoleh ini, berdasarkan target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2018 yaitu B, berarti Pemerintah Kota Bukittinggi sudah melebihi dari target yang diperjanjikan dalam IKU Pemerintah Kota Bukittinggi.

Bila dibandingkan dengan tahun 2017, Pemerintah Kota Bukittinggi telah memperoleh predikat B dengan nilai indeks Reformasi Birokrasi yang diperoleh sebesar 61,67.

Upaya yang dilakukan dalam mencapai indeks reformasi birokrasi tersebut diatas adalah dengan :

1. Memvalidasi dokumen komponen penilaian yang terdiri dari komponen pengungkit dan komponen hasil

Ada 8 area komponen pengungkit meliputi :

- Manajemen perubahan
- Penataan peraturan perundang-undangan
- Penataan dan penguatan organisasi
- Penataan tatalaksana
- Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
- Penguatan Akuntabilitas
- Penguatan pengawasan
- Kualitas pelayanan publik

3 Area komponen hasil meliputi :

- Kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi
- Pemerintah yang bersih dan bebas KKN
- Kualitas Pelayanan publik

2. Adapun hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi pada pemerintah Kota Bukittinggi, melalui SKPD pembangun dan



SKPD pelayanan. Adapun SKPD pembangun reformasi birokrasi di Kota Bukittinggi adalah:

Bagian Organisasi, Inspektorat, Bapelitbang, Bagian Hukum, BKPSDM, Dinas Kominfo, Dinas Arsip dan Perpustakaan

Sedangkan untuk SKPD pelayanan antara lain :

Dinas Dukcapil, Dinas PMPTSPPTK, Dinas Pariwisata, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan penilaian terhadap kinerja Reformasi Birokrasi Penyelenggaraan lembaga pemerintahan meliputi area perubahan, yang terdiri faktor pengungkit dan hasil. Penilaian dilakukan secara mandiri melalui formulasi dan lembaran serta kerja evaluasi yang diterbitkan oleh Kementerian PAN dan RB, selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Kementerian PAN terhadap capaian dan dokumen pendukung yang disampaikan oleh daerah secara online melalui aplikasi yang telah disiapkan. Hasil finalnya disampaikan ke daerah sebagai penetapan terhadap indeks Reformasi Birokrasi tersebut.

Pemerintah Kota Bukittinggi untuk indeks RB tahun 2018 masih dalam proses evaluasi mandiri, yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Bukittinggi, dengan capaian BB. Nilai ini akan terkoreksi atau dikuatkan oleh Kementerian PAN dan RB, yang akan dirilis dan disampaikan ke seluruh lembaga pemerintahan pada bulan Juli – Oktober.

Dari 8 (delapan) area perubahan yang menjadi faktor pengungkit, Kota Bukittinggi secara umum telah memenuhi kriteria untuk baik, begitu juga dengan faktor hasil berupa opini BPK RI terhadap LKPD dan Nilai Evaluasi SAKIP. Namun dokumen pendukung belum tersedia lengkap dan valid, karena kegiatan pendukungnya pada beberapa SKPD belum tersedia.

Karena itu kegiatan pendukung ini menjadi perhatian utama dari seluruh SKPD, terutama SKPD pendukung, seperti terkait penataan perundang-undangan, kelembagaan, pengawasan, kepegawaian, layanan publik dan pengembangan Teknologi Informasi untuk pendukung.

5.2. Realisasi Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi Capaian Kinerja Indeks RB dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



Tahun	Indeks RB
	Capaian Kinerja
2017	100%
2018	116%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi capaian pada tahun 2017 dengan target B terealisasi indeks B, pada tahun 2018 dengan target B capaian BB sehingga realisasi capaian meningkat dengan realisasi capaian menjadi 116%.

5.3. Realisasi Capaian Target Dari Awal RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan

Realisasi capaian indikator Indeks RB Kota Bukittinggi dibandingkan dengan target akhir RPJMD :

INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD	REALISASI TAHUN 2018	KONDISI AKHIR RPJMD
Indeks RB	-	BB	B

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa bila dibandingkan capaian indeks RB tahun 2018 jika dibandingkan dengan target akhir masa RPJMD telah melampaui target.

6. Opini Bpk Terhadap Laporan Keuangan Daerah

6.1. Perbandingan Target Realisasi

Opini BPK terhadap Hasil Evaluasi / Opini BPK RI pada tahun laporan keuangan = 2018 WTP daerah

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2017 yang perlu mendapat perhatian adalah :

1. Opini atas Laporan Keuangan (Wajar tanpa pengecualian)
2. Sistem Pengendalian Internal (masi terdapat kelemahan sistem pengendalian intern)
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

Penilaian LKPD Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Kota Bukittinggi adalah WTP, dan ini merupakan penilaian WTP yang kelima kalinya bagi pemerintah Kota Bukittinggi

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target yang diinginkan :

- Dengan menyusun jadwal penyusunan LKPD Tahun 2018



- Evaluasi dan Verifikasi laporan keuangan SKPD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
- Mengupayakan penyelesaian masalah yang dihadapi oleh SKPD sehubungan penyusunan laporan keuangan SKPD untuk meminimalisir kesalahan.

Pemerintah Kota Bukittinggi sudah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah semenjak tahun 2014. Diawali dengan LKPD tahun 2013, dan LKPD tahun 2014, yang masih ada catatan dari BPK RI. Opini WTP yang diperoleh Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2018 terhadap LKPD Tahun 2017 merupakan WTP murni, dan penerapan Akuntansi Pemerintah berbasis acrual dalam pelaporan. Dengan demikian, Pemerintah Kota Bukittinggi sudah siap untuk menerapkan SAP secara penuh dalam pengelolaan keuangan daerah, meliputi perencanaan, perbendaharaan, pembukuan dan pengelolaan aset.

Kondisi LKPD ini juga menggambarkan tata kelola keuangan secara menyeluruh pada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi. Hal ini didukung oleh sistem dan prosedur yang telah dibuat dan diterapkan secara konsisten dengan sumber daya manusia pengelola keuangan yang kompeten di SKPD pengelola keuangan dan seluruh SKPD yang ada.

Hal penting lain yang mendukung pencapaian WTP ini adalah pengawasan dan monitoring secara berkala dan konsisten, serta pembinaan secara rutin kepada seluruh SKPD. Keberhasilan Kota Bukittinggi juga didukung dengan evaluasi dan audit dari inspektorat secara rutin dan berkala, serta pembinaan melalui klinik pengawasan, monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan yang lebih intensif.

Untuk melakukan tugas-tugas ini, aparatur pengelola keuangan dan pengawasan difasilitasi dalam bentuk bimtek/ coaching serta pelatihan, baik dengan mengutus peserta, ataupun dilakukan dalam bentuk Pelatihan Kantor Sendiri. Dengan demikian, kemampuan pengelolaan keuangan oleh SKPD semakin meningkat, kemampuan dan keahlian aparatur pengawas juga demikian, sehingga temuan pemeriksaan yang berulang semakin menurun.

Dalam pengelolaan aset juga terjadi peningkatan penyelesaian masalah aset dan ketepatan pengelolaannya, sehingga meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan aset daerah.

Mendukung pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Bukittinggi telah memanfaatkan aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang



terintegrasi. Dengan aplikasi ini, terjadi kecepatan pengelolaan keuangan, sekaligus akurasi dan ketepatan dalam penyajiannya.

Dengan capaian WTP ini, maka berbagai kasus yang bermuara pada terjadinya KKN di Kota Bukittinggi sudah sangat kurang dan dapat diminimalisir.

Dibandingkan tahun 2015, Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi juga sudah memperoleh WTP. Pada tahun 2016 Pemerintah Kota Bukittinggi juga memperoleh WTP terhadap LKPD tahun 2015, namun terjadi peningkatan dari sisi catatan yang sudah tidak ada lagi, serta merupakan laporan pertama menggunakan Acrual Basic sesuai Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah.

6.2. Realisasi Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi dan Capaian Kinerja Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tahun	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah
	Capaian Kinerja
2015	100%
2016	100%
2017	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Pemerintah Kota Bukittinggi terus konsisten meraih WTP, dengan capaian ini maka berbagai kasus yang bermuara pada terjadinya KKN di Kota Bukittinggi sudah sangat kurang dan dapat diminimalisir.

6.3. Realisasi Capaian Target Dari Awal RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan

Realisasi capaian indikator nilai SAKIP Kota Bukittinggi dibandingkan dengan terget akhir RPJMD :

INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD	REALISASI TAHUN 2018	KONDISI AKHIR RPJMD
Opini BPK	WTP	WTP	WTP

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian indikator Opini BPK sejak awal RPJMD sampai tahun 2018 tetap mendapatkan WTP. Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Badan



keuangan terus meningkatkan keakuratan data keuangan sehingga dalam pelaksanaan pemeriksaan keuangan pemerintah Kota Bukittinggi konsisten dengan meraih WTP.

6.4. Analisis Program/ Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator

Adapun program kegiatan pendukung untuk menunjang indikator Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah antara lain melalui :

- Program peningkatan dan pengembangan pengelola keuangan daerah Rp. 4.200.017.459,-
- Program peningkatan pengembangan pengelolaan aset daerah Rp. 2.184.062.950,-
- Program pengelolaan pengembangan pengelolaan aset daerah Rp. 2.184.062.950,-

7. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik

7.1. Perbandingan Target Realisasi

<i>Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik</i>	<i>=</i>	<i>Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. 87,35%</i>
---	----------	--

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Capaian kinerja ini diukur berdasarkan hasil survei terhadap lembaga penyelenggara pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi meliputi :

1. Balai Benih Ikan Hias
2. Pusat Kesehatan Hewan
3. Rumah Potong Hewan
4. Puskesmas Guguk Panjang
5. Puskesmas Perkotaan
6. Puskesmas Tigo Baleh
7. Puskesmas Mandiangain
8. Puskesmas Nilam Sari
9. Puskesmas Gulai Bancah



10. Puskesmas Plus Mandiangin
11. Kecamatan Aur Birogo Tigo Baleh
12. Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
13. Kecamatan guguk Panjang
14. Pelayanan perizinan
15. Keluarga Berencana
16. KK dan KTP
17. Catatan Sipil
18. Perhubungan
19. Pustaka
20. Pajak

Pada tahun 2018 kualitas layanan publik dilingkungan pemerintah Kota Bukittinggi berdasarkan hasil survei pada lembaga pelayanan publik dimaksud memiliki nilai “baik” (B) dengan indeks nilai 87,35% sesuai dengan Permenpan 14 tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik terdapat 9 unsur pelayanan yang dinilai meliputi :

1. Persyaratan
2. Prosedur
3. Waktu Pelayanan
4. Biaya/ Tarif
5. Produk Layanan
6. Kompetensi Pelaksanaan
7. Perilaku Pelaksanaan
8. Sarana dan Prasarana
9. Penanganan Pengaduan

Pada tingkat kota sembilan unsur pelayanan tersebut memiliki nilai rata-rata baik, dilihat dari lembaga penyelenggara pelayanan publik tingkat kota yang disurvei terdapat beberapa unsur pelayanan yang memiliki rata-rata sangat baik dan tidak terdapat tingkat “cukup”.

- a. Balai benih ikan hias

Capaian IKM lembaga ini adalah bernilai “baik” dengan indeks 83%, dari sembilan unsur pelayanan yang disurvei terdapat dua unsur pelayanan yang bernilai sangat baik dan selebihnya bernilai baik, dua unsur pelayanan tersebut adalah kompetensi pelaksana dan perilaku pelaksana. Hal ini



didukung oleh program peningkatan kapasitas aparatur pengelola BBIH yang dilakukan secara terprogram dan terintegrasi dengan program pendukung pada dinas pertanian dan pangan baik dengan pembiayaan dari APBD maupun yang bersumber dari Kementerian.

b. Puskesmas

Capaian indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada Puskesmas memiliki nilai 'baik' dengan indeks 83,25, secara menyeluruh dari unsur pelayanan yang di nilai memiliki nilai rata-rata "baik".

c. Rumah Potong Hewan

Capaian indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada Rumah Potong Hewan memiliki nilai 'baik' dengan indeks 96,50, secara menyeluruh dari unsur pelayanan yang di nilai memiliki nilai rata-rata "sangat baik".

d. Puskesmas Guguk Panjang

Capaian indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada Puskesmas Guguk Panjang memiliki nilai 'baik' dengan indeks 77,46 secara menyeluruh dari unsur pelayanan yang di nilai memiliki nilai rata-rata "baik".

e. Puskesmas Perkotaan

Capaian indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada Puskesmas Perkotaan memiliki nilai 'baik' dengan indeks 77,55 secara menyeluruh dari unsur pelayanan yang di nilai memiliki nilai rata-rata "baik".

f. Puskesmas Tigo Baleh

Capaian indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada Puskesmas Tigo Baleh memiliki nilai 'baik' dengan indeks 74,81, ada tiga unsur pelayanan yang bernilai cukup yaitu produk layanan, sarana dan prasarana, serta penanganan pengaduan. Produk layanan yang ada pada Puskesmas Tigo Baleh belum maksimal untuk menyelenggarakan layanan dasar wajib pada Puskesmas hal ini disebabkan keterbatasan sarana dan prasarana dan hal ini terlihat pada unsur pelayanan yang juga bernilai cukup. Sarana prasarana pada Puskesmas Tigo Baleh tidak bisa ditempatkan pada ruang Puskesmas yang ada sekarang karena keterbatasan lahan yang status kepemilikannya juga masih didalam proses penyelesaian, karena itu Puskesmas ini masih tetap dipertahankan namun pada level kualifikasi yang belum memungkinkan untuk ditingkatkan, adapun terkait penanganan pengaduan oleh masyarakat belum



memadai dan akan ditingkatkan pada masa yang akan datang, layanan dasar yang selebihnya bernilai baik.

g. Puskesmas plus Mandiangin

Capaian indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada Puskesmas Mandiangin memiliki nilai 'baik' dengan indeks 79 secara menyeluruh dari unsur pelayanan yang di nilai memiliki nilai rata-rata "baik".

h. Puskesmas Nilam Sari

Capaian indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada Puskesmas Mandiangin memiliki nilai 'baik' dengan indeks 78,80, namun ada satu unsur pelayanan yang bernilai cukup yaitu waktu pelayanan dikarenakan lokasi Puskesmas yang belum dilalui oleh angkutan umum secara rutin, hal ini menyebabkan adanya masyarakat yang dilayani datang diluar waktu pelayanan setelah Puskesmas tutup, adapun upaya yang dilakukan dengan menyesuaikan waktu kunjungan masyarakat yang dilayani dan sewaktu-waktu dapat melayani masyarakat dengan menempatkan petugas secara bergiliran diluar jam layanan, unsur pelayanan yang di nilai memiliki nilai rata-rata "baik".

i. Puskesmas Gulai Banchah

Capaian indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada Puskesmas Gulai Banchah memiliki nilai 'baik' dengan indeks 80,25 secara menyeluruh dari unsur pelayanan yang di nilai memiliki nilai rata-rata "baik".

j. Puskesmas Plus Mandiangin

Capaian indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada Puskesmas Plus Mandiangin memiliki nilai 'baik' dengan indeks 74,93 secara menyeluruh dari unsur pelayanan yang di nilai memiliki nilai rata-rata "baik".

k. Kecamatan ABTB

Capaian indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada Kecamatan ABTB memiliki nilai 'baik' dengan indeks 88,03% secara menyeluruh dari unsur pelayanan yang di nilai memiliki nilai rata-rata "baik".

l. Kecamatan MKS

Capaian indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada Kecamatan MKS memiliki nilai 'baik' dengan indeks 88,5, terdapat dua unsur penilaian yang bernilai sangat baik yaitu, prilaku pelaksana dan sarana prasarana yang



letak yang strategis dan luas sehingga masyarakat mudah dalam mengakses, dari unsur pelayanan yang di nilai memiliki nilai rata-rata “baik”.

m. Kecamatan Guguk Panjang

Capaian indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada Kecamatan Guguk Panjang memiliki nilai ‘baik” dengan indeks 79% secara menyeluruh dari unsur pelayanan yang di nilai memiliki nilai rata-rata “baik”.

n. Tenaga Kerja

Capaian indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada Tenaga Kerja memiliki nilai ‘baik” dengan indeks 88,80 dan ada dua unsur pelayanan yang bernilai sangat baik yaitu perilaku pelaksana dan penanganan pengaduan karena pada posisi pelayanan posisi pelayanannya telah dibantu dengan sistem yang dibuat secara nasional sehingga penanganan pengaduan langsung terkontrol oleh pusat secara menyeluruh dari unsur pelayanan yang di nilai memiliki nilai rata-rata “baik”.

o. Penanaman Modal

Capaian indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada Penanaman Modal memiliki nilai ‘baik” dengan indeks 80 secara menyeluruh dari unsur pelayanan yang di nilai memiliki nilai rata-rata “baik”.

p. Keluarga Berencana

Capaian indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada Keluarga Berencana memiliki nilai ‘baik” dengan indeks 82,66 dan ada satu unsur penilaian bernilai cukup yaitu biaya dikarenakan informasi tarif masih kurang sosialisasi dan tersedia ditempat layanan dikarenakan masih sulit untuk menentukan tarif layanan secara menyeluruh dari unsur pelayanan yang di nilai memiliki nilai rata-rata “baik”.

q. KTP dan KK

Capaian indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada KTP dan KK memiliki nilai ‘baik” dengan indeks 81,28 secara menyeluruh dari unsur pelayanan yang di nilai memiliki nilai rata-rata “baik”.

r. Catatan Sipil

Capaian indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada Catatan Sipil memiliki nilai ‘baik” dengan indeks 84,63 tiga yang bernilai cukup yaitu



waktu pelayanan, kompetensi peleksana dan penanganan pengaduan, dikarenakan smapai saat ini masih terbatas tenaga pengelola dan tahun 2018 telah mulai direkrut, dan dengan ada ketentuan dari pusat roling staf tidak bisa dilakukan sewaktu-waktu, permasalahan penanganan pengaduan belum dilengkapi dengan alat yang mudah untuk memfasilitasi pengaduan masyarakatada secara menyeluruh dari unsur pelayanan yang di nilai memiliki nilai rata-rata “baik”.

- s. Pustaka
Capaian indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada perpustakaan memiliki nilai ‘baik” dengan indeks 81% secara menyeluruh dari unsur pelayanan yang di nilai memiliki nilai rata-rata “baik”.
- t. Pajak
Capaian indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada pajak memiliki nilai ‘baik” dengan indeks 78,46% secara menyeluruh dari unsur pelayanan yang di nilai memiliki nilai rata-rata “baik”.
- u. Pariwisata
Capaian indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada pajak memiliki nilai ‘baik” dengan indeks 83,25% secara menyeluruh dari unsur pelayanan yang di nilai memiliki nilai rata-rata “baik”.
- v. Perhubungan
Capaian indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada pajak memiliki nilai ‘baik” dengan indeks 86,27% secara menyeluruh dari unsur pelayanan yang di nilai memiliki nilai rata-rata “baik”.

7.2. Realisasi Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi dan Capaian Kinerja Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik terhadap laporan keuangan daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tahun	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik
	Capaian Kinerja
2017	114,92%
2018	116%



Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Pemerintah Kota Bukittinggi terus konsisten meraih Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik, dengan capaian ini maka dapat dilihat terjadinya peningkatan dari tahun 2017 ke Tahun 2018.

7.3. Realisasi Capaian Target Dari Awal RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan

Realisasi capaian indikator Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Kota Bukittinggi dibandingkan dengan target akhir RPJMD :

INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD	REALISASI TAHUN 2018	KONDISI AKHIR RPJMD
Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	30%	87,35%	80%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian indikator Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik sejak awal RPJMD sampai tahun 2018 tetap mengalami peningkatan. Pemerintah Kota Bukittinggi terus berupaya dalam meningkatkan layanan pada masyarakat, sehingga terwujud masyarakat yang sejahtera.

MISI III : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN, PENATAAN, DAN PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA KOTA SECARA TERPADU BERWAWASAN LINGKUNGAN

Untuk mewujudkan misi 3 ini, sesuai dengan Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2017, tujuan dan sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut:

No	TUJUAN	No	SASARAN STRATEGIS
3.1	Meningkatkan Pembangunan sarana dan prasarana kota secara terpadu berwawasan lingkungan	3.1.1	Terpenuhinya RTH Kota
		3.1.2	Fasilitas Publik yang memenuhi standar lingkungan
		3.1.3	Pemenuhan target universal access (sanitasi, air bersih dan permukiman kumuh)



No	TUJUAN	No	SASARAN STRATEGIS
3.2	Peningkatan Penataan Ruang Kota	3.2.1	Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Kota

Untuk menggambarkan capaian terhadap misi 3 ini akan disajikan analisis masing-masing tujuan dan sasaran strategis berdasarkan capaian indikator kinerja utama sebagai berikut :

TUJUAN 3.1 : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KOTA SECARA TERPADU BERWAWASAN LINGKUNGAN

Tujuan pertama dari misi 3 ini diukur berdasarkan indikator utama dari sasaran strategis berikut :

SASARAN STRATEGIS 3.1.1

Terpenuhinya RTH Kota

Capaian sasaran strategis 3.1.1 ini diukur berdasarkan capaian 1 (satu) indikator kinerja utama, seperti pada tabel dibawah ini :

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN 3.1.1

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase RTH Publik	14%	1,079%	7,7%
Rata-rata Capaian				7,7%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian 1 (satu) indikator kinerja utama sasaran strategis sebesar 7,7%, sesuai dengan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan, keberhasilan pencapaian sasaran Strategis termasuk kategori gagal.

8. Persentase RTH Publik

8.1. Perbandingan Target Realisasi



$$\text{Persentase RTH Publik} = \frac{\text{Jumlah RTH publik}}{\text{jumlah RTH yang tersedia}} = 1,079\%$$

Sesuai Permen Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M2008 bahwa Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan artau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) terbagi dua , yaitu :

1. Ruang terbuka hijau privat , adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.
2. Ruang Terbuka Hijau Publik, adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.

RTH memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi utama (intrinsik) yaitu fungsi ekologis :
 - Memberi jaminan pengadaan RTH menjadi dari system sirkulasi udara (paru-paru kota)
 - Pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar
 - Sebagai peneduh
 - Produsen oksigen
 - Penyerap air hujan
 - Penyedia habitat satwa
 - Penyerap polutan media udara, air dan tanah, serta
 - Penahan angin
 - Menahan kebisingan arus lalu lintas
2. Fungsi tambahan (ekstrinsik) yaitu :
 - Fungsi social dan budaya :
 - Menggambarkan ekspresi budaya lokal



- Merupakan media komunikasi warga kota
- Tempat rekreasi
- Wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari alam
- Sebagai taman Ruang Bermain Ramah Anak
- Fungsi ekonomi :
 - Sumber produk yang bisa dijual, seperti tanaman bunga, buah, daun, sayur mayor
 - Bisa menjadi bagian dari usaha pertanian, perkebunan, kehutanan dan lain-lain.
- Fungsi estetika :
 - Meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik dari skala mikro : halaman rumah, lingkungan permukiman, maupun makro : landscape kota secara keseluruhan
 - Menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota
 - Pembentuk factor keindahan arsitektural
 - Menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.
- Sebagai Identitas Kota

Manfaat RTH

Manfaat RTH berdasarkan fungsinya dibagi atas :

1. Manfaat langsung (dalam pengertian cepat dan bersifat *tangible*), yaitu membentuk keindahan dan kenyamanan (teduh, segar, sejuk) dan mendapatkan bahan-bahan untuk dijual (kayu, daun, bunga, buah)
2. Manfaat tidak langsung (berjangka panjang dan bersifat *intangibile*), yaitu pembersih udara yang sangat efektif, pemeliharaan akan kelangsungan persediaan air tanah, pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan fauna yang ada (konservasi hayati atau keanekaragaman hayati)

Salah satu tugas pokok dan fungsi dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi adalah melakukan sebagian pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Bukittinggi. Untuk saat ini pengelolaan ruang terbuka hijau yang menjadi tugas dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi adalah taman-taman yang termasuk fasilitas umum yang berada di Kota



Bukittinggi . Taman yang pengelolaanya berada di Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

No	Taman/Lokasi Taman	Luas Tahun 2017	Luas Tahun 2018	Jenis Taman
	Pembibitan	2.250 m ²		Tanaman biasa
	Taman Tugu BDB, Tugu Imam Bonjol, taman depan Rumah Potong	1.269,78 m ²		Tanaman biasa
	Taman Jl. Veteran, Simpang Tembok, Bundaran Kampung Cina	357 m ²		Tanaman biasa
	Taman Simpang By Pass/d Simp. Limau, Jalur hijau Anak Air	1.107,10 m ²		Tanaman biasa
	Taman gerbang Walikota, taman Dinas Walikota Gulai Bancah	6.175,90 m ²		Tanaman biasa
	Taman Jl. Raya Walikota Gulai Bancah, taman SBY	1.108,00 m ²		Tanaman biasa
	Sepanjang taman Jl. By Pass Gulai Bancah	3.920,00 m ²		Tanaman biasa
	Taman Jl. Kesuma Bhakti, taman Simpang Surau Gadang	1.380,00 m ²		Tanaman biasa
	Taman Tugu Adipura, Bundaran Simpang Mandiangin-Simpang Jl. By Pass	4.371,00 m ²		Tanaman biasa
	Taman Simpang Limau s/d batas kota Garegeh	2.359,25 m ²		Tanaman biasa
	Taman pendakian Luak Anyia (pendakian Bukik Ambacang), taman depan	2.159,00 m ²		Tanaman biasa



	balai pemuda Luak Anyia			
	Taman lereng Pasar Bawah, Bundaran Pasar Banto, taman gantung Terminal Aur Tajungkang	989,33 m2		Tanaman biasa
	Taman DPRD, taman depan PLN, taman bundaran depan PLN dan Gardu, taman Jl. Panorama	618,35 m2		Tanaman biasa
	Taman belakang dan depan Link, taman Tugu Pahlawan Tak Dikenal, taman depan Kadin	1.651,49 m2		Tanaman biasa
	Taman Monumen Bung Hatta, taman belakang The Hills (lereng sovia), taman depan Bank Nagari	2.110,30 m2		Tanaman biasa
	Taman penyapuan Monumen Bung Hatta, pahlawan tak dikenal, taman depan Dinas Kadin	2.888,00 m2		Tanaman biasa
	Taman depan Ria Sari s/d batas kota	1.207,21 m2		Tanaman biasa
	Taman Tengah Jua	73,65 m2		Tanaman biasa
	Taman By Pass Simpang Aua s/d Taluak	1.400 m2		Tanaman biasa
	Taman seputan Jam Gadang, lereng Toko Maju, bak bunga Jl. Minangkabau	5.126,00 m2		Tanaman biasa
	Taman depan Primkopol s/d Simpang Yarsi	490,15 m2		Tanaman biasa



	Taman Lapang Kantin, Tugu Kadet, depan Asrama Kodim	570,80 m ²		Tanaman biasa
	Taman Belakang Balok	2.140,00 m ²		Tanaman biasa
	Taman Ngarai Maaram	6.000 m ²		Tanaman biasa
	Pedok	544 m ²		Tanaman biasa
	Tanam RTH Surau Gadang	1.640 m ²		Tanaman biasa
	Pandam	0,60 m ²		Tanaman biasa
	Hutan Kota	0,60 m ²		Tanaman biasa
	Taman Panganak		17,00 m ²	Tanaman biasa
	Total	53.907,51 m ²	53.981,46 m ²	

Berdasarkan target SKPD, untuk luas RTH yang dikelola adalah sebesar 1,079% hal ini masih sangat jauh dari target kota sebesar 14% dan belum memenuhi luas minimal RTH yang diamanatkan oleh undang undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penetapan Tata Ruang yaitu Setiap Kabupaten/Kota harus memiliki RTH Publik 20% dan RTH privat 10% dari luas Kabupate/Kota. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memenuhi target kota adalah :

- a. Setiap kelurahan harus mempunyai taman-taman kelurahan yang nantinya akan dijadikan sebagai taman RTH Publik di Kelurahan
- b. Untuk sempadan ngarai yang tidak boleh menjadi kawasan terbangun dapat dijadikan RTH Publik. Hal ini dapat dilakukan melalui kerja sama Pemda dengan pemilik tanah (masyarakat) agar bersedia menjadikan lahan milih mereka menjadi RTH Publik.
- c. Untuk jalan-jalan utama agar disediakan median jalan yang dijadikan taman kota.



Untuk memaksimalkan fungsi taman sebagai penghasil oksigen dan estetika kota perlu dilakukan revitalisasi terhadap taman-taman yang telah ada mulai dari rehab rekonstruksi sampai dengan peremajaan tanaman yang ada di taman kota saat ini

8.2. Realisasi Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase RTH Publik dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tahun	Persentase RTH Publik
	Capaian Kinerja
2016	-
2017	7,2%
2018	7,7%

Berdasarkan perbandingan capaian di tahun 2016 dan 2017 terdapat kenaikan capaian di tahun 2018, belum memenuhi luas minimal RTH yang diamanatkan oleh undang undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penetapan Tata Ruang yaitu Setiap Kabupaten/Kota harus memiliki RTH Publik 20% dan RTH privat 10% dari luas Kabupate/Kota.

8.3. Realisasi Capaian Target Dari Awal RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan

Realisasi capaian indikator persentase RTH Publik Kota Bukittinggi dibandingkan dengan terget akhir RPJMD :

INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD	REALISASI TAHUN 2018	KONDISI AKHIR RPJMD
Persentase RTH Publik	8%	1%	17%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa indikator persentase RTH publik Kota Bukittinggi belum memenuhi target berdasarkan undang-undang nomor 26 tahun 2007. Namun Pemerintah Kota Bukittinggi tetap berupaya dalam meningkatkan RTH publik yang representatif.

9. Persentase Fasum yang representatif dan memenuhi standar lingkungan

9.1. Perbandingan Target Realisasi



Persentase Fasum yang representatif dan memenuhi standar lingkungan	=	<i>Jumlah fasum yang representatif dan memenuhi standar lingkungan/jumlah fasum = 67,94%</i>
---	---	---

- Jalan $(158,242/180,17) \times 100\% = 87,83 \%$

Jalan yang ada di Kota Bukittinggi menjadi kewenangan dari Dinas PUPR adapun kegiatan pendukung dari sub indikator ini adalah :

- Peningkatan jalan dalam kota
- Pembangunan Jalan Dalam kota
- Perencanaan pembangunan jalan dalam kota
- Rehabilitasi/ pemeliharaan rutin jalan dalam kota
- Pemeliharaan rutin berkala jalan dalam kota bukittinggi
- Perencanaan rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dalam kota tahun 2019
- Perencanaan DAK jalan 2019

- Jembatan $(28/32) \times 100\% = 87,5 \%$

Jembatan merupakan kewenangan dari Dinas PUPR Kota Bukittinggi dengan kegiatan pendukung :

- Perencanaan pelebaran jembatan jalan Bahder Johan
- Pemeliharaan rutin jembatan

- Trotoar $(10/59) \times 100\% = 16,95\%$

Adapun kegiatan pada Dinas PUPR yang menjadi kewenangannya antara lain :

- Peningkatan trotoar
- Pembangunan Trotoar
- Perencanaan peningkatan trotoar tahun 2019
- Pemeliharaan rutin trotoar dalam kota

- Saluran Air $(3.652/4.596) \times 100\% = 79,46\%$

Kegiatan pendukung pada Dinas PUPR Kota Bukittinggi antara lain :

- Perencanaan pembuatan drainase dan pemasangan paving block serta trotoar



- Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong
- Peningkatan drainase
- Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali
- Pembuatan bak resapan penanggulangan banjir

9.2. Realisasi Capaian Target Dari Awal RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan

Realisasi capaian indikator Persentase Fasum yang representatif dan memenuhi standar lingkungan Kota Bukittinggi dibandingkan dengan target akhir RPJMD :

INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD	REALISASI TAHUN 2018	KONDISI AKHIR RPJMD
Persentase Fasum yang representatif dan memenuhi standar lingkungan	55%	67,94	85%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Persentase Fasum yang representatif dan memenuhi standar lingkungan dari awal RPJMD sampai tahun 2018 tetap mengalami kenaikan dari 55% menjadi 67,94% hingga akhir masa RPJMD diharapkan tercapai 85%.

9.3. Analisis Program/ Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator

Adapun kegiatan pendukung dari indikator Persentase Fasum yang representatif dan memenuhi standar lingkungan ini antara lain :

- Peningkatan jalan dalam kota
- Pembangunan jalan dalam kota
- Perencanaan pembangunan dalam kota
- Rehabilitasi pembangunan dan rehab jalan kota
- Perencanaan DAK jalan 2019

SASARAN STRATEGIS 3.1.3

Pemenuhan Target Universal Access (Sanitasi, Air Bersih, Dan Pemukiman Kumuh)



Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 3.1.3 terdiri atas 3 (tiga) indikator kinerja utama, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini :

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN 3.1.3

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Penyediaan air minum layak	90%	92%	102%
2.	Kawasan Kumuh	6 Ha	8,2 Ha	73%
3.	Persentase Sanitasi Layak	95%	96%	101%
Rata-rata Capaian				92%

Dari tabel dapat dilihat, rata-rata capaian 3 (tiga) indikator kinerja sasaran strategis sebesar 92%. Sesuai dengan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan, keberhasilan pencapaian sasaran Strategis termasuk kategori **sangat baik**.

10. Persentase Penyediaan Air Minum Layak

10.1. Perbandingan Target Realisasi

$$\begin{aligned} \text{Persentase} &= \text{Jumlah air minum layak yang tersedia} \\ \text{Penyediaan air} &117.956 / \text{jumlah rumah tangga } 128.783 \times 100\% \\ \text{minum layak} &= 92\% \end{aligned}$$

Air minum layak berdasarkan Permenkes no. 492/ MENKES/ PES/ IV/ 2010 adalah air minum yang dapat dikonsumsi yang secara fisik tidak berwarna, tidak berbau, berasa alami, dan jernih. Itu yang secara kasat mata, tapi yang secara parameter biologis air minum yang layak dikonsumsi harus terbebas dari bakteri E Coli dan Coliform. Selain itu kadar keasaman air juga harus berkisar antara 6,5 – 8,5 , mengandung mineral dibawah 500 (Total dissolved solid < 500), bebas dari zat kimia beracun, logam berat, pestisida, dan tidak mengandung bahan radioaktif. Standar ini juga digunakan oleh WHO sebagai acuan syarat air minum yang layak untuk dikonsumsi.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018 ditargetkan 90% air minum di Bukittinggi sudah termasuk kedalam kategori air minum layak.



Realisasinya 92% air minum yang masuk kriteria layak atau dengan tingkat capaian 102%.

Pemenuhan air minum layak/ jumlah rumah tangga yang menggunakan air minum layak adalah sebanyak 117.965 rumah tangga, dari jumlah 128.783 rumah tangga, sehingga ada 10.827 rumah tangga yang menggunakan air minum yang tidak layak berdasarkan Permenkes.

Upaya yang dilakukan untuk penyediaan air bersih adalah dengan program :

1) Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Program Pengembangan Lingkungan Sehat terkait dengan penyediaan air bersih adalah untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan air bersih dimasyarakat. Beberapa upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan pengawasan terhadap penggunaan air minum pada Tempat Tempat Umum dan Tempat Pengolahan Makanan.

2) Program Pengawasan Obat dan Makanan

Program Pengawasan Obat dan Makanan ini secara khusus bertujuan untuk pengawasan sanitasi depot air minum. Seluruh Pemilik depot air Minum isi ulang yang ada di Bukittinggi selalu diberikan penyuluhan dan pelatihan. Air digunakan selalu diperiksa setiap bulannya.

3) Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Program Upaya Kesehatan Masyarakat yang dimaksud adalah Upaya Kesehatan Masyarakat yang dilakukan oleh Puskesmas, salah satunya adalah upaya kesehatan lingkungan. Kegiatan yang dilakukan adalah pengambilan sampel air minum dirumah tangga untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium, verifikasi kepemilikan sarana air minum. Inspeksi sanitasi pada seluruh rumah tangga termasuk penyediaan air bersih.

10.2. Realisasi Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Penyediaan air minum layak dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tahun	Persentase Penyediaan air minum layak
	Capaian Kinerja



2016	83%
2017	103,5%
2018	102%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa adanya penurunan dari pencapaian penyediaan air minum layak dari tahun 2017 ke tahun 2018, namun dalam tahun berikutnya akan lebih diupayakan dalam memfasilitasi penyediaan air minum layak.

10.3. Realisasi Capaian Target Dari Awal RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan

Realisasi capaian indikator Persentase Penyediaan air minum layak Kota Bukittinggi dibandingkan dengan terget akhir RPJMD :

INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD	REALISASI TAHUN 2018	KONDISI AKHIR RPJMD
Persentase Penyediaan air minum layak	85%	92%	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Persentase Penyediaan air minum layak Kota Bukittinggi tahun 2018 dengan realisasi 92%, jika dibandingkan dengan kondisi akhir RPJMD dengan capaian 100%. Pemerintah Kota Bukittinggi tengah berupaya meningkatkan Penyediaan air minum layak dengan melakukan peningkatan pembinaan dan pengawasan kualitas air serta dengan meningkatkan distribusi air minum layak kerumah-rumah warga.

NO	INDIKATOR	TAHUN 2017		TAHUN 2018	
		TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
1	Jumlah desa / Kelurahan yg melaksanakan STBM	2	2	17	17
2	Persentase air minum yang dilakukan pengawasan	54 %	86.38	56%	56%
3	Persentase rumah sakit yang melakukan pengolahan Limbah medis sesuai standar	20 %	100 %	40%	40%
4	Persentase tempat pengolahan makanan (TPM) yang memenuhi syarat Kesehatan.	20 %	79.12 %	30%	39.9%
5	Persentase Tempat- Tempat Umum yang memenuhi syarat	54 %	92 %	56 %	95.18 %



Adapun kegiatan pendukung dari indikator Persentase Penyediaan air minum layak ini antara lain dengan melakukan kegiatan pembinaan dan pengawasan kualitas air minum dengan indikator kinerja persentase sarana air minum masyarakat memenuhi persyaratan kesehatan dengan anggaran pada tahun 2018 sebanyak Rp. 106.316.610,-, Pembuatan sumur bor dan pengadaan dan pemasangan pipa jaringan air minum (DAK Air Minum 2018)

11. Kawasan Kumuh

11.1. Perbandingan Target Realisasi

<i>kawasan kumuh</i>	=	<i>Luas Kawasan Kumuh 30,60 Ha akhir tahun 2018 tinggal 22,4 Ha di Kota Bukittinggisehingga terjadi penurunan sebesar 8,2 Ha</i>
----------------------	---	--

Penetapan indikator kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi ditujukan untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Dinas yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi pelaksanaan urusan wajib Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Bukittinggi. Oleh karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Kota Bukittinggi tahun 2016–2021.

Sesuai dengan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Kota Bukittinggi tahun 2016–2021, indikator dan target kinerja yang terkait dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu:

1. Kawasan Kumuh dengan kondisi awal 2 (dua) kelurahan dan ditargetkan pada akhir RPJMD tidak ada.
2. Luasan kawasan permukiman kumuh pada kondisi awal sebesar 30,6 Ha dan ditargetkan 0 Ha pada akhir RPJMD.

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bukittinggi No. 188.45-300-2014 Tahun 2014 terdapat 2 (dua) lokasi kawasan kumuh kota kategori kumuh berat dengan luas total



30,6 Ha, yaitu Kawasan Aur Tanjungkang Tengah Sawah dengan luas kawasan lebih kurang 8,48 Ha dan Pakan Kurai dengan luas 22,12 Ha yang terletak di Kecamatan Guguk Panjang.

Terhadap penanganan kawasan permukiman ini sejak tahun 2015 sampai dengan 2016 telah dilakukan berbagai investasi program baik oleh Pemerintah Kota Bukittinggi maupun Pemerintah Pusat melalui kegiatan Kolaborasi Kota Program KOTAKU. Agar luasan kawasan kumuh sesuai data diatas tidak bertambah, maka perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan munculnya kawasan kumuh baru di kota Bukittinggi.

Tahun 2017

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Tahun 2017 ada dua kegiatan yang mendukung pelaksanaannya, yaitu Pendamping Kegiatan P2KP atau KOTAKU dan Pendamping Kegiatan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh (RP2KPKP).

1. Pendamping Kegiatan P2KP/KOTAKU, dengan pagu dana Rp. 51.685.150,- terealisasi Rp. 29.373.600,- atau sebesar 57% anggaran yang terealisasi.
2. Pendamping Kegiatan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh (RP2KPKP), dengan pagu dana Rp. 96.543.875,- terealisasi Rp. 24.838.440,- atau sebesar 26% anggaran yang terealisasi.

Di tahun 2017 kawasan kumuh dengan kondisi awal 2 (dua) kelurahan, yakni Aur Tanjungkang Tengah Sawah dan Pakan Kurai dan ditargetkan di tahun 2017 tidak ada lagi kawasan kumuh di dua kelurahan tersebut. Namun capaian di akhir tahun 2017 masih terdapat kawasan kumuh di dua kelurahan tersebut (0%).

Luasan kawasan permukiman kumuh pada kondisi awal sebesar 30,60 Ha dan ditargetkan di tahun 2017 menjadi 20,40 Ha. Namun di akhir tahun 2017 capaian belum ada, masih 30,60 Ha (0%).

Hal tersebut disebabkan karena di tahun 2017 kegiatan yang dilaksanakan masih berupa pengusulan kegiatan dimana pelaksanaan kegiatannya akan direncanakan pada tahun 2018.

11.2. Realisasi Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi Capaian Kinerja kawasan kumuh dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



Tahun	Kawasan Kumuh
	Capaian Kinerja
2017	45%
2018	73%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian realisasi dari kawasan kumuh Kota Bukittinggi telah mengalami penurunan dari tahun 2017 dengan capaian 45% naik menjadi 73% [pada tahun 2018, hal ini menunjukkan adanya upaya yang serius dari Pemerintah Kota Bukittinggi untuk meminimalisir dari luasan kawasan kumuh, sehingga taraf hidup masyarakatpun diharapkan meningkat.

11.3. Realisasi Capaian Target Dari Awal RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan

Realisasi capaian indikator nilai SAKIP Kota Bukittinggi dibandingkan dengan target akhir RPJMD :

INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD	REALISASI TAHUN 2018	KONDISI AKHIR RPJMD
Kawasan Kumuh	30,60	8,2 Ha	0

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kawasan kumuh yang ada di Kota Bukittinggi saat ini masih terdapat di dua kelurahan dengan luasan 22,4 Ha, jika dibandingkan dengan luasan awal kawasan kumuh yang ada telah terdapat pengurangan yang signifikan dari awal pelaksanaan RPJMD dengan luasan 30,60 Ha. Kota Bukittinggi melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terus akan melakukan pengurangan jumlah kawasan kumuh sehingga pada akhir masa RPJMD hal ini dapat diselesaikan.

11.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Indikator

11.5. Analisis Program/ Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Tahun 2018 ada dua kegiatan yang mendukung pelaksanaannya, yaitu Pendamping Kegiatan P2KP/KOTAKU dan Pendamping Kegiatan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh (RP2KPKP).

Pendamping Kegiatan P2KP/KOTAKU, dengan pagu dana Rp. 21.965.000,- terealisasi Rp. 6462.750,- atau sebesar 29,42% anggaran yang terealisasi.



Pendamping Kegiatan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh (RP2KPKP), dengan pagu dana Rp. 49.240.500,- terealisasi Rp. 35.801.312,- atau sebesar 72,71% anggaran yang terealisasi.

Di tahun 2018 kawasan kumuh dengan kondisi awal 2 (dua) kelurahan dan ditargetkan yakni Aur Tajung Kang Tengah Sawah dan Pakan Kurai tidak ada lagi kawasan kumuh di dua kelurahan tersebut. Luasan kawasan permukiman kumuh pada kondisi awal sebesar 30,60 Ha dan ditargetkan di tahun 2018 menjadi 10,20 Ha.

Capaian di akhir tahun 2018 masih terdapat kawasan kumuh di dua kelurahan (0%), namun luas kawasan permukiman kumuh berkurang sebesar 8,2 Ha, dari 30,60 Ha menjadi 22,4 Ha (26,8%). Di tahun 2018 juga dilakukan kegiatan pembuatan Ranperda RP2KPKP.

12. Persentase Sanitasi Layak

12.1. Perbandingan Target Realisasi

$$\% \text{ sanitasi layak} = \frac{\text{Rumah tangga yang memiliki sanitasi layak sebanyak } 123.567}{\text{Seluruh rumah tangga } 128.783} \times 100\% = 96\%$$

Pembangunan Sanitasi Kota Bukittinggi telah dirumuskan dalam Buku Putih Strategi Sanitasi Kota (SSK) yang dimuat dalam bentuk Memorandum Program integrasi program pemerintah kota, pemerintah provinsi dan nasional melalui Dirjen Ciptakarya Kementerian PUPR. Monitoring dan evaluasi secara nasional program ini dilakukan dalam City Sanitation Summit setiap tahunnya seluruh pemerintah kabupaten dan kota peduli sanitasi, yang tergabung dalam AKKOPSI.

Pada tahun 2016, berdasarkan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi ditargetkan 90% sanitasi yang ada di Bukittinggi sudah termasuk dalam kategori sanitasi layak, dan pada akhir tahun 2019, sesuai target nasional 100% sanitasi sudah harus masuk dalam sanitasi layak. Fokus penanganan dalam memenuhi sanitasi layak ini meliputi penyediaan tangki septik baik komunal ataupun terpusat. Selanjutnya



penyediaan IPLT yang juga akan diarahkan sebagai IPLT Regional karena keterbatasan lahan di Bukittinggi.

Pencapaian target kinerja ini diupayakan melalui kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kebersihan dan Pertamanan serta Kantor Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi. Pembiayaan program juga dibiayai bersama melalui APBD pemerintah provinsi dan program Dirjen Ciptakarya Kementerian PUPR.

Keberhasilan program ini juga sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat, karena itu dilakukan pertemuan yang intens melalui pemerintahan kecamatan dan kelurahan dan lembaga keswadayaan masyarakat atau kelompok swadaya masyarakat yang ada pada seluruh kelurahan.

Persentase sanitasi layak Kota Bukittinggi pada tahun 2015 tercatat 93,12% sementara tahun 2016 terjadi penurunan signifikan menjadi 72,72% dari 95% yang ditargetkan, dan pada tahun 2017 dengan target 90% terealisasi 90,05% dan pada tahun 2018 ditargetkan 95% terealisasi 96% dengan realisasi capaian kinerja 101% Kondisi ini merupakan penyesuaian terhadap data pada Strategi Sanitasi Kota dan terjadinya penurunan daya dukung lingkungan.

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan sanitasi yang layak adalah dengan program :

1) Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Program Pengembangan Lingkungan Sehat adalah upaya untuk pengawasan terhadap lingkungan agar tetap memiliki sanitasi yang layak. Target utama kegiatan ini adalah mewujudkan Kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Beberapa upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan pengawasan kepada Tempat Tempat Umum dan Tempat Pengolahan Makanan, diantaranya pemeriksaan sanitasi pasar, rumah sakit, hotel, rumah makan, sekolah, Puskesmas dan tempat umum lainnya.

2) Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Program Upaya Kesehatan Masyarakat yang dimaksud adalah Upaya Kesehatan Masyarakat yang dilakukan oleh Puskesmas, salah satunya adalah upaya kesehatan lingkungan. Kegiatan yang dilakukan adalah Inspeksi sanitasi pada seluruh rumah tangga yang ada di wilayah kerja Puskesmas, memberikan pelayanan klinik sanitasi, membina kantin sekolah serta upaya promosi untuk meningkatkan sanitasi lingkungan.



12.2. Realisasi Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Sanitasi Layak dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tahun	Persentase Sanitasi Layak
	Capaian Kinerja
2016	76%
2017	100%
2018	101%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2016 ke tahun 2017 telah terdapat peningkatan pencapaian sanitasi layak bagi masyarakat Kota Bukittinggi, dan dari tahun 2017 k tahun 2018 terdapat peningkatan realisasi capaian kinerja, hal ini membuktikan bahwa telah tercapainya kehidupan bersih dan sehat ditengah-tengah masyarakat sebagai wujud upaya dari Pemerintah Kota Bukittinggi dalam meningkatkan layanan kepada masyarakat.

NO	INDIKATOR	TAHUN 2017		TAHUN 2018	
		TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
1	Jumlah desa / Kelurahan yg melaksanakan STBM	2	2	17	17
2	Persentase air minum yang dilakukan pengawasan	54 %	86.38	56%	56%
3	Persentase rumah sakit yang melakukan pengolahan Limbah medis sesuai standar	20 %	100 %	40%	40%
4	Persentase tempat pengolahan makanan (TPM) yang memenuhi syarat Kesehatan.	20 %	79.12 %	30%	39.9%
5	Persentase Tempat- Tempat Umum yang memenuhi syarat	54 %	92 %	56 %	95.18 %

12.3. Realisasi Capaian Target Dari Awal RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan

Realisasi capaian indikator sanitasi layak Kota Bukittinggi dibandingkan dengan target akhir RPJMD :

INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD	REALISASI TAHUN 2018	KONDISI AKHIR RPJMD
Sanitasi Layak	85%	96%	100%



Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase sanitasi layak Kota Bukittinggi tahun 2018 dengan realisasi 96%, jika dibandingkan dengan kondisi akhir RPJMD dengan realisasi 85% ada 4% yang harus dicapai sampai akhir masa RPJMD dengan target 100%. Pemerintah Kota Bukittinggi tengah berupaya meningkatkan sanitasi layak disetiap rumah warga sehingga terjadinya peningkatan mutu kesehatan masyarakat.

12.4. Analisis Program/ Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator

Adapun kegiatan pendukung dari indikator nilai SAKIP ini antara lain dengan melakukan kegiatan pengkajian dan pengembangan lingkungan sehat, dan pembangunan toilet umum dengan anggran Rp. 906.563.700,-

TUJUAN 3.2 : PENINGKATAN PENATAAN RUANG KOTA

Tujuan kedua dari misi 3 ini didukung oleh beberapa sasaran strategis berikut:

SASARAN STRATEGIS 3.2.1

Pengendalian Dan Pemanfaatan Ruang Kota

Indikator Kinerja utama yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 3.2.1 terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja utama, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini :

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN 3.2.1

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Kesesuaian pemanfaatan ruang kota	65%	60,76%	93%
Rata-rata Capaian				93%



Dari tabel di atas dapat dilihat, rata-rata capaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis adalah sebesar 93%. Sesuai dengan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan, keberhasilan pencapaian sasaran Strategis termasuk kategori **sangat baik**.

13. Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kota

13.1. Perbandingan Target Realisasi

$$\text{Kesesuaian pemanfaatan ruang kota} = \frac{\text{Ruang kota yang dimanfaatkan sesuai peruntukannya 175 Ha}}{\text{Pemanfaatan ruang kota 288 Ha}} \times 100\% = 60,76\%$$

Kesesuaian pemanfaatan ruang kota sesuai peruntukannya adalah salah satu implementasi dari Perda Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010 – 2030. Pengontrolannya dilakukan melalui penerbitan Rekomendasi Peruntukan Lahan, yang diterbitkan oleh Dinas PU Kota Bukittinggi sebelum penerbitan izin mendirikan bangunan.

Sementara bangunan yang didirikan tidak memiliki izin atau tidak sesuai dengan peruntukan lahan diawasi melalui razia gabungan yang melibatkan Dinas PU, SKPD layanan perizinan, Satpol PP dan pemerintahan kecamatan dan kelurahan.

Untuk bangunan khusus dalam kawasan yang lebih luas, Pemerintah Kota Bukittinggi mengoptimalkan peran Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) yang diketuai oleh Sekretaris Daerah dan sekretariatnya di Bappeda. Badan ini melakukan analisa dan menerbitkan peruntukan lahan sesuai dengan pola ruang daerah.

Pada tahun 2018, ditargetkan 65% pemanfaatan ruang kota sudah sesuai dengan peruntukan lahan dalam pola ruang kota yang termuat dalam RTRW, sebelum ditetapkannya Rencana Ditail Ruang Kota. Dengan program yang ada pada Dinas PU, Bappeda dan SKPD terkait lainnya, pemanfaatan ruang kota sebanyak 60,76% sudah sesuai dengan peruntukan ruang.

Pemanfaatan ruang kota yang tidak sesuai dengan peruntukan lahan dilakukan melalui pengurusan, terutama berupa bangunan tanpa izin di lahan milik pemerintah. Bangunan tanpa izin diharuskan mengurus izin, sementara itu juga dilakukan revisi terhadap RTRW sesuai dinamika yang berkembang di masyarakat. Hal ini dimungkinkan sesuai peraturan perundang-undangan penataan ruang daerah, setelah dilakukan peninjauan kembali dan diproses secara teknis sesuai ketentuan pemerintah.



Kesesuaian pemanfaatan ruang kota dengan RTRW Kota Bukittinggi pada tahun 2015 tercatat sebesar 52%, dan pada tahun 2016 terealisasi 93%, pada tahun 2017 ditargetkan 60%, tahun 2018 dengan target 60% terealisasi 60,76%. Capaian kinerja ini didukung melalui upaya yang sudah disampaikan sebelumnya seperti pengurusan, terutama berupa bangunan tanpa izin di lahan milik pemerintah. Sejalan dengan revisi RTRW, Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Bappeda dan Dinas PU juga melakukan penyesuaian data dengan kondisi lapangan.

Jumlah Pemanfaatan ruang kota yang sesuai dengan peraturan 175 Ha, Jumlah pemanfaatan ruang kota yang tidak sesuai aturan 288 Ha, bentuk-bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang kota dan update yang dilakukan untuk menyelesaikannya :

- Pembangunan Perumahan di kawasan ngarai sianok
- Pembangunan di sempadan ngarai sianok
- Pembangunan di kawasan RTH
- Pembangunan di kawasan rel kereta api

13.2. Realisasi Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi dan Capaian Kinerja Kesesuaian pemanfaatan ruang kota dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tahun	Kesesuaian pemanfaatan ruang kota
	Capaian Kinerja
2016	154%
2017	103,8%
2018	93%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terjadi penurunan realisasi capaian dari tahun 2016 sampai tahun 2018 hal ini dikarenakan semakin tingginya target capaian dari tahun ke tahun, dalam upaya kesesuaian pemanfaatan ruang kota di Kota Bukittinggi akan terus ditingkatkan sehingga terwujudnya kesesuaian ruang kota yang representatif.

13.3. Realisasi Capaian Target Dari Awal RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan

Realisasi capaian indikator Kesesuaian pemanfaatan ruang kota Kota Bukittinggi dibandingkan dengan terget akhir RPJMD :



INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD	REALISASI TAHUN 2018	KONDISI AKHIR RPJMD
Kesesuaian pemanfaatan ruang kota	55%	60%	70%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kesesuaian pemanfaatan ruang kota pada awal RPJMD dengan capaian 55% sedangkan pada tahun 2018 meningkat menjadi 60%, sampai pada akhir masa RPJMD Pemerintah Kota Bukittinggi menargetkan capaian kesesuaian pemanfaatan ruang kota menjadi 70%.

13.4. Analisis Program/ Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator

Adapun kegiatan pendukung dari indikator kesesuaian pemanfaatan ruang kota ini antara lain dengan melakukan pembuatan keterangan rancangan kota dengan anggaran Rp. 22.688.384,-

MISI IV : MENGEMBANGKAN SISTEM EKONOMI PERKOTAAN SECARA LEBIH BERDAYA GUNA

Untuk mewujudkan misi 4 tersebut, sesuai dengan Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2017, tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai dari pelaksanaan program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

No	TUJUAN	No	SASARAN STRATEGIS
4.1	Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Perkotaan Yang Berkualitas	4.1.1	Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi
4.2	Menurunkan Angka dan Pengangguran	4.2.1	Menurunnya Tingkat Kemiskinan

Analisis capaian indikator kinerja per sasaran strategis misi IV adalah sebagai berikut



**TUJUAN 4.1 : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN EKONOMI
PERKOTAAN YANG BERKUALITAS**

Untuk mencapai tujuan tersebut hasil yang akan dicapai telah ditetapkan dalam sasaran strategis sebagai berikut :

**SASARAN STRATEGIS 4.1.1
Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan
Ekonomi**

Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 4.1.1 terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja utama, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini :

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN 4.1.1

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Pertumbuhan Ekonomi	6,20%	6,04	97
2.	PDRB Perkapita	52,50 juta	54,12 juta	99
3.	Indeks Gini	<0,3	0,329	109
4.	Jumlah Investasi	30%	27%	90
Rata-rata Capaian				98,7%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator kinerja utama sasaran strategis berkembangnya koperasi aktif adalah sebesar 98,7%. Sesuai dengan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan, keberhasilan pencapaian sasaran Strategis termasuk kategori **sangat baik**.

14. Pertumbuhan Ekonomi

14.1. Perbandingan Target Realisasi



$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{\text{Pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah}}{\text{perekonomian dalam selang waktu tertentu}} = 6,04\%$$

Pertumbuhan ekonomi tahun 2017 sebesar 6,04 persen, namun sektor pertambangan dan penggalian berkontraksi sebesar 0,61 persen. Sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah sektor pengadaan listrik dan gas sebesar 10,15 persen. Sektor-sektor yang sangat dominan sumbangannya terhadap total PDRB Kota Bukittinggi, yaitu sektor Tersier sektor perdagangan, hotel dan restoran, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, sektor listrik, gas, dan air bersih, sektor jasa- jasa

Hal ini sesuai dengan potensi Kota Bukittinggi sebagai kota wisata pariwisata ,perdagangan dan jasa. Pemerintah Kota Bukittinggi terus berbenah dan memenuhi seluruh infrastruktur pendukung sektor utama kota ini yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan dominansi sektor tersier terhadap struktur ekonomi kota.

Dibandingkan tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi sedikit mengalami kontraksi dari 6,12% menjadi 6,04% hal ini merupakan dampak secara nasional yang menyebabkan turunnya daya beli masyarakat dan kurang berkembangnya sektor ril sehingga pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi dari sektor primer dan sekunder mengalami kontraksi yang lebih besar. Kenyataan ini belum sepenuhnya tertutupi oleh pertumbuhan ekonomi dari sektor tersier.

Ditinjau dari besaran PDRB harga konstan maupun harga berlaku terjadi peningkatan dari tahun 2015 ke 2016. Pada tahun 2015 PDRB harga berlaku kota bukittinggi adalah sebesar Rp 6.141.524,62 juta meningkat menjadi Rp 6.749.791,92 juta pada tahun 2016. sementara berdasarkan harga konstan pada tahun 2015 adalah Rp 4.873.746,31 juta meningkat menjadi Rp 5.168.023,69 juta pada tahun 2016.

15. PDRB Perkapita

15.1. Perbandingan Target Realisasi

$$\text{PDRB Perkapita} = \frac{\text{Jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha / jumlah penduduk pertengahan tahun}}{= 58,78}$$

PDRB per kapita Kota Bukittinggi tahun 2017 adalah sebesar Rp 58,78 juta meningkat dari Tahun 2016 yang berjumlah Rp 54,38 juta. Kondisi ini merupakan dampak dari pertumbuhan ekonomi kota yang relatif tinggi sementara pertumbuhan penduduk dapat



dikendalikan relatif stabil. Cukup tingginya nilai PDRB perkapita dan pendapatan regional pada beberapa tahun terakhir belum bisa membuat kita berbesar hati jika tidak diikuti dengan peningkatan daya beli masyarakat, karena dalam peningkatan ekonomi yang cukup tinggi itu di dalamnya masih dipengaruhi oleh inflasi.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bukittinggi adalah mengembangkan sektor-sektor potensial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan mempertahankan dan bahkan menekan laju pertumbuhan penduduk sehingga menjadi stabil atau malah cenderung berkurang. Hal penting lain yang sangat terkait dengan ini adalah mengendalikan inflasi walaupun realitanya pada tahun 2016 tingkat inflasi terlalu rendah, berada pada level dibawah 3%, sehingga tidak terlalu mendorong bertumbuhnya ekonomi dari sektor ril. Walaupun Kota Bukittinggi terkait hal ini tidak terlalu dirugikan karena struktur ekonominya yang didukung oleh sektor tersier namun kontribusi ekonomi luar Kota Bukittinggi yang signifikan terhadap kondisi ekonomi kota secara tidak langsung berdampak, yang pada gilirannya juga akan menurunkan PDRB per kapita.

15.2. Realisasi Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi dan Capaian Kinerja PDRB Perkapita a dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tahun	PDRB Perkapita
	Capaian Kinerja
2016	78%
2017	99%

16. Indeks Gini

16.1. Perbandingan Target Realisasi

<i>Indeks Gini</i>	=	<i>Distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan diantara populasi = 0,32</i>
--------------------	---	--

Indeks Gini (Gini Rasio) merupakan suatu ukuran pemerataan atau etimpangan distribusi pengeluaran. Nilai Gini Rasio berkisar antara 0 dan 1 dengan klasifikasi antara lain :

1. Ketimpangan Rendah ($G < 0,3$)
2. Ketipangan Sedanag ($0,3 \leq G \leq 0,5$)



3. Ketimpangan Tinggi ($G \geq 0,5$)

Jika Koefisien bernilai 0, berarti ketimpangan sempurna.

Indeks Gini Kota Bukittinggi pada tahun 2016 adalah sebesar 0,329, yang menggambarkan bahwa Kota Bukittinggi termasuk dalam daerah yang memiliki ketipangan sedang. Kota Bukittinggi termasuk dalam daerah yang mempunyai ketimpangan sedang.

Jika dibandingkan dengan tahun 2015, maka pemerataan penduduk lebih mengarah ke pemerataan sempurna dimana indeks gini Kota Bukittinggi sebesar 0,340. Dari hasil Susenas 2016, diperoleh hasil rata-rata pengeluaran Per Kapita di Kota Bukittinggi paling besar di kelompok Makanan, yaitu sebesar 50,42 persen, sedangkan pengeluaran di kelompok bukan makanan sebesar 49,58 persen. Secara umum, 3 pengeluaran terbesar yaitu: kelompok perumahan dan fasilitas rumah sebesar 23,70 persen, kelompok makanan dan minuman jadi sebesar 18,34 persen, dan aneka barang dan jasa sebesar 13,16 persen.

Dilihat dari struktur ekonomi kota, dan distribusi masyarakat yang bekerja pada sektor tersebut, terlihat bahwa sektor informal yang banyak menyerap tenaga kerja belum maksimal, malah sedikit berkontraksi. Hal lain juga terjadi karena sektor rill kurang berkembang, sehingga sebaran penduduk yang berusaha di sektor informal terus meningkat. Hal ini juga mendorong indeks gini sedikit bergeser ke tingkat sedang.

Beberapa intervensi yang dilakukan pemerintah kota untuk mendorong Bergeraknya sektor ril diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang dominan menjadi usaha masyarakat.

18. Jumlah Investasi

18.1. Perbandingan Target Realisasi

$$\text{Jumlah Investasi} = \text{Jumlah investasi yang ditanamkan di Kota Bukittinggi selama 1 tahun sebanyak 27\%}$$

Pada tahun 2017 ditargetkan pertumbuhan investasi Kota Bukittinggi sebesar 30%. Berdasarkan data dari DPMPTSP Kta Bukittinggi sampai akhir tahun 2017 penanaman modal di Bukittinggi baik yang berasal dari dalam negeri maupun asing adalah sebesar 1.281.juta atau dengan rincian Rp. 1.269.000.000,- dari dalam negeri dan Rp. 12.000.000,- luar negeri. Capaian ini dibandingkan dengan realisasi penanaman modal



pada tahun 2016 sebesar Rp. 1.771.juta mengalami penurunan yang signifikan sehingga terjadi penurunan sebesar 27% hal ini disebabkan beberapa permohonan penanaman modal terutama terkait pembangunan hotel dan pernafasan jasa lainnya belum dapat dituntaskan ditahun 2017 akibat keterlambatan revisi RT RW Kota Bukittinggi 2016-2021 persoalan lainnya juga terkait dengan keterbatasan lahan sesuai dengan kriteria yang diminta oleh investor.

Pembangunan sebuah kota tidak bisa dibiayai oleh pemerintah saja karena keterbatasan anggaran. Percepatan pembangunan kota membutuhkan dukungan pembiayaan dunia swasta melalui investasi. Mendukung masuknya investasi asing ataupun dalam negeri, pemerintah harus menyediakan infrastruktur pendukung, regulasi yang jelas dan iklim yang mendukung investasi, serta kejelasan dan kemudahan dalam berinvestasi.

Pengelolaan investasi di Bukittinggi dilaksanakan dengan melakukan pengawasan, pembinaan dan pemantauan terhadap BUMN/ BUMD yang ada di Kota Bukittinggi. Sementara besaran investasi masuk Bukittinggi diketahui melalui proses perizinan oleh perusahaan dalam negeri ataupun modal asing.

Data Dukung :

Kita memang selalu mengharapkan dari tahun ke tahun ada peningkatan jumlah investor yang masuk ke Kota Bukittinggi, tapi hal itu tidak selalu mutlak dan dapat kita prediksi. Untuk masuknya investor, banyak hal yang harus kita persiapkan diantaranya Ketersediaan lahan yang sangat terbatas di Kota Bukittinggi dan Kesesuaian peruntukan lahan dengan RTRW

Perbandingan masuknya investor ke Kota Bukittinggi tahun 2016 dengan tahun 2017 adalah :

- Tahun 2016 hanya 1 (satu) perusahaan yang sudah mengantongi izin prinsip untuk membuka usaha di Kota Bukittinggi yaitu PT. UKAY ASIA INDONESIA dengan nilai Investasi sebesar US\$. 4.000.000,- yang bergerak di Bidang Perhotelan.
- Tahun 2017 dari PMDN hanya 1 (satu) Badan Usaha yang sudah memiliki Izin Prinsip yaitu Gust House 10, dengan nilai Investasi sebesar Rp. 1.269.000.000,- yang bergerak pada Bidang usaha Penginapan, sedangkan dari PMA juga 1 (satu) Perusahaan yang sudah memiliki Izin Prinsip yaitu PT.PENGUIN FAMILY SHOES yang bergerak pada bidang usaha industry alas kaki dan industry sepatu olah raga.



Bidang/Jenis Usaha yang banyak dipilih investor adalah pada bidang perhotelan dan penginapan untuk mendukung kegiatan pada bidang kepariwisataan.

18.2. Realisasi Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi dan Capaian Kinerja jumlah investasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tahun	Jumlah Investasi
	Capaian Kinerja
2016	93%
2017	90%

TUJUAN 4.2 : Menurunkan Angka Kemiskinan dan Pengangguran

Untuk mencapai tujuan tersebut hasil yang akan dicapai telah ditetapkan dalam sasaran strategis sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS 4.2.1

Menurunnya Tingkat Kemiskinan

Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 4.2.1 terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja utama, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini :

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN 4.1.1

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Tingkat Kemiskinan	3,5%	5,48	68%
Rata-rata Capaian				68%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator kinerja utama sasaran strategis berkembangnya koperasi aktif adalah sebesar 68%. Sesuai dengan kategori penilaian



keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan, keberhasilan pencapaian sasaran Strategis termasuk kategori **cukup**.

19. Tingkat Kemiskinan

19.1. Perbandingan Target Realisasi

Tingkat Kemiskinan	= Jumlah penduduk miskin = 68%
--------------------	--------------------------------

Kemiskinan telah menjadi fenomena sosial yang menuntut perhatian serius dari semua pihak, baik pemerintah melalui beberapa SKPD yang terkait maupun masyarakat. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan kemiskinan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan interaksi sosial. Itulah sebabnya masalah kemiskinan dapat muncul sebagai penyebab ataupun pemberat berbagai jenis permasalahan kesejahteraan sosial lainnya seperti ketunaan sosial, kecacatan, keterlantaran, ketertinggalan/ keterpencilan dan keresahan sosial, yang pada umumnya berkenaan dengan keterbatasan kemampuan untuk mengakses berbagai sumber pelayanan.

Dinas Sosial menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terdiri dari 26 jenis PMKS dan salah satunya merupakan penduduk miskin. Untuk berhasilnya sasaran Dinas Sosial dalam penanganan penduduk miskin perkotaan, telah dilakukan beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan sasaran dinas sosial, penurunan masyarakat miskin perkotaan. Diantaranya kegiatan perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial, serta pemberdayaan sosial untuk memberikan penguatan kepada fakir miskin, sehingga fakir miskin dapat mandiri. Untuk menangani permasalahan tersebut dirumuskan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Sosial terdiri dari :

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Mandiri

Realisasi indikator ini untuk tahun 2018 yang lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi tahun 2017. Pada Tahun 2018, kegiatan untuk penanganan PMKS lebih banyak dilakukan dibandingkan dengan tahun 2017. Dari 26 PMKS yang ada 20 diantaranya telah dilakukan penanganan oleh Dinas Sosial yang dipersentasekan sekitar 76,92 %. Kegiatan Penanganan PMKS diantaranya adalah :



- ✓ Peningkatan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk Program Keluarga Harapan (PKH) yang pada tahun 2017 berjumlah 954 KPM, sedangkan tahun 2018 meningkat menjadi 1608 KPM.
- ✓ Jumlah KPM penerima Beras Sejahtera (Rastra) pada Tahun 2018 sebanyak 2.908 KPM, untuk penyaluran bulan Januari sampai dengan September 2018.
- ✓ Pada bulan Oktober penerima Rastra beralih menjadi penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Kota Bukittinggi termasuk lokasi perluasan BPNT Tahap III bulan Oktober 2018 sebanyak 3.121 KPM. Penyaluran BPNT dapat dilakukan pada e-Warong, KUBe dan Agen Brilink.
- ✓ Pada Tahun 2018 juga diberikan bantuan untuk Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) untuk direnovasi, sebanyak 50 buah rumah se Kota Bukittinggi.
- ✓ Pemberdayaan terhadap Perempuan Rawan Sosial Ekonomi telah dilaksanakan untuk 100 Orang PRSE, yang diberikan keterampilan untuk membuka usaha dibidang kuliner.
- ✓ Pada Tahun 2018 juga dilakukan pembentukan dan pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBe) Fakir Miskin melalui 3 (tiga) aspek yaitu Kelembagaan, Ekonomi dan sosial.
- ✓ Kelompok Usaha Bersama (KUBe) Fakir miskin yang telah terbentuk sebanyak 70 KUBe dengan anggota 10 orang masing-masing nya, sehingga anggota KUBe Fakir Miskin sebanyak 700 orang.
- ✓ Pada Tahun 2018, ditambah lagi bantuan untuk 30 KUBe FM dengan jumlah anggota sebanyak 300 orang.
- ✓ KUBe e-Warong atau KUBe Jasa dibentuk sebanyak 5 KUBe dengan jumlah anggota sebanyak 50 Orang.
- ✓ KUBe pengembangan untuk Fakir Miskin sebanyak 6 KUBe, dan pada tahun 2018 ditambah lagi 2 KUBe pengembangan dengan anggaran dari APBN.
- ✓ Untuk penyandang Disabilitas telah ditangani dengan memberi bantuan Alat Bantu Dengar sebanyak 10 orang, bantuan kursi roda 13 orang, bantuan dari Program Keluarga Harapan sebanyak 41 orang dan hibah bansos dari IPSM sebanyak 50 orang.
- ✓ Untuk kasus Orang Terlantar telah ditangani sebanyak 37 kasus selama Tahun 2018.
- ✓ Kasus Anak Bayi terlantar telah dilakukan penanganan sebanyak 4 kasus selama tahun 2018.
- ✓ Untuk Lansia telah mendapat bantuan dari Program Keluarga Harapan sebanyak 132 Orang dan dari Hibah Bansos yang dikelola IPSM sebanyak 175 Orang.



- ✓ Untuk Korban Bencana Korban bencana alam dan bencana sosial yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat terealisasi secara maksimal (100%). Pada tahun 2018 terjadi bencana alam longsor tebing, banjir dan bencana sosial kebakaran. Masyarakat terkena dampak yang dilaporkan Kelurahan adalah sebanyak 523 KK, yang masing-masing kepala keluarga (KK) mendapatkan bantuan berupa makan harian selama masa tanggap darurat dan pemberian matras, serta family kit bagi korban bencana. Uraian bencana yang terjadi pada tahun 2017 antara lain:

- Korban Bencana Sosial, Kebakaran : 36 KK
- Korban Bencana Alam, Longsor Tebing : 2 KK
- Korban Bencana Alam, Banjir : 485 KK

Masyarakat Miskin keluar dari Basis Data Kemiskinan

Dari data kemiskinan hasil verifikasi berjumlah 7.554 KK telah dilakukan verifikasi data dan terdapat 1.430 KK yang dikeluarkan dari data kemiskinan berdasarkan hasil verifikasi dan validasi Basis Data Terpadu bulan November 2018. Dari data 1.430 KK tersebut terdapat KK miskin yang telah mampu, ganda dan tidak ditemukan, dianggap telah pindah dan keluar dari Kota Bukittinggi. Capaian masyarakat miskin yang keluar dari data kemiskinan berdasarkan data 2018 adalah sebesar 18,90 %. Total Basis Data Terpadu hasil verifikasi dan validasi bulan November 2018 setelah dikurangi data yang keluar, berjumlah 6.154 KK.

PSKS yang berpartisipasi atau yang aktif menangani permasalahan kesejahteraan sosial

Pada Tahun 2018, kondisi capaian Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif melaksanakan program kesejahteraan sosial adalah 68,23 %. Pada akhir masa Renstra, diharapkan mencapai 80%. Pencapaian target ini akan dilakukan melalui Program Pemberdayaan seluruh Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang ada di Kota Bukittinggi, serta dengan menumbuhkan wahana kesejahteraan sosial baru seperti Rehabilitasi Berbasis Masyarakat, Penumbuhan Family Care Unit, peningkatan nilai-nilai kesetiakawanan sosial di Kota Bukittinggi, serta dengan terus melakukan pembinaan lanjutan terhadap kapasitas organisasi sosial, Taruna Siaga Bencana, Pekerja Sosial Masyarakat, Karang Taruna, Yayasan dan LKS yang ada di Kota Bukittinggi.

Pada Tahun 2018 sosialisasi mengenai penumbuhan Family Care Unit sudah mulai dilakukan untuk menumbuhkan minat keluarga pionir (keluarga kuat) untuk membantu keluarga plasma (keluarga lemah), sehingga keluarga plasma merasakan



bantuan dari keluarga pionir. Dari 13 Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang ada, 9 diantaranya sudah berpartisipasi aktif dalam penganan PMKS Kota Bukittinggi. Untuk itu, pada tahun mendatang diharapkan seluruh PSKS dapat berpartisipasi aktif, baik PSKS dari internal maupun dari masyarakat sendiri.

Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam menanggulangi bencana, Pada tahun 2017 telah dibentuk Kampung Siaga Bencana di Kelurahan Kayu Kubu, Bukit Apit Puhun dan Pulai Anak Aia. Kampung siaga bencana ini termasuk bagian dari PSKS aktif menangani masalah bencana. Kampung Siaga Bencana dibentuk pada daerah yang rawan terjadi bencana, dan di daerah tersebut juga dibentuk Taruna Siaga Bencana ada masing-masing kelurahan tersebut. Untuk tingkat kota Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kota Bukittinggi, yang aktif berpartisipasi dalam penanggulangan korban pasca bencana yang berjumlah 29 orang yang merupakan utusan dari masing-masing kelurahan. Dengan adanya Kampung Siaga Bencana dan Tagana ini, maka Capaian perlindungan sosial bagi korban bencana alam tahun 2018 adalah 100%.

Di Kota Bukittinggi Tahun 2018 terdapat 15 Organisasi Sosial yang aktif bergerak di bidang penanganan kesejahteraan sosial, serta terdapat 125 orang Pekerja Sosial Masyarakat yang turut menunjang pelaksanaan kegiatan sosial Dinas. Sedangkan jumlah Karang Taruna yang aktif adalah sebanyak 24 buah Karang Taruna dari 24 Karang Taruna yang telah terbentuk di Kota Bukittinggi. Selain itu, Di kota Bukittinggi terdapat 3 panti sosial yang mempunyai kegiatan penyantunan terhadap anak terlantar dalam panti dan 1 Panti Sosial yang melayani Layanan Dalam dan Luar panti yaitu Panti Kasih Bundo. Dengan jumlah anak 114 orang, untuk pemenuhan kebutuhan makan, biaya pendidikan juga sarana dan prasarana terdapat 3 panti menerima bantuan sosial bersumber dari APBD Kota Bukittinggi dan APBD Propinsi dan juga bantuan dari para donator.

18.2. Realisasi Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi dan Capaian Kinerja Tingkat Kemiskinan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tahun	Tingkat Kemiskinan
	Capaian Kinerja
2016	71%
2017	68%



Masih relatif tingginya angka kemiskinan Kota Bukittinggi. Kemiskinan telah menjadi fenomena sosial yang menuntut perhatian serius dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan kemiskinan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan interaksi sosial. Itulah sebabnya masalah kemiskinan dapat muncul sebagai penyebab ataupun pemberat berbagai jenis permasalahan kesejahteraan sosial lainnya seperti ketunaan sosial, kecacatan, keterlantaran, ketertinggalan/keterpencilan dan keresahan sosial, yang pada umumnya berkenaan dengan keterbatasan kemampuan untuk mengakses berbagai sumber pelayanan.

Dari data kemiskinan hasil verifikasi Tahun 2019 berjumlah 7.554 KK telah dilakukan verifikasi data dan terdapat 1.430 KK yang dikeluarkan dari data kemiskinan berdasarkan hasil verifikasi dan validasi Basis Data Terpadu bulan November 2018. Dari data 1.430 KK tersebut terdapat ganda dan tidak ditemukan, dianggap telah pindah dan keluar dari Kota Bukittinggi. Capaian masyarakat miskin yang keluar dari data kemiskinan berdasarkan data 2018 adalah sebesar 18,90 %. Total Basis Data Terpadu hasil verifikasi dan validasi bulan November setelah dikurangi data yang keluar, berjumlah 6.124 KK.

Realisasi capaian indikator tingkat kemiskinan Kota Bukittinggi dibandingkan dengan target akhir RPJMD :

INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD	REALISASI TAHUN 2018	KONDISI AKHIR RPJMD
Tingkat kemiskinan	4,23	5,48	2,84

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat kemiskinan Kota Bukittinggi tahun 2018 dibandingkan dengan awal RPJMD masih jauh meningkat, hal ini menjadi tugas bersama pemerintah dan msasyarakat untuk sama-sama dapat menekan angka kemiskinan di Kota Bukittinggi.

MISI V : MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PARIWISATA, PENDIDIKAN, KESEHATAN, PERDAGANGAN DAN JASA SERTA KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT

Untuk mewujudkan misi 5 tersebut, sesuai dengan Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2016, tujuan dan sasaran strategis dimaksud adalah sebagai berikut:



No	TUJUAN	No	SASARAN STRATEGIS
5.1	Meningkatnya kunjungan wisatawan	5.1.1	Meningkatkan pelayanan pariwisata
5.2	Layanan pendidikan yang berkualitas dan berkarakter unggul	5.2.1	Meningkatnya akses layanan bidang pendidikan
		5.2.2	Meningkatkan kualitas pendidikan
5.3	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	5.3.1	Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan
		5.3.2	Meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan serta sumber daya kesehatan
5.4	Peningkatan nilai tambah sektor perdagangan dan jasa	5.4.1	Terjaganya stabilitas harga
5.5	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kota Bukittinggi	5.5.1	Terkendalinya jumlah penduduk

Analisis capaian kinerjanya dilakukan berdasarkan capaian indikator kinerja utama per sasaran strategis sebagai berikut:

TUJUAN 5.1 : MENINGKATNYA KUNJUNGAN WISATAWAN

Pencapaian tujuan pertama pada misi 5 ini akan dicapai berdasarkan capaian indikator kinerja utama beberapa sasaran strategis berikut :

**SASARAN STRATEGIS 5.1.1
MENINGKATKAN PELAYANAN PARIWISATA**



Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 5.1.1 terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja utama, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini :

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN 5.1.1

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	kunjungan wisatawan	533.555 orang	577.857 orang	108%
Rata-rata Capaian				108%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian 1 (satu) indikator kinerja utama sasaran strategis sebesar 108%, sesuai dengan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan, keberhasilan pencapaian sasaran Strategis termasuk kategori **sangat baik**.

19. Jumlah Kunjungan Wisatawan

19.1. Perbandingan Target Realisasi

Jumlah kunjungan wisatawan	=	Jumlah kunjungan wisatawan dalam satu tahun berjumlah 577.857 Orang wisatawan
----------------------------	---	---

Kota Bukittinggi memiliki luas wilayah 25,239 km², dengan wilayah administrasi terbagi atas 3 kecamatan dengan 24 kelurahan. Topografi bergelombang, terdiri dari bukit-bukit dan lembah-lembah. Dimana bila kita menyusuri Kota Bukittinggi maka akan banyak sekali jalan yang mendaki, menurun dan jenjang untuk pejalan kaki, maka tidak salah kota ini dijuluki kota seribu jenjang. Dengan keindahan alam dan hawa sejuk karena dikelilingi tiga gunung yaitu Gunung Merapi, Singgalang dan Tandikek atau disebut juga Tri Arga seakan menjadi tonggak penyangga untuk memperkokoh Bukittinggi. Disamping itu, Bukittinggi juga dilengkapi dengan peninggalan sejarah seperti, Lobang Jepang, Benteng Fort de Kock, Jam Gadang dan lain- lain. Karunia alam yang ditopang dengan karunia sejarah ini menjadikan Bukittinggi sebagai salah satu kota tujuan utama wisata di Sumatera Barat.



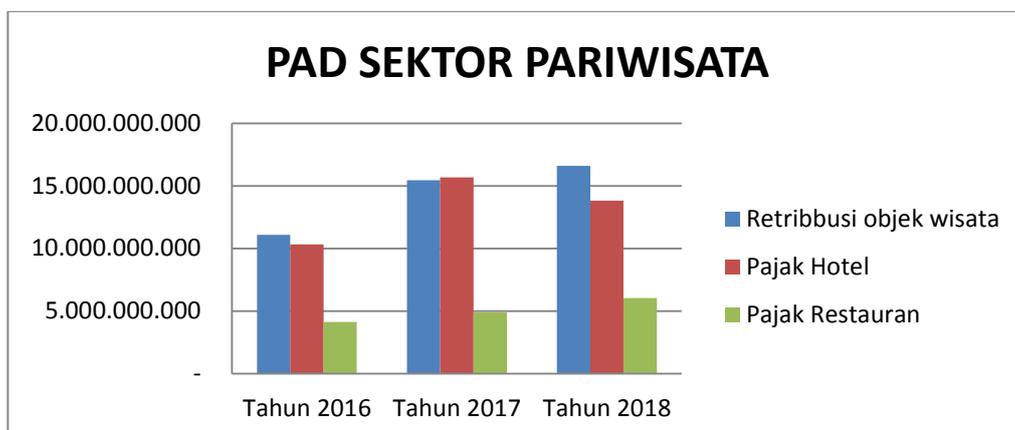
Di Kota Bukittinggi sektor pariwisata merupakan sektor terpenting yang memberikan kontribusi besar pada Pendapatan Anggaran Daerah Kota Bukittinggi. Pendapatan ini berasal dari retribusi tempat rekreasi dan olahraga, pajak hotel, restoran dan lain-lain.

Untuk pendapatan pariwisata dari sektor retribusi rekreasi dan olahraga mengalami kemajuan yang cukup baik dari tahun ke tahun, hasil ini juga tidak bisa dilepaskan dari pembangunan destinasi dan industry wisata yang meliputi konsep 4A Atraksi (objek yang memiliki daya tarik untuk dilihat, ditonton, dinikmati, yang layak 'dijual' ke pasar wisata) Amenitas (Segala macam fasilitas penunjang kegiatan pariwisata) Aksesibilitas (Sarana prasarana yang tersedia untuk membantu wisatawan mencapai objek wisata dengan aman dan nyaman) dan Ancilliary (organisasi atau orang - orang yang mengurus objek wisata).

Berikut disajikan data PAD sektor pariwisata, kunjungan wisatawan ke objek wisata berbayar dan jumlah kunjungan wisatawan yang menginap di hotel.

PAD sektor pariwisata

Sumber pendapatan	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
Retribusi objek wisata	11.086.016.000 ,-	15.449.660.182 ,-	16.603.534.121,-
Pajak hotel	10.332.160.754 ,-	15.677.584.723 ,-	13.819.121.537,-
Pajak restoran	4.131.293.409,-	4.883.019.955,-	6.040.839.165,-



Keterangan :

Dari tabel dan grafik diatas terlihat bahwa Pendapatan Asli Daerah dari 2 sektor pariwisata, baik itu retribusi objek wisata dan pajak restoran selama 3 (tiga) tahun terakhir mengalami kenaikan yang cukup menggembirakan, untuk retribusi objek wisata yang dikelola langsung oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi tahun 2017 mengalami kenaikan cukup significant sebesar 39%, dan untuk tahun 2018 naik lagi sebesar 7%.

Untuk pajak hotel tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 51% dan pada tahun 2018 terjadi sedikit penurunan sebesar 11%, sementara pajak restoran pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 18% dan tahun 2018 naik lagi sekitar 23%.

Data kunjungan wisatawan ke kota Bukittinggi

(berdasarkan yang menginap di hotel)

Tahun	Jenis wisatawan		Jumlah
	Mancanegara	Nusantara	
2016	27.516	511.258	538.774
2017	30.412	516.483	546.895
2018	31.841	546.016	577.857



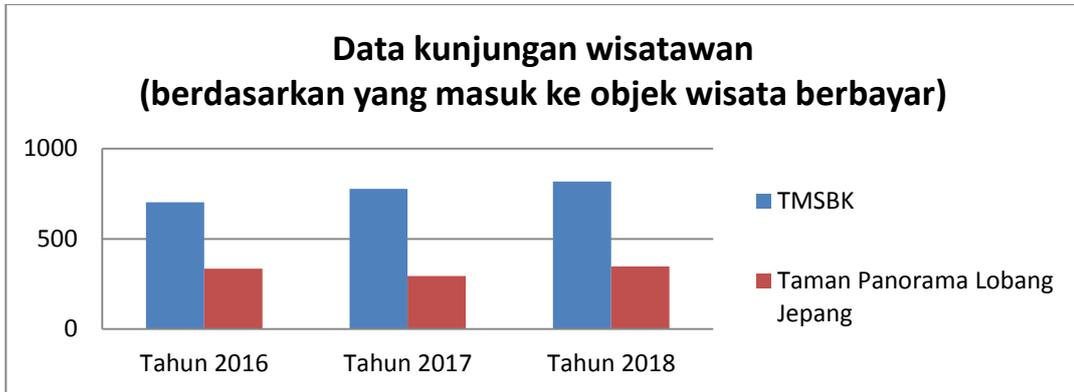
Keterangan :

Dari tabel dan grafik di atas terlihat jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Bukittinggi berdasarkan data tamu yang menginap di hotel baik itu jenis wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara juga mengalami kenaikan cukup bagus. Tahun 2017 kunjungan wisatawan mancanegara naik 10% dan 2018 naik lagi sebesar 3%. Untuk wisatawan nusantara tahun 2017 naik sebesar 1% dan tahun 2018 naik lagi sekitar 5%.

Data kunjungan wisatawan

(berdasarkan yang masuk ke objek wisata berbayar)

Objek wisata	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
TMSBK	703.718	777.403	818.839
Taman Panorama Lobang Jepang	333.474	293.742	345.905
Total	1.037.192	1.071.145	1.164.294



Keterangan :

Dari tabel dan grafik di atas terlihat jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Bukittinggi berdasarkan data pengunjung ke objek wisata berbayar Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan (TMSBK) mengalami kenaikan selama 3 (tiga) tahun terakhir. Untuk tahun 2017 terjadi kenaikan sekitar 10% dibanding tahun 2016. Untuk tahun 2018 meningkat lagi sekitar 5%.

Sementara jumlah pengunjung ke objek wisata Taman Panorama Lobang Jepang masih berfluktuasi dimana pada tahun 2017 mengalami penurunan sekitar 11% dan tahun 2018 naik sebesar 17%.

Kunjungan wisatawan ke Kota Bukittinggi terbagi atas dua kelompok yaitu :

1. Jumlah kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara masuk objek wisata Dari target 1.092.353 orang dengan realisasi 1.164.294 orang (sumber Disparpora) dengan kegiatan pendukung diantaranya
 - Pemeliharaan jam gadang
 - Pengelolaan taman panorama lobang jepang
 - Pemeliharaan objek wisata
 - Pemeliharaan TMS-BK
 - Revitalisasi kawasan wisata taman marga satwa dan budaya jinantan
 - Revitalisasi kawasan wisata taman panorama

Jumlah kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara menginap di hotel



Dari target 557.832 orang dengan realisasi 577.857 orang (data rekap statistik kunjungan hotel pada bidang pariwisata dan ekonomi kreatif), kegiatan pendukung diantaranya :

- Pelaksanaan promosi Pariwisata Nusantara dalam dan luar negeri
- Pembuatan dan pengadaan sarana promosi pariwisata

Rata-rata lama tinggal wisatawan

Dari target 2 hari dan realisasi 2 hari (data rekap statistik kunjungan hotel pada bidang pariwisata dan ekonomi kreatif) dengan kegiatan pendukung :

- Dukungan terhadap pelaksanaan tur de singkarak
- Lomba fotografi wisata tingkat provinsi dan cipta lagu pariwisata
- Fasilitasi iven-iven pariwisata
- Pembinaan guide
- Fasilitasi penampilan tim kesenian
- Pembinaan sadar wisata
- Pemilihan duta wisata kota bukittinggi
- Festival Multi etnis

19.2. Realisasi Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi dan Capaian Kinerja Jumlah Kunjungan Wisatawan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tahun	Jumlah Kunjungan Wisatawan
	Capaian Kinerja
2016	103%
2017	103,89%
2018	108%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa kunjungan wisatawan ke Kota Bukittinggi tidak mengalami kemajuan yang signifikan. Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga terus berupaya meningkatkan layanan terhadap wisatawan sebagai wujud Kota Bukittinggi sebagai kota wisata.



19.3. Realisasi Capaian Target Dari Awal RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan

Realisasi capaian indikator kunjungan wisatawan Kota Bukittinggi dibandingkan dengan target akhir RPJMD :

INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD	REALISASI TAHUN 2018	KONDISI AKHIR RPJMD
Kunjungan Wisatawan	460.905 orang	577.857 orang	588.245 orang

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kunjungan wisatawan ke Kota Bukittinggi dari tahun ke tahun semakin meningkat dari awal tahun RPJMD dengan jumlah kunjungan 406.905 dan meningkat sampai tahun 2018 dengan jumlah kunjungan 577.857 orang. Pemerintah Kota Bukittinggi terus mendorong kunjungan wisatawan untuk berkunjung ke Kota Bukittinggi dengan meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengunjung. Serta meningkatkan promosi Kota Bukittinggi sebagai Kota Wisata.

19.4. Analisis Program/ Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator

Adapun kegiatan pendukung dari indikator kunjungan wisatawan ini antara lain, Pemeliharaan Jam Gadang, Pegelolaan Taman Panorama Lobang japing, Pemeliharaan Obyek Wisata, Pemeliharaan TMS-BK, Revitalisasi Kawasan Wisata Tamam Marga Satwa dan Budaya kinantan (DAK Fisik Pariwisata 2018), Revitalisasi Kawasan Wisata Taman Panorama (DAK Fisik Pariwisata 2018), Pelaksanaan Promosi PariwisataNusantara dalam Dan Luar Negeri, Pembuatan dan Penggadaan Sarana Promosi Pariwisata, Dukungan Terhadap Pelaksanaan Tour de Singkarak, Lomba Fotografi Wisata Tingkat Propinsi dan Cipta Lagu Pariwisata, Fasilitasi Iven-ivent Pariwisata, Pembinaan Guide, Fasilitasi Penampilan Tim Kesenian, Pembinaan Sadar Wisata, Pemilihan Duta Wisata kota Bukittinggi, Festival Multi Etnis.

TUJUAN 5.2 : LAYANAN PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS DAN BERKARAKTER UNGGUL

Untuk mencapai tujuan tersebut hasil yang akan dicapai telah ditetapkan dalam sasaran strategis sebagai berikut :



SASARAN STRATEGIS 5.2.1

MENINGKATNYA AKSES LAYANAN BIDANG PENDIDIKAN

Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 5.2.1 terdiri atas 7 (tujuh) indikator kinerja utama, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini :

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN 5.2.1

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Harapan lama sekolah	14,8 tahun	14,92 tahun	100,8%
Rata-rata Capaian				100,8%

Data BPS relis april 2018

Dari tabel dapat dilihat, rata-rata capaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis sebesar 100,8%. Sesuai dengan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan, keberhasilan pencapaian sasaran Strategis termasuk kategori **sangat baik**

20. Harapan lama sekolah

20.1. Perbandingan Target Realisasi

Harapan Lama Sekolah = Lamanya sekolah yang akan dirasakan oleh anak umu tertentu pada masa datang 14,92 tahun

Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Variabel ini merupakan salah satu indikator dalam menentukan Indeks Pembangunan Manusia.

Pada tahun 2016, Harapan Lama sekolah yang ditargetkan pada Pemerintah Kota Bukittinggi adalah 14,7 tahun, dan terealisasi sebesar 14,92 tahun atau dengan tingkat capaian sebesar 79% Artinya, setiap anak pada usia tertentu pada tahun 2016, akan memiliki harapan untuk bersekolah pada umur tertentu selama 14,92 tahun, atau sudah sampai ke tingkat perguruan tinggi pada semester 6.



Capaian ini didukung dengan keberadaan sekolah mulai dari tingkat dasar, tingkat menengah dan perguruan tinggi yang ada di Bukittinggi sebagai berikut:

1. Sekolah Dasar/ MI negeri dan swasta sebanyak 65 sekolah
2. SMP/ MTs negeri dan swasta sebanyak 18 sekolah
3. SMA/MA/SMK negeri dan swasta sebanyak 29 sekolah
4. Perguruan tinggi negeri dan swasta sebanyak 22 perguruan tinggi

Pengelolaan dan perencanaan kebutuhan sekolah merupakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi, sementara untuk jajaran pendidikan keagamaan dikelola oleh Kementerian Agama, baik tingkat kota maupun provinsi. Perguruan tinggi negeri sesuai kewenangannya dikelola oleh pemerintah, sementara keberadaannya sangat berpengaruh pada harapan lama sekolah di Bukittinggi. Karena itu program Pemerintah Kota Bukittinggi terkait hal ini dalam bentuk fasilitasi.

Angka Harapan lama sekolah Kota Bukittinggi tahun 2015 adalah 14,92 tahun, dan tahun 2016 selama 14,92 tahun. Capaian ini masih sama dengan tahun sebelumnya, karena belum ada publikasi terbaru data harapan lama sekolah yang dipublikasi oleh BPS Kota Bukittinggi, walaupun data sementara terdapat peningkatan. Sesuai Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan, data yang menjadi ukuran adalah dari BPS Kota Bukittinggi.

20.2. Realisasi Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi dan Capaian Kinerja Harapan Lama Sekolah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tahun	Harapan Lama Sekolah
	Capaian Kinerja
2016	79%
2017	100%
2018	

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kota Bukittinggi terus berupaya meningkatkan minat sekolah pada anak-anak usia sekolah.

20.3. Realisasi Capaian Target Dari Awal RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan



Realisasi capaian indikator harapan lama sekolah Kota Bukittinggi dibandingkan dengan target akhir RPJMD :

INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD	REALISASI TAHUN 2018	KONDISI AKHIR RPJMD
Harapan lama sekolah	14,7	14,92	15

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa harapan lama sekolah Kota Bukittinggi tahun 2018 jika disandingkan dengan data awal tahun RPJMD mengalami kenaikan dari 14,7 menjadi 14,92, dan untuk akhir masa RPJMD akan ditingkatkan menjadi 15.

SASARAN STRATEGIS 5.2.2

MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 5.2.1 terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja utama, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini :

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN 5.1.1

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase sekolah yang berakreditasi A tingkat SD	78,50%	72,88%	92,8%
2.	Persentase sekolah yang berakreditasi A tingkat SMP	70,75%	61,53%	86,9%
Rata-rata Capaian				89,85%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian 1 (satu) indikator kinerja utama sasaran strategis sebesar 89,85%, sesuai dengan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan, keberhasilan pencapaian sasaran Strategis termasuk kategori **sangat baik**.

21. Persentase Sekolah Yang Berakreditasi A Tingkat SD

21.1. Perbandingan Target Realisasi



$$\text{Sekolah yang berakreditasi A tingkat SD} = \frac{\text{Jumlah sekolah yang berakreditasi A 43}}{\text{Jumlah sekolah SD 59}} \times 100\% = 72,88\%$$

Bukittinggi memiliki 59 sekolah dasar. Sebanyak 59 sekolah sudah diakreditasi, dan pada tahun 2017 sebanyak 43 sekolah memperoleh akreditasi A, 13 sekolah terakreditasi B dan 3 sekolah memperoleh akreditasi C atau belum terakredinas.

Berdasarkan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2017, tingkat capaian kinerja dari indikator utama yang ditetapkan adalah sebesar 108%, dimana target yang ditetapkan sebesar 72,88 % dan terealisasi sebesar 79%.

Untuk mendapatkan akreditasi A, fasilitasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Bukittinggi adalah:

1. Melakukan pembinaan terhadap sekolah-sekolah yang mencapai indikator standar penilaian yang telah dilakukan oleh BAN pusat, baik dari segi mutu dan layanan pendidikan

Penilaian akreditasi sekolah ini dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional terhadap indikator yang telah ditetapkan, meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga pendidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan sesuai peraturan Presiden nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Pada tahun 2015 Persentase Sekolah yang berakreditasi A tingkat SD di Kota Bukittinggi adalah sebanyak 71,18%, dan tahun 2016 menjadi 79%. Terjadi peningkatan dari tahun 2015 didukung oleh realisasi program pembinaan, fasilitasi yang dilakukan terhadap SD yang terakreditasi untuk meningkatkan capaiannya.

Dari semua SD yang ada di Kota Bukittinggi Negeri dan Swasta, terdapat satu sekolah mendapat nilai akreditasi C dan 13 sekolah yang mendapat nilai B sedangkan A ada 43 sekolah perhitungannya adalah 43 dibagi 57 dikali 100 % jumlahnya 75,44. Ini sudah ada peningkatan dari tahun sebelumnya.

NO	NAMA SEKOLAH	JENJANG	STATUS	PERINGKAT	NILAI	MASA BERLAKU
----	--------------	---------	--------	-----------	-------	--------------



NO	NAMA SEKOLAH	JENJANG	STATUS	PERINGKAT	NILAI	MASA BERLAKU
1	SDN 01 BENTENG PASAR ATAS	SD	NEGERI	A	92	2022
2	SDN 01 CAMPAGO IPUH	SD	NEGERI	A	93	2020
3	SDN 01 LADANG CAKIAH	SD	NEGERI	A	91	2020
4	SDN 02 AUR KUNING	SD	NEGERI	A	87	2020
5	SDN 02 CAMPAGO GUGUK BULEK	SD	NEGERI	A	91	2021
6	SDN 02 PERCONTOHAN	SD	NEGERI	A	93	2022
7	SDN 03 PAKAN KURAI	SD	NEGERI	A	92	2019
8	SDN 03 PAKAN LABUAH	SD	NEGERI	A	91	2022
9	SDN 03 PULAI ANAK AIR	SD	NEGERI	A	93	2021
10	SDN 04 BIRUGO	SD	NEGERI	A	93	2022
11	SDN 04 BUKIT APIT PUHUN	SD	NEGERI	A	90	2021
12	SDN 04 GAREGEH	SD	NEGERI	A	95	2022
13	SDN 05 BIRUGO	SD	NEGERI	A	87	2020
14	SDN 05 PUHUN PINTU KABUN	SD	NEGERI	A	94	2021
15	SDN 05 TAROK DIPO	SD	NEGERI	B	89	2022
16	SDN 06 ATTS	SD	NEGERI	A	94	2021
17	SDN 06 PARIT ANTANG	SD	NEGERI	A	94	2020
18	SDN 06 PULAI ANAK AIR	SD	NEGERI	A	93	2021
19	SDN 07 BELAKANG BALOK	SD	NEGERI	A	93	2022
20	SDN 07 BUKIT CANGANG	SD	NEGERI	A	94	2021
21	SDN 07 KUBU GULAI BANCAH	SD	NEGERI	A	95	2021
22	SDN 08 CAMPAGO IPUAH	SD	NEGERI	B	89	2022
23	SDN 08 KUBU TANJUANG	SD	NEGERI	B	82	2020



NO	NAMA SEKOLAH	JENJANG	STATUS	PERINGKAT	NILAI	MASA BERLAKU
24	SDN 08 TAROK DIPO	SD	NEGERI	A	93	2022
25	SDN 09 BELAKANG BALOK	SD	NEGERI	A	94	2020
26	SDN 09 MANGGIS GANTIANG	SD	NEGERI	A	92	2022
27	SDN 10 ATTS	SD	NEGERI	A	92	2016
28	SDN 10 PUHUN PINTU KABUN	SD	NEGERI	A	92	2020
29	SDN 10 SAPIRAN	SD	NEGERI	A	95	2021
30	SDN 11 AUR KUNUNG	SD	NEGERI	A	94	2021
31	SDN 11 BUKIT APIT PUHUN	SD	NEGERI	A	93	2020
32	SDN 11 CAMPAGO GUGUK BULEK	SD	NEGERI	A	93	2019
33	SDN 12 BUKIT CANGANG	SD	NEGERI	A	93	2021
34	SDN 12 PUHUN PINTU KABUN	SD	NEGERI	B	90	2022
35	SDN 13 BUKIT APIT PUHUN	SD	NEGERI	A	92	2020
36	SDN 13 KUBU GULAI BANCAH	SD	NEGERI	B	88	2022
37	SDN 14 ATTS	SD	NEGERI	A	91	2018
38	SDN 14 TANJUNG ALAM	SD	NEGERI	B	87	2022
39	SDN 15 PULAI ANAK AIR	SD	NEGERI	B	84	2019
40	SDN 16 CAMPAGO IPUH	SD	NEGERI	A	92	2022
41	SDN 16 TAROK DIPO	SD	NEGERI	A	92	2020
42	SDN 17 MANGGIS GANTING	SD	NEGERI	B	90	2022
43	SDN 17 PAKAN KURAI	SD	NEGERI	A	91	2020
44	SDN 18 CAMPAGO GUGUK BULEK	SD	NEGERI	B	83	2022
45	SDN 18 TAROK DIPO	SD	NEGERI	A	93	2019
46	SDN 19 ATTS	SD	NEGERI	A	90	2021



NO	NAMA SEKOLAH	JENJANG	STATUS	PERINGKAT	NILAI	MASA BERLAKU
47	SD AL AZHAR	SD	SWASTA	A	93	2020
48	SD AL FALAH	SD	SWASTA	A	91	2022
49	SD AL ISHLAH	SD	SWASTA	A	91	2020
50	SD CAHAYA HATI	SD	SWASTA	B	90	2022
51	SD EXCELLENT	SD	SWASTA	A	91	2022
52	SD FRANSISKUS	SD	SWASTA	A	90	2020
53	SD INSAN KAMIL	SD	SWASTA	B	89	2022
54	SD JAMIYYATUL HUJAJ	SD	SWASTA	A	94	2021
55	SD MASYITHAH	SD	SWASTA	B	89	2020
56	SD SYAHIRAL ILMU	SD	SWASTA	B	83	2018
57	SD TRISULA PERWARI	SD	SWASTA	C	58	2021

21.2. Realisasi Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Sekolah yang Berakreditasi A Tingkat SD dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tahun	Persentase Sekolah yang Berakreditasi A Tingkat SD
	Capaian Kinerja
2016	108%
2017	100,2%
2018	92,8%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sekolah yang berakreditasi A tingkat SD dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 mengalami penurunan realisasi capaiannya, hal ini dikarenakan tingginya target yang harus dipenuhi pada tiap-tiap tahun berikutnya. Pemerintah Kota Bukittinggi melakukan seleksi yang ketat terhadap sekolah dalam memberikan akreditasi, sehingga diharapkan mutu pendidikan dapat ditingkatkan.

21.3. Realisasi Capaian Target Dari Awal RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan



Realisasi capaian indikator Persentase Sekolah yang Berakreditasi A Tingkat SD Kota Bukittinggi dibandingkan dengan target akhir RPJMD :

INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD	REALISASI TAHUN 2018	KONDISI AKHIR RPJMD
Persentase Sekolah yang Berakreditasi A Tingkat SD	72,88%	72,88%	81,35%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Persentase Sekolah yang Berakreditasi A Tingkat SD Kota Bukittinggi tahun 2018 jika dibandingkan dengan kondisi awal RPJMD 72,88% tidak terjadi peningkatan, untuk mencapai tingkatan akhir masa RPJMD dengan 81,35% Pemerintah Kota Bukittinggi akan terus melakukan peningkatan dalam meningkatkan mutu pendidikan dari jenjang Sekolah Dasar.

22. Persentase Sekolah Yang Berakreditasi A Tingkat SMP

22.1. Perbandingan Target Realisasi

$$\% \text{ Sekolah yang berakreditasi A tingkat SMP} = \frac{\text{Jumlah sekolah yang berakreditasi A } 8}{\text{Jumlah sekolah SMP } 13} \times 100\% = 61,53\%$$

Jumlah Sekolah Menengah Tingkat Pertama di Bukittinggi adalah 13. Sebanyak 13 sekolah sudah diakreditasi, dan pada tahun 2018 sebanyak 8 sekolah memperoleh akreditasi A, 3 sekolah terakreditasi B dan 2 sekolah memperoleh akreditasi C atau belum terakredinasasi.

Berdasarkan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2017, tingkat capaian kinerja dari indikator utama yang ditetapkan adalah sebesar 135 %, dimana target yang ditetapkan sebesar 54 % dan terealisasi sebesar 73%.

Pada tahun 2015 Persentase SMP yang berakreditasi A di Kota Bukittinggi adalah sebanyak 54,50%, dan tahun 2016 menjadi 73%. Terjadi peningkatan dari tahun 2015



didukung oleh realisasi program pembinaan, fasilitasi yang dilakukan terhadap SMP yang terakreditasi untuk meningkatkan capaiannya.

NO	NAMA SEKOLAH	JENJANG	STATUS	PERINGKAT	NILAI	MASA BERLAKU
1	SMPN 1 BUKITTINGGI	SMP	NEGERI	A	90	2019
2	SMPN 2 BUKITTINGGI	SMP	NEGERI	A	90	2020
3	SMPN 3 BUKITTINGGI	SMP	NEGERI	A	92	2020
4	SMPN 4 BUKITTINGGI	SMP	NEGERI	A	92	2020
5	SMPN 5 BUKITTINGGI	SMP	NEGERI	A	92	2020
6	SMPN 6 BUKITTINGGI	SMP	NEGERI	B	85	2020
7	SMPN 7 BUKITTINGGI	SMP	NEGERI	B	83	2019
8	SMPN 8 BUKITTINGGI	SMP	NEGERI	A	86	2020
9	SMP AL ISHLAH	SMP	SWASTA	A	90	2021
10	SMP PSM	SMP	SWASTA	B	81	2021
11	SMP XAVERIUS	SMP	SWASTA	A	87	2021

Dari semua SMP yang ada di Kota Bukittinggi Negeri dan Swasta, terdapat tiga sekolah mendapat nilai akreditasi B sedangkan A ada 8 sekolah perhitungannya adalah 8 dibagi 11 dikali 100 % jumlahnya 72,73. Ini sudah ada peningkatan dari tahun sebelumnya.

22.2. Realisasi Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Sekolah yang Berakreditasi A Tingkat SMP dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tahun	Persentase Sekolah yang Berakreditasi A Tingkat SMP
	Capaian Kinerja
2016	135%
2017	111%
2018	86,9%



Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sekolah yang berakreditasi A tingkat SMP dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 mengalami penurunan realisasi capaiannya, hal ini dikarenakan tingginya target yang harus dipenuhi pada tiap-tiap tahun berikutnya. Pemerintah Kota Bukittinggi melakukan seleksi yang ketat terhadap sekolah dalam memberikan akreditasi, sehingga diharapkan mutu pendidikan dapat ditingkatkan.

22.3. Realisasi Capaian Target Dari Awal RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan

Realisasi capaian indikator Persentase Sekolah yang Berakreditasi A Tingkat SMPD Kota Bukittinggi dibandingkan dengan target akhir RPJMD :

INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD	REALISASI TAHUN 2018	KONDISI AKHIR RPJMD
Persentase Sekolah yang Berakreditasi A Tingkat SMP	54,50%	61,53%	90,90%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Persentase Sekolah yang Berakreditasi A Tingkat SMP Kota Bukittinggi tahun 2018 jika dibandingkan dengan kondisi awal RPJMD 54,50% terjadi peningkatan, untuk mencapai target akhir masa RPJMD dengan 90,90% Pemerintah Kota Bukittinggi akan terus melakukan peningkatan dalam meningkatkan mutu pendidikan dari jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

TUJUAN 5.3 : MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT

Tujuan ketiga pada misi 5 ini memiliki satu sasaran strategis Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, sebagai berikut :



SASARAN STRATEGIS 5.3.1

Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan



Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 5.3.1 terdiri atas 3 (tiga) indikator kinerja utama, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini :

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN 5.3.1

No	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Angka Harapan Hidup	72,75%	73,36%	100,8%
Rata-rata Capaian Indikator				100,8%

BPS relis april 2018

Dari tabel dapat dilihat, rata-rata capaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis sebesar 100,8%. Sesuai dengan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan, keberhasilan pencapaian sasaran Strategis termasuk kategori **sangat baik**.

23. Angka Harapan Hidup

23.1. Perbandingan Target Realisasi

$$\text{Angka Harapan Hidup} = \frac{\text{Rata-rata jumlah tahun kehidupan yang masih dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur}}{\text{Target}}$$

Salah satu indikator utama untuk menentukan derajat kesehatan masyarakat adalah angka harapan hidup. Indikator ini menjadi salah satu indikator utama dari sasaran strategis meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan.

Pada tahun 2018 ditetapkan target angka harapan hidup Kota Bukittinggi 72,75 tahun dan berdasarkan data yang dipublikasikan oleh BPS Kota Bukittinggi, angka harapan hidup Kota Bukittinggi mencapai 73,13 tahun dan menjadi salah satu variabel Indeks Pembangunan Manusia. Realisasi ini melampaui target dengan tingkat capaian 101%.

Pencapaian angka harapan hidup merupakan dampak dari berbagai kinerja bidang kesehatan, seperti; tingkat kematian ibu melahirkan dan bayi baru lahir, angka kesakitan dan pemenuhan gizi masyarakat. Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi beserta seluruh instansi dan lembaga kesehatan tingkat kota hingga kelurahan.



Tugas ini juga menjadi bagian penting partisipasi masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat melalui berbagai program di tingkat kelurahan, dasa wisma pos yandu dan kader kesehatan.

Angka Harapan Hidup Kota Bukittinggi tahun 2015 adalah 71,98 tahun, dan tahun 2016 meningkat menjadi 73,36 tahun. Peningkatan ini menunjukkan semakin baiknya derajat kesehatan masyarakat melalui program preventif dan kuratif serta perilaku hidup bersih dan sehat yang semakin baik.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatnya angka harapan hidup adalah :

1) Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Program upaya Kesehatan masyarakat adalah program untuk menjamin masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan dasar yang dilakukan dalam bentuk Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) didalam gedung dan Upaya Kesehahatan Masyarakat (UKM) di luar gedung. Upaya Kesehatan masyarakat dilakukan dalam bentuk pelayanan kesehatan pada 7 Puskesmas yang ada, pelayanan kesehatan P3K pada keramaian Kota, pelayanan ambulance siaga yang siap antar jemput pasien dari rumah menuju sarana pelayanan kesehatan. Untuk pelayanan kesehatan dasar, Pemerintah Kota Bukittinggi sudah memberlakukan pengobatan gratis bagi penduduk Kota Bukittinggi yang ditandai dengan KTP / Kartu Keluarga.

Untuk pelayanan kesehatan rujukan, Pemerintah Kota Bukittinggi sudah mengalokasikan anggaran untuk kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi warga miskin sebanyak 9.618 orang, artinya seluruh warga Kota Bukittinggi sudah memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.

Akses kesehatan yang sudah baik di Kota Bukittinggi ditunjang oleh adanya 7 Puskesmas induk pada setiap Kecamatan di Kota Bukittinggi. Dari 3 Kecamatan yang ada, 1 Puskesmas di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, 2 Puskesmas di Kecamatan Guguk Panjang dan 4 Puskesmas di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan. Disamping itu, pelayanan kesehatan juga dilengkapi dengan 14 Puskesmas Pembantu dan 26 Pos Kesehatan Kelurahan yang sudah ada pada setiap Kelurahan. Di Kota Bukittinggi terdapat 4 Rumah Sakit Umum, 2 Rumah Sakit Khusus, 115 Praktek dokter perorangan, 45 apotek dan pendukung lainnya. Untuk mobilisasi program kesehatan, pada 7 Puskesmas juga sudah ada Mobil Puskesmas keliling.

2) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak



Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak adalah upaya untuk menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi dan angka kematian balita. Beberapa upaya yang dilakukan adalah :

- a. Memberikan pelayanan ibu hamil sesuai standar
- b. Memberikan pelayanan ibu bersalin sesuai standar
- c. Memberikan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar
- d. Memberikan pelayanan kesehatan balita sesuai standar
- e. Memberikan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar (skrining)

3) Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Program Perbaikan Gizi Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan gizi masyarakat dan mengatasi permasalahan gizi di masyarakat. Dalam hal mengatasi permasalahan gizi diantaranya masalah Kurang Energi Protein (KEP) pada balita, Stunting (anak pendek), kekurangan Yodium (GAKY), kekurangan Vitamin A (KVA) dan mengatasi masalah Kurang Energi Kalori pada Ibu Hamil. Untuk meningkatkan status gizi masyarakat sudah dilakukan upaya pemberian makanan tambahan pada anak sekolah, pemberian makanan tambahan pada anak keluarga miskin, makanan tambahan pada anak baru masuk sekolah, makanan tambahan pada ibu hamil KEK, makanan tambahan pada balita KEP.

4) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

Program promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat merupakan program untuk menunjang seluruh program yang ada di Dinas Kesehatan khususnya untuk meningkatkan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat. Program promosi ini berupa kegiatan penyuluhan kesehatan, sosialisasi program yang dilaksanakan dengan metode yang mudah diterima oleh masyarakat. Berupa penyuluhan melalui media, pemasangan baliho, running text, pemasangan stiker, pencahangan program dan kegiatan lomba-lomba untuk memotivasi masyarakat dan kader-kader kesehatan.

Sebagai ujung tombak dari upaya promosi kesehatan, pada setiap Kelurahan sudah ada Posyandu sebanyak 133 Posyandu, kader-kader kesehatan, kader Pos kesehatan Kelurahan sebanyak 33 buah dan PKK kelurahan yang bisa bekerja sama dalam meningkatkan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.

5) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia adalah upaya untuk mempertahankan kesehatan usia lanjut sehingga dapat mandiri dalam menjaga dan memelihara kesehatannya. Beberapa kegiatan yang dilakukan adalah memberikan pelayanan prioritas pada lanjut usia di Puskesmas, mengaktifkan Posyandu Lansia



sebagai wadah dalam menggerakkan Lansia untuk menjaga kesehatannya, melaksanakan senam lansia rutin setiap minggu pada setiap Puskesmas.

23.2. Realisasi Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi dan Capaian Kinerja Angka Harapan Hidup dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tahun	Angka Harapan Hidup
	Capaian Kinerja
2016	101%
2017	100,8%

SASARAN STRATEGIS 5.3.2

Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan Serta Sumber Daya Kesehatan

Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 5.3.2 terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja utama, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini :

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN 5.3.2

No	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase Puskesmas yang terakreditasi	70%	100%	142 %
Rata-rata capaian				142%



Dari tabel dapat dilihat, rata-rata capaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis 5.3.2 sebesar **142%**. Sesuai dengan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan, keberhasilan sasaran ini termasuk kategori **sangat baik**.

24. Persentase Puskesmas Yang Terakreditasi

24.1. Perbandingan Target Realisasi

$$\frac{\text{Persentase Puskesmas Yang Terakreditasi}}{100\%} = \frac{\text{Persentase Jumlah puskesmas yang terakreditasi}}{100\%}$$

Puskesmas terakreditasi menunjukkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Sebagai unit layanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan dasar, puskesmas tidak hanya memberikan layanan kuratif, tetapi juga preventif dan berperan penting dalam mewujudkan masyarakat yang berperilaku hidup bersih dan sehat.

Pada tahun 2016, ditargetkan 2 puskesmas Kota Bukittinggi terakreditasi, dan terealisasi keduanya. Puskesmas tersebut adalah puskesmas Guguk Panjang dan puskesmas Perkotaan Rasimah Ahmad, dengan nilai Utama untuk Puskesmas Guguk Panjang dan Madya untuk puskesmas Perkotaan Rasimah Ahmad berdasarkan keputusan tim asesor akreditasi Kementerian Kesehatan.

Dengan terakreditasi, maka puskesmas sesuai kriteria penilaiannya berarti sudah memenuhi standar mutu :

1. Administrasi Manajemen
2. Upaya Kesehatan Perorangan
3. Upaya Kesehatan Masyarakat

Menjadi tugas penting bagi Dinas Kesehatan bersama puskesmas itu sendiri untuk memenuhi kriteria dan indikator puskesmas terakreditasi dimaksud. Hal ini dilakukan melalui berbagai program seperti Program usaha kesehatan masyarakat, program promosi kesehatan, program perbaikan gizi masyarakat dan program penunjang kesehatan lainnya.

Pada tahun 2015 Puskesmas yang terakreditasi di Bukittinggi masih belum ada (0), sementara tahun 2016 puskesmas yang terakreditasi sebanyak 2 puskesmas. Pencapaian ini didukung program pembinaan puskesmas yang diorientasikan untuk pemenuhan akreditasi puskesmas pada Dinas Kesehatan Bukittinggi.



Akreditasi Puskesmas dikeluarkan oleh Komisi Akreditasi dari Kementerian Kesehatan. Hasil kinerja Puskesmas sejak awal tahun RPJMD, Puskesmas yang sudah terakreditasi adalah :

1. Puskesmas Guguk Panjang : Akreditasi Utama (Penilaian Tahun 2016)
2. Puskesmas Rasimah Ahmad : Akreditasi Madya (Penilaian Tahun 2016)
3. Puskesmas Mandiangin : Akreditasi Madya (Penilaian Tahun 2017)
4. Puskesmas Gulai Banchah : Akreditasi Madya (Penilaian Tahun 2017)
5. Puskesmas Nilam Sari : Akreditasi Madya (Penilaian Tahun 2017)

Puskesmas yang sudah terakreditasi menunjukkan bahwa Puskesmas yang ada di Kota Bukittinggi sudah memiliki manajemen, standar pelayanan, sarana prasarana, sumber daya manusia, pengelolaan keuangan yang sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan No. 75 tahun 2014 tentang Puskesmas dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 46 tahun 2015 tentang akreditasi Puskesmas.

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan akreditasi Puskesmas adalah :

1) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan adalah upaya untuk menyiapkan manajemen Puskesmas sesuai dengan standar akreditasi Puskesmas mulai dari administrasi Tata Usaha, administrasi pelayanan perorangan dan administrasi pelayanan masyarakat.

2) Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan

Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan Sumber Daya Kesehatan di Puskesmas sesuai dengan standar, baik tenaga medis, Para medis maupun tenaga administrasi. Disamping memenuhi jumlah juga dilakukan untuk memenuhi kompetensi tenaga kesehatan. Hal ini dilakukan dengan mengikuti pelatihan teknis dibidang kesehatan.

3) Program Obat dan Pembekalan Kesehatan

Program obat dan perbekalan kesehatan adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan obat dan bahan medis di Puskesmas.

4) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya adalah untuk menjamin bahwa



seluruh sarana dan prasarana pelayanan di Puskesmas dan jaringannya sudah sesuai dengan standar. Kegiatan dalam bentuk renovasi gedung Puskesmas, Pustu dan jaringannya dan pemenuhan alat - alat kesehatan sesuai standar pelayanan di Puskesmas pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014.

5) Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD bertujuan untuk mendorong seluruh Puskesmas dapat melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang bertujuan untuk memberikan fleksibilitas kepada Puskesmas dalam pengelolaan keuangan. Sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45.351-2016 tanggal 23 Desember 2017 tentang Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Puskesmas di Kota Bukittinggi dengan status BLUD Penuh. Status Penuh yang dimaksud adalah untuk pengelolaan pendapatan yang diperoleh dari dana Kapitasi JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) yang diperoleh dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Dengan diberlakukannya PPK-BLUD, Puskesmas sudah mandiri dalam pengelolaan keuangan, dapat memenuhi seluruh kebutuhan pelayanan, yang akhirnya dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

6) Program Kebijakan dan Manajemen Kesehatan

Program Kebijakan dan Manajemen Kesehatan adalah upaya untuk pengelolaan data dan informasi kesehatan yang sudah berbasis Teknologi Informasi. Seluruh Puskesmas di Kota Bukittinggi sudah menggunakan aplikasi e-Puskesmas dalam pengelolaan data, Disamping itu, data Puskesmas sudah langsung online dengan Dinas Kesehatan, BPJS dan Kementerian Kesehatan sehingga kebutuhan data terkait pelayanan kesehatan dapat diakses kapan saja dibutuhkan.

24.2. Realisasi Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Puskesmas yang terakreditasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tahun	Persentase Puskesmas yang terakreditasi
	Capaian Kinerja
2016	100%
2017	142,8%



2018	142%
------	------

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Persentase Puskesmas yang terakreditasi dari tahun 2016 sampai tahun 2017 mengalami peningkatan dan untuk tahun 2018 mengalami penurunan capaian, namun tidak terjadi penurunan kualitas akreditasi puskesmas.

24.3. Realisasi Capaian Target Dari Awal RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan

Realisasi capaian indikator Persentase Puskesmas yang terakreditasi Kota Bukittinggi dibandingkan dengan target akhir RPJMD :

INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD	REALISASI TAHUN 2018	KONDISI AKHIR RPJMD
Opini BPK	30	142	100

Realisasi Capaian Tahun Berjalan Terhadap Akhir Masa RPJMD Persentase Puskesmas yang terakreditasi telah melebihi target akhir masa RPJMD.

TUJUAN 5.4 : MENINGKATNYA NILAI TAMBAH SEKTOR PERDAGANGAN DAN JASA

Tujuan keempat pada misi 5 ini memiliki satu sasaran strategis Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS 5.4.1

Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Perdagangan dan Terjaganya Stabilitas Harga

Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 5.4.1 terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja utama, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini :

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN 5.4.1



No	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Tingkat Inflasi	6	1,37	437,9%
Rata-rata Capaian Indikator				437,9%

Dari tabel dapat dilihat, rata-rata capaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis sebesar **437,9%**. Sesuai dengan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan, keberhasilan pencapaian sasaran Strategis termasuk kategori **sangat baik**.

25. Tingkat Inflasi

25.1. Perbandingan Target Realisasi

Tingkat Inflasi = Tingkat inflasi kota bukittinggi selama tahun 2018 adalah 2,99%

Laju pertumbuhan inflasi tahun kalender Kota Bukittinggi sampai dengan bulan Desember 2018 sebesar 2,99 % dan untuk laju inflasi Desember 2018 terhadap Desember 2017 sebesar 2,99 persen (Berita resmi statistik)

Nilai inflasi Kota Bukittinggi tahun 2017 relatif stabil berkisar pada angka dibawah 1%. Inflasi tertinggi terjadi pada bulan Februari sebesar 0,45% dan bulan Mei mengalami Deflasi sebesar 0,44%. Perbandingan Inflasi Kota Bukittinggi terhadap Propinsi dan Nasional diman inflasi Kota Bukittinggi merupakan inflasi terendah di Sumatera dari 23 Kota yang menjadi sampel inflasi dan nomor 3 terendah se Indonesia setelah Ternate dan Sorong.

Pemerintah Kota Bukittinggi membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Bukittinggi yang beranggotakan SKPD teknis terkait, BPS Bulog, Kodim, Polres Kota Bukittinggi dengan melakukan rapat-rapat koordinasi TPID sehingga menghasilkan rekomendasi kebijakan pengendalian Inflasi di Kota Bukittinggi.

Berdasarkan Berita Resmi Statistik dari Badan Pusat Statistik Kota



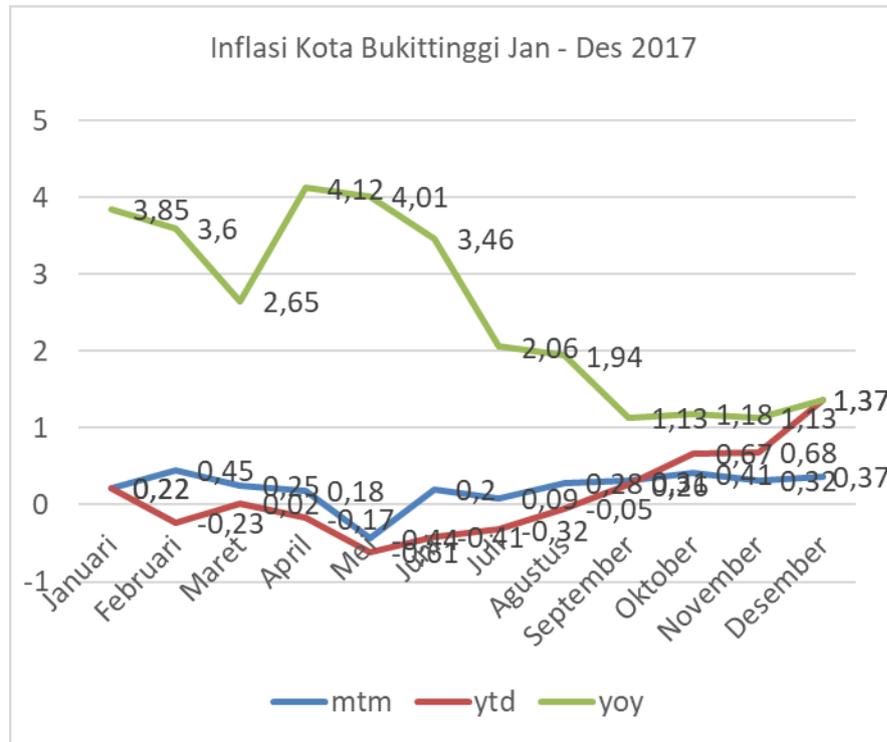
Bukittinggi bahwa perkembangan Indeks Harga Konsumen / Inflasi Kota Bukittinggi bulan Januari - Desember 2017 Kota Bukittinggi sebagai berikut :

1. Pada bulan Januari 2017 di Kota Bukittinggi terjadi inflasi sebesar 0,22 persen. Laju inflasi tahun kalender Kota Bukittinggi sampai Januari 2017 sebesar 0,22 persen dan laju inflasi year on the year (Januari 2017 terhadap Januari 2016) sebesar 3,85 persen.
2. Pada bulan Februari 2017 di Kota Bukittinggi terjadi inflasi sebesar 0,45 persen. Laju inflasi tahun kalender Kota Bukittinggi sampai Februari 2017 sebesar -0,23 persen dan laju inflasi year on the year (Februari 2017 terhadap Februari 2016) sebesar 3,60 persen.
3. Pada bulan Maret 2017 di Kota Bukittinggi terjadi inflasi sebesar 0,25 persen. Laju inflasi tahun kalender Kota Bukittinggi sampai Maret 2017 sebesar 0,02 persen dan laju inflasi year on the year (Maret 2017 terhadap Maret 2016) sebesar 2,65 persen.
4. Pada bulan April 2017 di Kota Bukittinggi terjadi inflasi sebesar 0,18 persen. Laju inflasi tahun kalender Kota Bukittinggi sampai April 2017 sebesar -0,17 persen dan laju inflasi year on the year (April 2017 terhadap April 2016) sebesar 4,12 persen.
5. Pada bulan Mei 2017 di Kota Bukittinggi terjadi inflasi sebesar -0,44 persen. Laju inflasi tahun kalender Kota Bukittinggi sampai Mei 2017 sebesar -0,61 persen dan laju inflasi year on the year (Mei 2017 terhadap Mei 2016) sebesar 4,01 persen.
6. Pada bulan Juni 2017 di Kota Bukittinggi terjadi inflasi sebesar 0,20 persen. Laju inflasi tahun kalender Kota Bukittinggi sampai Juni 2017 sebesar -0,41 persen dan laju inflasi year on the year (Juni 2017 terhadap Juni 2016) sebesar 3,46 persen.
7. Pada bulan Juli 2017 di Kota Bukittinggi terjadi inflasi sebesar 0,09 persen. Laju inflasi tahun kalender Kota Bukittinggi sampai Juli 2017 sebesar -0,32 persen dan laju inflasi year on the year (Juli 2017 terhadap Juli 2016) sebesar 2,06 persen.
8. Pada bulan Agustus 2017 di Kota Bukittinggi terjadi inflasi sebesar 0,28 persen. Laju inflasi tahun kalender Kota Bukittinggi sampai Agustus 2017 sebesar -0,05 persen dan laju inflasi year on the year (Agustus



2017 terhadap Agustus 2016) sebesar 1,94 persen.

9. Pada bulan September 2017 di Kota Bukittinggi terjadi inflasi sebesar 0,31 persen. Laju inflasi tahun kalender Kota Bukittinggi sampai September 2017 sebesar 0,26 persen dan laju inflasi year on the year (September 2017 terhadap September 2016) sebesar 1,13 persen.
10. Pada bulan Oktober 2017 di Kota Bukittinggi terjadi inflasi sebesar 0,41 persen. Laju inflasi tahun kalender Kota Bukittinggi sampai Oktober 2017 sebesar 0,67 persen dan laju inflasi year on the year (Oktober 2017 terhadap Oktober 2016) sebesar 1,18 persen.
11. Pada bulan November 2017 di Kota Bukittinggi terjadi inflasi sebesar 0,37 persen. Laju inflasi tahun kalender Kota Bukittinggi sampai November 2017 sebesar 1,37 persen dan laju inflasi year on the year (Maret 2017 terhadap Maret 2016) sebesar 1,37 persen.
12. Pada bulan Desember 2017 di Kota Bukittinggi terjadi inflasi sebesar 0,37 persen. Laju inflasi tahun kalender Kota Bukittinggi sampai Desember 2017 sebesar 1,37 persen dan laju inflasi year on the year (Maret 2017 terhadap Maret 2016) sebesar 1,37 persen.
13. Perkembangan Inflasi Kota Bukittinggi Januari – Desember 2017



Tingkat Inflasi di Kota Bukittinggi sejak bulan Januari - Desember 2017 menunjuk penurunan angka inflasi, hal tersebut menunjukkan bahwa harga harga komoditas kebutuhan pokok tidak mengalami gejolak yang berarti dan berada pada tingkat yang stabil.

Terkait tingkat inflasi di Kota Bukittinggi yang mengalami penurunan sejak bulan Januari - Desember 2017 maka tingkat inflasi yang rendah dan stabil di Kota Bukittinggi harus tetap terjaga. Untuk itu Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Bukittinggi harus tetap berkoordinasi dalam melaksanakan upaya upaya pengendalian Inflasi di Kota Bukittinggi.

TUJUAN 5.5 : MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KOTA BUKITTINGGI



Tujuan kelima pada misi 5 ini memiliki satu sasaran strategis Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS 5.5.1

Terkendalinya Jumlah Penduduk

Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 5.5.1 terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja utama, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini :

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN 5.5.1

No	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,55	1,56	100%
Rata-rata Capaian Indikator				100%

Dari tabel dapat dilihat, rata-rata capaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis sebesar **100%**. Sesuai dengan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan, keberhasilan pencapaian sasaran Strategis termasuk kategori **sangat baik**.

26. Laju Pertumbuhan Penduduk

26.1. Perbandingan Target Realisasi

$$\text{Laju Pertumbuhan Penduduk} = \frac{\text{perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah}}{\text{tertentu setiap tahunnya 1,56}}$$

Kondisi dan perkembangan demografi berperan penting dalam perencanaan pembangunan. Penduduk merupakan modal dasar keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Komposisi dan distribusi penduduk akan mempengaruhi struktur ruang, kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Seluruh aspek pembangunan memiliki korelasi dan interaksi dengan kondisi kependudukan yang ada, sehingga informasi tentang demografi memiliki posisi strategis dalam penentuan kebijakan.

Kota Bukittinggi terdiri atas 3 kecamatan dengan 24 kelurahan. Dengan jumlah 3 kecamatan ini penduduk Kota Bukittinggi Tahun 2018 berjumlah 124.715 jiwa.



Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Bukittinggi

NO.	TAHUN	JUMLAH PENDUDUK (Jiwa)			LAJU PERTUMBUHAN
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
1.	2010	56.224	55.768	112.010	1,93
2.	2011	54.922	58.625	113.547	1,93
3.	2012	55.276	59.117	114.393	1,93
4.	2013	57.261	60.999	118.260	1,88
5.	2014	62.025	61.385	123.410	1,88
6.	2015	62.094	61.514	123.608	1,77
7.	2016	60.503	64.212	124.715	1,71
8.	2017	61.588	65.216	126.804	1,68
9.	2018	62.484	66.299	128.783	1,56

Sumber: Bukittinggi Dalam Angka, 2018

Laju Pertumbuhan Penduduk pada tahun 2018 adalah sebesar 1,56. Proyeksi Penduduk menurut Jenis Kelamin Dan Kelompok Umur Kota Bukittinggi 2015-2020, dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini.

Proyeksi Jumlah penduduk menurut kelompok Umur



PROYEKSI PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK UMUR KOTA BUKITINGGI 2015-2020.

KELOMPOK UMUR	2015			2016			2017		
	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH
0-4	6.391	6.247	12.638	6.400	6.249	12.649	6.409	6.245	12.654
5-9	5.780	5.669	11.449	5.871	5.767	11.638	5.950	5.844	11.794
10-14	4.986	4.926	9.912	5.083	5.005	10.088	5.171	5.091	10.262
15-19	5.837	7.223	13.966	5.921	7.305	13.226	6.000	7.376	13.376
20-24	5.640	7.564	13.204	5.731	7.676	13.407	5.844	7.796	13.640
25-29	5.246	5.134	10.380	5.251	5.180	10.431	5.263	5.227	10.490
30-34	4.515	4.561	9.076	4.655	4.612	9.267	4.772	4.665	9.437
35-39	4.372	4.283	8.655	4.390	4.336	8.726	4.426	4.384	8.810
40-45	3.863	3.977	7.840	3.966	4.071	8.037	4.060	4.157	8.217
46-49	3.524	3.406	6.930	3.628	3.479	7.107	3.736	3.563	7.299
50-54	2.884	2.819	5.703	2.941	2.863	5.804	3.005	2.912	5.917
55-59	2.381	2.458	4.839	2.450	2.548	4.998	2.505	2.616	5.121
60-64	1.681	1.691	3.372	1.788	1.798	3.586	1.890	1.915	3.805
65-69	999	1.131	2.130	1.074	1.200	2.274	1.166	1.279	2.445
70-74	661	896	1.557	674	896	1.570	689	899	1.588
75 +	659	1.211	1.870	680	1.227	1.907	702	1.247	1.949
JUMLAH	59.419	63.202	122.621	60.503	64.212	124.715	61.588	65.216	126.804
KK			29.690			30.197			30.703
1 KK=4,13 Jiwa			(29.156)			1.041			1.547
			534						
KEPADATAN			4.858			4.941			5.024
			(4774)						

2018			2019			2020		
L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH
6.395	6.251	12.646	6.395	6.240	12.635	6.387	6.231	12.618
6.000	5.920	11.920	6.050	5.970	12.020	6.062	5.987	12.049
5.256	5.192	10.448	5.348	5.282	10.630	5.445	5.380	10.825
6.047	7.443	13.490	6.119	7.508	13.627	6.214	7.599	13.813
5.947	7.928	13.875	6.065	8.049	14.114	6.168	8.173	14.341
5.264	5.259	10.523	5.285	5.283	10.568	5.329	5.315	10.644
4.875	4.742	9.617	4.980	4.817	9.797	5.038	4.865	9.903
4.442	4.435	8.877	4.514	4.479	8.993	4.605	4.531	9.136
4.140	4.246	8.386	4.173	4.313	8.486	4.205	4.383	8.588
3.835	3.655	7.490	3.942	3.740	7.682	4.041	3.818	7.859
3.069	2.968	6.037	3.147	3.023	6.170	3.228	3.085	6.313
2.545	2.674	5.219	2.593	2.722	5.315	2.645	2.776	5.421
1.074	2.037	4.011	2.054	2.139	4.193	2.119	2.222	4.341
1.264	1.370	2.634	1.364	1.470	2.834	1.456	1.583	3.039
707	914	1.621	742	936	1.678	793	971	1.765
724	1.265	1.989	748	1.283	2.031	770	1.299	2.069
62.484	66.299	128.783	63.519	67.254	130.773	64.505	68.218	132.723
		31.182			31.664			32.136
		2.026			2.508			2.980
		5.102			5.177			5.259



Pertumbuhan Penduduk atau Dinamika Penduduk adalah perubahan / pertumbuhan jumlah penduduk dari waktu ke waktu, hal ini disebabkan karena adanya peristiwa kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. (ketiga hal tersebut dikenal dengan istilah unsur-unsur dinamika penduduk.) Pertumbuhan penduduk secara umum dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu pertumbuhan alami, pertumbuhan migrasi, dan pertumbuhan penduduk total.

Pertumbuhan Penduduk Total adalah pertumbuhan penduduk yang disebabkan oleh faktor kelahiran, kematian, dan migrasi. Pertumbuhan penduduk migrasi dapat dihitung dengan rumus berikut ini : $P = (L - M) + (I - E)$ (P = Pertumbuhan penduduk total L = Jumlah kelahiran M = Jumlah kematian I = Jumlah imigrasi E = Jumlah emigrasi)

1. **Tingkat kelahiran (fertilitas)** adalah tingkat penambahan jumlah anak atau tingkat kelahiran bayi pada suatu periode tertentu. Tingkat kelahiran bayi dapat dihitung dengan dua cara, yaitu:

a. Angka Kelahiran Kasar (Crude Birth Rate/CBR), adalah angka kelahiran yang menunjukkan jumlah kelahiran perseribu penduduk dalam suatu periode.

Angka Kelahiran Kasar (CBR) menunjukkan banyaknya kelahiran pada tahun tertentu per 1000 penduduk pada pertengahan tahun yang sama. Angka kelahiran kasar di Kota Bukittinggi mengalami penurunan per lima tahunan dari 20,6 kelahiran per 1000 penduduk pada Tahun 2010 (SP 2000) menjadi 18,3 kelahiran per 1000 penduduk Tahun 2015 (SP 2010), pada Tahun 2020 menjadi 17,2 kelahiran per 1000 penduduk, Tahun 2025 menjadi 16,5 kelahiran per 1000 penduduk, dan pada Tahun 2030 menjadi 15,4 kelahiran per 1000 penduduk yang pada akhirnya menjadi 14,2 kelahiran per 1000 penduduk pada Tahun 2035 (hasil proyeksi data BPS).

b. Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)

TFR adalah jumlah anak yang akan dipunyai seorang wanita selama masa reproduksinya per 1000 wanita. Asumsi yang digunakan yaitu tidak ada seorang perempuan pun yang meninggal sebelum mengakhiri masa reproduksinya dan tingkat fertilitas menurut umur tidak berubah pada periode waktu pengukuran. TFR merupakan pengukuran yang menyatakan fertilitas pada akhir masa reproduksi dari suatu kohor perempuan. Keunggulan TFR adalah angka ini dapat dijadikan ukuran kelahiran untuk seorang perempuan selama masa



reproduksinya dan telah memperhitungkan tingkat kesuburan perempuan pada masing-masing kelompok umur.

Tren TFR di Kota Bukittinggi menurut Proyeksi Data BPS SP 2010 (Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk Kota Bukittinggi Tahun 2010-2035) semakin menurun, dan sasaran fertilitas diarahkan pada pencapaian kondisi Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) pada tahun 2025 yang ditandai dengan TFR sebesar 2,1 anak per wanita usia subur.

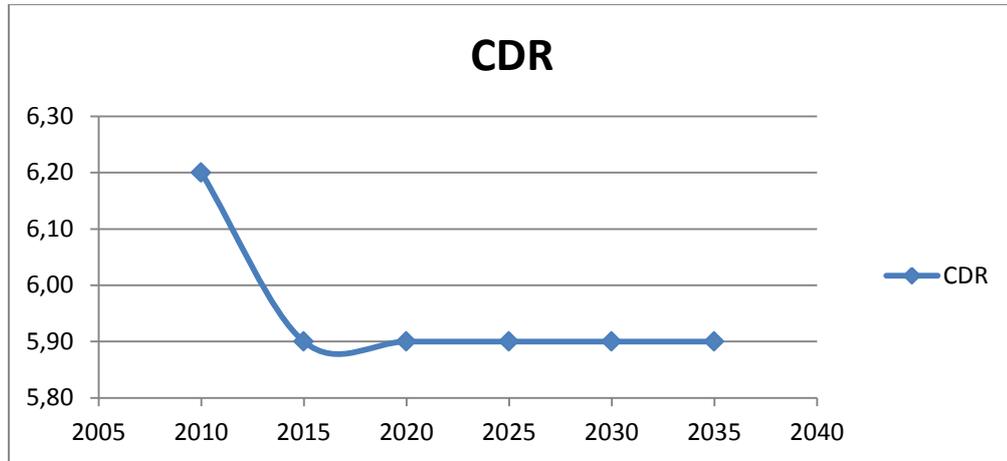
Angka Kelahiran Umum (General Fertility Rate/GFR), adalah angka yang menunjukkan jumlah bayi yang lahir dari setiap 1000 wanita pada usia reproduksi atau melahirkan yaitu pada kelompok usia 15-49 tahun.

2. **Tingkat kematian (mortalitas)** merupakan pengurangan jumlah penduduk pada periode tertentu yang disebabkan oleh faktor kematian. Tingkat kematian dapat diketahui melalui tiga cara, yaitu:

a. Tingkat Kematian Kasar (Crude Death Rate/CDR), adalah angka yang menunjukkan rata-rata kematian perseribu penduduk dalam satu tahun.

Angka kematian kasar dipengaruhi oleh komposisi penduduk menurut umur. Untuk kondisi Indonesia dengan struktur umur penduduk relative muda, angka kematian kasar banyak dipengaruhi oleh tingkat kematian anak, terutama yang berumur di bawah 1 tahun. Tingkat kematian umur di bawah 1 tahun dikenal dengan angka kematian bayi (AKB), yang mempunyai hubungan erat dengan angka harapan hidup waktu lahir (AHH). Perubahan AKB berpengaruh pada AHH dan AKK, yang secara teoritis turunya AKB menyebabkan turunya Angka Kematian Kasar (AKK) dan naiknya AHH. Dari data BPS (SP 2010) tahun 2010 angka kematian kasar di Kota Bukittinggi 6,30 menurun sampai kondisi Tahun 2035 yaitu di angka 5,90. Dapat terlihat trennya pada gambar 2. dibawah ini.

Tren Angka Kematian Kasar (*Crude Death Rate/CDR*) Kota Bukittinggi Tahun 2010-2035



- b. Tingkat Kematian Menurut Umur (Age Specific Death Rate/ASDR), adalah angka yang menunjukkan banyaknya kematian pada kelompok umur tertentu perseribu penduduk dalam kelompok yang sama.

Angka Kematian Bayi (Infant Mortality Rate/IMR)

Angka kelangsungan hidup bayi merefleksikan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan anak-anak bertempat tinggal termasuk kesehatannya. Indikator yang terkait langsung dengan angka kelangsungan hidup bayi adalah angka kematian bayi yaitu suatu angka yang menunjukkan jumlah anak yang dilahirkan pada tahun tertentu dan meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun dinyatakan sebagai angka per 1000 kelahiran hidup. Angka kematian bayi Kota Bukittinggi dapat terlihat pada tabel berikut :

Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Kota Bukittinggi

Tahun	Jumlah Kematian bayi usia di bawah 1 tahun	Jumlah Kelahiran hidup	AKB	AKHB
2010	12	2059	5,8	4,8
2011	10	2271	4,4	3,4
2012	10	2320	4,3	3,3
2013	19	2338	8,1	7,1
2014	19	2405	7,9	6,9



2015	26	2407	10,8	9,8
2016	17	2456	6,92	5,92
2017	7	2427	2,85	
2018	3	2460	1,2	

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi

Dari data yang ada maka di Kota Bukittinggi angka kelangsungan hidup bayi dari tahun ketahun dapat ditingkatkan. Ini artinya ibu-ibu hamil mampu menjaga kehamilan sehingga bayi lahir sehat dan selamat Bagi anak yang berusia di atas 1 bulan program imunasi anak berjalan dengan baik sehingga ibu dan bayi tumbuh sehat penuh gizi.

- **Angka Kematian Anak Balita (AKABA)**

Angka kematian Anak Balita (AKABA) adalah jumlah kematian anak umur 12-59 bulan (1-<5th) per 1.000 kelahiran hidup pada periode waktu tertentu. AKABA dapat menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan serta faktor lain yang mempengaruhi terhadap kesehatan anak balita seperti gizi, sanitasi lingkungan, tingkat pelayanan KIA/Posyandu, penyakit infeksi dan kecelakaan.

AKABA di Kota Bukittinggi pada Tahun 2018 menurut laporan bersumber Dinas Kesehatan yaitu 1 (satu) anak.

- **Angka Kematian Ibu Maternal Dinas Kesehatan**

Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan derajat kesehatan masyarakat. AKI menggambarkan jumlah wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42



hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.

Angka kematian ibu mencerminkan resiko yang dihadapi ibu selama kehamilan dan melahirkan yang dipengaruhi oleh :

- a. Keadaan sosial ekonomi dan kesehatan yang kurang baik menjelang kehamilan;
- b. Kejadian berbagai komplikasi pada kehamilan dan kelahiran;
- c. Tingkat tersedianya dan penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan perinatal dan obstetri.

Menurut Data Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi Tahun 2015, jumlah kematian ibu maternal di Kota Bukittinggi Tahun 2015 adalah 7 (tujuh) jiwa dan tahun 2016 adalah 3 jiwa, Tahun 2017 adalah 1 (satu) jiwa dan tahun 2018 adalah 2 (dua) jiwa). Upaya penurunan angka kematian ibu dan angka kematian neonatal melalui Program EMAS dilakukan dengan cara :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan emergensi obstetri dan bayi baru lahir minimal di 300 Puskesmas (PONED);
- b. Memperkuat sistem rujukan yang efisien dan efektif antar puskesmas dan rumah sakit.

- **Angka Harapan Hidup (AHH)**

Angka harapan hidup didefinisikan sebagai rata rata perkiraan banyaknya tahun yang dapat di tempuh oleh seseorang sejak lahir. Di kota Bukittinggi terlihat AHH tahun 2010 sebesar 73,10 , tahun 2011 73,11 dan tahun 2012 s/d 2014 sebesar 73,12, dan tahun 2015 menjadi 73,52, dan tahun 2016 menjadi 73.60, Tahun 2018 73,69. Jika kita simak dan bandingkan lagi angka harapan hidup di Kota Bukittinggi dengan kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Barat dan Nasional , terlihat AHH Kota Bukittinggi adalah 73,69 namun jika dibandingkan dengan AHH Propinsi Sumbar maka Bukittinggi masih di atas rata rata propinsi dan bahkan diatas rata rata nasional, yakni 69,87.

- **Penyebab Kematian**



Kematian atau ajal adalah akhir dari kehidupan, ketiadaan nyawa dalam organisme biologis. Semua makhluk hidup pada akhirnya akan mati secara permanen, baik karena penyebab alami seperti penyakit atau karena penyebab tidak alami seperti kecelakaan. Sedangkan morbiditas adalah angka kesakitan, baik insiden maupun prevalen dari suatu penyakit. Morbiditas menggambarkan kejadian penyakit dalam suatu populasi pada kurun waktu tertentu. Morbiditas juga berperan dalam penilaian terhadap derajat kesehatan masyarakat.

Angka kematian Bayi
Angka kematian Bayi dilihat pada tahun 2018 adalah sebanyak 3 (tiga) orang. *(Data DKK 2018)*

3. Migrasi atau mobilitas penduduk adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain.

Berdasarkan Data Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, angka migrasi risen baik keluar maupun masuk mengalami peningkatan. Migrasi risen masuk pada Tahun 2012 sebesar 1.336 jiwa, naik menjadi 3.058 jiwa pada tahun 2015. Sedangkan data migrasi risen keluar pada tahun 2012 adalah 702 jiwa, naik menjadi 4.039 jiwa pada tahun 2015.

Pada tahun 2018 tingkat kepadatan penduduk masih terjadi di Kecamatan Guguk Panjang yaitu 6.375 jiwa per km², dan kec. ABTB dengan 4.231 jiwa per km², diikuti oleh kec. Mks dengan 4.243 jiwa per km².

Upaya yang dilakukan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk.

Adapun usaha-usaha yang dilakukan pemerintah dalam menekan laju pertumbuhan penduduk antara lain meliputi hal-hal berikut ini.

1. **Meningkatkan pelayanan kesehatan dan kemudahan dalam menjadi akseptor Keluarga Berencana.**

Dinas P3APKB Kota Bukittinggi melakukan upaya untuk menekan laju pertumbuhan Penduduk dengan cara :



- a. Meningkatkan layanan KIE kepada masyarakat melalui berbagai model seperti, KIE perorangan , KIE Kelompok, KIE Media Masa dan KIE Melalui Luar ruang yaitu MUPEN.
- b. Meningkatkan layanan Kesehatan dan kemudahan dalam menjadi Akseptor Keluarga Berencana.
- c. Mempermudah dan meningkatkan pelayanan dalam bidang KIE Pendidikan, sehingga keinginan untuk segera menikah dapat dihambat.
- d. Meningkatkan Sosialisasi Sekolah Siaga Kependudukan dalam upaya mewujudkan yujuan program pendidikan kependudukan yakni; peningkatan pengetahuan, sikap, perilaku masyarakat, terutama generasi muda dalam partisipasi dan peran serta pada program KKBPK kepada Siswa SLTP dan SLTA se Kota Bukittinggi.
- e. Meningkatkan SDM Kader melalui fasilitasi BKB Kit, Genre KIT, BKL Kit agar lebih ahli dalam memberikan informasi ketengah masyarakat.
- f. Kesertaan ber KB / Pasangan Usia Subur

Pasangan Usia Subur adalah pasangan suami-istri yang istrinya berumur antara 15–49 tahun, dan secara operasional pula pasangan suami-istri yang istri berumur kurang dari 15 tahun dan telah kawin atau istri berumur lebih dari 49 tahun tapi belum menopause (BKKBN, 2007). Tingkat kesertaan ber-KB diukur dari angka persentase PUS yang menjadi peserta KB. Jumlah PUS di Tahun 2011 mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu 16.007 pasang dan seterusnya meningkat sampai Tahun 2015 sebesar 16.385 pasang, dan tahun 2016 menjadi 16.538 pasang. Jumlah PUS di Kota Bukittinggi Tahun 2017 menjadi 16.455 pasang yang berarti terjadi penurunan PUS dari tahun 2016 sebanyak 83 pasang. Tahun 2018 Pasangan Usia Subur di Kota Bukittinggi sebanyak 16.421 pasang yang berarti berkurang sebanyak 34 pasang.

- **Contraceptive Prevalence Rate dan Mix Kontrasepsi**

- **Pengetahuan Mengenai Alat/Cara KB**

Pengetahuan tentang metode kontrasepsi untuk semua wanita, wanita pernah kawin dan pria berstatus kawin. Hampir semua wanita dan wanita pernah kawin di Indonesia (98 persen dan 99 persen) pernah mendengar dan mengetahui



paling tidak satu alat/cara KB. Persentase ini relatif tidak mengalami perubahan yang signifikan sejak SDKI 2007.

- **Pemakaian kontrasepsi dan kecenderungannya**

Program Keluarga Berencana berkaitan dengan dapat ditekannya angka kematian ibu dan anak dan dapat mempengaruhi Pertumbuhan ekonomi. Memiliki anak lebih sedikit dan lebih sehat dapat mengurangi beban ekonomi pada keluarga miskin, dan memungkinkan mereka menginvestasikan sumberdayanya dalam pengasuhan, perawatan dan sekolah anak, sehingga nantinya dapat memutuskan mata rantai kemiskinan. Investasi KB juga membuka “*a window of opportunity*” (jendela kesempatan) bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat melalui penurunan fertilitas dan perubahan struktur umur populasi dan angka ketergantungan (dependency ratio). Perencanaan jumlah keluarga dengan pembatasan yang bisa dilakukan dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran seperti kondom, spiral, IUD, dan sebagainya.

- **Pencapaian tahun 2018.**

Berdasarkan pencapaian tahun 2018 dan target PPM tahun 2018 sebanyak 3.570, dapat kita lihat perbandingan pencapaian tahun 2018 ini sebagai berikut :

1. Jumlah pencapaian Peserta KB Baru sampai dengan Desember 2018 adalah sebanyak 3.581 akseptor atau sebanyak 100.31 % dari PPM, ($(3581 : 3.570) \times 100 \% = 100,31 \%$).
2. Akseptor tersebut dibagi dalam alat kontrasepsi sebagai berikut:
 - IUD sebanyak 1.014 Akseptor
 - MOW sebanyak 176 Akseptor
 - MOP sebanyak 4 Akseptor
 - Kondom sebanyak 258 Akseptor
 - Implan sebanyak 1017 Akseptor
 - Suntik sebanyak 4025 Akseptor
 - Pil sebanyak 1029 Akseptor



2. Selanjutnya dari 16.421 Pasangan Usia Subur yang tercatat pada tahun 2018 ini Pencapaian Peserta KB Aktif adalah sejumlah 10.604 peserta dengan perincian, IUD sebanyak 3.226 peserta, MOW 484 peserta, MOP 70 Peserta, Kondom 753 peserta, Implan sebanyak 1017 Peserta, Suntik sebanyak 4.025 peserta dan Pil sebanyak 1.029 peserta. Sehingga dapat ditampilkan bahwa pencapaian Peserta KB Aktif Kota Bukittinggi tahun 2018 adalah sebanyak 64,58 %.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2. 1. VISI DAN MISI

2.1.2 VISI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi tahun 2016 – 2021, dinyatakan bahwa visi daerah adalah:

VISI

“TERWUJUDNYA BUKITTINGGI KOTA TUJUAN PARIWISATA, PENDIDIKAN, KESEHATAN, PERDAGANGAN DAN JASA, BERLANDASKAN NILAI AGAMA DAN BUDAYA”

Makna yang terkandung dari visi di atas, adalah sebagai berikut:

7. Bukittinggi kota tujuan pariwisata mempunyai makna bahwa Bukittinggi merupakan salah satu sentral wisata di wilayah Indonesia bagian barat yang disemangati dengan budaya yang bermartabat, masyarakat yang religius, kegiatan perdagangan yang maju, alam yang indah, kuliner yang berkelas, tertata, bersih dan sehat.
8. Bukittinggi kota pendidikan mengandung makna bahwa Bukittinggi mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas dan mempunyai daya saing yang tinggi.
9. Bukittinggi kota kesehatan mengandung makna bahwa masyarakat kota Bukittinggi mempunyai lingkungan yang sehat dengan derajat kesehatan yang tinggi dan sentra pelayanan kesehatan daerah sekitarnya
10. Bukittinggi kota perdagangan dan jasa mengandung makna bahwa semua pelaku ekonomi mempunyai jiwa kewirausahaan yang berdaya saing tinggi
11. Bukittinggi sebagai kota yang berlandaskan nilai-nilai agama mengandung makna bahwa masyarakat Bukittinggi menjadikan agama sebagai landasan dalam tata-tatanan kehidupan bermasyarakat dan berusaha.
12. Bukittinggi sebagai kota yang beradab dan berbudaya mengandung makna dalam menjalankan kehidupan sehari-hari berdasarkan filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah

2.1.3. MISI



Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2016-2021 ditetapkan sejalan dengan RPJPD Kota Bukittinggi. Ada 5 Misi yang telah ditetapkan sebagai perwujudan dan penjabaran dari Visi. Adapun Misi dimaksud adalah sebagai berikut:

MISI

6. Mengembangkan dan memberdayakan partisipasi berbagai potensi pemangku kepentingan (Pemerintah, Dunia usaha dan Masyarakat).
7. Meningkatkan kinerja Pemerintahan secara profesional, transparan, akuntabel dan mempunyai jiwa kewirausahaan.
8. Meningkatkan pembangunan, penataan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana secara terpadu dan berwawasan lingkungan.
9. Mengembangkan sistem ekonomi perkotaan secara lebih berdaya guna.
10. Meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa serta kesejahteraan sosial masyarakat

2.1.3. PERENCANAAN KINERJA

Tahun 2017 merupakan tahun kedua implementasi RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2021, yang penyusunannya dilakukan melalui penyempurnaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017, dimana pada waktu penyusunan awalnya masih memperhatikan RKPD yang lama. Dengan ditetapkannya RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2021, dilakukan penyempurnaan perencanaan tahunan dimaksud, berikut Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

Prioritas Pembangunan Kota Bukittinggi tahun 2018 berdasarkan RPJMD Kota Bukittinggi tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut:

10. Pembangunan mental, Penerapan ajaran agama, adat dan budaya;
11. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik;
12. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan



13. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
14. Pengembangan Pariwisata
15. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)
16. Penanggulangan Kemiskinan
17. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur
18. Pelestarian lingkungan hidup

2.3. PENETAPAN KINERJA PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2018

Dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018 yang telah ditetapkan berpedoman pada RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018, dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bukittinggi.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET
1	2		3		4
1	Melibatkan Pemangku kepentingan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah	a	Persentase usulan pemangku kepentingan yang diakomodir dalam Perencanaan Pembangunan	%	90
2	Meningkatnya dukungan pembiayaan pemangku kepentingan dalam pembangunan		Rasio Corporate Social Responsibility dengan Belanja Langsung APBD dalam pembiayaan	%	1,75



			Pembangunan		
3	Terlaksananya reformasi birokrasi	a	Nilai SAKIP	nilai	BB
		b	Peringkat LPPD	peringkat	40
		c	Indeks RB	nilai	B
		d	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	nilai	WTP
		e	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan public	%	75
4	Terpenuhinya RTH Kota	A	Persentase RTH Publik	%	14
5	Fasilitas publik yang memenuhi standar lingkungan	a	Persentase fasum yang representatif dan memenuhi standar lingkungan	%	65
6	Pemenuhan target universal access (sanitasi, air bersih dan permukiman kumuh)	a	Persentase Penyediaan air minum layak	%	90
		b	Kawasan Kumuh	ha	6
		c	Persentase sanitasi layak	%	95



7	Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Kota	a	Kesesuaian pemanfaatan ruang kota	%	65
8	Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi	a	Pertumbuhan ekonomi	%	6,30
		b	PDRB Perkapita	jumlah	53,25 juta
		c	Indeks Gini	jumlah	<0,3
		d	Jumlah Investasi	%	40
9	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	a	Tingkat Kemiskinan	nilai	3,5
10	Meningkatkan pelayanan pariwisata	a	Kunjungan Wisatawan	jumlah	533.555 orang
11	Meningkatnya akses layanan bidang pendidikan	a	Harapan lama sekolah	%	14,9
12	Meningkatkan kualitas pendidikan	a	Persentase Sekolah yang berakreditasi A tingkat SD	%	78,50
		b	Persentase Sekolah yang berakreditasi A tingkat SMP	%	70,75
13	Peningkatan kualitas layanan kesehatan	a	Angka Harapan Hidup	%	72,85
14	Meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan serta sumber daya kesehatan	a	Persentase Puskesmas yang terakreditasi	%	70



15	Terjaganya stabilitas harga	a	Tingkat Inflasi	%	5
16	Terkendalnya jumlah penduduk	a	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,55



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018 merupakan Perwujudan kewajiban Pemerintah Kota Bukittinggi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber dana lainnya, dalam rangka mencapai misi pemerintah daerah secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2017. Akuntabilitas Kinerja ini mencakup 17 sasaran strategis dengan 26 indikator kinerja.

3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja

Pengukuran Kinerja merupakan pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2017. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Bukittinggi serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis diukur dengan capaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini.

Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan



Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2017

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	85% - 100%	Sangat Baik
2	69% - 84%	Baik
3	53% - 68%	Cukup
4	<53%	Gagal

3.2. Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil pengukuran capaian target indikator, dari 16 sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2017, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISAI	%
1	Melibatkan Pemangku kepentingan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah	1 Persentase usulan pemangku kepentingan yang diakomodir dalam Perencanaan Pembangunan	90%	98%	108,8%
2	Meningkatnya dukungan pembiayaan pemangku kepentingan dalam pembangunan	2 Rasio Corporate Social Responsibility dengan Belanja Langsung APBD dalam pembiayaan Pembangunan	1,75%	1,58%	105%
3	Terlaksananya reformasi birokrasi	3 Nilai SAKIP	BB	BB	100%
		4 Peringkat LPPD	40	29	137,9%
		5 Indeks RB	B	BB	125%



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET	REALISAI	%
		6	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP	WTP	100%
		7	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan public	75%	87,35%	116%
4	Terpenuhinya RTH Kota	8	Persentase RTH Publik	14%	1,079%	7,7%
5	Fasilitas Publik yang memenuhi standar lingkungan	9	Persentase Fasum yang representative dan memenuhi standar lingkungan	65%	67,94%	104
6	Pemenuhan target universal access (sanitasi, air bersih dan permukiman kumuh)	10	Persentase Penyediaan air minum layak	90%	92	102
7	Pemenuhan target universal access (sanitasi, air bersih dan permukiman kumuh)	11	Kawasan Kumuh	6 ha	8,2 ha	73
		12	Persentase sanitasi layak	95%	96	101
8	Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Kota	13	Kesesuaian pemanfaatan ruang kota	65%	60%	93
9	Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi	14	Pertumbuhan ekonomi	6,30%	6,04	95
		15	PDRB Perkapita	53,25 juta	58,73	110
		16	Indeks Gini	<0,3	0,32	93
		17	Jumlah Investasi	40%	27%	67



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET	REALISAI	%
10	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	18	Tingkat Kemiskinan	3,5	5,48	68
11	Meningkatkan pelayanan pariwisata	19	Kunjungan Wisatawan	533.555	577.857	108
12	Meningkatnya akses layanan bidang pendidikan	20	Harapan lama sekolah	14,9	14,92	100,8
13	Meningkatkan kualitas pendidikan	21	Persentase Sekolah yang berakreditasi A tingkat SD	78,50%	72,88	92,8
		22	Persentase Sekolah yang berakreditasi A tingkat SMP	70,75%	61,53	86,9
14	Peningkatan kualitas layanan kesehatan	23	Angka Harapan Hidup	72,85	72,88	92,8
15	Meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan serta sumber daya kesehatan	24	Persentase Puskesmas yang terakreditasi	70	61,53	86,9
16	Terjaganya stabilitas harga	25	Tingkat Inflasi	5	1,37	437,9
17	Terkendalnya jumlah penduduk	26	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,55	1,56	100

Dari tabel diatas dapat dilihat, capain rata-rata dari 25 indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian 15 sasaran strategis yang ditetapkan tahun 2017 sebesar 115,99% Sesuai dengan Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan **Sangat baik**.

3.3. Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil capaian terhadap pengukuran indikator kinerja Kota Bukittinggi Tahun 2017 yang telah dicantumkan pada tabel pengukuran kinerja, selanjutnya pada sub bab ini disajikan



analisis capaian kinerja per sasaran strategis untuk mewujudkan masing-masing misi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

MISI I : MENGEMBANGKAN DAN MEMBERDAYAKAN PARTISIPASI BERBAGAI POTENSI PEMANGKU KEPENTINGAN (PEMERINTAH, DUNIA USAHA, DAN MASYARAKAT)

Sesuai Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2017, misi ini dicapai melalui 1 tujuan dan 2 sasaran strategis yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan pada seluruh SKPD terkait. Adapun tujuan dan sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

No	Tujuan	No	Sasaran Strategis
1.1	Meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan dalam pembangunan	1.1.1	Melibatkan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah
		1.1.2	Meningkatnya dukungan pembiayaan pemangku kepentingan dalam pembangunan

Analisis terhadap capaian sasaran strategis pada misi 1 akan dibahas berdasarkan capaian terhadap indikator kinerja masing-masing sasaran pada masing-masing tujuan sebagai berikut:

TUJUAN 1.1 : MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PEMBANGUNAN

Tujuan pertama pada misi 1 ini terdiri dari sasaran strategis sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS 1.1.1

Melibatkan Pemangku Kepentingan Dalam Proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah

Capaian sasaran strategis 1.1.1 ini diukur berdasarkan capaian terhadap satu Indikator Kinerja utama seperti pada tabel dibawah ini :



CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN 1.1.1

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase usulan pemangku kepentingan yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	90%	98%	108,8%
Rata-rata Capaian				108,8%

Dari tabel dapat dilihat, rata-rata capaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis sebesar 108,8%. Sesuai dengan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan, keberhasilan pencapaian sasaran Strategis termasuk kategori **sangat baik**.

2. PERSENTASE USULAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PROSES PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

8. 1. Perbandingan Target Realisasi

$$\begin{array}{l} \text{Persentase usulan pemangku} \\ \text{kepentingan dalam proses} \\ \text{penyusunan perencanaan} \\ \text{pembangunan daerah} \end{array} = \begin{array}{l} \text{jumlah usulan pemangku kepentingan} \\ \text{yang diakomodir pada RKPD/ Jumlah} \\ \text{usulan pemangku kepentingan} \\ \text{musrenbang dan lainnya} = 98\% \end{array}$$

Proses pengusulan dari masyarakat sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan diantaranya adalah melalui musyawarah perencanaan pembangunan dan reses anggota DPRD, melalui proses musrenbang dilakukan secara bertingkat mulai dari kelurahan, kecamatan, tingkat kota hingga nasional. Usulan masyarakat yang termuat dalam RKPD Kota Bukittinggi adalah yang akan dibiayai dengan anggaran daerah, sementara yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi maupun nasional diajukan melalui mekanisme musrenbang tingkat provinsi. Pada tahun 2018 Pemerintah Kota Bukittinggi telah menyediakan instrumen yang tepat untuk menyeleksi aspirasi masyarakat baik melalui musrenbang maupun reses dewan.

Kriteria yang digunakan adalah melalui penyesuaian dengan prioritas daerah, kemampuan fiskal, kewenangan pemerintah dan mendorong keterlibatan masyarakat secara langsung untuk pengadaan barang dan jasa terutama yang tidak bisa dianggarkan daerah sesuai ketentuan pengelolaan keuangan, berdasarkan hal tersebut seluruh usulan



masyarakat yang sampai ke tingkat musrenbang kota sudah dapat ditampung dalam RKPD Kota Bukittinggi sebanyak 100%, sementara usulan yang tidak termasuk kriteria yang ditetapkan disepakati dilaksanakan melalui partisipasi masyarakat dalam bentuk swadaya. Usulan yang terkait dengan pemerintah provinsi maupun nasional dilakukan dengan penyesuaian dengan rencana pembangunan kota yang diusulkan untuk dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan nasional dan disampaikan melalui mekanisme musrenbang tingkat provinsi.

8.2. Realisasi Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi Capaian Kinerja Persentase usulan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tahun	Persentase usulan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah
	Capaian Kinerja
2017	125%
2018	108%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian realisasi dari Persentase usulan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah Kota Bukittinggi telah sesuai dengan target yang diharapkan sesuai target perjanjian kinerja pada tahun masing-masing yang telah berjalan. Semenjak awal RPJMD tahun 2016 telah diperoleh Persentase usulan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah Kota Bukittinggi sesuai dengan target RPJMD yang telah ditetapkan.

8.3. Realisasi Capaian Target Dari Awal RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan

Realisasi capaian indikator Persentase usulan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah Kota Bukittinggi dibandingkan dengan target akhir RPJMD :



INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD	REALISASI TAHUN 2018	KONDISI AKHIR RPJMD
Persentase usulan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah	80%	98%	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Persentase usulan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah Kota Bukittinggi tahun 2018 dengan realisasi 98%, jika dibandingkan dengan kondisi akhir RPJMD dengan capaian 100% maka Pemerintah Kota Bukittinggi tengah berupaya meningkatkan kinerja pemerintah daerah dengan melakukan peningkatan dalam mengakomodir segala usulan dalam rangka perbaikan perencanaan pembangunan sehingga diharapkan pemerataan pembangunan disegala bidang.

8.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Indikator

Penyebab keberhasilan indikator Persentase usulan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah di Kota Bukittinggi berjalan dengan baik dikarenakan pemerintah kota bukittinggi telah membuat instrumen untuk mengarahkan usulan pembangunan kota sesuai dengan usulan masyarakat ditingkat kelurahan sesuai dengan prioritas pembangunan kota

Usulan langsung dibahas oleh skpd terkait sesuai dengan kewenangannya dan bagi yang diluar kewennnga pemerintah melalui skpd dicarikan solusinya melalui swadaya csr ataupun kegiatan manunggaldan untuk yang menjadi kewenagan provinsi dan pusat diajukan melaului mekanisme musrenabng procinsi sebagai usulan tingkat kota

Usulan masyarakat telah harus membuat pernataan kejelasan dan kepastian lahan dan program bisa dilaksanakan.

Pernyataan dari LPM bahwa mereka bertanggungjawab untuk mendukung secara moral sesuai dengan kewenangannya usulan tersebut dilaksanakan.

8.5. Analisis Penggunaan Sumber Daya



Penggunaan sumber daya dari indikator Persentase usulan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah

- Telah dibuat tim yang bertanggung jawab sebelum pelaksanaan musrenbang di tingkat kelurahan bahkan dirembuk warga dan bertanggung jawab atas pelaksanaan musrenbang dan bersama mengontrol agar usulan tidak keluar dari prioritas kota dan pagu logis kelurahan.
- Telah dilakukan penguatan LPM dan aparatur untuk bisa menyelenggarakan kegiatan serta menyeleksi kegiatan yang muncul dari rt rw dan kelurahan serta lembaga kemasyarakatan yang muncul.

8.6. Analisis Program/ Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator

Adapun kegiatan pendukung dari indikator Persentase usulan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah ini antara lain :

- Penyusunan Rancangan Dan Penetaan RKPD Kota Bukittinggi
- Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
- Penyusunan Perubahan RKPD Kota Bukittinggi 2018
- Monitoring Dan Evaluasi RKPD Kota Bukittinggi
- Monitoring Dan Evaluasi Pokok-Pokok Pikiran Dprd
- Evaluasi RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021
- Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan Daerah Tahun 2018-2021
- Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif
- Penyusunan Strategis Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kota Bukittinggi
- Penyusunan Revisi RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2006-2021

SASARAN STRATEGIS 1.1.2

Meningkatnya Dukungan Pembiayaan Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan

Capaian sasaran strategis 1.1.2 ini diukur berdasarkan capaian terhadap satu Indikator Kinerja utama seperti pada tabel dibawah ini :

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN 1.1.2



No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Rasio Corporate Social Responsibility dengan Belanja Langsung APBD dalam pembiayaan Pembangunan	1,5%	1,58%	105%
Rata-rata Capaian				105%

Dari tabel dapat dilihat, rata-rata capaian indikator kinerja sasaran strategis adalah sebesar 105%. Sesuai dengan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan, keberhasilan pencapaian sasaran Strategis termasuk kategori **sangat baik**.

Pencapaian kinerja indikator tersebut dihitung berdasarkan formulasi dan nilai capaian seperti rumus berikut ini.

9. RASIO CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DENGAN BELANJA LANGSUNG APBD DALAM PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

2.1. Perbandingan Target Realisasi

<i>Rasio Corporate Social Responsibility dengan Belanja Langsung APBD dalam pembiayaan Pembangunan</i>	<i>Jumlah anggaran CSR/ jumlah belanja langsung APBD</i>
<i>=</i>	<i>Rp. 7.071.571.909 /</i>
	<i>Rp. 446.972.085.273</i>
	<i>(1,58%)</i>

Data CSR 2018 rilis april 2018

Kegiatan/ pembangunan yang dibiayai melalui dana CSR tahun 2017 diantaranya :

17. Melalui Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi melalui PT. Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) dengan nilai Rp. 200.000.000,- dengan melakukan pembangunan wahana sepeda gantung di benteng fort de kock dan sedang dalam proses pemasangan oleh vendor telkomsel yakni PT. Alsindo Padang, dengan estimasi selesai pada pertengahan bulan Februari 2018, wahana permainan hammock di benteng fort de kock, pembuatan tema foto selfie tema (I U) di taman Panorama, Pembuatan spot foto selfie flower di panorama, dan pembuatan spot foto selfie love di panorama.



18. Melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dengan nilai 5.433.000,- oleh PT. PLN (Persero) dengan melakukan sambungan listrik gratis di Kleurahan Pula Anak Aia, Kelurahan Manggih Gantiang dan Kelurahan Ladang Cakiah sehingga ada 3 (tiga) unit rumah yang telah dibantu.
19. Melalui Dinas Lingkungan Hidup oleh PT. PLN (Persero) berupa mobil unit penyapu jalan dengan harga Rp. 1.448.700.000,-.
20. Melalui Dinas Lingkungan Hidup oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) berupa keranjang belanja sebanyak 10.000,- serta dari Bank Rakyat Indonesia sebanyak 200 buah, dan dari Bank Nagari sebanyak 800 buah dengan harga satuan keranjang Rp. 10.000,- dengan total Rp. 110.000.000,-
21. Melalui Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan yaitu bantuan pembangunan kios penampungan pasar atas (78 petak) oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Barat dan BAZNAS Kabupaten/ Kota se Sumatera Barat dengan total bantuan Rp 1.500.000.000,-, oleh Yayasan Padusi Minang (21 petak) dengan nilai Rp. 239.297.646, oleh PT. Semen Padang (44 petak) dengan nilai Rp. 500.000.000,- dan PT. Bank Nagari berupa pembangunan pagar pengaman pasar atas senilai Rp. 285.830.000,- dan pembangunan kios penampungan pasar atas (80 petak) Rp. 911.610.080,-, dari Bank BRI pembangunan kios (103 petak) Rp. 1.173.697.978,-, Bank Nagari BPD (25 petak) Rp. 284.878.150,-, Badan Musyawarah Perbankan Daerah Sumbar (25 petak) Rp. 45.580.504,-, PT. Jasa Raharja (11 petak) Rp. 125.346.386,-, dan PT. Taspen (14 petak) Rp. 159.531.764,-.
22. Melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan oleh PT. PLN melalui dana untuk pendidikan senilai Rp. 6.250.000,- ke SMAN 2 Bukittinggi.
23. Melalui Ikatan Keluarga Pensiun PLN oleh PT. PLN berupa sosialisasi keagamaan senilai Rp. 75.416.401,-.

Besaran Belanja Langsung pada APBD-P Kota Bukittinggi Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 446.972.085.273,- dengan dana CSR senilai Rp. 7.071.571.909,- dan persentase (perbandingan dengan belanja langsung dengan APBD 2017 1,58%. Dari target yang ditetapkan telah melebihi tingkat pencapaiannya.

9.2. Realisasi Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi Capaian Kinerja Rasio Corporate Social Responsibility dengan Belanja Langsung APBD dalam pembiayaan Pembangunan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



Tahun	Rasio Corporate Social Responsibility dengan Belanja Langsung APBD dalam pembiayaan Pembangunan
	Capaian Kinerja
2017	105%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian realisasi dari Rasio Corporate Social Responsibility dengan Belanja Langsung APBD dalam pembiayaan Pembangunan Kota Bukittinggi telah sesuai dengan target yang diharapkan sesuai terget perjanjian kinerja pada tahun berjalan.

9.3. Realisasi Capaian Target Dari Awal RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan

Realisasi capaian indikator Rasio Corporate Social Responsibility dengan Belanja Langsung APBD dalam pembiayaan Pembangunan Kota Bukittinggi dibandingkan dengan terget akhir RPJMD :

INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD	REALISASI TAHUN 2017	KONDISI AKHIR RPJMD
Rasio Corporate Social Responsibility dengan Belanja Langsung APBD dalam pembiayaan Pembangunan	1%	1,58%	2,5%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Rasio Corporate Social Responsibility dengan Belanja Langsung APBD dalam pembiayaan Pembangunan dari awal RPJMD dengan target 1% telah terealisasi sampai dengan tahun 2017 sebesar 1,58% dan untuk akhir masa RPJMD ditargetkan 2,5%. Pemerintah Kota Bukittinggi terus berupaya untuk membuka peluang bagi BUMN dan perusahaan swasta untuk meningkatkan pembangunan di Kota Bukittinggi.

9.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Indikator

Penyebab keberhasilan dari indikator Rasio Corporate Social Responsibility dengan Belanja Langsung APBD dalam pembiayaan Pembangunan Kota Bukittinggi dipengaruhi oleh :



- Pro aktif dari kepala daerah untuk menawarkan program pembangunan yang dibiayai oleh perusahaan baik perusahaan BUMN maupun perusahaan swasta lainnya
- Keterlibatan seluruh perusahaan mempromosikan layanan produk dan jasa
- Memberikan fasilitasi dalam bentuk perizinan dan layanan kewangan daerah yang dibutuhkan

9.5. Analisis Penggunaan Sumber Daya

Program yang akan di csr langsung dihandle setelah disetujui kepala daerah dan diakomodir secara berkala oleh perekonomian

9.6. Analisis Program/ Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator

Program dan kegiatan penunjang indikator ini langsung melekat dengan program kegiatan masing-masing SKPD yang diarahkan untuk melaksanakan csr dimonitor dengan kegiatan rutin yang ada di sekretariat daerah.

MISI II : MENINGKATKAN KINERJA PEMERINTAH SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN MEMPUNYAI JIWA KEWIRAUSAHAAN

Pencapaian misi 2 yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018, terdiri dari dua tujuan dan tiga sasaran strategis sebagai berikut:

No	TUJUAN	No	SASARAN STRATEGIS
2.1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	2.1.1	Terlaksanya reformasi birokrasi

Analisis terhadap capaian sasaran strategis pada misi 2 akan dianalisis berdasarkan capaian terhadap indikator kinerja masing-masing sasaran pada masing-masing tujuan sebagai berikut:

TUJUAN 2.1 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

Tujuan pertama pada misi 2 ini terdiri dari sasaran strategis sebagai berikut :



SASARAN STRATEGIS 2.1.1

Terlaksana Reformasi Birokrasi

Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 2.1.1 terdiri atas 5 (lima) indikator kinerja utama, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini :

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN 2.1.1

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Nilai SAKIP	BB	BB	100%
2.	Peringkat LPPD	40	29	137,9%
3.	Indeks RB	B	BB	116%
4.	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP	WTP	100%
5.	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan public	75%	87,35%	116%
Rata-rata Capaian				114%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian 5 (lima) indikator kinerja utama sasaran strategis adalah sebesar 114%, sesuai dengan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan, keberhasilan pencapaian sasaran Strategis termasuk kategori **sangat baik**.

10. Nilai SAKIP

3.1. Perbandingan Target Realisasi

Nilai SAKIP = Peringkat yang diperoleh dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah BB

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bukittinggi memperoleh nilai 70,39 atau predikat "BB". Penilaian tersebut

Menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan



penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kota Bukittinggi sudah menunjukkan hasil yang baik, namun masih memerlukan perbaikan. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut :

	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai		
			2016	2017	2018
A	Perencanaan Kinerja	30	16,54	19,44	22,00
B	Pengukuran Kinerja	25	10,31	13,48	16,16
C	Pelaporan Kinerja	15	9,65	10,22	10,58
D	Evaluasi Internal	10	4,34	6,94	7,83
E	Capaian Kinerja	20	9,5	10,13	13,81
Nilai Hasil Evaluasi		100	50,34	60,21	70,39
Tingkat Kinerja	Akuntabilitas		CC	B	BB

Uraian hasil evaluasi adalah sebagai berikut :

7. Secara umum, implementasi manajemen berbasis kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi telah mengalami peningkatan, hal ini terlihat dari komitmen pimpinan daerah bersama dengan Kepala SKPD.
8. Perencanaan kinerja secara terintegrasi maupun uraian kinerja (cascade down) telah dilakukan dari level pemerintah kota sampai dengan level eselon4, meskipun belum seluruhnya menggambarkan hubungan causalitas kinerja dengan level di atasnya, serta masih terdapat uraian kinerja yang belum sesuai dengan levelnya.
9. Kualitas indikator kinerja sudah baik, namun masih belum seluruhnya SMART dan relevan untuk menjadi alat ukur keberhasilan/ ketercapaian kinerja yang diperjanjikan.
10. Laporan kinerja, baik di level Pemda maupun OPD, belum sepenuhnya menggambarkan analisis pencapaian kinerja, utamanya analisis tentang program/ kegiatan yang relevan/ tidak relevan atas ketercapaian kinerja.



11. Pemerintah Kota Bukittinggi telah memanfaatkan sistem informasi dalam manajemen kinerja, mulai dari perencanaan sampai dengan money, akan tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal.
12. Telah dilakukan analisis dan refocusing terhadap program/kegiatan dan anggaran di lingkungan Pemda, dengan nilai efisiensi anggaran sebesar Rp. 64.856.103.314 atau 22,10% dari belanja langsung setelah dikurangi belanja pegawai Rp. 293.424.543.282.

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja, KemenPAN RB merekomendasikan kepada Walikota Bukittinggi untuk memperhatikan dan menindaklanjuti beberapa hal sebagai berikut :

3. Memastikan budaya kinerja tetap berjalan di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi, dengan penguatan keterlibatan pimpinan beserta jajaran secara aktif mulai dari proses perencanaan pelaporan sampai dengan evaluasi atas implementasi manajemen kinerja.
4. Melakukan penyempurnaan indikator kinerja, mulai dari level OPD sampai dengan level individu, sehingga dapat terwujud keselarasan kinerja dari level organisasi sampai dengan individu.

10.2. Realisasi Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi Capaian Kinerja Nilai SAKIP dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tahun	Nilai SAKIP
	Capaian Kinerja
2015	75%
2016	100%
2017	100%
2018	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian realisasi dari nilai SAKIP Kota Bukittinggi telah sesuai dengan target yang diharapkan sesuai target perjanjian kinerja pada tahun masing-masing yang telah berjalan. Semenjak awal RPJMD tahun 2016 telah diperoleh nilai SAKIP Kota Bukittinggi sesuai dengan target RPJMD yang telah ditetapkan.



10.3. Realisasi Capaian Target Dari Awal RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan

Realisasi capaian indikator nilai SAKIP Kota Bukittinggi dibandingkan dengan target akhir RPJMD :

INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD	REALISASI TAHUN 2018	KONDISI AKHIR RPJMD
Nilai SAKIP	C	BB	A

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai SAKIP Kota Bukittinggi tahun 2018 dengan realisasi nilai BB, jika dibandingkan dengan kondisi akhir RPJMD dengan nilai A ada satu tingkatan lagi untuk mendapatkan nilai SAKIP A. Pemerintah Kota Bukittinggi tengah berupaya meningkatkan kinerja pemerintah daerah dengan melakukan peningkatan dalam efisiensi anggaran serta perencanaan yang baik dan terintegrasi.

10.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Indikator

- Intensitas peningkatan pemahaman dari pimpinan sampai level pejabat yang ada di SKPD
- Intensitas konsultasi dengan narasumber dari kementerian
- Ketersediaan untuk melakukan perbaikan menyeluruh terhadap seluruh dokumen perencanaan pelaporan dan perencanaan
- Memperkuat kualitas review oleh inspektorat

10.5. Analisis Penggunaan Sumber Daya

- Memperkuat tim SAKIP kota Bukittinggi yang terdiri dari bagian organisasi, Bapelitbang, dan Inspektorat.
- Memperkuat penempatan seluruh subbag perencanaan SKPD
Komitmen implementasi sakip yang memiliki konsekuensi efisiensi anggaran, sehingga berorientasi penuh pada peningkatan pelayanan publik dan pemenuhan infrastruktur dasar daerah dan bisa menghemat belanja pemerintah sebesar 64 milyar yang dialihkan untuk infrastruktur kota

10.6. Analisis Program/ Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator

Adapun kegiatan pendukung dari indikator nilai SAKIP ini antara lain :



- Program peningkatan kinerja pelaporan dan keuangan dengan kegiatan penyusunan LKIP Kota Bukittinggi
- Program review dokumen perencanaan keuangan yang ada di Inspektorat Kota Bukittinggi
- Kegiatan diklat yang diarahkan pimpinan melalui BKPSDM untuk melakukan

11. Peringkat LPPD

4.1. Perbandingan Target Realisasi

<i>Peringkat LPPD</i>	=	<i>Skor evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 3,2205 dengan peringkat 29</i>
-----------------------	---	---

Berdasarkan keputusan Menteri dalam negeri nomor 100-53 tahun 2018 tentang peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah secara nasional, memususkan Kota Bukittinggi dengan nilai skor 3,2205 dengan status kinerja sangat tinggi dengan atribut bintang dua berada pada peringkat 29 dari 93 kota se Indonesia. Sementara untuk hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2018 pada tingkat provinsi berada pada peringkat satu untuk kota se Sumatera Barat, sedangkan untuk peringkat nasional akan diumumkan pada peringatan hari otonomi daerah pada tanggal 25 April 2019 mendatang.

Usaha yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja pemerintah daerah dengan membentuk tim penilai evaluasi kinerja mandiri penyelenggaraan pemerintah daerah, sebagaimana amanat dari PP Nomor 6 tahun 2008 tentang pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditetapkan melalui keputusan Walikota Bukittinggi dengan tugas utamanya melakukan self assessment/pemilain sendiri terhadap kinerja pemerintah daerah sebelum dilakukan evaluasi oleh Pemerintah Provinsi dan Nasional. Dengan adanya tim ini diharapkan lebih awal dapat mengukur capaian kinerja dan dapat mengukur strategi untuk meningkatkan kinerja secara nasional.

Upaya yang dilakukan selama tahun 2018 yakni :

6. Membentuk Tim Penilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2017



7. Melakukan interview langsung dengan SKPD terkait dengan data IKK yang disampaikan serta membandingkan dengan data tahun sebelumnya.
8. Melakukan konsultasi yang intensif dengan BPKP dan Biro Pemerintahan
9. Adanya komitmen dan dukungan pimpinan agar SKPD meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
10. Pelaksanaan Self Assesment (Penilaian Mandiri) yang dilaksanakan langsung oleh pihak kementerian dalam negeri sebelum pelaksanaan validasi secara resmi oleh Kemendagri (Pemerintah Kota Bukittinggi ditunjuk sebagai salah satu daerah untuk pelaksanaan self assestment).

11.2. Realisasi Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi dan Capaian Kinerja Peringkat LPPD dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tahun	Peringkat LPPD
	Capaian Kinerja
2015	Peringkat 65 atau 96%
2016	Peringkat 33 atau 166%
2017	Peringkat 29 atau 137%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian peringkat LPPD Kota Bukittinggi sejak tahun 2015 mengalami kenaikan yang signifikan ke tahun 2016, pada tahun 2017 realisasi capaian mengalami penurunan dari 166% ke 137% namun masih berada jauh diatas target dengan peringkat 40 realisasi peringkat 29.

11.3. Realisasi Capaian Target Dari Awal RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan

Realisasi capaian indikator peringkat LPPD Kota Bukittinggi dibandingkan dengan terget akhir RPJMD :

INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD	REALISASI TAHUN 2018	KONDISI AKHIR RPJMD
Peringkat LPPD	65	29	30

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa peringkat LPPD tahun 2018 penilaian tahun 2017 telah melebihi peringkat akhir masa RPJMD dengan peringkat 30.



12. Indeks RB

10.1. Perbandingan Target Realisasi

$$\text{Indeks RB} = \frac{\text{Indeks RB (evaluasi mandiri Inspektorat)}}{\text{BB}} \text{ adalah}$$

Berdasarkan hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Bukittinggi pada Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018 yang tertuang dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE Template PMPRB) diperoleh nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kota Bukittinggi sebesar 71,68 dengan predikat BB. Predikat BB yang diperoleh ini, berdasarkan target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2018 yaitu B, berarti Pemerintah Kota Bukittinggi sudah melebihi dari target yang diperjanjikan dalam IKU Pemerintah Kota Bukittinggi.

Bila dibandingkan dengan tahun 2017, Pemerintah Kota Bukittinggi telah memperoleh predikat B dengan nilai indeks Reformasi Birokrasi yang diperoleh sebesar 61,67.

Upaya yang dilakukan dalam mencapai indeks reformasi birokrasi tersebut diatas adalah dengan :

3. Memvalidasi dokumen komponen penilaian yang terdiri dari komponen pengungkit dan komponen hasil

Ada 8 area komponen pengungkit meliputi :

- Manajemen perubahan
- Penataan peraturan perundang-undangan
- Penataan dan penguatan organisasi
- Penataan tatalaksana
- Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
- Penguatan Akuntabilitas
- Penguatan pengawasan
- Kualitas pelayanan publik



3 Area komponen hasil meliputi :

- Kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi
- Pemerintah yang bersih dan bebas KKN
- Kualitas Pelayanan publik

4. Adapun hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi pada pemerintah Kota Bukittinggi, melalui SKPD pembangun dan SKPD pelayanan. Adapun SKPD pembangun reformasi birokrasi di Kota Bukittinggi adalah:

Bagian Organisasi, Inspektorat, Bapelitbang, Bagian Hukum, BKPSDM, Dinas Kominfo, Dinas Arsip dan Perpustakaan

Sedangkan untuk SKPD pelayanan antara lain :

Dinas Dukcapil, Dinas PMPTSPPTK, Dinas Pariwisata, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan penilaian terhadap kinerja Reformasi Birokrasi Penyelenggaraan lembaga pemerintahan meliputi area perubahan, yang terdiri faktor pengungkit dan hasil. Penilaian dilakukan secara mandiri melalui formulasi dan lembaran serta kerja evaluasi yang diterbitkan oleh Kementerian PAN dan RB, selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Kementerian PAN terhadap capaian dan dokumen pendukung yang disampaikan oleh daerah secara online melalui aplikasi yang telah disiapkan. Hasil akhirnya disampaikan ke daerah sebagai penetapan terhadap indeks Reformasi Birokrasi tersebut.

Pemerintah Kota Bukittinggi untuk indeks RB tahun 2018 masih dalam proses evaluasi mandiri, yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Bukittinggi, dengan capaian BB. Nilai ini akan terkoreksi atau dikuatkan oleh Kementerian PAN dan RB, yang akan dirilis dan disampaikan ke seluruh lembaga pemerintahan pada bulan Juli – Oktober.

Dari 8 (delapan) area perubahan yang menjadi faktor pengungkit, Kota Bukittinggi secara umum telah memenuhi kriteria untuk baik, begitu juga dengan faktor hasil berupa opini BPK RI terhadap LKPD dan Nilai Evaluasi SAKIP. Namun dokumen pendukung belum tersedia lengkap dan valid, karena kegiatan pendukungnya pada beberapa SKPD belum tersedia.



Karena itu kegiatan pendukung ini menjadi perhatian utama dari seluruh SKPD, terutama SKPD pendukung, seperti terkait penataan perundang-undangan, kelembagaan, pengawasan, kepegawaian, layanan publik dan pengembangan Teknologi Informasi untuk pendukung.

10.2. Realisasi Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi Capaian Kinerja Indeks RB dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tahun	Indeks RB
	Capaian Kinerja
2017	100%
2018	116%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi capaian pada tahun 2017 dengan target B terealisasi indeks B, pada tahun 2018 dengan target B capaian BB sehingga realisasi capaian meningkat dengan realisasi capaian manjadi 116%.

10.3. Realisasi Capaian Target Dari Awal RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan

Realisasi capaian indikator Indeks RB Kota Bukittinggi dibandingkan dengan terget akhir RPJMD :

INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD	REALISASI TAHUN 2018	KONDISI AKHIR RPJMD
Indeks RB	-	BB	B

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa bila dibandingkan capaian indeks RB tahun 2018 jika dibandingkan dengan target akhir masa RPJMD telah melampaui target.

13. Opini Bpk Terhadap Laporan Keuangan Daerah

12.1. Perbandingan Target Realisasi

Opini BPK terhadap Hasil Evaluasi / Opini BPK RI pada tahun laporan keuangan = 2018 WTP daerah

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2017 yang perlu mendapat perhatian adalah :

4. Opini atas Laporan Keuangan (Wajar tanpa pengecualian)



5. Sistem Pengendalian Internal (masi terdapat kelemahan sistem pengendalian intern)
6. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

Penilaian LKPD Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Kota Bukittinggi adalah WTP, dan ini merupakan penilaian WTP yang kelima kalinya bagi pemerintah Kota Bukittinggi

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target yang diinginkan :

- Dengan menyusun jadwal penyusunan LKPD Tahun 2018
- Evaluasi dan Verifikasi laporan keuangan SKPD desuai dengan jadwal yang telah ditentukan
- Mengupayakan penyelesaian masalah yang dihadapi oleh SKPD sehubungan penyusunan laporan keuangan SKPD untuk meminimalisir kesalahan.

Pemerintah Kota Bukittinggi sudah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah semenjak tahun 2014. Diawali dengan LKPD tahun 2013, dan LKPD tahun 2014, yang masih ada catatan dari BPK RI. Opini WTP yang diperoleh Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2018 terhadap LKPD Tahun 2017 merupakan WTP murni, dan penerapan Akuntansi Pemerintah berbasis acrual dalam pelaporan. Dengan demikian, Pemerintah Kota Bukittinggi sudah siap untuk menerapkan SAP secara penuh dalam pengelolaan keuangan daerah, meliputi perencanaan, perbendaharaan, pembukuan dan pengelolaan aset.

Kondisi LKPD ini juga menggambarkan tata kelola keuangan secara menyeluruh pada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi. Hal ini didukung oleh sistem dan prosedur yang telah dibuat dan diterapkan secara konsisten dengan sumber daya manusia pengelola keuangan yang kompeten di SKPD pengelola keuangan dan seluruh SKPD yang ada.

Hal penting lain yang mendukung pencapaian WTP ini adalah pengawasan dan monitoring secara berkala dan konsisten, serta pembinaan secara rutin kepada seluruh SKPD. Keberhasilan Kota Bukittinggi juga didukung dengan evaluasi dan audit dari inspektorat secara rutin dan berkala, serta pembinaan melalui klinik pengawasan, monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan yang lebih intensif.

Untuk melakukan tugas-tugas ini, aparatur pengelola keuangan dan pengawasan difasilitasi dalam bentuk bimtek/ couching serta pelatihan, baik dengan mengutus peserta, ataupun dilakukan dalam bentuk Pelatihan Kantor Sendiri. Dengan demikian, kemampuan pengelolaan keuangan oleh SKPD semakin meningkat, kemampuan dan



keahlian aparatur pengawas juga demikian, sehingga temuan pemeriksaan yang berulang semakin menurun.

Dalam pengelolaan aset juga terjadi peningkatan penyelesaian masalah aset dan ketepatan pengelolaannya, sehingga meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan aset daerah.

Mendukung pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Bukittinggi telah memanfaatkan aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang terintegrasi. Dengan aplikasi ini, terjadi kecepatan pengelolaan keuangan, sekaligus akurasi dan ketepatan dalam penyajiannya.

Dengan capaian WTP ini, maka berbagai kasus yang bermuara pada terjadinya KKN di Kota Bukittinggi sudah sangat kurang dan dapat diminimalisir.

Dibandingkan tahun 2015, Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi juga sudah memperoleh WTP. Pada tahun 2016 Pemerintah Kota Bukittinggi juga memperoleh WTP terhadap LKPD tahun 2015, namun terjadi peningkatan dari sisi catatan yang sudah tidak ada lagi, serta merupakan laporan pertama menggunakan Acrual Basic sesuai Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah.

12.2. Realisasi Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi dan Capaian Kinerja Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tahun	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah
	Capaian Kinerja
2015	100%
2016	100%
2017	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Pemerintah Kota Bukittinggi terus konsisten meraih WTP, dengan capaian ini maka berbagai kasus yang bermuara pada terjadinya KKN di Kota Bukittinggi sudah sangat kurang dan dapat diminimalisir.

12.3. Realisasi Capaian Target Dari Awal RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan

Realisasi capaian indikator nilai SAKIP Kota Bukittinggi dibandingkan dengan terget akhir RPJMD :



INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD	REALISASI TAHUN 2018	KONDISI AKHIR RPJMD
Opini BPK	WTP	WTP	WTP

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian indikator Opini BPK sejak awal RPJMD sampai tahun 2018 tetap mendapatkan WTP. Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Badan keuangan terus meningkatkan keakuratan data keuangan sehingga dalam pelaksanaan pemeriksaan keuangan pemerintah Kota Bukittinggi konsisten dengan meraih WTP.

12.4. Analisis Program/ Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator

Adapun program kegiatan pendukung untuk menunjang indikator Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah antara lain melalui :

- Program peningkatan dan pengembangan pengelola keuangan daerah Rp. 4.200.017.459,-
- Program peningkatan pengembangan pengelolaan aset daerah Rp. 2.184.062.950,-
- Program pengelolaan pengembangan pengelolaan aset daerah Rp. 2.184.062.950,-

14. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik

23.1. Perbandingan Target Realisasi

<i>Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik</i>	<i>=</i>	<i>Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. 87,35%</i>
---	----------	--

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Capaian kinerja ini diukur berdasarkan hasil survei terhadap lembaga penyelenggara pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi meliputi :

21. Balai Benih Ikan Hias
22. Pusat Kesehatan Hewan



23. Rumah Potong Hewan
24. Puskesmas Guguk Panjang
25. Puskesmas Perkotaan
26. Puskesmas Tigo Baleh
27. Puskesmas Mandiangin
28. Puskesmas Nilam Sari
29. Puskesmas Gulai Bancah
30. Puskesmas Plus Mandiangin
31. Kecamatan Aur Birogo Tigo Baleh
32. Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
33. Kecamatan guguk Panjang
34. Pelayanan perizinan
35. Keluarga Berencana
36. KK dan KTP
37. Catatan Sipil
38. Perhubungan
39. Pustaka
40. Pajak

Pada tahun 2018 kualitas layanan publik dilingkungan pemerintah Kota Bukittinggi berdasarkan hasil survei pada lembaga pelayanan publik dimaksud memiliki nilai “baik” (B) dengan indeks nilai 87,35% sesuai dengan Permenpan 14 tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik terdapat 9 unsur pelayanan yang dinilai meliputi :

10. Persyaratan
11. Prosedur
12. Waktu Pelayanan
13. Biaya/ Tarif
14. Produk Layanan
15. Kompetensi Pelaksanaan
16. Perilaku Pelaksanaan
17. Sarana dan Prasarana
18. Penanganan Pengaduan



Pada tingkat kota sembilan unsur pelayanan tersebut memiliki nilai rata-rata baik, dilihat dari lembaga penyelenggara pelayanan publik tingkat kota yang disurvei terdapat beberapa unsur pelayanan yang memiliki rata-rata sangat baik dan tidak terdapat tingkat “cukup”.

w. Balai benih ikan hias

Capaian IKM lembaga ini adalah bernilai “baik” dengan indeks 83%, dari sembilan unsur pelayanan yang disurvei terdapat dua unsur pelayanan yang bernilai sangat baik dan selebihnya bernilai baik, dua unsur pelayanan tersebut adalah kompetensi pelaksana dan perilaku pelaksana. Hal ini didukung oleh program peningkatan kapasitas aparatur pengelola BBIH yang dilakukan secara terprogram dan terintegrasi dengan program pendukung pada dinas pertanian dan pangan baik dengan pembiayaan dari APBD maupun yang bersumber dari Kementerian.

x. Puskesmas

Capaian indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada Puskesmas memiliki nilai “baik” dengan indeks 83,25, secara menyeluruh dari unsur pelayanan yang di nilai memiliki nilai rata-rata “baik”.

y. Rumah Potong Hewan

Capaian indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada Rumah Potong Hewan memiliki nilai “baik” dengan indeks 96,50, secara menyeluruh dari unsur pelayanan yang di nilai memiliki nilai rata-rata “sangat baik”.

z. Puskesmas Guguk Panjang

Capaian indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada Puskesmas Guguk Panjang memiliki nilai “baik” dengan indeks 77,46 secara menyeluruh dari unsur pelayanan yang di nilai memiliki nilai rata-rata “baik”.

aa. Puskesmas Perkotaan

Capaian indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada Puskesmas Perkotaan memiliki nilai “baik” dengan indeks 77,55 secara menyeluruh dari unsur pelayanan yang di nilai memiliki nilai rata-rata “baik”.

bb. Puskesmas Tigo Baleh

Capaian indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada Puskesmas Tigo Baleh memiliki nilai “baik” dengan indeks 74,81, ada tiga unsur pelayanan yang bernilai cukup yaitu produk layanan, sarana dan prasarana, serta penanganan pengaduan. Produk layanan yang ada pada Puskesmas Tigo Baleh



belum maksimal untuk menyelenggarakan layanan dasar wajib pada Puskesmas hal ini disebabkan keterbatasan sarana dan prasarana dan hal ini terlihat pada unsur pelayanan yang juga bernilai cukup. Sarana prasarana pada Puskesmas Tigo Baleh tidak bisa ditempatkan pada ruang Puskesmas yang ada sekarang karena keterbatasan lahan yang status kepemilikannya juga masih didalam proses penyelesaian, karena itu Puskesmas ini masih tetap dipertahankan namun pada level kualifikasi yang belum memungkinkan untuk ditingkatkan, adapun terkait penanganan pengaduan oleh masyarakat belum memadai dan akan ditingkatkan pada masa yang akan datang, layanan dasar yang selebihnya bernilai baik.

cc. Puskesmas plus Mandiangin

Capaian indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada Puskesmas Mandiangin memiliki nilai 'baik" dengan indeks 79 secara menyeluruh dari unsur pelayanan yang di nilai memiliki nilai rata-rata "baik".

dd. Puskesmas Nilam Sari

Capaian indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada Puskesmas Mandiangin memiliki nilai 'baik" dengan indeks 78,80, namun ada satu unsur pelayanan yang bernilai cukup yaitu waktu pelayanan dikarenakan lokasi Puskesmas yang belum dilalui oleh angkutan umum secara rutin, hal ini menyebabkan adanya masyarakat yang dilayani datang diluar waktu pelayanan setelah Puskesmas tutup, adapun upaya yang dilakukan dengan menyesuaikan waktu kunjungan masyarakat yang dilayani dan sewaktu-waktu dapat melayani masyarakat dengan menempatkan petugas secara bergiliran diluar jam layanan, unsur pelayanan yang di nilai memiliki nilai rata-rata "baik".

ee. Puskesmas Gulai Bancah

Capaian indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada Puskesmas Gulai Bancah memiliki nilai 'baik" dengan indeks 80,25 secara menyeluruh dari unsur pelayanan yang di nilai memiliki nilai rata-rata "baik".

ff. Puskesmas Plus Mandiangin

Capaian indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada Puskesmas Plus Mandiangin memiliki nilai 'baik" dengan indeks 74,93 secara menyeluruh dari unsur pelayanan yang di nilai memiliki nilai rata-rata "baik".

gg. Kecamatan ABTB



Capaian indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada Kecamatan ABTB memiliki nilai 'baik' dengan indeks 88,03% secara menyeluruh dari unsur pelayanan yang di nilai memiliki nilai rata-rata "baik".

hh. Kecamatan MKS

Capaian indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada Kecamatan MKS memiliki nilai 'baik' dengan indeks 88,5, terdapat dua unsur penilaian yang bernilai sangat baik yaitu, perilaku pelaksana dan sarana prasarana yang letak yang strategis dan luas sehingga masyarakat mudah dalam mengakses, dari unsur pelayanan yang di nilai memiliki nilai rata-rata "baik".

ii. Kecamatan Guguk Panjang

Capaian indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada Kecamatan Guguk Panjang memiliki nilai 'baik' dengan indeks 79% secara menyeluruh dari unsur pelayanan yang di nilai memiliki nilai rata-rata "baik".

jj. Tenaga Kerja

Capaian indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada Tenaga Kerja memiliki nilai 'baik' dengan indeks 88,80 dan ada dua unsur pelayanan yang bernilai sangat baik yaitu perilaku pelaksana dan penanganan pengaduan karena pada posisi pelayanan posisi pelayanannya telah dibantu dengan sistem yang dibuat secara nasional sehingga penanganan pengaduan langsung terkontrol oleh pusat secara menyeluruh dari unsur pelayanan yang di nilai memiliki nilai rata-rata "baik".

kk. Penanaman Modal

Capaian indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada Penanaman Modal memiliki nilai 'baik' dengan indeks 80 secara menyeluruh dari unsur pelayanan yang di nilai memiliki nilai rata-rata "baik".

ll. Keluarga Berencana

Capaian indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada Keluarga Berencana memiliki nilai 'baik' dengan indeks 82,66 dan ada satu unsur penilaian bernilai cukup yaitu biaya dikarenakan informasi tarif masih kurang sosialisasi dan tersedia ditempat layanan dikarenakan masih sulit untuk menentukan tarif layanan secara menyeluruh dari unsur pelayanan yang di nilai memiliki nilai rata-rata "baik".



mm.KTP dan KK

Capaian indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada KTP dan KK memiliki nilai 'baik' dengan indeks 81,28 secara menyeluruh dari unsur pelayanan yang di nilai memiliki nilai rata-rata "baik".

nn. Catatan Sipil

Capaian indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada Catatan Sipil memiliki nilai 'baik' dengan indeks 84,63 tiga yang bernilai cukup yaitu waktu pelayanan, kompetensi peleksana dan penanganan pengaduan, dikarenakan smapai saat ini masih terbatas tenaga pengelola dan tahun 2018 telah mulai direkrut, dan dengan ada ketentuan dari pusat roling staf tidak bisa dilakukan sewaktu-waktu, permasalahan penanganan pengaduan belum dilengkapi dengan alat yang mudah untuk memfasilitasi pengaduan masyarakatada secara menyeluruh dari unsur pelayanan yang di nilai memiliki nilai rata-rata "baik".

oo. Pustaka

Capaian indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada perpustakaan memiliki nilai 'baik' dengan indeks 81% secara menyeluruh dari unsur pelayanan yang di nilai memiliki nilai rata-rata "baik".

pp. Pajak

Capaian indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada pajak memiliki nilai 'baik' dengan indeks 78,46% secara menyeluruh dari unsur pelayanan yang di nilai memiliki nilai rata-rata "baik".

qq. Pariwisata

Capaian indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada pajak memiliki nilai 'baik' dengan indeks 83,25% secara menyeluruh dari unsur pelayanan yang di nilai memiliki nilai rata-rata "baik".

rr. Perhubungan

Capaian indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada pajak memiliki nilai 'baik' dengan indeks 86,27% secara menyeluruh dari unsur pelayanan yang di nilai memiliki nilai rata-rata "baik".

23.2. Realisasi Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya



Realisasi dan Capaian Kinerja Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik terhadap laporan keuangan daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tahun	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik
	Capaian Kinerja
2017	114,92%
2018	116%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Pemerintah Kota Bukittinggi terus konsisten meraih Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik, dengan capaian ini maka dapat dilihat terjadinya peningkatan dari tahun 2017 ke Tahun 2018.

23.3. Realisasi Capaian Target Dari Awal RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan

Realisasi capaian indikator Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Kota Bukittinggi dibandingkan dengan target akhir RPJMD :

INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD	REALISASI TAHUN 2018	KONDISI AKHIR RPJMD
Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	30%	87,35%	80%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian indikator Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik sejak awal RPJMD sampai tahun 2018 tetap mengalami peningkatan. Pemerintah Kota Bukittinggi terus berupaya dalam meningkatkan layanan pada masyarakat, sehingga terwujud masyarakat yang sejahtera.

MISI III : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN, PENATAAN, DAN PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA KOTA SECARA TERPADU BERWAWASAN LINGKUNGAN

Untuk mewujudkan misi 3 ini, sesuai dengan Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2017, tujuan dan sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut:



No	TUJUAN	No	SASARAN STRATEGIS
3.1	Meningkatkan Pembangunan sarana dan prasarana kota secara terpadu berwawasan lingkungan	3.1.1	Terpenuhinya RTH Kota
		3.1.2	Fasilitas Publik yang memenuhi standar lingkungan
		3.1.3	Pemenuhan target universal access (sanitasi, air bersih dan permukiman kumuh)
3.2	Peningkatan Penataan Ruang Kota	3.2.1	Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Kota

Untuk menggambarkan capaian terhadap misi 3 ini akan disajikan analisis masing-masing tujuan dan sasaran strategis berdasarkan capaian indikator kinerja utama sebagai berikut :

TUJUAN 3.1 : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KOTA SECARA TERPADU BERWAWASAN LINGKUNGAN

Tujuan pertama dari misi 3 ini diukur berdasarkan indikator utama dari sasaran strategis berikut :

SASARAN STRATEGIS 3.1.1

Terpenuhinya RTH Kota

Capaian sasaran strategis 3.1.1 ini diukur berdasarkan capaian 1 (satu) indikator kinerja utama, seperti pada tabel dibawah ini :

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN 3.1.1

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase RTH Publik	14%	1,079%	7,7%
Rata-rata Capaian				7,7%



Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian 1 (satu) indikator kinerja utama sasaran strategis sebesar 7,7%, sesuai dengan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan, keberhasilan pencapaian sasaran Strategis termasuk kategori gagal.

24. Persentase RTH Publik

24.1. Perbandingan Target Realisasi

$$\text{Persentase RTH Publik} = \frac{\text{Jumlah RTH publik}}{\text{jumlah RTH yang tersedia}} = 1,079\%$$

Sesuai Permen Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M2008 bahwa Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan artau mengelompok, yang penggunaanya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) terbagi dua , yaitu :

3. Ruang terbuka hijau privat , adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.
4. Ruang Terbuka Hijau Publik, adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.

RTH memiliki fungsi sebagai berikut :

3. Fungsi utama (intrinsik) yaitu fungsi ekologis :
 - Memberi jaminan pengadaan RTH menjadi dari system sirkulasi udara (paru-paru kota)
 - Pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar
 - Sebagai peneduh
 - Produsen oksigen
 - Penyerap air hujan
 - Penyedia habitat satwa
 - Penyerap polutan media udara, air dan tanah, serta



- Penahan angin
- Menahan kebisingan arus lalu lintas
- 4. Fungsi tambahan (ekstrinsik) yaitu :
 - Fungsi social dan budaya :
 - Menggambarkan ekspresi budaya lokal
 - Merupakan media komunikasi warga kota
 - Tempat rekreasi
 - Wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari alam
 - Sebagai taman Ruang Bermain Ramah Anak
 - Fungsi ekonomi :
 - Sumber produk yang bisa dijual, seperti tanaman bunga, buah, daun, sayur mayor
 - Bisa menjadi bagian dari usaha pertanian, perkebunan, kehutanan dan lain-lain.
 - Fungsi estetika :
 - Meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik dari skala mikro : halaman rumah, lingkungan permukiman, maupun makro : landscape kota secara keseluruhan
 - Menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota
 - Pembentuk factor keindahan arsitektural
 - Menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.
 - Sebagai Identitas Kota

Manfaat RTH

Manfaat RTH berdasarkan fungsinya dibagi atas :

3. Manfaat langsung (dalam pengertian cepat dan bersifat *tangible*), yaitu membentuk keindahan dan kenyamanan (teduh, segar, sejuk) dan mendapatkan bahan-bahan untuk dijual (kayu, daun, bunga, buah)
4. Manfaat tidak langsung (berjangka panjang dan bersifat *intangibile*), yaitu pembersih udara yang sangat efektif, pemeliharaan akan kelangsungan persediaan air tanah, pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan fauna yang ada (konservasi hayati atau keanekaragaman hayati)



Salah satu tugas pokok dan fungsi dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi adalah melakukan sebagian pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Bukittinggi. Untuk saat ini pengelolaan ruang terbuka hijau yang menjadi tugas dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi adalah taman-taman yang termasuk fasilitas umum yang berada di Kota Bukittinggi . Taman yang pengelolaannya berada di Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

No	Taman/Lokasi Taman	Luas Tahun 2017	Luas Tahun 2018	Jenis Taman
	Pembibitan	2.250 m ²		Tanaman biasa
	Taman Tugu BDB, Tugu Imam Bonjol, taman depan Rumah Potong	1.269,78 m ²		Tanaman biasa
	Taman Jl. Veteran, Simpang Tembok, Bundaran Kampung Cina	357 m ²		Tanaman biasa
	Taman Simpang By Pass/d Simp. Limau, Jalur hijau Anak Air	1.107,10 m ²		Tanaman biasa
	Taman gerbang Walikota, taman Dinas Walikota Gulai Bancah	6.175,90 m ²		Tanaman biasa
	Taman Jl. Raya Walikota Gulai Bancah, taman SBY	1.108,00 m ²		Tanaman biasa
	Sepanjang taman Jl. By Pass Gulai Bancah	3.920,00 m ²		Tanaman biasa
	Taman Jl. Kesuma Bhakti, taman Simpang Surau Gadang	1.380,00 m ²		Tanaman biasa
	Taman Tugu Adipura, Bundaran Simpang Mandiangin-Simpang Jl.	4.371,00 m ²		Tanaman biasa



	By Pass			
	Taman Simpang Limau s/d batas kota Garegeh	2.359,25 m ²		Tanaman biasa
	Taman pendakian Luak Anyia (pendakian Bukik Ambacang), taman depan balai pemuda Luak Anyia	2.159,00 m ²		Tanaman biasa
	Taman lereng Pasar Bawah, Bundaran Pasar Banto, taman gantung Terminal Aur Tajungkang	989,33 m ²		Tanaman biasa
	Taman DPRD, taman depan PLN, taman bundaran depan PLN dan Gardu, taman Jl. Panorama	618,35 m ²		Tanaman biasa
	Taman belakang dan depan Link, taman Tugu Pahlawan Tak Dikenal, taman depan Kadin	1.651,49 m ²		Tanaman biasa
	Taman Monumen Bung Hatta, taman belakang The Hills (lereng sovia), taman depan Bank Nagari	2.110,30 m ²		Tanaman biasa
	Taman penyapuan Monumen Bung Hatta, pahlawan tak dikenal, taman depan Dinas Kadin	2.888,00 m ²		Tanaman biasa
	Taman depan Ria Sari s/d batas kota	1.207,21 m ²		Tanaman biasa
	Taman Tengah Jua	73,65 m ²		Tanaman biasa
	Taman By Pass Simpang Aua s/d Taluak	1.400 m ²		Tanaman biasa



Taman seputan Jam Gadang, lereng Toko Maju, bak bunga Jl. Minangkabau	5.126,00 m ²		Tanaman biasa
Taman depan Primkopol s/d Simpang Yarsi	490,15 m ²		Tanaman biasa
Taman Lapang Kantin, Tugu Kadet, depan Asrama Kodim	570,80 m ²		Tanaman biasa
Taman Belakang Balok	2.140,00 m ²		Tanaman biasa
Taman Ngarai Maaram	6.000 m ²		Tanaman biasa
Pedok	544 m ²		Tanaman biasa
Tanam RTH Surau Gadang	1.640 m ²		Tanaman biasa
Pandam	0,60 m ²		Tanaman biasa
Hutan Kota	0,60 m ²		Tanaman biasa
Taman Panganak		17,00 m ²	Tanaman biasa
Total	53.907,51 m ²	53.981,46 m ²	

Berdasarkan target SKPD, untuk luas RTH yang dikelola adalah sebesar 1,079% hal ini masih sangat jauh dari target kota sebesar 14% dan belum memenuhi luas minimal RTH yang diamanatkan oleh undang undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penetapan Tata Ruang yaitu Setiap Kabupaten/Kota harus memiliki RTH Publik 20% dan RTH privat 10% dari luas Kabupate/Kota. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memenuhi target kota adalah :

- d. Setiap kelurahan harus mempunyai taman-taman kelurahan yang nantinya akan dijadikan sebagai taman RTH Publik di Kelurahan



- e. Untuk sempadan ngarai yang tidak boleh menjadi kawasan terbangun dapat dijadikan RTH Publik. Hal ini dapat dilakukan melalui kerja sama Pemda dengan pemilik tanah (masyarakat) agar bersedia menjadikan lahan milih mereka menjadi RTH Publik.
- f. Untuk jalan-jalan utama agar disediakan median jalan yang dijadikan taman kota.

Untuk memaksimalkan fungsi taman sebagai penghasil oksigen dan estetika kota perlu dilakukan revitalisasi terhadap taman-taman yang telah ada mulai dari rehab rekonstruksi sampai dengan peremajaan tanaman yang ada di taman kota saat ini

24.2. Realisasi Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase RTH Publik dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tahun	Persentase RTH Publik
	Capaian Kinerja
2016	-
2017	7,2%
2018	7,7%

Berdasarkan perbandingan capaian di tahun 2016 dan 2017 terdapat kenaikan capaian di tahun 2018, belum memenuhi luas minimal RTH yang diamanatkan oleh undang undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penetapan Tata Ruang yaitu Setiap Kabupaten/Kota harus memiliki RTH Publik 20% dan RTH privat 10% dari luas Kabupate/Kota.

24.3. Realisasi Capaian Target Dari Awal RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan

Realisasi capaian indikator persentase RTH Publik Kota Bukittinggi dibandingkan dengan terget akhir RPJMD :

INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD	REALISASI TAHUN 2018	KONDISI AKHIR RPJMD
Persentase RTH Publik	8%	1%	17%



Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa indikator persentase RTH publik Kota Bukittinggi belum memenuhi target berdasarkan undang-undang nomor 26 tahun 2007. Namun Pemerintah Kota Bukittinggi tetap berupaya dalam meningkatkan RTH publik yang representatif.

25. Persentase Fasum yang representatif dan memenuhi standar lingkungan

25.1. Perbandingan Target Realisasi

Persentase Fasum yang representatif dan memenuhi standar lingkungan	=	<i>Jumlah fasum yang representatif dan memenuhi standar lingkungan/jumlah fasum = 67,94%</i>
---	---	--

- Jalan $(158,242/180,17) \times 100\% = 87,83 \%$

Jalan yang ada di Kota Bukittinggi menjadi kewenangan dari Dinas PUPR adapun kegiatan pendukung dari sub indikator ini adalah :

- Peningkatan jalan dalam kota
- Pembangunan Jalan Dalam kota
- Perencanaan pembangunan jalan dalam kota
- Rehabilitasi/ pemeliharaan rutin jalan dalam kota
- Pemeliharaan rutin berkala jalan dalam kota bukittinggi
- Perencanaan rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dalam kota tahun 2019
- Perencanaan DAK jalan 2019

- Jembatan $(28/32) \times 100\% = 87,5 \%$

Jembatan merupakan kewenangan dari Dinas PUPR Kota Bukittinggi dengan kegiatan pendukung :

- Perencanaan pelebaran jembatan jalan Bahder Johan
- Pemeliharaan rutin jembatan

- Trotoar $(10/59) \times 100\% = 16,95\%$

Adapun kegiatan pada Dinas PUPR yang menjadi kewenangannya antara lain :

- Peningkatan trotoar



- Pembangunan Trotoar
 - Perencanaan peningkatan trotoar tahun 2019
 - Pemeliharaan rutin trotoar dalam kota
- Saluran Air $(3.652/4.596) \times 100\% = 79,46\%$

Kegiatan pendukung pada Dinas PUPR Kota Bukittinggi antara lain :

- Perencanaan pembuatan drainase dan pemasangan paving block serta trotoar
- Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong
- Peningkatan drainase
- Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali
- Pembuatan bak resapan penanggulangan banjir

25.2. Realisasi Capaian Target Dari Awal RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan

Realisasi capaian indikator Persentase Fasum yang representatif dan memenuhi standar lingkungan Kota Bukittinggi dibandingkan dengan target akhir RPJMD :

INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD	REALISASI TAHUN 2018	KONDISI AKHIR RPJMD
Persentase Fasum yang representatif dan memenuhi standar lingkungan	55%	67,94	85%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Persentase Fasum yang representatif dan memenuhi standar lingkungan dari awal RPJMD sampai tahun 2018 tetap mengalami kenaikan dari 55% menjadi 67,94% hingga akhir masa RPJMD diharapkan tercapai 85%.

25.3. Analisis Program/ Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator

Adapun kegiatan pendukung dari indikator Persentase Fasum yang representatif dan memenuhi standar lingkungan ini antara lain :

- Peningkatan jalan dalam kota
- Pembangunan jalan dalam kota
- Perencanaan pembangunan dalam kota



- Rehabilitasi pembangunan dan rehab jalan kota
- Perencanaan DAK jalan 2019

SASARAN STRATEGIS 3.1.3

Pemenuhan Target Universal Access (Sanitasi, Air Bersih, Dan Pemukiman Kumuh)

Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 3.1.3 terdiri atas 3 (tiga) indikator kinerja utama, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini :

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN 3.1.3

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Penyediaan air minum layak	90%	92%	102%
2.	Kawasan Kumuh	6 Ha	8,2 Ha	73%
3.	Persentase Sanitasi Layak	95%	96%	101%
Rata-rata Capaian				92%

Dari tabel dapat dilihat, rata-rata capaian 3 (tiga) indikator kinerja sasaran strategis sebesar 92%. Sesuai dengan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan, keberhasilan pencapaian sasaran Strategis termasuk kategori **sangat baik**.

26. Persentase Penyediaan Air Minum Layak

26.1. Perbandingan Target Realisasi

$$\begin{aligned} \text{Persentase} &= \text{Jumlah air minum layak yang tersedia} \\ \text{Penyediaan air} &= 117.956 / \text{jumlah rumah tangga } 128.783 \times 100\% \\ \text{minum layak} &= 92\% \end{aligned}$$

Air minum layak berdasarkan Permenkes no. 492/ MENKES/ PES/ IV/ 2010 adalah air minum yang dapat dikonsumsi yang secara fisik tidak berwarna, tidak berbau, berasa alami, dan jernih. Itu yang secara kasat mata, tapi yang secara parameter biologis air



minum yang layak dikonsumsi harus terbebas dari bakteri E Coli dan Coliform. Selain itu kadar keasaman air juga harus berkisar antara 6,5 – 8,5 , mengandung mineral dibawah 500 (Total dissolved solid < 500), bebas dari zat kimia beracun, logam berat, pestisida, dan tidak mengandung bahan radioaktif. Standar ini juga digunakan oleh WHO sebagai acuan syarat air minum yang layak untuk dikonsumsi.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018 ditargetkan 90% air minum di Bukittinggi sudah termasuk kedalam kategori air minum layak. Realisasinya 92% air minum yang masuk kriteria layak atau dengan tingkat capaian 102%.

Pemenuhan air minum layak/ jumlah rumah tangga yang menggunakan air minum layak adalah sebanyak 117.965 rumah tangga, dari jumlah 128.783 rumah tangga, sehingga ada 10.827 rumah tangga yang menggunakan air minum yang tidak layak berdasarkan Permenkes.

Upaya yang dilakukan untuk penyediaan air bersih adalah dengan program :

4) Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Program Pengembangan Lingkungan Sehat terkait dengan penyediaan air bersih adalah untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan air bersih dimasyarakat. Beberapa upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan pengawasan terhadap penggunaan air minum pada Tempat Tempat Umum dan Tempat Pengolahan Makanan.

5) Program Pengawasan Obat dan Makanan

Program Pengawasan Obat dan Makanan ini secara khusus bertujuan untuk pengawasan sanitasi depot air minum. Seluruh Pemilik depot air Minum isi ulang yang ada di Bukittinggi selalu diberikan penyuluhan dan pelatihan. Air digunakan selalu diperiksa setiap bulannya.

6) Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Program Upaya Kesehatan Masyarakat yang dimaksud adalah Upaya Kesehatan Masyarakat yang dilakukan oleh Puskesmas, salah satunya adalah upaya kesehatan lingkungan. Kegiatan yang dilakukan adalah pengambilan sampel air minum dirumah tangga untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium, verifikasi kepemilikan sarana air minum. Inspeksi sanitasi pada seluruh rumah tangga termasuk penyediaan air bersih.



26.2. Realisasi Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Penyediaan air minum layak dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tahun	Persentase Penyediaan air minum layak
	Capaian Kinerja
2016	83%
2017	103,5%
2018	102%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa adanya penurunan dari pencapaian penyediaan air minum layak dari tahun 2017 ke tahun 2018, namun dalam tahun berikutnya akan lebih diupayakan dalam memfasilitasi penyediaan air minum layak.

26.3. Realisasi Capaian Target Dari Awal RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan

Realisasi capaian indikator Persentase Penyediaan air minum layak Kota Bukittinggi dibandingkan dengan terget akhir RPJMD :

INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD	REALISASI TAHUN 2018	KONDISI AKHIR RPJMD
Persentase Penyediaan air minum layak	85%	92%	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Persentase Penyediaan air minum layak Kota Bukittinggi tahun 2018 dengan realisasi 92%, jika dibandingkan dengan kondisi akhir RPJMD dengan capaian 100%. Pemerintah Kota Bukittinggi tengah berupaya meningkatkan Penyediaan air minum layak dengan melakukan peningkatan pembinaan dan pengawasan kualitas air serta dengan meningkatkan distribusi air minum layak kerumah-rumah warga.

NO	INDIKATOR	TAHUN 2017		TAHUN 2018	
		TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
1	Jumlah desa / Kelurahan yg melaksanakan STBM	2	2	17	17
2	Persentase air minum yang dilakukan pengawasan	54 %	86.38	56%	56%



Adapun kegiatan pendukung dari indikator Persentase Penyediaan air minum layak ini antara lain dengan melakukan kegiatan pembinaan dan pengawasan kualitas air minum dengan indikator kinerja persentase sarana air minum masyarakat memenuhi persyaratan kesehatan dengan anggaran pada tahun 2018 sebanyak Rp. 106.316.610,-, Pembuatan sumur bor dan pengadaan dan pemasangan pipa jaringan air minum (DAK Air Minum 2018)

27. Kawasan Kumuh

27.1. Perbandingan Target Realisasi

<i>kawasan kumuh</i>	=	<i>Luas Kawasan Kumuh 30,60 Ha akhir tahun 2018 tinggal 22,4 Ha di Kota Bukittinggisehingga terjadi penurunan sebesar 8,2 Ha</i>
----------------------	---	--

Penetapan indikator kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi ditujukan untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Dinas yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi pelaksanaan urusan wajib Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Bukittinggi. Oleh karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Kota Bukittinggi tahun 2016-2021.



Sesuai dengan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Kota Bukittinggi tahun 2016–2021, indikator dan target kinerja yang terkait dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu:

3. Kawasan Kumuh dengan kondisi awal 2 (dua) kelurahan dan ditargetkan pada akhir RPJMD tidak ada.
4. Luasan kawasan permukiman kumuh pada kondisi awal sebesar 30,6 Ha dan ditargetkan 0 Ha pada akhir RPJMD.

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bukittinggi No. 188.45-300-2014 Tahun 2014 terdapat 2 (dua) lokasi kawasan kumuh kota kategori kumuh berat dengan luas total 30,6 Ha, yaitu Kawasan Aur Tanjungkang Tengah Sawah dengan luas kawasan lebih kurang 8,48 Ha dan Pakan Kurai dengan luas 22,12 Ha yang terletak di Kecamatan Guguk Panjang.

Terhadap penanganan kawasan permukiman ini sejak tahun 2015 sampai dengan 2016 telah dilakukan berbagai investasi program baik oleh Pemerintah Kota Bukittinggi maupun Pemerintah Pusat melalui kegiatan Kolaborasi Kota Program KOTAKU. Agar luasan kawasan kumuh sesuai data diatas tidak bertambah, maka perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan munculnya kawasan kumuh baru di kota Bukittinggi.

Tahun 2017

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Tahun 2017 ada dua kegiatan yang mendukung pelaksanaannya, yaitu Pendamping Kegiatan P2KP atau KOTAKU dan Pendamping Kegiatan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh (RP2KPKP).

3. Pendamping Kegiatan P2KP/KOTAKU, dengan pagu dana Rp. 51.685.150,- terealisasi Rp. 29.373.600,- atau sebesar 57% anggaran yang terealisasi.
4. Pendamping Kegiatan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh (RP2KPKP), dengan pagu dana Rp. 96.543.875,- terealisasi Rp. 24.838.440,- atau sebesar 26% anggaran yang terealisasi.

Di tahun 2017 kawasan kumuh dengan kondisi awal 2 (dua) kelurahan, yakni Aur Tanjungkang Tengah Sawah dan Pakan Kurai dan ditargetkan di tahun 2017 tidak ada lagi kawasan kumuh di dua kelurahan tersebut. Namun capaian di akhir tahun 2017 masih terdapat kawasan kumuh di dua kelurahan tersebut (0%).



Luasan kawasan permukiman kumuh pada kondisi awal sebesar 30,60 Ha dan ditargetkan di tahun 2017 menjadi 20,40 Ha. Namun di akhir tahun 2017 capaian belum ada, masih 30,60 Ha (0%).

Hal tersebut disebabkan karena di tahun 2017 kegiatan yang dilaksanakan masih berupa pengusulan kegiatan dimana pelaksanaan kegiatannya akan direncanakan pada tahun 2018.

27.2. Realisasi Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi Capaian Kinerja kawasan kumuh dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tahun	Kawasan Kumuh
	Capaian Kinerja
2017	45%
2018	73%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian realisasi dari kawasan kumuh Kota Bukittinggi telah mengalami penurunan dari tahun 2017 dengan capaian 45% naik menjadi 73% [pada tahun 2018, hal ini menunjukkan adanya upaya yang serius dari Pemerintah Kota Bukittinggi untuk meminimalisir dari luasan kawasan kumuh, sehingga taraf hidup masyarakatpun diharapkan meningkat.

27.3. Realisasi Capaian Target Dari Awal RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan

Realisasi capaian indikator nilai SAKIP Kota Bukittinggi dibandingkan dengan target akhir RPJMD :

INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD	REALISASI TAHUN 2018	KONDISI AKHIR RPJMD
Kawasan Kumuh	30,60	8,2 Ha	0

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kawasan kumuh yang ada di Kota Bukittinggi saat ini masih terdapat di dua kelurahan dengan luasan 22,4 Ha, jika dibandingkan dengan luasan awal kawasan kumuh yang ada telah terdapat pengurangan yang signifikan dari awal pelaksanaan RPJMD dengan luasan 30,60 Ha. Kota Bukittinggi melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman terus akan melakukan pengurangan jumlah kawasan kumuh sehingga pada akhir masa RPJMD hal ini dapat diselesaikan.



27.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Indikator

27.5. Analisis Program/ Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Tahun 2018 ada dua kegiatan yang mendukung pelaksanaannya, yaitu Pendamping Kegiatan P2KP/KOTAKU dan Pendamping Kegiatan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh (RP2KPKP).

Pendamping Kegiatan P2KP/KOTAKU, dengan pagu dana Rp. 21.965.000,- terealisasi Rp. 6462.750,- atau sebesar 29,42% anggaran yang terealisasi.

Pendamping Kegiatan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh (RP2KPKP), dengan pagu dana Rp. 49.240.500,- terealisasi Rp. 35.801.312,- atau sebesar 72,71% anggaran yang terealisasi.

Di tahun 2018 kawasan kumuh dengan kondisi awal 2 (dua) kelurahan dan ditargetkan yakni Aur Tajungkang Tengah Sawah dan Pakan Kurai tidak ada lagi kawasan kumuh di dua kelurahan tersebut. Luasan kawasan permukiman kumuh pada kondisi awal sebesar 30,60 Ha dan ditargetkan di tahun 2018 menjadi 10,20 Ha.

Capaian di akhir tahun 2018 masih terdapat kawasan kumuh di dua kelurahan (0%), namun luas kawasan permukiman kumuh berkurang sebesar 8,2 Ha, dari 30,60 Ha menjadi 22,4 Ha (26,8%). Di tahun 2018 juga dilakukan kegiatan pembuatan Ranperda RP2KPKP.

28. Persentase Sanitasi Layak

28.1. Perbandingan Target Realisasi

$$\begin{array}{l} \text{\% sanitasi} \\ \text{layak} \end{array} = \frac{\begin{array}{l} \text{Rumah tangga yang} \\ \text{memiliki sanitasi layak} \\ \text{sebanyak 123.567} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Seluruh rumah tangga} \\ \text{128.783} \end{array}} \times 100\% = 96\%$$

Pembangunan Sanitasi Kota Bukittinggi telah dirumuskan dalam Buku Putih Strategi Sanitasi Kota (SSK) yang dimuat dalam bentuk Memorandum Program integrasi



program pemerintah kota, pemerintah provinsi dan nasional melalui Dirjen Ciptakarya Kementerian PUPR. Monitoring dan evaluasi secara nasional program ini dilakukan dalam City Sanitation Summit setiap tahunnya seluruh pemerintah kabupaten dan kota peduli sanitasi, yang tergabung dalam AKKOPSI.

Pada tahun 2016, berdasarkan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi ditargetkan 90% sanitasi yang ada di Bukittinggi sudah termasuk dalam kategori sanitasi layak, dan pada akhir tahun 2019, sesuai target nasional 100% sanitasi sudah harus masuk dalam sanitasi layak. Fokus penanganan dalam memenuhi sanitasi layak ini meliputi penyediaan tangki septik baik komunal ataupun terpusat. Selanjutnya penyediaan IPLT yang juga akan diarahkan sebagai IPLT Regional karena keterbatasan lahan di Bukittinggi.

Pencapaian target kinerja ini diupayakan melalui kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kebersihan dan Pertamanan serta Kantor Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi. Pembiayaan program juga dibiayai bersama melalui APBD pemerintah provinsi dan program Dirjen Ciptakarya Kementerian PUPR.

Keberhasilan program ini juga sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat, karena itu dilakukan pertemuan yang intens melalui pemerintahan kecamatan dan kelurahan dan lembaga keswadayaan masyarakat atau kelompok swadaya masyarakat yang ada pada seluruh kelurahan.

Persentase sanitasi layak Kota Bukittinggi pada tahun 2015 tercatat 93,12% sementara tahun 2016 terjadi penurunan signifikan menjadi 72,72% dari 95% yang ditargetkan, dan pada tahun 2017 dengan target 90% terealisasi 90,05% dan pada tahun 2018 ditargetkan 95% terealisasi 96% dengan realisasi capaian kinerja 101% Kondisi ini merupakan penyesuaian terhadap data pada Strategi Sanitasi Kota dan terjadinya penurunan daya dukung lingkungan.

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan sanitasi yang layak adalah dengan program :

3) Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Program Pengembangan Lingkungan Sehat adalah upaya untuk pengawasan terhadap lingkungan agar tetap memiliki sanitasi yang layak. Target utama kegiatan ini adalah mewujudkan Kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Beberapa upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan pengawasan kepada Tempat Tempat Umum dan Tempat Pengolahan Makanan,



diantaranya pemeriksaan sanitasi pasar, rumah sakit, hotel, rumah makan, sekolah, Puskesmas dan tempat umum lainnya.

4) Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Program Upaya Kesehatan Masyarakat yang dimaksud adalah Upaya Kesehatan Masyarakat yang dilakukan oleh Puskesmas, salah satunya adalah upaya kesehatan lingkungan. Kegiatan yang dilakukan adalah Inspeksi sanitasi pada seluruh rumah tangga yang ada di wilayah kerja Puskesmas, memberikan pelayanan klinik sanitasi, membina kantin sekolah serta upaya promosi untuk meningkatkan sanitasi lingkungan.

28.2. Realisasi Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Sanitasi Layak dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tahun	Persentase Sanitasi Layak
	Capaian Kinerja
2016	76%
2017	100%
2018	101%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2016 ke tahun 2017 telah terdapat peningkatan pencapaian sanitasi layak bagi masyarakat Kota Bukittinggi, dan dari tahun 2017 k tahun 2018 terdapat peningkatan realisasi capaian kinerja, hal ini membuktikan bahwa telah tercapainya kehidupan bersih dan sehat ditengah-tengah masyarakat sebagai wujud upaya dari Pemerintah Kota Bukittinggi dalam meningkatkan layanan kepada masyarakat.

NO	INDIKATOR	TAHUN 2017		TAHUN 2018	
		TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
1	Jumlah desa / Kelurahan yg melaksanakan STBM	2	2	17	17
2	Persentase air minum yang dilakukan pengawasan	54 %	86.38	56%	56%
3	Persentase rumah sakit yang melakukan pengolahan Limbah medis sesuai standar	20 %	100 %	40%	40%
4	Persentase tempat pengolahan makanan (TPM) yang memenuhi syarat Kesehatan.	20 %	79.12 %	30%	39.9%
5	Persentase Tempat- Tempat Umum yang memenuhi syarat	54 %	92 %	56 %	95.18 %



28.3. Realisasi Capaian Target Dari Awal RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan

Realisasi capaian indikator sanitasi layak Kota Bukittinggi dibandingkan dengan target akhir RPJMD :

INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD	REALISASI TAHUN 2018	KONDISI AKHIR RPJMD
Sanitasi Layak	85%	96%	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase sanitasi layak Kota Bukittinggi tahun 2018 dengan realisasi 96%, jika dibandingkan dengan kondisi akhir RPJMD dengan realisasi 85% ada 4% yang harus dicapai sampai akhir masa RPJMD dengan target 100%. Pemerintah Kota Bukittinggi tengah berupaya meningkatkan sanitasi layak disetiap rumah warga sehingga terjadinya peningkatan mutu kesehatan masyarakat.

28.4. Analisis Program/ Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator

Adapun kegiatan pendukung dari indikator nilai SAKIP ini antara lain dengan melakukan kegiatan pengkajian dan pengembangan lingkungan sehat, dan pembangunan toilet umum dengan anggaran Rp. 906.563.700,-

TUJUAN 3.2 : PENINGKATAN PENATAAN RUANG KOTA

Tujuan kedua dari misi 3 ini didukung oleh beberapa sasaran strategis berikut:

SASARAN STRATEGIS 3.2.1

Pengendalian Dan Pemanfaatan Ruang Kota



Indikator Kinerja utama yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 3.2.1 terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja utama, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini :

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN 3.2.1

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Kesesuaian pemanfaatan ruang kota	65%	60,76%	93%
Rata-rata Capaian				93%

Dari tabel dia atas dapat dilihat, rata-rata capaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis adalah sebesar 93%. Sesuai dengan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan, keberhasilan pencapaian sasaran Strategis termasuk kategori **sangat baik**.

29. Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kota

29.1. Perbandingan Target Realisasi

$$\text{Kesesuaian pemanfaatan ruang kota} = \frac{\text{Ruang kota yang dimanfaatkan sesuai peruntukannya } 175 \text{ Ha}}{\text{Pemanfaatan ruang kota } 288 \text{ Ha}} \times 100\% = 60,76\%$$

Kesesuaian pemanfaatan ruang kota sesuai peruntukannya adalah salah satu imlementasi dari Perda Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010 – 2030. Pengontrolannya dilakukan melalui penerbitan Rekomendasi Peruntukan Lahan, yang diterbitkan oleh Dinas PU Kota Bukittinggi sebelum penerbitan izin mendirikan bangunan.

Sementara bangunan yang didirikan tidak memiliki izin atau tidak sesuai dengan peruntukan lahan diawasi melalui razia gabungan yang melibatkan Dinas PU, SKPD layanan perizinan, Satpol PP dan pemerintahan kecamatan dan kelurahan.

Untuk bangunan khusus dalam kawasan yang lebih luas, Pemerintah Kota Bukittinggi mengoptimalkan peran Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) yang diketuai oleh Sekretaris Daerah dan sekretariatnya di Bappeda. Badan ini melakukan analisa dan menerbitkan peruntukan lahan sesuai dengan pola ruang daerah.



Pada tahun 2018, ditargetkan 65% pemanfaatan ruang kota sudah sesuai dengan peruntukan lahan dalam pola ruang kota yang termuat dalam RTRW, sebelum ditetapkannya Rencana Ditail Ruang Kota. Dengan program yang ada pada Dinas PU, Bappeda dan SKPD terkait lainnya, pemanfaatan ruang kota sebanyak 60,76% sudah sesuai dengan peruntukan ruang.

Pemanfaatan ruang kota yang tidak sesuai dengan peruntukan lahan dilakukan melalui pengurusan, terutama berupa bangunan tanpa izin di lahan milik pemerintah. Bangunan tanpa izin diharuskan mengurus izin, sementara itu juga dilakukan revisi terhadap RTRW sesuai dinamika yang berkembang di masyarakat. Hal ini dimungkinkan sesuai peraturan perundang-undangan penataan ruang daerah, setelah dilakukan peninjauan kembali dan diproses secara teknis sesuai ketentuan pemerintah.

Kesesuaian pemanfaatan ruang kota dengan RTRW Kota Bukittinggi pada tahun 2015 tercatat sebesar 52%, dan pada tahun 2016 terealisasi 93%, pada tahun 2017 ditargetkan 60%, tahun 2018 dengan target 60% terealisasi 60,76%. Capaian kinerja ini didukung melalui upaya yang sudah disampaikan sebelumnya seperti pengurusan, terutama berupa bangunan tanpa izin di lahan milik pemerintah. Sejalan dengan revisi RTRW, Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Bappeda dan Dinas PU juga melakukan penyesuaian data dengan kondisi lapangan.

Jumlah Pemanfaatan ruang kota yang sesuai dengan peraturan 175 Ha, Jumlah pemanfaatan ruang kota yang tidak sesuai aturan 288 Ha, bentuk-bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang kota dan update yang dilakukan untuk menyelesaikannya :

- Pembangunan Perumahan di kawasan ngarai sianok
- Pembangunan di sempadan ngarai sianok
- Pembangunan di kawasan RTH
- Pembangunan di kawasan rel kereta api

29.2. Realisasi Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi dan Capaian Kinerja Kesesuaian pemanfaatan ruang kota dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tahun	Kesesuaian pemanfaatan ruang kota
	Capaian Kinerja
2016	154%



2017	103,8%
2018	93%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terjadi penurunan realisasi capaian dari tahun 2016 sampai tahun 2018 hal ini dikarenakan semakin tingginya target capaian dari tahun ke tahun, dalam upaya kesesuaian pemanfaatan ruang kota di Kota Bukittinggi akan terus ditingkatkan sehingga terwujudnya kesesuaian ruang kota yang representatif.

29.3. Realisasi Capaian Target Dari Awal RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan

Realisasi capaian indikator Kesesuaian pemanfaatan ruang kota Kota Bukittinggi dibandingkan dengan target akhir RPJMD :

INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD	REALISASI TAHUN 2018	KONDISI AKHIR RPJMD
Kesesuaian pemanfaatan ruang kota	55%	60%	70%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kesesuaian pemanfaatan ruang kota pada awal RPJMD dengan capaian 55% sedangkan pada tahun 2018 meningkat menjadi 60%, sampai pada akhir masa RPJMD Pemerintah Kota Bukittinggi menargetkan capaian kesesuaian pemanfaatan ruang kota menjadi 70%.

29.4. Analisis Program/ Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator

Adapun kegiatan pendukung dari indikator kesesuaian pemanfaatan ruang kota ini antara lain dengan melakukan pembuatan keterangan rancangan kota dengan anggaran Rp. 22.688.384,-

MISI IV : MENGEMBANGKAN SISTEM EKONOMI PERKOTAAN SECARA LEBIH BERDAYA GUNA

Untuk mewujudkan misi 4 tersebut, sesuai dengan Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2017, tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai dari pelaksanaan program dan kegiatan adalah sebagai berikut:



No	TUJUAN	No	SASARAN STRATEGIS
4.1	Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Perkotaan Yang Berkualitas	4.1.1	Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi
4.2	Menurunkan Angka dan Kemiskinan Pengangguran	4.2.1	Menurunnya Tingkat Kemiskinan

Analisis capaian indikator kinerja per sasaran strategis misi IV adalah sebagai berikut

TUJUAN 4.1 : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN EKONOMI PERKOTAAN YANG BERKUALITAS

Untuk mencapai tujuan tersebut hasil yang akan dicapai telah ditetapkan dalam sasaran strategis sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS 4.1.1
Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan
Ekonomi

Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 4.1.1 terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja utama, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini :

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN 4.1.1

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Pertumbuhan Ekonomi	6,20%	6,04	97
2.	PDRB Perkapita	52,50 juta	54,12 juta	99
3.	Indeks Gini	<0,3	0,329	109



4.	Jumlah Investasi	30%	27%	90
Rata-rata Capaian				98,7%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator kinerja utama sasaran strategis berkembangnya koperasi aktif adalah sebesar 98,7%. Sesuai dengan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan, keberhasilan pencapaian sasaran Strategis termasuk kategori **sangat baik**.

30. Pertumbuhan Ekonomi

30.1. Perbandingan Target Realisasi

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{\text{Pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah}}{\text{perekonomian dalam selang waktu tertentu}} = 6,04\%$$

Pertumbuhan ekonomi tahun 2017 sebesar 6,04 persen, namun sektor pertambangan dan penggalian berkontraksi sebesar 0,61 persen. Sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah sektor pengadaan listrik dan gas sebesar 10,15 persen. Sektor-sektor yang sangat dominan sumbangannya terhadap total PDRB Kota Bukittinggi, yaitu sektor Tersier sektor perdagangan, hotel dan restoran, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, sektor listrik, gas, dan air bersih, sektor jasa- jasa Hal ini sesuai dengan potensi Kota Bukittinggi sebagai kota wisata pariwisata ,perdagangan dan jasa. Pemerintah Kota Bukittinggi terus berbenah dan memenuhi seluruh infrastruktur pendukung sektor utama kota ini yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan dominansi sektor tersier terhadap struktur ekonomi kota.

Dibandingkan tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi sedikit mengalami kontraksi dari 6,12% menjadi 6,04% hal ini merupakan dampak secara nasional yang menyebabkan turunnya daya beli masyarakat dan kurang berkembangnya sektor ril sehingga pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi dari sektor primer dan sekunder mengalami kontraksi yang lebih besar. Kenyataan ini belum sepenuhnya tertutupi oleh pertumbuhan ekonomi dari sektor tersier.

Ditinjau dari besaran PDRB harga konstan maupun harga berlaku terjadi peningkatan dari tahun 2015 ke 2016. Pada tahun 2015 PDRB harga berlaku kota bukittinggi adalah sebesar Rp 6.141.524,62 juta meningkat menjadi Rp 6.749.791,92 juta pada tahun



2016. sementara berdasarkan harga konstan pada tahun 2015 adalah Rp 4.873.746,31 juta meningkat menjadi Rp 5.168.023,69 juta pada tahun 2016.

31. PDRB Perkapita

31.1. Perbandingan Target Realisasi

PDRB Perkapita	=	$\frac{\text{Jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha}}{\text{jumlah penduduk pertengahan tahun}}$ = 58,78
----------------	---	---

PDRB per kapita Kota Bukittinggi tahun 2017 adalah sebesar Rp 58,78 juta meningkat dari Tahun 2016 yang berjumlah Rp 54,38 juta. Kondisi ini merupakan dampak dari pertumbuhan ekonomi kota yang relatif tinggi sementara pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan relatif stabil. Cukup tingginya nilai PDRB perkapita dan pendapatan regional pada beberapa tahun terakhir belum bisa membuat kita berbesar hati jika tidak diikuti dengan peningkatan daya beli masyarakat, karena dalam peningkatan ekonomi yang cukup tinggi itu di dalamnya masih dipengaruhi oleh inflasi.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bukittinggi adalah mengembangkan sektor-sektor potensial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan mempertahankan dan bahkan menekan laju pertumbuhan penduduk sehingga menjadi stabil atau malah cenderung berkurang. Hal penting lain yang sangat terkait dengan ini adalah mengendalikan inflasi walaupun realitanya pada tahun 2016 tingkat inflasi terlalu rendah, berada pada level dibawah 3%, sehingga tidak terlalu mendorong bertumbuhnya ekonomi dari sektor ril. Walaupun Kota Bukittinggi terkait hal ini tidak terlalu dirugikan karena struktur ekonominya yang didukung oleh sektor tersier namun kontribusi ekonomi luar Kota Bukittinggi yang signifikan terhadap kondisi ekonomi kota secara tidak langsung berdampak, yang pada gilirannya juga akan menurunkan PDRB per kapita.

31.2. Realisasi Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi dan Capaian Kinerja PDRB Perkapita a dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tahun	PDRB Perkapita
	Capaian Kinerja
2016	78%



2017	99%
------	-----

32. Indeks Gini

32.1. Perbandingan Target Realisasi

Indeks Gini	=	Distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan diantara populasi = 0,32
-------------	---	---

Indeks Gini (Gini Rasio) merupakan suatu ukuran pemerataan atau etimpangan distribusi pengeluaran. Nilai Gini Rasio berkisar antara 0 dan 1 dengan klasifikasi antara lain :

4. Ketimpangan Rendah ($G < 0,3$)
5. Ketipangan Sedanag ($0,3 \leq G \leq 0,5$)
6. Ketimpangan Tinggi ($G \geq 0,5$)

Jika Kooefisien bernilai 0, berarti ketimpangan sempurna.

Indeks Gini Kota Bukittinggi pada tahun 2016 adalah sebesar 0,329, yang menggambarkan bahwa Kota Bukittinggi termasuk dalam daerah yang memiliki ketipangan sedang. Kota Bukittinggi termasuk dalam daerah yang mempunyai ketimpangan sedang.

Jika dibandingkan dengan tahun 2015, maka pemerataan penduduk lebih mengarah ke pemerataan sempurna dimana indeks gini Kota Bukittinggi sebesar 0,340. Dari hasil Susenas 2016, diperoleh hasil rata-rata pengeluaran Per Kapita di Kota Bukittinggi paling besar di kelompok Makanan, yaitu sebesar 50,42 persen, sedangkan pengeluaran di kelompok bukan makanan sebesar 49,58 persen. Secara umum, 3 pengeluaran terbesar yaitu: kelompok perumahan dan fasilitas rumah sebesar 23,70 persen, kelompok makanan dan minuman jadi sebesar 18,34 persen, dan aneka barang dan jasa sebesar 13,16 persen.

Dilihat dari struktur ekonomi kota, dan distribusi masyarakat yang bekerja pada sektor tersebut, terlihat bahwa sektor informal yang banyak menyerap tenaga kerja belum maksimal, malah sedikit berkontraksi. Hal lain juga terjadi karena sektor rill kurang berkembang, sehingga sebaran penduduk yang berusaha di sektor informal terus meningkat. Hal ini juga mendorong indeks gini sedikit bergeser ke tingkat sedang.

Beberapa intervensi yang dilakukan pemerintah kota untuk mendorong Bergeraknya sektor ril diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang dominan menjadi usaha masyarakat.



27. Jumlah Investasi

27.1. Perbandingan Target Realisasi

$$\text{Jumlah Investasi} = \text{Jumlah investasi yang ditanamkan di Kota Bukittinggi selama 1 tahun sebanyak 27\%}$$

Pada tahun 2017 ditargetkan pertumbuhan investasi Kota Bukittinggi sebesar 30%. Berdasarkan data dari DPMPTSP Kota Bukittinggi sampai akhir tahun 2017 penanaman modal di Bukittinggi baik yang berasal dari dalam negeri maupun asing adalah sebesar 1.281.juta atau dengan rincian Rp. 1.269.000.000,- dari dalam negeri dan Rp. 12.000.000,- luar negeri. Capaian ini dibandingkan dengan realisasi penanaman modal pada tahun 2016 sebesar Rp. 1.771.juta mengalami penurunan yang signifikan sehingga terjadi penurunan sebesar 27% hal ini disebabkan beberapa permohonan penanaman modal terutama terkait pembangunan hotel dan pernafasan jasa lainnya belum dapat dituntaskan ditahun 2017 akibat keterlambatan revisi RT RW Kota Bukittinggi 2016-2021 persoalan lainnya juga terkait dengan keterbatasan lahan sesuai dengan kriteria yang diminta oleh investor.

Pembangunan sebuah kota tidak bisa dibiayai oleh pemerintah saja karena keterbatasan anggaran. Percepatan pembangunan kota membutuhkan dukungan pembiayaan dunia swasta melalui investasi. Mendukung masuknya investasi asing ataupun dalam negeri, pemerintah harus menyediakan infrastruktur pendukung, regulasi yang jelas dan iklim yang mendukung investasi, serta kejelasan dan kemudahan dalam berinvestasi.

Pengelolaan investasi di Bukittinggi dilaksanakan dengan melakukan pengawasan, pembinaan dan pemantauan terhadap BUMN/ BUMD yang ada di Kota Bukittinggi. Sementara besaran investasi masuk Bukittinggi diketahui melalui proses perizinan oleh perusahaan dalam negeri ataupun modal asing.

Data Dukung :

Kita memang selalu mengharapkan dari tahun ke tahun ada peningkatan jumlah investor yang masuk ke Kota Bukittinggi, tapi hal itu tidak selalu mutlak dan dapat kita prediksi. Untuk masuknya investor, banyak hal yang harus kita persiapkan diantaranya Ketersediaan lahan yang sangat terbatas di Kota Bukittinggi dan Kesesuaian peruntukan lahan dengan RTRW



Perbandingan masuknya investor ke Kota Bukittinggi tahun 2016 dengan tahun 2017 adalah :

- Tahun 2016 hanya 1 (satu) perusahaan yang sudah mengantongi izin prinsip untuk membuka usaha di Kota Bukittinggi yaitu PT. UKAY ASIA INDONESIA dengan nilai Investasi sebesar US\$. 4.000.000,- yang bergerak di Bidang Perhotelan.
- Tahun 2017 dari PMDN hanya 1 (satu) Badan Usaha yang sudah memiliki Izin Prinsip yaitu Gust House 10, dengan nilai Investasi sebesar Rp. 1.269.000.000,- yang bergerak pada Bidang usaha Penginapan, sedangkan dari PMA juga 1 (satu) Perusahaan yang sudah memiliki Izin Prinsip yaitu PT.PENGUIN FAMILY SHOES yang bergerak pada bidang usaha industry alas kaki dan industry sepatu olah raga.

Bidang/Jenis Usaha yang banyak dipilih investor adalah pada bidang perhotelan dan penginapan untuk mendukung kegiatan pada bidang kepariwisataan.

27.2. Realisasi Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi dan Capaian Kinerja jumlah investasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tahun	Jumlah Investasi
	Capaian Kinerja
2016	93%
2017	90%

TUJUAN 4.2 : Menurunkan Angka Kemiskinan dan Pengangguran

Untuk mencapai tujuan tersebut hasil yang akan dicapai telah ditetapkan dalam sasaran strategis sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS 4.2.1

Menurunnya Tingkat Kemiskinan



Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 4.2.1 terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja utama, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini :

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN 4.1.1

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Tingkat Kemiskinan	3,5%	5,48	68%
Rata-rata Capaian				68%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator kinerja utama sasaran strategis berkembangnya koperasi aktif adalah sebesar 68%. Sesuai dengan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan, keberhasilan pencapaian sasaran Strategis termasuk kategori **cukup**.

28. Tingkat Kemiskinan

19.1. Perbandingan Target Realisasi

$$\text{Tingkat Kemiskinan} = \text{Jumlah penduduk miskin} = 68\%$$

Kemiskinan telah menjadi fenomena sosial yang menuntut perhatian serius dari semua pihak, baik pemerintah melalui beberapa SKPD yang terkait maupun masyarakat. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan kemiskinan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan interaksi sosial. Itulah sebabnya masalah kemiskinan dapat muncul sebagai penyebab ataupun pemberat berbagai jenis permasalahan kesejahteraan sosial lainnya seperti ketunaan sosial, kecacatan, keterlantaran, ketertinggalan/ keterpencilan dan keresahan sosial, yang pada umumnya berkenaan dengan keterbatasan kemampuan untuk mengakses berbagai sumber pelayanan.

Dinas Sosial menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terdiri dari 26 jenis PMKS dan salah satunya merupakan penduduk miskin. Untuk berhasilnya sasaran Dinas Sosial dalam penanganan penduduk miskin perkotaan, telah dilakukan beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan sasaran dinas sosial, penurunan masyarakat miskin perkotaan. Diantaranya kegiatan perlindungan sosial,



rehabilitasi sosial, jaminan sosial, serta pemberdayaan sosial untuk memberikan penguatan kepada fakir miskin, sehingga fakir miskin dapat mandiri. Untuk menangani permasalahan tersebut dirumuskan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Sosial terdiri dari :

Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Mandiri

Realisasi indikator ini untuk tahun 2018 yang lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi tahun 2017. Pada Tahun 2018, kegiatan untuk penanganan PMKS lebih banyak dilakukan dibandingkan dengan tahun 2017. Dari 26 PMKS yang ada 20 diantaranya telah dilakukan penanganan oleh Dinas Sosial yang dipersentasekan sekitar 76,92 %. Kegiatan Penanganan PMKS diantaranya adalah :

- ✓ Peningkatan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk Program Keluarga Harapan (PKH) yang pada tahun 2017 berjumlah 954 KPM, sedangkan tahun 2018 meningkat menjadi 1608 KPM.
- ✓ Jumlah KPM penerima Beras Sejahtera (Rastra) pada Tahun 2018 sebanyak 2.908 KPM, untuk penyaluran bulan Januari sampai dengan September 2018.
- ✓ Pada bulan Oktober penerima Rastra beralih menjadi penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Kota Bukittinggi termasuk lokasi perluasan BPNT Tahap III bulan Oktober 2018 sebanyak 3.121 KPM. Penyaluran BPNT dapat dilakukan pada e-Warong, KUBe dan Agen Brilink.
- ✓ Pada Tahun 2018 juga diberikan bantuan untuk Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) untuk direnovasi, sebanyak 50 buah rumah se Kota Bukittinggi.
- ✓ Pemberdayaan terhadap Perempuan Rawan Sosial Ekonomi telah dilaksanakan untuk 100 Orang PRSE, yang diberikan keterampilan untuk membuka usaha dibidang kuliner.
- ✓ Pada Tahun 2018 juga dilakukan pembentukan dan pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBe) Fakir Miskin melalui 3 (tiga) aspek yaitu Kelembagaan, Ekonomi dan sosial.
- ✓ Kelompok Usaha Bersama (KUBe) Fakir miskin yang telah terbentuk sebanyak 70 KUBe dengan anggota 10 orang masing-masing nya, sehingga anggota KUBe Fakir Miskin sebanyak 700 orang.
- ✓ Pada Tahun 2018, ditambah lagi bantuan untuk 30 KUBe FM dengan jumlah anggota sebanyak 300 orang.



- ✓ KUBe e-Warong atau KUBe Jasa dibentuk sebanyak 5 KUBe dengan jumlah anggota sebanyak 50 Orang.
- ✓ KUBe pengembangan untuk Fakir Miskin sebanyak 6 KUBe, dan pada tahun 2018 ditambah lagi 2 KUBe pengembangan dengan anggaran dari APBN.
- ✓ Untuk penyandang Disabilitas telah ditangani dengan memberi bantuan Alat Bantu Dengar sebanyak 10 orang, bantuan kursi roda 13 orang, bantuan dari Program Keluarga Harapan sebanyak 41 orang dan hibah bansos dari IPSM sebanyak 50 orang.
- ✓ Untuk kasus Orang Terlantar telah ditangani sebanyak 37 kasus selama Tahun 2018.
- ✓ Kasus Anak Bayi terlantar telah dilakukan penanganan sebanyak 4 kasus selama tahun 2018.
- ✓ Untuk Lansia telah mendapat bantuan dari Program Keluarga Harapan sebanyak 132 Orang dan dari Hibah Bansos yang dikelola IPSM sebanyak 175 Orang.
- ✓ Untuk Korban Bencana Korban bencana alam dan bencana sosial yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat terealisasi secara maksimal (100%). Pada tahun 2018 terjadi bencana alam longsor tebing, banjir dan bencana sosial kebakaran. Masyarakat terkena dampak yang dilaporkan Kelurahan adalah sebanyak 523 KK, yang masing-masing kepala keluarga (KK) mendapatkan bantuan berupa makan harian selama masa tanggap darurat dan pemberian matras, serta family kit bagi korban bencana. Uraian bencana yang terjadi pada tahun 2017 antara lain:
 - Korban Bencana Sosial, Kebakaran : 36 KK
 - Korban Bencana Alam, Longsor Tebing : 2 KK
 - Korban Bencana Alam, Banjir : 485 KK

Masyarakat Miskin keluar dari Basis Data Kemiskinan

Dari data kemiskinan hasil verifikasi berjumlah 7.554 KK telah dilakukan verifikasi data dan terdapat 1.430 KK yang dikeluarkan dari data kemiskinan berdasarkan hasil verifikasi dan validasi Basis Data Terpadu bulan November 2018. Dari data 1.430 KK tersebut terdapat KK miskin yang telah mampu, ganda dan tidak ditemukan, dianggap telah pindah dan keluar dari Kota Bukittinggi. Capaian masyarakat miskin yang keluar dari data kemiskinan berdasarkan data 2018 adalah sebesar 18,90 %. Total Basis Data Terpadu hasil verifikasi dan validasi bulan November 2018 setelah dikurangi data yang keluar, berjumlah 6.154 KK.

PSKS yang berpartisipasi atau yang aktif menangani permasalahan kesejahteraan sosial



Pada Tahun 2018, kondisi capaian Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif melaksanakan program kesejahteraan sosial adalah 68,23 %. Pada akhir masa Renstra, diharapkan mencapai 80%. Pencapaian target ini akan dilakukan melalui Program Pemberdayaan seluruh Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang ada di Kota Bukittinggi, serta dengan menumbuhkan wahana kesejahteraan sosial baru seperti Rehabilitasi Berbasis Masyarakat, Penumbuhan Family Care Unit, peningkatan nilai-nilai kesetiakawanan sosial di Kota Bukittinggi, serta dengan terus melakukan pembinaan lanjutan terhadap kapasitas organisasi sosial, Taruna Siaga Bencana, Pekerja Sosial Masyarakat, Karang Taruna, Yayasan dan LKS yang ada di Kota Bukittinggi.

Pada Tahun 2018 sosialisasi mengenai penumbuhan Family Care Unit sudah mulai dilakukan untuk menumbuhkan minat keluarga pionir (keluarga kuat) untuk membantu keluarga plasma (keluarga lemah), sehingga keluarga plasma merasakan bantuan dari keluarga pionir. Dari 13 Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang ada, 9 diantaranya sudah berpartisipasi aktif dalam penanganan PMKS Kota Bukittinggi. Untuk itu, pada tahun mendatang diharapkan seluruh PSKS dapat berpartisipasi aktif, baik PSKS dari internal maupun dari masyarakat sendiri.

Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam menanggulangi bencana, Pada tahun 2017 telah dibentuk Kampung Siaga Bencana di Kelurahan Kayu Kubu, Bukit Apit Puhun dan Pulau Anak Aia. Kampung siaga bencana ini termasuk bagian dari PSKS aktif menangani masalah bencana. Kampung Siaga Bencana dibentuk pada daerah yang rawan terjadi bencana, dan di daerah tersebut juga dibentuk Taruna Siaga Bencana di masing-masing kelurahan tersebut. Untuk tingkat kota Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kota Bukittinggi, yang aktif berpartisipasi dalam penanggulangan korban pasca bencana yang berjumlah 29 orang yang merupakan utusan dari masing-masing kelurahan. Dengan adanya Kampung Siaga Bencana dan Tagana ini, maka Capaian perlindungan sosial bagi korban bencana alam tahun 2018 adalah 100%.

Di Kota Bukittinggi Tahun 2018 terdapat 15 Organisasi Sosial yang aktif bergerak di bidang penanganan kesejahteraan sosial, serta terdapat 125 orang Pekerja Sosial Masyarakat yang turut menunjang pelaksanaan kegiatan sosial Dinas. Sedangkan jumlah Karang Taruna yang aktif adalah sebanyak 24 buah Karang Taruna dari 24 Karang Taruna yang telah terbentuk di Kota Bukittinggi. Selain itu, Di kota Bukittinggi terdapat 3 panti sosial yang mempunyai kegiatan penyantunan terhadap anak terlantar dalam panti dan 1 Panti Sosial yang melayani Layanan Dalam dan Luar panti yaitu Panti Kasih Bundo. Dengan jumlah anak 114 orang, untuk pemenuhan kebutuhan makan, biaya



pendidikan juga sarana dan prasarana terdapat 3 panti menerima bantuan sosial bersumber dari APBD Kota Bukittinggi dan APBD Propinsi dan juga bantuan dari para donator.

18.2. Realisasi Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi dan Capaian Kinerja Tingkat Kemiskinan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tahun	Tingkat Kemiskinan
	Capaian Kinerja
2016	71%
2017	68%

Masih relatif tingginya angka kemiskinan Kota Bukittinggi. Kemiskinan telah menjadi fenomena sosial yang menuntut perhatian serius dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan kemiskinan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan interaksi sosial. Itulah sebabnya masalah kemiskinan dapat muncul sebagai penyebab ataupun pemberat berbagai jenis permasalahan kesejahteraan sosial lainnya seperti ketunaan sosial, kecacatan, keterlantaran, ketertinggalan/keterpencilan dan keresahan sosial, yang pada umumnya berkenaan dengan keterbatasan kemampuan untuk mengakses berbagai sumber pelayanan.

Dari data kemiskinan hasil verifikasi Tahun 2019 berjumlah 7.554 KK telah dilakukan verifikasi data dan terdapat 1.430 KK yang dikeluarkan dari data kemiskinan berdasarkan hasil verifikasi dan validasi Basis Data Terpadu bulan November 2018. Dari data 1.430 KK tersebut terdapat ganda dan tidak ditemukan, dianggap telah pindah dan keluar dari Kota Bukittinggi. Capaian masyarakat miskin yang keluar dari data kemiskinan berdasarkan data 2018 adalah sebesar 18,90 %. Total Basis Data Terpadu hasil verifikasi dan validasi bulan November setelah dikurangi data yang keluar, berjumlah 6.124 KK.

Realisasi capaian indikator tingkat kemiskinan Kota Bukittinggi dibandingkan dengan target akhir RPJMD :

INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD	REALISASI TAHUN 2018	KONDISI AKHIR RPJMD
Tingkat	4,23	5,48	2,84



kemiskinan			
------------	--	--	--

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat kemiskinan Kota Bukittinggi tahun 2018 dibandingkan dengan awal RPJMD masih jauh meningkat, hal ini menjadi tugas bersama pemerintah dan msasyarakat untuk sama-sama dapat menekan angka kemiskinan di Kota Bukittinggi.

MISI V : MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PARIWISATA, PENDIDIKAN, KESEHATAN, PERDAGANGAN DAN JASA SERTA KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT

Untuk mewujudkan misi 5 tersebut, sesuai dengan Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2016, tujuan dan sasaran strategis dimaksud adalah sebagai berikut:

No	TUJUAN	No	SASARAN STRATEGIS
5.1	Meningkatnya kunjungan wisatawan	5.1.1	Meningkatkan pelayanan pariwisata
5.2	Layanan pendidikan yang berkualitas dan berkarakter unggul	5.2.1	Meningkatnya akses layanan bidang pendidikan
		5.2.2	Meningkatkan kualitas pendidikan
5.3	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	5.3.1	Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan
		5.3.2	Meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan serta sumber daya kesehatan
5.4	Peningkatan nilai tambah sektor perdagangan dan jasa	5.4.1	Terjaganya stabilitas harga
5.5	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kota Bukittinggi	5.5.1	Terkendalinya jumlah penduduk

Analisis capaian kinerjanya dilakukan berdasarkan capaian indikator kinerja utama per sasaran strategis sebagai berikut:



TUJUAN 5.1 : MENINGKATNYA KUNJUNGAN WISATAWAN

Pencapaian tujuan pertama pada misi 5 ini akan dicapai berdasarkan capaian indikator kinerja utama beberapa sasaran strategis berikut :

**SASARAN STRATEGIS 5.1.1
MENINGKATKAN PELAYANAN PARIWISATA**

Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 5.1.1 terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja utama, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini :

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN 5.1.1

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	kunjungan wisatawan	533.555 orang	577.857 orang	108%
Rata-rata Capaian				108%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian 1 (satu) indikator kinerja utama sasaran strategis sebesar 108%, sesuai dengan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan, keberhasilan pencapaian sasaran Strategis termasuk kategori **sangat baik**.

19. Jumlah Kunjungan Wisatawan

28.1. Perbandingan Target Realisasi

$$\text{Jumlah kunjungan wisatawan} = \frac{\text{Jumlah kunjungan wisatawan dalam satu tahun berjumlah 577.857 Orang wisatawan}}{\text{Target}}$$

Kota Bukittinggi memiliki luas wilayah 25,239 km², dengan wilayah administrasi terbagi atas 3 kecamatan dengan 24 kelurahan. Topografi bergelombang, terdiri dari bukit-bukit dan lembah-lembah. Dimana bila kita menyusuri Kota Bukittinggi maka akan banyak sekali jalan yang mendaki, menurun dan jenjang untuk pejalan kaki, maka



tidak salah kota ini dijuluki kota seribu jenjang. Dengan keindahan alam dan hawa sejuk karena dikelilingi tiga gunung yaitu Gunung Merapi, Singgalang dan Tandikek atau disebut juga Tri Arga seakan menjadi tonggak penyangga untuk memperkokoh Bukittinggi. Disamping itu, Bukittinggi juga dilengkapi dengan peninggalan sejarah seperti, Lobang Jepang, Benteng Fort de Kock, Jam Gadang dan lain- lain. Karunia alam yang ditopang dengan karunia sejarah ini menjadikan Bukittinggi sebagai salah satu kota tujuan utama wisata di Sumatera Barat.

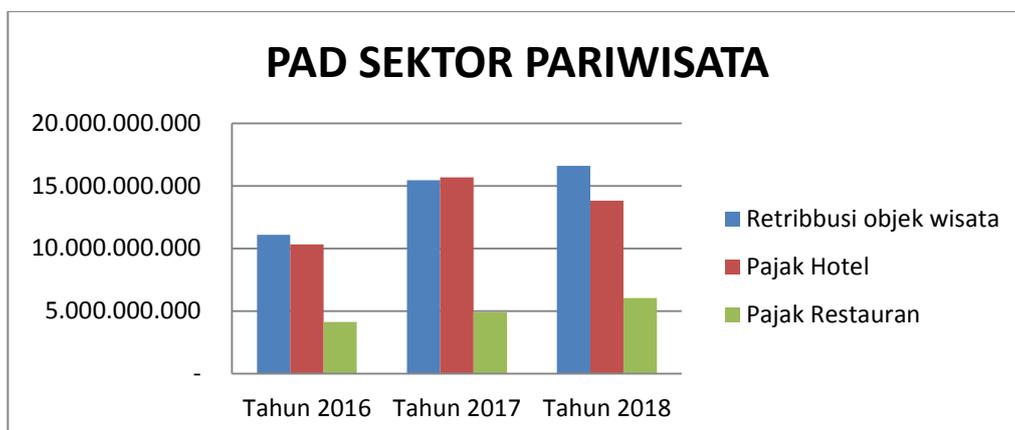
Di Kota Bukittinggi sektor pariwisata merupakan sektor terpenting yang memberikan kontribusi besar pada Pendapatan Anggaran Daerah Kota Bukittinggi. Pendapatan ini berasal dari retribusi tempat rekreasi dan olahraga, pajak hotel, restoran dan lain-lain.

Untuk pendapatan pariwisata dari sektor retribusi rekreasi dan olahraga mengalami kemajuan yang cukup baik dari tahun ke tahun, hasil ini juga tidak bisa dilepaskan dari pembangunan destinasi dan industry wisata yang meliputi konsep 4A Atraksi (objek yang memiliki daya tarik untuk dilihat, ditonton, dinikmati, yang layak 'dijual' ke pasar wisata) Amenitas (Segala macam fasilitas penunjang kegiatan pariwisata) Aksesibilitas (Sarana prasarana yang tersedia untuk membantu wisatawan mencapai objek wisata dengan aman dan nyaman) dan Ancilliary (organisasi atau orang – orang yang mengurus objek wisata).

Berikut disajikan data PAD sektor pariwisata, kunjungan wisatawan ke objek wisata berbayar dan jumlah kunjungan wisatawan yang menginap di hotel.

PAD sektor pariwisata

Sumber pendapatan	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
Retribusi objek wisata	11.086.016.000 ,-	15.449.660.182 ,-	16.603.534.121,-
Pajak hotel	10.332.160.754 ,-	15.677.584.723 ,-	13.819.121.537,-
Pajak restoran	4.131.293.409,-	4.883.019.955,-	6.040.839.165,-



Keterangan :

Dari tabel dan grafik diatas terlihat bahwa Pendapatan Asli Daerah dari 2 sektor pariwisata, baik itu retribusi objek wisata dan pajak restoran selama 3 (tiga) tahun terakhir mengalami kenaikan yang cukup menggembirakan, untuk retribusi objek wisata yang dikelola langsung oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi tahun 2017 mengalami kenaikan cukup significant sebesar 39%, dan untuk tahun 2018 naik lagi sebesar 7%.

Untuk pajak hotel tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 51% dan pada tahun 2018 terjadi sedikit penurunan sebesar 11%, sementara pajak restoran pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 18% dan tahun 2018 naik lagi sekitar 23%.

Data kunjungan wisatawan ke kota Bukittinggi

(berdasarkan yang menginap di hotel)

Tahun	Jenis wisatawan		Jumlah
	Mancanegara	Nusantara	
2016	27.516	511.258	538.774
2017	30.412	516.483	546.895
2018	31.841	546.016	577.857



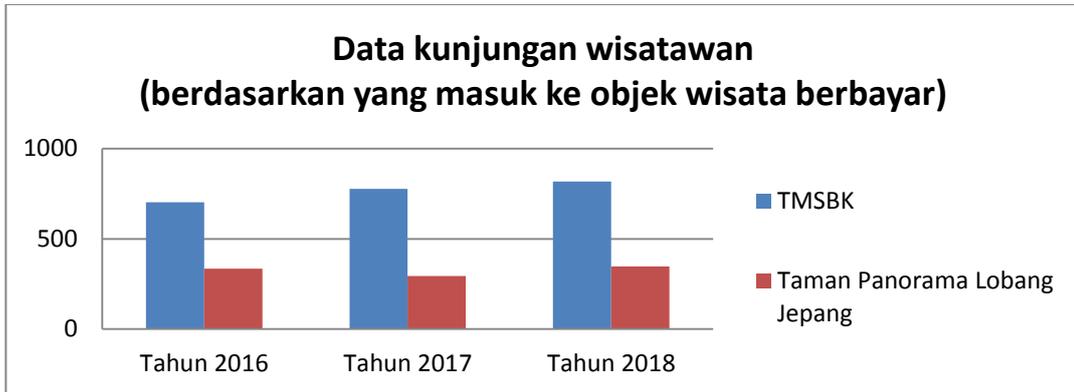
Keterangan :

Dari tabel dan grafik di atas terlihat jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Bukittinggi berdasarkan data tamu yang menginap di hotel baik itu jenis wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara juga mengalami kenaikan cukup bagus. Tahun 2017 kunjungan wisatawan mancanegara naik 10% dan 2018 naik lagi sebesar 3%. Untuk wisatawan nusantara tahun 2017 naik sebesar 1% dan tahun 2018 naik lagi sekitar 5%.

Data kunjungan wisatawan

(berdasarkan yang masuk ke objek wisata berbayar)

Objek wisata	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
TMSBK	703.718	777.403	818.839
Taman Panorama Lobang Jepang	333.474	293.742	345.905
Total	1.037.192	1.071.145	1.164.294



Keterangan :

Dari tabel dan grafik di atas terlihat jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Bukittinggi berdasarkan data pengunjung ke objek wisata berbayar Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan (TMSBK) mengalami kenaikan selama 3 (tiga) tahun terakhir. Untuk tahun 2017 terjadi kenaikan sekitar 10% dibanding tahun 2016. Untuk tahun 2018 meningkat lagi sekitar 5%.

Sementara jumlah pengunjung ke objek wisata Taman Panorama Lobang Jepang masih berfluktuasi dimana pada tahun 2017 mengalami penurunan sekitar 11% dan tahun 2018 naik sebesar 17%.

Kunjungan wisatawan ke Kota Bukittinggi terbagi atas dua kelompok yaitu :

1. Jumlah kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara masuk objek wisata Dari target 1.092.353 orang dengan realisasi 1.164.294 orang (sumber Disparpora) dengan kegiatan pendukung diantaranya
 - Pemeliharaan jam gadang
 - Pengelolaan taman panorama lobang jepang
 - Pemeliharaan objek wisata
 - Pemeliharaan TMS-BK
 - Revitalisasi kawasan wisata taman marga satwa dan budaya jinantan
 - Revitalisasi kawasan wisata taman panorama

Jumlah kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara menginap di hotel



Dari target 557.832 orang dengan realisasi 577.857 orang (data rekap statistik kunjungan hotel pada bidang pariwisata dan ekonomi kreatif), kegiatan pendukung diantaranya :

- Pelaksanaan promosi Pariwisata Nusantara dalam dan luar negeri
- Pembuatan dan pengadaan sarana promosi pariwisata

Rata-rata lama tinggal wisatawan

Dari target 2 hari dan realisasi 2 hari (data rekap statistik kunjungan hotel pada bidang pariwisata dan ekonomi kreatif) dengan kegiatan pendukung :

- Dukungan terhadap pelaksanaan tur de singkarak
- Lomba fotografi wisata tingkat provinsi dan cipta lagu pariwisata
- Fasilitasi iven-iven pariwisata
- Pembinaan guide
- Fasilitasi penampilan tim kesenian
- Pembinaan sadar wisata
- Pemilihan duta wisata kota bukittinggi
- Festival Multi etnis

19.2. Realisasi Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi dan Capaian Kinerja Jumlah Kunjungan Wisatawan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tahun	Jumlah Kunjungan Wisatawan
	Capaian Kinerja
2016	103%
2017	103,89%
2018	108%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa kunjungan wisatawan ke Kota Bukittinggi tidak mengalami kemajuan yang signifikan. Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga terus berupaya meningkatkan layanan terhadap wisatawan sebagai wujud Kota Bukittinggi sebagai kota wisata.



19.3. Realisasi Capaian Target Dari Awal RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan

Realisasi capaian indikator kunjungan wisatawan Kota Bukittinggi dibandingkan dengan target akhir RPJMD :

INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD	REALISASI TAHUN 2018	KONDISI AKHIR RPJMD
Kunjungan Wisatawan	460.905 orang	577.857 orang	588.245 orang

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kunjungan wisatawan ke Kota Bukittinggi dari tahun ke tahun semakin meningkat dari awal tahun RPJMD dengan jumlah kunjungan 406.905 dan meningkat sampai tahun 2018 dengan jumlah kunjungan 577.857 orang. Pemerintah Kota Bukittinggi terus mendorong kunjungan wisatawan untuk berkunjung ke Kota Bukittinggi dengan meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengunjung. Serta meningkatkan promosi Kota Bukittinggi sebagai Kota Wisata.

19.4. Analisis Program/ Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator

Adapun kegiatan pendukung dari indikator kunjungan wisatawan ini antara lain, Pemeliharaan Jam Gadang, Pegelolaan Taman Panorama Lobang japing, Pemeliharaan Obyek Wisata, Pemeliharaan TMS-BK, Revitalisasi Kawasan Wisata Tamam Marga Satwa dan Budaya kinantan (DAK Fisik Pariwisata 2018), Revitalisasi Kawasan Wisata Taman Panorama (DAK Fisik Pariwisata 2018), Pelaksanaan Promosi PariwisataNusantara dalam Dan Luar Negeri, Pembuatan dan Penggadaan Sarana Promosi Pariwisata, Dukungan Terhadap Pelaksanaan Tour de Singkarak, Lomba Fotografi Wisata Tingkat Propinsi dan Cipta Lagu Pariwisata, Fasilitasi Iven-ivent Pariwisata, Pembinaan Guide, Fasilitasi Penampilan Tim Kesenian, Pembinaan Sadar Wisata, Pemilihan Duta Wisata kota Bukittinggi, Festival Multi Etnis.

TUJUAN 5.2 : LAYANAN PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS DAN BERKARAKTER UNGGUL

Untuk mencapai tujuan tersebut hasil yang akan dicapai telah ditetapkan dalam sasaran strategis sebagai berikut :



SASARAN STRATEGIS 5.2.1

MENINGKATNYA AKSES LAYANAN BIDANG PENDIDIKAN

Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 5.2.1 terdiri atas 7 (tujuh) indikator kinerja utama, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini :

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN 5.2.1

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Harapan lama sekolah	14,8 tahun	14,92 tahun	100,8%
Rata-rata Capaian				100,8%

Data BPS relis april 2018

Dari tabel dapat dilihat, rata-rata capaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis sebesar 100,8%. Sesuai dengan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan, keberhasilan pencapaian sasaran Strategis termasuk kategori **sangat baik**

29. Harapan lama sekolah

29.1. Perbandingan Target Realisasi

Harapan Lama Sekolah = Lamanya sekolah yang akan dirasakan oleh anak umu tertentu pada masa datang 14,92 tahun

Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Variabel ini merupakan salah satu indikator dalam menentukan Indeks Pembangunan Manusia.

Pada tahun 2016, Harapan Lama sekolah yang ditargetkan pada Pemerintah Kota Bukittinggi adalah 14,7 tahun, dan terealisasi sebesar 14,92 tahun atau dengan tingkat capaian sebesar 79% Artinya, setiap anak pada usia tertentu pada tahun 2016, akan memiliki harapan untuk bersekolah pada umur tertentu selama 14,92 tahun, atau sudah sampai ke tingkat perguruan tinggi pada semester 6.



Capaian ini didukung dengan keberadaan sekolah mulai dari tingkat dasar, tingkat menengah dan perguruan tinggi yang ada di Bukittinggi sebagai berikut:

5. Sekolah Dasar/ MI negeri dan swasta sebanyak 65 sekolah
6. SMP/ MTs negeri dan swasta sebanyak 18 sekolah
7. SMA/MA/SMK negeri dan swasta sebanyak 29 sekolah
8. Perguruan tinggi negeri dan swasta sebanyak 22 perguruan tinggi

Pengelolaan dan perencanaan kebutuhan sekolah merupakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi, sementara untuk jaringan pendidikan keagamaan dikelola oleh Kementerian Agama, baik tingkat kota maupun provinsi. Perguruan tinggi negeri sesuai kewenangannya dikelola oleh pemerintah, sementara keberadaannya sangat berpengaruh pada harapan lama sekolah di Bukittinggi. Karena itu program Pemerintah Kota Bukittinggi terkait hal ini dalam bentuk fasilitasi.

Angka Harapan lama sekolah Kota Bukittinggi tahun 2015 adalah 14,92 tahun, dan tahun 2016 selama 14,92 tahun. Capaian ini masih sama dengan tahun sebelumnya, karena belum ada publikasi terbaru data harapan lama sekolah yang dipublikasi oleh BPS Kota Bukittinggi, walaupun data sementara terdapat peningkatan. Sesuai Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan, data yang menjadi ukuran adalah dari BPS Kota Bukittinggi.

29.2. Realisasi Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi dan Capaian Kinerja Harapan Lama Sekolah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tahun	Harapan Lama Sekolah
	Capaian Kinerja
2016	79%
2017	100%
2018	

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kota Bukittinggi terus berupaya meningkatkan minat sekolah pada anak-anak usia sekolah.

29.3. Realisasi Capaian Target Dari Awal RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan



Realisasi capaian indikator harapan lama sekolah Kota Bukittinggi dibandingkan dengan target akhir RPJMD :

INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD	REALISASI TAHUN 2018	KONDISI AKHIR RPJMD
Harapan lama sekolah	14,7	14,92	15

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa harapan lama sekolah Kota Bukittinggi tahun 2018 jika disandingkan dengan data awal tahun RPJMD mengalami kenaikan dari 14,7 menjadi 14,92, dan untuk akhir masa RPJMD akan ditingkatkan menjadi 15.

SASARAN STRATEGIS 5.2.2

MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 5.2.1 terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja utama, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini :

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN 5.1.1

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase sekolah yang berakreditasi A tingkat SD	78,50%	72,88%	92,8%
2.	Persentase sekolah yang berakreditasi A tingkat SMP	70,75%	61,53%	86,9%
Rata-rata Capaian				89,85%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian 1 (satu) indikator kinerja utama sasaran strategis sebesar 89,85%, sesuai dengan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan, keberhasilan pencapaian sasaran Strategis termasuk kategori **sangat baik**.

30. Persentase Sekolah Yang Berakreditasi A Tingkat SD

30.1. Perbandingan Target Realisasi



$$\text{Sekolah yang berakreditasi A tingkat SD} = \frac{\text{Jumlah sekolah yang berakreditasi A 43}}{\text{Jumlah sekolah SD 59}} \times 100\% = 72,88\%$$

Bukittinggi memiliki 59 sekolah dasar. Sebanyak 59 sekolah sudah diakreditasi, dan pada tahun 2017 sebanyak 43 sekolah memperoleh akreditasi A, 13 sekolah terakreditasi B dan 3 sekolah memperoleh akreditasi C atau belum terakredinas.

Berdasarkan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2017, tingkat capaian kinerja dari indikator utama yang ditetapkan adalah sebesar 108%, dimana target yang ditetapkan sebesar 72,88 % dan terealisasi sebesar 79%.

Untuk mendapatkan akreditasi A, fasilitasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Bukittinggi adalah:

1. Melakukan pembinaan terhadap sekolah-sekolah yang mencapai indikator standar penilaian yang telah dilakukan oleh BAN pusat, baik dari segi mutu dan layanan pendidikan

Penilaian akreditasi sekolah ini dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional terhadap indikator yang telah ditetapkan, meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga pendidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan sesuai peraturan Presiden nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Pada tahun 2015 Persentase Sekolah yang berakreditasi A tingkat SD di Kota Bukittinggi adalah sebanyak 71,18%, dan tahun 2016 menjadi 79%. Terjadi peningkatan dari tahun 2015 didukung oleh realisasi program pembinaan, fasilitasi yang dilakukan terhadap SD yang terakreditasi untuk meningkatkan capaiannya.

Dari semua SD yang ada di Kota Bukittinggi Negeri dan Swasta, terdapat satu sekolah mendapat nilai akreditasi C dan 13 sekolah yang mendapat nilai B sedangkan A ada 43 sekolah perhitungannya adalah 43 dibagi 57 dikali 100 % jumlahnya 75,44. Ini sudah ada peningkatan dari tahun sebelumnya.

NO	NAMA SEKOLAH	JENJANG	STATUS	PERINGKAT	NILAI	MASA BERLAKU
----	--------------	---------	--------	-----------	-------	--------------



NO	NAMA SEKOLAH	JENJANG	STATUS	PERINGKAT	NILAI	MASA BERLAKU
1	SDN 01 BENTENG PASAR ATAS	SD	NEGERI	A	92	2022
2	SDN 01 CAMPAGO IPUH	SD	NEGERI	A	93	2020
3	SDN 01 LADANG CAKIAH	SD	NEGERI	A	91	2020
4	SDN 02 AUR KUNING	SD	NEGERI	A	87	2020
5	SDN 02 CAMPAGO GUGUK BULEK	SD	NEGERI	A	91	2021
6	SDN 02 PERCONTOHAN	SD	NEGERI	A	93	2022
7	SDN 03 PAKAN KURAI	SD	NEGERI	A	92	2019
8	SDN 03 PAKAN LABUAH	SD	NEGERI	A	91	2022
9	SDN 03 PULAI ANAK AIR	SD	NEGERI	A	93	2021
10	SDN 04 BIRUGO	SD	NEGERI	A	93	2022
11	SDN 04 BUKIT APIT PUHUN	SD	NEGERI	A	90	2021
12	SDN 04 GAREGEH	SD	NEGERI	A	95	2022
13	SDN 05 BIRUGO	SD	NEGERI	A	87	2020
14	SDN 05 PUHUN PINTU KABUN	SD	NEGERI	A	94	2021
15	SDN 05 TAROK DIPO	SD	NEGERI	B	89	2022
16	SDN 06 ATTS	SD	NEGERI	A	94	2021
17	SDN 06 PARIT ANTANG	SD	NEGERI	A	94	2020
18	SDN 06 PULAI ANAK AIR	SD	NEGERI	A	93	2021
19	SDN 07 BELAKANG BALOK	SD	NEGERI	A	93	2022
20	SDN 07 BUKIT CANGANG	SD	NEGERI	A	94	2021
21	SDN 07 KUBU GULAI BANCAH	SD	NEGERI	A	95	2021
22	SDN 08 CAMPAGO IPUAH	SD	NEGERI	B	89	2022
23	SDN 08 KUBU TANJUANG	SD	NEGERI	B	82	2020



NO	NAMA SEKOLAH	JENJANG	STATUS	PERINGKAT	NILAI	MASA BERLAKU
24	SDN 08 TAROK DIPO	SD	NEGERI	A	93	2022
25	SDN 09 BELAKANG BALOK	SD	NEGERI	A	94	2020
26	SDN 09 MANGGIS GANTIANG	SD	NEGERI	A	92	2022
27	SDN 10 ATTS	SD	NEGERI	A	92	2016
28	SDN 10 PUHUN PINTU KABUN	SD	NEGERI	A	92	2020
29	SDN 10 SAPIRAN	SD	NEGERI	A	95	2021
30	SDN 11 AUR KUNUNG	SD	NEGERI	A	94	2021
31	SDN 11 BUKIT APIT PUHUN	SD	NEGERI	A	93	2020
32	SDN 11 CAMPAGO GUGUK BULEK	SD	NEGERI	A	93	2019
33	SDN 12 BUKIT CANGANG	SD	NEGERI	A	93	2021
34	SDN 12 PUHUN PINTU KABUN	SD	NEGERI	B	90	2022
35	SDN 13 BUKIT APIT PUHUN	SD	NEGERI	A	92	2020
36	SDN 13 KUBU GULAI BANCAH	SD	NEGERI	B	88	2022
37	SDN 14 ATTS	SD	NEGERI	A	91	2018
38	SDN 14 TANJUNG ALAM	SD	NEGERI	B	87	2022
39	SDN 15 PULAI ANAK AIR	SD	NEGERI	B	84	2019
40	SDN 16 CAMPAGO IPUH	SD	NEGERI	A	92	2022
41	SDN 16 TAROK DIPO	SD	NEGERI	A	92	2020
42	SDN 17 MANGGIS GANTING	SD	NEGERI	B	90	2022
43	SDN 17 PAKAN KURAI	SD	NEGERI	A	91	2020
44	SDN 18 CAMPAGO GUGUK BULEK	SD	NEGERI	B	83	2022
45	SDN 18 TAROK DIPO	SD	NEGERI	A	93	2019
46	SDN 19 ATTS	SD	NEGERI	A	90	2021



NO	NAMA SEKOLAH	JENJANG	STATUS	PERINGKAT	NILAI	MASA BERLAKU
47	SD AL AZHAR	SD	SWASTA	A	93	2020
48	SD AL FALAH	SD	SWASTA	A	91	2022
49	SD AL ISHLAH	SD	SWASTA	A	91	2020
50	SD CAHAYA HATI	SD	SWASTA	B	90	2022
51	SD EXCELLENT	SD	SWASTA	A	91	2022
52	SD FRANSISKUS	SD	SWASTA	A	90	2020
53	SD INSAN KAMIL	SD	SWASTA	B	89	2022
54	SD JAMIYYATUL HUJAJ	SD	SWASTA	A	94	2021
55	SD MASYITHAH	SD	SWASTA	B	89	2020
56	SD SYAHIRAL ILMU	SD	SWASTA	B	83	2018
57	SD TRISULA PERWARI	SD	SWASTA	C	58	2021

30.2. Realisasi Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Sekolah yang Berakreditasi A Tingkat SD dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tahun	Persentase Sekolah yang Berakreditasi A Tingkat SD
	Capaian Kinerja
2016	108%
2017	100,2%
2018	92,8%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sekolah yang berakreditasi A tingkat SD dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 mengalami penurunan realisasi capaiannya, hal ini dikarenakan tingginya target yang harus dipenuhi pada tiap-tiap tahun berikutnya. Pemerintah Kota Bukittinggi melakukan seleksi yang ketat terhadap sekolah dalam memberikan akreditasi, sehingga diharapkan mutu pendidikan dapat ditingkatkan.

30.3. Realisasi Capaian Target Dari Awal RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan



Realisasi capaian indikator Persentase Sekolah yang Berakreditasi A Tingkat SD Kota Bukittinggi dibandingkan dengan target akhir RPJMD :

INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD	REALISASI TAHUN 2018	KONDISI AKHIR RPJMD
Persentase Sekolah yang Berakreditasi A Tingkat SD	72,88%	72,88%	81,35%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Persentase Sekolah yang Berakreditasi A Tingkat SD Kota Bukittinggi tahun 2018 jika dibandingkan dengan kondisi awal RPJMD 72,88% tidak terjadi peningkatan, untuk mencapai tingkatan akhir masa RPJMD dengan 81,35% Pemerintah Kota Bukittinggi akan terus melakukan peningkatan dalam meningkatkan mutu pendidikan dari jenjang Sekolah Dasar.

31. Persentase Sekolah Yang Berakreditasi A Tingkat SMP

31.1. Perbandingan Target Realisasi

$$\% \text{ Sekolah yang berakreditasi A tingkat SMP} = \frac{\text{Jumlah sekolah yang berakreditasi A } 8}{\text{Jumlah sekolah SMP } 13} \times 100\% = 61,53\%$$

Jumlah Sekolah Menengah Tingkat Pertama di Bukittinggi adalah 13. Sebanyak 13 sekolah sudah diakreditasi, dan pada tahun 2018 sebanyak 8 sekolah memperoleh akreditasi A, 3 sekolah terakreditasi B dan 2 sekolah memperoleh akreditasi C atau belum terakredinasasi.

Berdasarkan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2017, tingkat capaian kinerja dari indikator utama yang ditetapkan adalah sebesar 135 %, dimana target yang ditetapkan sebesar 54 % dan terealisasi sebesar 73%.

Pada tahun 2015 Persentase SMP yang berakreditasi A di Kota Bukittinggi adalah sebanyak 54,50%, dan tahun 2016 menjadi 73%. Terjadi peningkatan dari tahun 2015



didukung oleh realisasi program pembinaan, fasilitasi yang dilakukan terhadap SMP yang terakreditasi untuk meningkatkan capaiannya.

NO	NAMA SEKOLAH	JENJANG	STATUS	PERINGKAT	NILAI	MASA BERLAKU
1	SMPN 1 BUKITTINGGI	SMP	NEGERI	A	90	2019
2	SMPN 2 BUKITTINGGI	SMP	NEGERI	A	90	2020
3	SMPN 3 BUKITTINGGI	SMP	NEGERI	A	92	2020
4	SMPN 4 BUKITTINGGI	SMP	NEGERI	A	92	2020
5	SMPN 5 BUKITTINGGI	SMP	NEGERI	A	92	2020
6	SMPN 6 BUKITTINGGI	SMP	NEGERI	B	85	2020
7	SMPN 7 BUKITTINGGI	SMP	NEGERI	B	83	2019
8	SMPN 8 BUKITTINGGI	SMP	NEGERI	A	86	2020
9	SMP AL ISHLAH	SMP	SWASTA	A	90	2021
10	SMP PSM	SMP	SWASTA	B	81	2021
11	SMP XAVERIUS	SMP	SWASTA	A	87	2021

Dari semua SMP yang ada di Kota Bukittinggi Negeri dan Swasta, terdapat tiga sekolah mendapat nilai akreditasi B sedangkan A ada 8 sekolah perhitungannya adalah 8 dibagi 11 dikali 100 % jumlahnya 72,73. Ini sudah ada peningkatan dari tahun sebelumnya.

31.2. Realisasi Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Sekolah yang Berakreditasi A Tingkat SMP dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tahun	Persentase Sekolah yang Berakreditasi A Tingkat SMP
	Capaian Kinerja
2016	135%
2017	111%
2018	86,9%



Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sekolah yang berakreditasi A tingkat SMP dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 mengalami penurunan realisasi capaiannya, hal ini dikarenakan tingginya target yang harus dipenuhi pada tiap-tiap tahun berikutnya. Pemerintah Kota Bukittinggi melakukan seleksi yang ketat terhadap sekolah dalam memberikan akreditasi, sehingga diharapkan mutu pendidikan dapat ditingkatkan.

31.3. Realisasi Capaian Target Dari Awal RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan

Realisasi capaian indikator Persentase Sekolah yang Berakreditasi A Tingkat SMPD Kota Bukittinggi dibandingkan dengan target akhir RPJMD :

INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD	REALISASI TAHUN 2018	KONDISI AKHIR RPJMD
Persentase Sekolah yang Berakreditasi A Tingkat SMP	54,50%	61,53%	90,90%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Persentase Sekolah yang Berakreditasi A Tingkat SMP Kota Bukittinggi tahun 2018 jika dibandingkan dengan kondisi awal RPJMD 54,50% terjadi peningkatan, untuk mencapai target akhir masa RPJMD dengan 90,90% Pemerintah Kota Bukittinggi akan terus melakukan peningkatan dalam meningkatkan mutu pendidikan dari jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

TUJUAN 5.3 : MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT

Tujuan ketiga pada misi 5 ini memiliki satu sasaran strategis Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, sebagai berikut :



SASARAN STRATEGIS 5.3.1

Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan



Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 5.3.1 terdiri atas 3 (tiga) indikator kinerja utama, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini :

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN 5.3.1

No	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Angka Harapan Hidup	72,75%	73,36%	100,8%
Rata-rata Capaian Indikator				100,8%

BPS relis april 2018

Dari tabel dapat dilihat, rata-rata capaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis sebesar 100,8%. Sesuai dengan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan, keberhasilan pencapaian sasaran Strategis termasuk kategori **sangat baik**.

32. Angka Harapan Hidup

32.1. Perbandingan Target Realisasi

$$\text{Angka Harapan Hidup} = \frac{\text{Rata-rata jumlah tahun kehidupan yang masih dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur}}{\text{Target}}$$

Salah satu indikator utama untuk menentukan derajat kesehatan masyarakat adalah angka harapan hidup. Indikator ini menjadi salah satu indikator utama dari sasaran strategis meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan.

Pada tahun 2018 ditetapkan target angka harapan hidup Kota Bukittinggi 72,75 tahun dan berdasarkan data yang dipublikasikan oleh BPS Kota Bukittinggi, angka harapan hidup Kota Bukittinggi mencapai 73,13 tahun dan menjadi salah satu variabel Indeks Pembangunan Manusia. Realisasi ini melampaui target dengan tingkat capaian 101%.

Pencapaian angka harapan hidup merupakan dampak dari berbagai kinerja bidang kesehatan, seperti; tingkat kematian ibu melahirkan dan bayi baru lahir, angka kesakitan dan pemenuhan gizi masyarakat. Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi beserta seluruh instansi dan lembaga kesehatan tingkat kota hingga kelurahan.



Tugas ini juga menjadi bagian penting partisipasi masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat melalui berbagai program di tingkat kelurahan, dasa wisma pos yandu dan kader kesehatan.

Angka Harapan Hidup Kota Bukittinggi tahun 2015 adalah 71,98 tahun, dan tahun 2016 meningkat menjadi 73,36 tahun. Peningkatan ini menunjukkan semakin baiknya derajat kesehatan masyarakat melalui program preventif dan kuratif serta perilaku hidup bersih dan sehat yang semakin baik.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatnya angka harapan hidup adalah :

6) Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Program upaya Kesehatan masyarakat adalah program untuk menjamin masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan dasar yang dilakukan dalam bentuk Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) didalam gedung dan Upaya Kesehahatan Masyarakat (UKM) di luar gedung. Upaya Kesehatan masyarakat dilakukan dalam bentuk pelayanan kesehatan pada 7 Puskesmas yang ada, pelayanan kesehatan P3K pada keramaian Kota, pelayanan ambulance siaga yang siap antar jemput pasien dari rumah menuju sarana pelayanan kesehatan. Untuk pelayanan kesehatan dasar, Pemerintah Kota Bukittinggi sudah memberlakukan pengobatan gratis bagi penduduk Kota Bukittinggi yang ditandai dengan KTP / Kartu Keluarga.

Untuk pelayanan kesehatan rujukan, Pemerintah Kota Bukittinggi sudah mengalokasikan anggaran untuk kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi warga miskin sebanyak 9.618 orang, artinya seluruh warga Kota Bukittinggi sudah memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.

Akses kesehatan yang sudah baik di Kota Bukittinggi ditunjang oleh adanya 7 Puskesmas induk pada setiap Kecamatan di Kota Bukittinggi. Dari 3 Kecamatan yang ada, 1 Puskesmas di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, 2 Puskesmas di Kecamatan Guguk Panjang dan 4 Puskesmas di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan. Disamping itu, pelayanan kesehatan juga dilengkapi dengan 14 Puskesmas Pembantu dan 26 Pos Kesehatan Kelurahan yang sudah ada pada setiap Kelurahan. Di Kota Bukittinggi terdapat 4 Rumah Sakit Umum, 2 Rumah Sakit Khusus, 115 Praktek dokter perorangan, 45 apotek dan pendukung lainnya. Untuk mobilisasi program kesehatan, pada 7 Puskesmas juga sudah ada Mobil Puskesmas keliling.

7) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak



Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak adalah upaya untuk menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi dan angka kematian balita. Beberapa upaya yang dilakukan adalah :

- f. Memberikan pelayanan ibu hamil sesuai standar
- g. Memberikan pelayanan ibu bersalin sesuai standar
- h. Memberikan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar
- i. Memberikan pelayanan kesehatan balita sesuai standar
- j. Memberikan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar (skrining)

8) Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Program Perbaikan Gizi Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan gizi masyarakat dan mengatasi permasalahan gizi di masyarakat. Dalam hal mengatasi permasalahan gizi diantaranya masalah Kurang Energi Protein (KEP) pada balita, Stunting (anak pendek), kekurangan Yodium (GAKY), kekurangan Vitamin A (KVA) dan mengatasi masalah Kurang Energi Kalori pada Ibu Hamil. Untuk meningkatkan status gizi masyarakat sudah dilakukan upaya pemberian makanan tambahan pada anak sekolah, pemberian makanan tambahan pada anak keluarga miskin, makanan tambahan pada anak baru masuk sekolah, makanan tambahan pada ibu hamil KEK, makanan tambahan pada balita KEP.

9) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

Program promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat merupakan program untuk menunjang seluruh program yang ada di Dinas Kesehatan khususnya untuk meningkatkan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat. Program promosi ini berupa kegiatan penyuluhan kesehatan, sosialisasi program yang dilaksanakan dengan metode yang mudah diterima oleh masyarakat. Berupa penyuluhan melalui media, pemasangan baliho, running text, pemasangan stiker, pencahangan program dan kegiatan lomba-lomba untuk memotivasi masyarakat dan kader-kader kesehatan.

Sebagai ujung tombak dari upaya promosi kesehatan, pada setiap Kelurahan sudah ada Posyandu sebanyak 133 Posyandu, kader-kader kesehatan, kader Pos kesehatan Kelurahan sebanyak 33 buah dan PKK kelurahan yang bisa bekerja sama dalam meningkatkan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.

10) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia adalah upaya untuk mempertahankan kesehatan usia lanjut sehingga dapat mandiri dalam menjaga dan memelihara kesehatannya. Beberapa kegiatan yang dilakukan adalah memberikan pelayanan prioritas pada lanjut usia di Puskesmas, mengaktifkan Posyandu Lansia



sebagai wadah dalam menggerakkan Lansia untuk menjaga kesehatannya, melaksanakan senam lansia rutin setiap minggu pada setiap Puskesmas.

32.2. Realisasi Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi dan Capaian Kinerja Angka Harapan Hidup dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tahun	Angka Harapan Hidup
	Capaian Kinerja
2016	101%
2017	100,8%

SASARAN STRATEGIS 5.3.2

Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan Serta Sumber Daya Kesehatan

Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 5.3.2 terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja utama, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini :

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN 5.3.2

No	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase Puskesmas yang terakreditasi	70%	100%	142 %
Rata-rata capaian				142%



Dari tabel dapat dilihat, rata-rata capaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis 5.3.2 sebesar **142%**. Sesuai dengan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan, keberhasilan sasaran ini termasuk kategori **sangat baik**.

33. Persentase Puskesmas Yang Terakreditasi

33.1. Perbandingan Target Realisasi

$$\frac{\text{Persentase Puskesmas Yang Terakreditasi}}{100\%} = \frac{\text{Persentase Jumlah puskesmas yang terakreditasi}}{100\%}$$

Puskesmas terakreditasi menunjukkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Sebagai unit layanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan dasar, puskesmas tidak hanya memberikan layanan kuratif, tetapi juga preventif dan berperan penting dalam mewujudkan masyarakat yang berperilaku hidup bersih dan sehat.

Pada tahun 2016, ditargetkan 2 puskesmas Kota Bukittinggi terakreditasi, dan terealisasi keduanya. Puskesmas tersebut adalah puskesmas Guguk Panjang dan puskesmas Perkotaan Rasimah Ahmad, dengan nilai Utama untuk Puskesmas Guguk Panjang dan Madya untuk puskesmas Perkotaan Rasimah Ahmad berdasarkan keputusan tim asesor akreditasi Kementerian Kesehatan.

Dengan terakreditasi, maka puskesmas sesuai kriteria penilaiannya berarti sudah memenuhi standar mutu :

4. Administrasi Manajemen
5. Upaya Kesehatan Perorangan
6. Upaya Kesehatan Masyarakat

Menjadi tugas penting bagi Dinas Kesehatan bersama puskesmas itu sendiri untuk memenuhi kriteria dan indikator puskesmas terakreditasi dimaksud. Hal ini dilakukan melalui berbagai program seperti Program usaha kesehatan masyarakat, program promosi kesehatan, program perbaikan gizi masyarakat dan program penunjang kesehatan lainnya.

Pada tahun 2015 Puskesmas yang terakreditasi di Bukittinggi masih belum ada (0), sementara tahun 2016 puskesmas yang terakreditasi sebanyak 2 puskesmas. Pencapaian ini didukung program pembinaan puskesmas yang diorientasikan untuk pemenuhan akreditasi puskesmas pada Dinas Kesehatan Bukittinggi.



Akreditasi Puskesmas dikeluarkan oleh Komisi Akreditasi dari Kementerian Kesehatan. Hasil kinerja Puskesmas sejak awal tahun RPJMD, Puskesmas yang sudah terakreditasi adalah :

6. Puskesmas Guguk Panjang : Akreditasi Utama (Penilaian Tahun 2016)
7. Puskesmas Rasimah Ahmad : Akreditasi Madya (Penilaian Tahun 2016)
8. Puskesmas Mandiangin : Akreditasi Madya (Penilaian Tahun 2017)
9. Puskesmas Gulai Banchah : Akreditasi Madya (Penilaian Tahun 2017)
10. Puskesmas Nilam Sari : Akreditasi Madya (Penilaian Tahun 2017)

Puskesmas yang sudah terakreditasi menunjukkan bahwa Puskesmas yang ada di Kota Bukittinggi sudah memiliki manajemen, standar pelayanan, sarana prasarana, sumber daya manusia, pengelolaan keuangan yang sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan No. 75 tahun 2014 tentang Puskesmas dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 46 tahun 2015 tentang akreditasi Puskesmas.

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan akreditasi Puskesmas adalah :

7) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan adalah upaya untuk menyiapkan manajemen Puskesmas sesuai dengan standar akreditasi Puskesmas mulai dari administrasi Tata Usaha, administrasi pelayanan perorangan dan administrasi pelayanan masyarakat.

8) Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan

Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan Sumber Daya Kesehatan di Puskesmas sesuai dengan standar, baik tenaga medis, Para medis maupun tenaga administrasi. Disamping memenuhi jumlah juga dilakukan untuk memenuhi kompetensi tenaga kesehatan. Hal ini dilakukan dengan mengikuti pelatihan teknis dibidang kesehatan.

9) Program Obat dan Pembekalan Kesehatan

Program obat dan perbekalan kesehatan adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan obat dan bahan medis di Puskesmas.

10) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya adalah untuk menjamin bahwa



seluruh sarana dan prasarana pelayanan di Puskesmas dan jaringannya sudah sesuai dengan standar. Kegiatan dalam bentuk renovasi gedung Puskesmas, Pustu dan jaringannya dan pemenuhan alat - alat kesehatan sesuai standar pelayanan di Puskesmas pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014.

11) Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD bertujuan untuk mendorong seluruh Puskesmas dapat melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang bertujuan untuk memberikan fleksibilitas kepada Puskesmas dalam pengelolaan keuangan. Sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45.351-2016 tanggal 23 Desember 2017 tentang Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Puskesmas di Kota Bukittinggi dengan status BLUD Penuh. Status Penuh yang dimaksud adalah untuk pengelolaan pendapatan yang diperoleh dari dana Kapitasi JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) yang diperoleh dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Dengan diberlakukannya PPK-BLUD, Puskesmas sudah mandiri dalam pengelolaan keuangan, dapat memenuhi seluruh kebutuhan pelayanan, yang akhirnya dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

12) Program Kebijakan dan Manajemen Kesehatan

Program Kebijakan dan Manajemen Kesehatan adalah upaya untuk pengelolaan data dan informasi kesehatan yang sudah berbasis Teknologi Informasi. Seluruh Puskesmas di Kota Bukittinggi sudah menggunakan aplikasi e-Puskesmas dalam pengelolaan data, Disamping itu, data Puskesmas sudah langsung online dengan Dinas Kesehatan, BPJS dan Kementerian Kesehatan sehingga kebutuhan data terkait pelayanan kesehatan dapat diakses kapan saja dibutuhkan.

33.2. Realisasi Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Puskesmas yang terakreditasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tahun	Persentase Puskesmas yang terakreditasi
	Capaian Kinerja
2016	100%
2017	142,8%



2018	142%
------	------

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Persentase Puskesmas yang terakreditasi dari tahun 2016 sampai tahun 2017 mengalami peningkatan dan untuk tahun 2018 mengalami penurunan capaian, namun tidak terjadi penurunan kualitas akreditasi puskesmas.

33.3. Realisasi Capaian Target Dari Awal RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan

Realisasi capaian indikator Persentase Puskesmas yang terakreditasi Kota Bukittinggi dibandingkan dengan target akhir RPJMD :

INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD	REALISASI TAHUN 2018	KONDISI AKHIR RPJMD
Opini BPK	30	142	100

Realisasi Capaian Tahun Berjalan Terhadap Akhir Masa RPJMD Persentase Puskesmas yang terakreditasi telah melebihi target akhir masa RPJMD.

TUJUAN 5.4 : MENINGKATNYA NILAI TAMBAH SEKTOR PERDAGANGAN DAN JASA

Tujuan keempat pada misi 5 ini memiliki satu sasaran strategis Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS 5.4.1

Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Perdagangan dan Terjaganya Stabilitas Harga

Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 5.4.1 terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja utama, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini :

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN 5.4.1



No	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Tingkat Inflasi	6	1,37	437,9%
Rata-rata Capaian Indikator				437,9%

Dari tabel dapat dilihat, rata-rata capaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis sebesar **437,9%**. Sesuai dengan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan, keberhasilan pencapaian sasaran Strategis termasuk kategori **sangat baik**.

34. Tingkat Inflasi

34.1. Perbandingan Target Realisasi

Tingkat Inflasi = Tingkat inflasi kota bukittinggi selama tahun 2018 adalah 2,99%

Laju pertumbuhan inflasi tahun kalender Kota Bukittinggi sampai dengan bulan Desember 2018 sebesar 2,99 % dan untuk laju inflasi Desember 2018 terhadap Desember 2017 sebesar 2,99 persen (Berita resmi statistik)

Nilai inflasi Kota Bukittinggi tahun 2017 relatif stabil berkisar pada angka dibawah 1%. Inflasi tertinggi terjadi pada bulan Februari sebesar 0,45% dan bulan Mei mengalami Deflasi sebesar 0,44%. Perbandingan Inflasi Kota Bukittinggi terhadap Propinsi dan Nasional diman inflasi Kota Bukittinggi merupakan inflasi terendah di Sumatera dari 23 Kota yang menjadi sampel inflasi dan nomor 3 terendah se Indonesia setelah Ternate dan Sorong.

Pemerintah Kota Bukittinggi membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Bukittinggi yang beranggotakan SKPD teknis terkait, BPS Bulog, Kodim, Polres Kota Bukittinggi dengan melakukan rapat-rapat koordinasi TPID sehingga menghasilkan rekomendasi kebijakan pengendalian Inflasi di Kota Bukittinggi.

Berdasarkan Berita Resmi Statistik dari Badan Pusat Statistik Kota

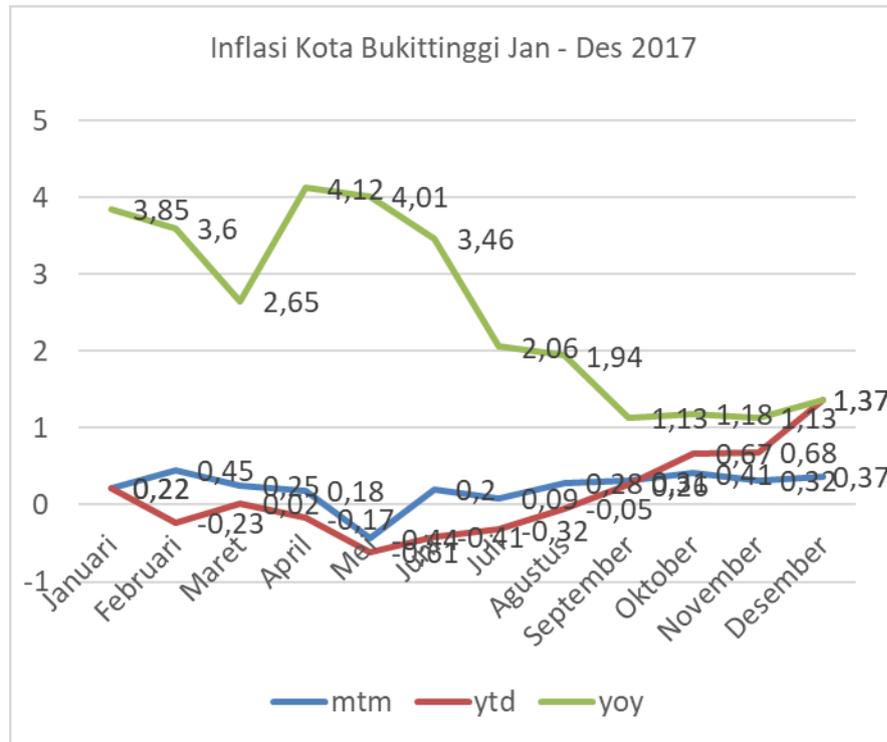


Bukittinggi bahwa perkembangan Indeks Harga Konsumen / Inflasi Kota Bukittinggi bulan Januari - Desember 2017 Kota Bukittinggi sebagai berikut :

14. Pada bulan Januari 2017 di Kota Bukittinggi terjadi inflasi sebesar 0,22 persen. Laju inflasi tahun kalender Kota Bukittinggi sampai Januari 2017 sebesar 0,22 persen dan laju inflasi year on the year (Januari 2017 terhadap Januari 2016) sebesar 3,85 persen.
15. Pada bulan Februari 2017 di Kota Bukittinggi terjadi inflasi sebesar 0,45 persen. Laju inflasi tahun kalender Kota Bukittinggi sampai Februari 2017 sebesar -0,23 persen dan laju inflasi year on the year (Februari 2017 terhadap Februari 2016) sebesar 3,60 persen.
16. Pada bulan Maret 2017 di Kota Bukittinggi terjadi inflasi sebesar 0,25 persen. Laju inflasi tahun kalender Kota Bukittinggi sampai Maret 2017 sebesar 0,02 persen dan laju inflasi year on the year (Maret 2017 terhadap Maret 2016) sebesar 2,65 persen.
17. Pada bulan April 2017 di Kota Bukittinggi terjadi inflasi sebesar 0,18 persen. Laju inflasi tahun kalender Kota Bukittinggi sampai April 2017 sebesar -0,17 persen dan laju inflasi year on the year (April 2017 terhadap April 2016) sebesar 4,12 persen.
18. Pada bulan Mei 2017 di Kota Bukittinggi terjadi inflasi sebesar -0,44 persen. Laju inflasi tahun kalender Kota Bukittinggi sampai Mei 2017 sebesar -0,61 persen dan laju inflasi year on the year (Mei 2017 terhadap Mei 2016) sebesar 4,01 persen.
19. Pada bulan Juni 2017 di Kota Bukittinggi terjadi inflasi sebesar 0,20 persen. Laju inflasi tahun kalender Kota Bukittinggi sampai Juni 2017 sebesar -0,41 persen dan laju inflasi year on the year (Juni 2017 terhadap Juni 2016) sebesar 3,46 persen.
20. Pada bulan Juli 2017 di Kota Bukittinggi terjadi inflasi sebesar 0,09 persen. Laju inflasi tahun kalender Kota Bukittinggi sampai Juli 2017 sebesar -0,32 persen dan laju inflasi year on the year (Juli 2017 terhadap Juli 2016) sebesar 2,06 persen.
21. Pada bulan Agustus 2017 di Kota Bukittinggi terjadi inflasi sebesar 0,28 persen. Laju inflasi tahun kalender Kota Bukittinggi sampai Agustus 2017 sebesar -0,05 persen dan laju inflasi year on the year (Agustus



- 2017 terhadap Agustus 2016) sebesar 1,94 persen.
22. Pada bulan September 2017 di Kota Bukittinggi terjadi inflasi sebesar 0,31 persen. Laju inflasi tahun kalender Kota Bukittinggi sampai September 2017 sebesar 0,26 persen dan laju inflasi year on the year (September 2017 terhadap September 2016) sebesar 1,13 persen.
 23. Pada bulan Oktober 2017 di Kota Bukittinggi terjadi inflasi sebesar 0,41 persen. Laju inflasi tahun kalender Kota Bukittinggi sampai Oktober 2017 sebesar 0,67 persen dan laju inflasi year on the year (Oktober 2017 terhadap Oktober 2016) sebesar 1,18 persen.
 24. Pada bulan November 2017 di Kota Bukittinggi terjadi inflasi sebesar 0,37 persen. Laju inflasi tahun kalender Kota Bukittinggi sampai November 2017 sebesar 1,37 persen dan laju inflasi year on the year (Maret 2017 terhadap Maret 2016) sebesar 1,37 persen.
 25. Pada bulan Desember 2017 di Kota Bukittinggi terjadi inflasi sebesar 0,37 persen. Laju inflasi tahun kalender Kota Bukittinggi sampai Desember 2017 sebesar 1,37 persen dan laju inflasi year on the year (Maret 2017 terhadap Maret 2016) sebesar 1,37 persen.
 26. Perkembangan Inflasi Kota Bukittinggi Januari – Desember 2017



Tingkat Inflasi di Kota Bukittinggi sejak bulan Januari - Desember 2017 menunjuk penurunan angka inflasi, hal tersebut menunjukkan bahwa harga harga komoditas kebutuhan pokok tidak mengalami gejolak yang berarti dan berada pada tingkat yang stabil.

Terkait tingkat inflasi di Kota Bukittinggi yang mengalami penurunan sejak bulan Januari - Desember 2017 maka tingkat inflasi yang rendah dan stabil di Kota Bukittinggi harus tetap terjaga. Untuk itu Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Bukittinggi harus tetap berkoordinasi dalam melaksanakan upaya upaya pengendalian Inflasi di Kota Bukittinggi.

TUJUAN 5.5 : MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KOTA BUKITTINGGI



Tujuan kelima pada misi 5 ini memiliki satu sasaran strategis Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS 5.5.1

Terkendalinya Jumlah Penduduk

Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 5.5.1 terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja utama, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini :

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN 5.5.1

No	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,55	1,56	100%
Rata-rata Capaian Indikator				100%

Dari tabel dapat dilihat, rata-rata capaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis sebesar **100%**. Sesuai dengan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan, keberhasilan pencapaian sasaran Strategis termasuk kategori **sangat baik**.

35. Laju Pertumbuhan Penduduk

35.1. Perbandingan Target Realisasi

$$\text{Laju Pertumbuhan Penduduk} = \frac{\text{perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah}}{\text{tertentu setiap tahunnya 1,56}}$$

Kondisi dan perkembangan demografi berperan penting dalam perencanaan pembangunan. Penduduk merupakan modal dasar keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Komposisi dan distribusi penduduk akan mempengaruhi struktur ruang, kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Seluruh aspek pembangunan memiliki korelasi dan interaksi dengan kondisi kependudukan yang ada, sehingga informasi tentang demografi memiliki posisi strategis dalam penentuan kebijakan.

Kota Bukittinggi terdiri atas 3 kecamatan dengan 24 kelurahan. Dengan jumlah 3 kecamatan ini penduduk Kota Bukittinggi Tahun 2018 berjumlah 124.715 jiwa.



Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Bukittinggi

NO.	TAHUN	JUMLAH PENDUDUK (Jiwa)			LAJU PERTUMBUHAN
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
1.	2010	56.224	55.768	112.010	1,93
2.	2011	54.922	58.625	113.547	1,93
3.	2012	55.276	59.117	114.393	1,93
4.	2013	57.261	60.999	118.260	1,88
5.	2014	62.025	61.385	123.410	1,88
6.	2015	62.094	61.514	123.608	1,77
7.	2016	60.503	64.212	124.715	1,71
8.	2017	61.588	65.216	126.804	1,68
9.	2018	62.484	66.299	128.783	1,56

Sumber: Bukittinggi Dalam Angka, 2018

Laju Pertumbuhan Penduduk pada tahun 2018 adalah sebesar 1,56. Proyeksi Penduduk menurut Jenis Kelamin Dan Kelompok Umur Kota Bukittinggi 2015-2020, dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini.

Proyeksi Jumlah penduduk menurut kelompok Umur



PROYEKSI PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK UMUR KOTA BUKITINGGI 2015-2020.

KELOMPOK UMUR	2015			2016			2017		
	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH
0-4	6.391	6.247	12.638	6.400	6.249	12.649	6.409	6.245	12.654
5-9	5.780	5.669	11.449	5.871	5.767	11.638	5.950	5.844	11.794
10-14	4.986	4.926	9.912	5.083	5.005	10.088	5.171	5.091	10.262
15-19	5.837	7.223	13.966	5.921	7.305	13.226	6.000	7.376	13.376
20-24	5.640	7.564	13.204	5.731	7.676	13.407	5.844	7.796	13.640
25-29	5.246	5.134	10.380	5.251	5.180	10.431	5.263	5.227	10.490
30-34	4.515	4.561	9.076	4.655	4.612	9.267	4.772	4.665	9.437
35-39	4.372	4.283	8.655	4.390	4.336	8.726	4.426	4.384	8.810
40-45	3.863	3.977	7.840	3.966	4.071	8.037	4.060	4.157	8.217
46-49	3.524	3.406	6.930	3.628	3.479	7.107	3.736	3.563	7.299
50-54	2.884	2.819	5.703	2.941	2.863	5.804	3.005	2.912	5.917
55-59	2.381	2.458	4.839	2.450	2.548	4.998	2.505	2.616	5.121
60-64	1.681	1.691	3.372	1.788	1.798	3.586	1.890	1.915	3.805
65-69	999	1.131	2.130	1.074	1.200	2.274	1.166	1.279	2.445
70-74	661	896	1.557	674	896	1.570	689	899	1.588
75 +	659	1.211	1.870	680	1.227	1.907	702	1.247	1.949
JUMLAH	59.419	63.202	122.621	60.503	64.212	124.715	61.588	65.216	126.804
KK			29.690			30.197			30.703
1 KK=4,13 Jiwa			(29.156)			1.041			1.547
			534						
KEPADATAN			4.858			4.941			5.024
			(4774)						

2018			2019			2020		
L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH
6.395	6.251	12.646	6.395	6.240	12.635	6.387	6.231	12.618
6.000	5.920	11.920	6.050	5.970	12.020	6.062	5.987	12.049
5.256	5.192	10.448	5.348	5.282	10.630	5.445	5.380	10.825
6.047	7.443	13.490	6.119	7.508	13.627	6.214	7.599	13.813
5.947	7.928	13.875	6.065	8.049	14.114	6.168	8.173	14.341
5.264	5.259	10.523	5.285	5.283	10.568	5.329	5.315	10.644
4.875	4.742	9.617	4.980	4.817	9.797	5.038	4.865	9.903
4.442	4.435	8.877	4.514	4.479	8.993	4.605	4.531	9.136
4.140	4.246	8.386	4.173	4.313	8.486	4.205	4.383	8.588
3.835	3.655	7.490	3.942	3.740	7.682	4.041	3.818	7.859
3.069	2.968	6.037	3.147	3.023	6.170	3.228	3.085	6.313
2.545	2.674	5.219	2.593	2.722	5.315	2.645	2.776	5.421
1.074	2.037	4.011	2.054	2.139	4.193	2.119	2.222	4.341
1.264	1.370	2.634	1.364	1.470	2.834	1.456	1.583	3.039
707	914	1.621	742	936	1.678	793	971	1.765
724	1.265	1.989	748	1.283	2.031	770	1.299	2.069
62.484	66.299	128.783	63.519	67.254	130.773	64.505	68.218	132.723
		31.182			31.664			32.136
		2.026			2.508			2.980
		5.102			5.177			5.259



Pertumbuhan Penduduk atau Dinamika Penduduk adalah perubahan / pertumbuhan jumlah penduduk dari waktu ke waktu, hal ini disebabkan karena adanya peristiwa kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. (ketiga hal tersebut dikenal dengan istilah unsur-unsur dinamika penduduk.) Pertumbuhan penduduk secara umum dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu pertumbuhan alami, pertumbuhan migrasi, dan pertumbuhan penduduk total.

Pertumbuhan Penduduk Total adalah pertumbuhan penduduk yang disebabkan oleh faktor kelahiran, kematian, dan migrasi. Pertumbuhan penduduk migrasi dapat dihitung dengan rumus berikut ini : $P = (L - M) + (I - E)$ (P = Pertumbuhan penduduk total L = Jumlah kelahiran M = Jumlah kematian I = Jumlah imigrasi E = Jumlah emigrasi)

4. **Tingkat kelahiran (fertilitas)** adalah tingkat penambahan jumlah anak atau tingkat kelahiran bayi pada suatu periode tertentu. Tingkat kelahiran bayi dapat dihitung dengan dua cara, yaitu:

c. Angka Kelahiran Kasar (Crude Birth Rate/CBR), adalah angka kelahiran yang menunjukkan jumlah kelahiran perseribu penduduk dalam suatu periode.

Angka Kelahiran Kasar (CBR) menunjukkan banyaknya kelahiran pada tahun tertentu per 1000 penduduk pada pertengahan tahun yang sama. Angka kelahiran kasar di Kota Bukittinggi mengalami penurunan per lima tahunan dari 20,6 kelahiran per 1000 penduduk pada Tahun 2010 (SP 2000) menjadi 18,3 kelahiran per 1000 penduduk Tahun 2015 (SP 2010), pada Tahun 2020 menjadi 17,2 kelahiran per 1000 penduduk, Tahun 2025 menjadi 16,5 kelahiran per 1000 penduduk, dan pada Tahun 2030 menjadi 15,4 kelahiran per 1000 penduduk yang pada akhirnya menjadi 14,2 kelahiran per 1000 penduduk pada Tahun 2035 (hasil proyeksi data BPS).

d. Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)

TFR adalah jumlah anak yang akan dipunyai seorang wanita selama masa reproduksinya per 1000 wanita. Asumsi yang digunakan yaitu tidak ada seorang perempuan pun yang meninggal sebelum mengakhiri masa reproduksinya dan tingkat fertilitas menurut umur tidak berubah pada periode waktu pengukuran. TFR merupakan pengukuran yang menyatakan fertilitas pada akhir masa reproduksi dari suatu kohor perempuan. Keunggulan TFR adalah angka ini dapat dijadikan ukuran kelahiran untuk seorang perempuan selama masa



reproduksinya dan telah memperhitungkan tingkat kesuburan perempuan pada masing-masing kelompok umur.

Tren TFR di Kota Bukittinggi menurut Proyeksi Data BPS SP 2010 (Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk Kota Bukittinggi Tahun 2010-2035) semakin menurun, dan sasaran fertilitas diarahkan pada pencapaian kondisi Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) pada tahun 2025 yang ditandai dengan TFR sebesar 2,1 anak per wanita usia subur.

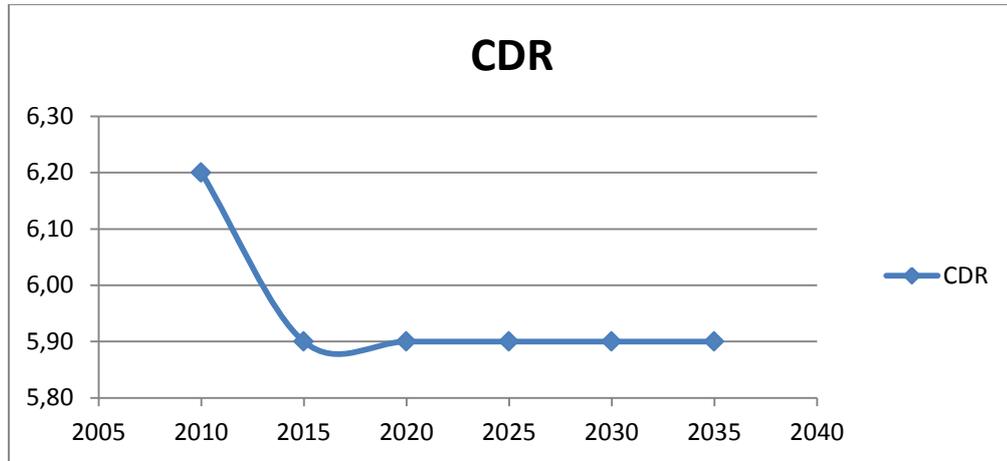
Angka Kelahiran Umum (General Fertility Rate/GFR), adalah angka yang menunjukkan jumlah bayi yang lahir dari setiap 1000 wanita pada usia reproduksi atau melahirkan yaitu pada kelompok usia 15-49 tahun.

5. **Tingkat kematian (mortalitas)** merupakan pengurangan jumlah penduduk pada periode tertentu yang disebabkan oleh faktor kematian. Tingkat kematian dapat diketahui melalui tiga cara, yaitu:

c. Tingkat Kematian Kasar (Crude Death Rate/CDR), adalah angka yang menunjukkan rata-rata kematian perseribu penduduk dalam satu tahun.

Angka kematian kasar dipengaruhi oleh komposisi penduduk menurut umur. Untuk kondisi Indonesia dengan struktur umur penduduk relative muda, angka kematian kasar banyak dipengaruhi oleh tingkat kematian anak, terutama yang berumur di bawah 1 tahun. Tingkat kematian umur di bawah 1 tahun dikenal dengan angka kematian bayi (AKB), yang mempunyai hubungan erat dengan angka harapan hidup waktu lahir (AHH). Perubahan AKB berpengaruh pada AHH dan AKK, yang secara teoritis turunya AKB menyebabkan turunya Angka Kematian Kasar (AKK) dan naiknya AHH. Dari data BPS (SP 2010) tahun 2010 angka kematian kasar di Kota Bukittinggi 6,30 menurun sampai kondisi Tahun 2035 yaitu di angka 5,90. Dapat terlihat trennya pada gambar 2. dibawah ini.

Tren Angka Kematian Kasar (*Crude Death Rate/CDR*) Kota Bukittinggi Tahun 2010-2035



- d. Tingkat Kematian Menurut Umur (Age Specific Death Rate/ASDR), adalah angka yang menunjukkan banyaknya kematian pada kelompok umur tertentu perseribu penduduk dalam kelompok yang sama.

Angka Kematian Bayi (Infant Mortality Rate/IMR)

Angka kelangsungan hidup bayi merefleksikan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan anak-anak bertempat tinggal termasuk kesehatannya. Indikator yang terkait langsung dengan angka kelangsungan hidup bayi adalah angka kematian bayi yaitu suatu angka yang menunjukkan jumlah anak yang dilahirkan pada tahun tertentu dan meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun dinyatakan sebagai angka per 1000 kelahiran hidup. Angka kematian bayi Kota Bukittinggi dapat terlihat pada tabel berikut :

Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Kota Bukittinggi

Tahun	Jumlah Kematian bayi usia di bawah 1 tahun	Jumlah Kelahiran hidup	AKB	AKHB
2010	12	2059	5,8	4,8
2011	10	2271	4,4	3,4
2012	10	2320	4,3	3,3
2013	19	2338	8,1	7,1
2014	19	2405	7,9	6,9



2015	26	2407	10,8	9,8
2016	17	2456	6,92	5,92
2017	7	2427	2,85	
2018	3	2460	1,2	

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi

Dari data yang ada maka di Kota Bukittinggi angka kelangsungan hidup bayi dari tahun ketahun dapat ditingkatkan. Ini artinya ibu-ibu hamil mampu menjaga kehamilan sehingga bayi lahir sehat dan selamat Bagi anak yang berusia di atas 1 bulan program imunasi anak berjalan dengan baik sehingga ibu dan bayi tumbuh sehat penuh gizi.

- **Angka Kematian Anak Balita (AKABA)**

Angka kematian Anak Balita (AKABA) adalah jumlah kematian anak umur 12-59 bulan (1-<5th) per 1.000 kelahiran hidup pada periode waktu tertentu. AKABA dapat menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan serta faktor lain yang mempengaruhi terhadap kesehatan anak balita seperti gizi, sanitasi lingkungan, tingkat pelayanan KIA/Posyandu, penyakit infeksi dan kecelakaan.

AKABA di Kota Bukittinggi pada Tahun 2018 menurut laporan bersumber Dinas Kesehatan yaitu 1 (satu) anak.

- **Angka Kematian Ibu Maternal Dinas Kesehatan**

Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan derajat kesehatan masyarakat. AKI menggambarkan jumlah wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42



hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.

Angka kematian ibu mencerminkan resiko yang dihadapi ibu selama kehamilan dan melahirkan yang dipengaruhi oleh :

- d. Keadaan sosial ekonomi dan kesehatan yang kurang baik menjelang kehamilan;
- e. Kejadian berbagai komplikasi pada kehamilan dan kelahiran;
- f. Tingkat tersedianya dan penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan perinatal dan obstetri.

Menurut Data Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi Tahun 2015, jumlah kematian ibu maternal di Kota Bukittinggi Tahun 2015 adalah 7 (tujuh) jiwa dan tahun 2016 adalah 3 jiwa, Tahun 2017 adalah 1 (satu) jiwa dan tahun 2018 adalah 2 (dua) jiwa). Upaya penurunan angka kematian ibu dan angka kematian neonatal melalui Program EMAS dilakukan dengan cara :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan emergensi obstetri dan bayi baru lahir minimal di 300 Puskesmas (PONED);
- b. Memperkuat sistem rujukan yang efisien dan efektif antar puskesmas dan rumah sakit.

- **Angka Harapan Hidup (AHH)**

Angka harapan hidup didefinisikan sebagai rata rata perkiraan banyaknya tahun yang dapat di tempuh oleh seseorang sejak lahir. Di kota Bukittinggi terlihat AHH tahun 2010 sebesar 73,10 , tahun 2011 73,11 dan tahun 2012 s/d 2014 sebesar 73,12, dan tahun 2015 menjadi 73,52, dan tahun 2016 menjadi 73.60, Tahun 2018 73,69. Jika kita simak dan bandingkan lagi angka harapan hidup di Kota Bukittinggi dengan kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Barat dan Nasional , terlihat AHH Kota Bukittinggi adalah 73,69 namun jika dibandingkan dengan AHH Propinsi Sumbar maka Bukittinggi masih di atas rata rata propinsi dan bahkan diatas rata rata nasional, yakni 69,87.

- **Penyebab Kematian**



Kematian atau ajal adalah akhir dari kehidupan, ketiadaan nyawa dalam organisme biologis. Semua makhluk hidup pada akhirnya akan mati secara permanen, baik karena penyebab alami seperti penyakit atau karena penyebab tidak alami seperti kecelakaan. Sedangkan morbiditas adalah angka kesakitan, baik insiden maupun prevalen dari suatu penyakit. Morbiditas menggambarkan kejadian penyakit dalam suatu populasi pada kurun waktu tertentu. Morbiditas juga berperan dalam penilaian terhadap derajat kesehatan masyarakat.

Angka kematian Bayi
Angka kematian Bayi dilihat pada tahun 2018 adalah sebanyak 3 (tiga) orang. *(Data DKK 2018)*

6. Migrasi atau mobilitas penduduk adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain.

Berdasarkan Data Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, angka migrasi risen baik keluar maupun masuk mengalami peningkatan. Migrasi risen masuk pada Tahun 2012 sebesar 1.336 jiwa, naik menjadi 3.058 jiwa pada tahun 2015. Sedangkan data migrasi risen keluar pada tahun 2012 adalah 702 jiwa, naik menjadi 4.039 jiwa pada tahun 2015.

Pada tahun 2018 tingkat kepadatan penduduk masih terjadi di Kecamatan Guguk Panjang yaitu 6.375 jiwa per km², dan kec. ABTB dengan 4.231 jiwa per km², diikuti oleh kec. Mks dengan 4.243 jiwa per km².

Upaya yang dilakukan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk.

Adapun usaha-usaha yang dilakukan pemerintah dalam menekan laju pertumbuhan penduduk antara lain meliputi hal-hal berikut ini.

3. **Meningkatkan pelayanan kesehatan dan kemudahan dalam menjadi akseptor Keluarga Berencana.**

Dinas P3APKB Kota Bukittinggi melakukan upaya untuk menekan laju pertumbuhan Penduduk dengan cara :



- g. Meningkatkan layanan KIE kepada masyarakat melalui berbagai model seperti, KIE perorangan , KIE Kelompok, KIE Media Masa dan KIE Melalui Luar ruang yaitu MUPEN.
- h. Meningkatkan layanan Kesehatan dan kemudahan dalam menjadi Akseptor Keluarga Berencana.
- i. Mempermudah dan meningkatkan pelayanan dalam bidang KIE Pendidikan, sehingga keinginan untuk segera menikah dapat dihambat.
- j. Meningkatkan Sosialisasi Sekolah Siaga Kependudukan dalam upaya mewujudkan yujuan program pendidikan kependudukan yakni; peningkatan pengetahuan, sikap, perilaku masyarakat, terutama generasi muda dalam partisipasi dan peran serta pada program KKBPK kepada Siswa SLTP dan SLTA se Kota Bukittinggi.
- k. Meningkatkan SDM Kader melalui fasilitasi BKB Kit, Genre KIT, BKL Kit agar lebih ahli dalam memberikan informasi ketengah masyarakat.
- l. Kesertaan ber KB / Pasangan Usia Subur

Pasangan Usia Subur adalah pasangan suami-istri yang istrinya berumur antara 15–49 tahun, dan secara operasional pula pasangan suami-istri yang istri berumur kurang dari 15 tahun dan telah kawin atau istri berumur lebih dari 49 tahun tapi belum menopause (BKKBN, 2007). Tingkat kesertaan ber-KB diukur dari angka persentase PUS yang menjadi peserta KB. Jumlah PUS di Tahun 2011 mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu 16.007 pasang dan seterusnya meningkat sampai Tahun 2015 sebesar 16.385 pasang, dan tahun 2016 menjadi 16.538 pasang. Jumlah PUS di Kota Bukittinggi Tahun 2017 menjadi 16.455 pasang yang berarti terjadi penurunan PUS dari tahun 2016 sebanyak 83 pasang. Tahun 2018 Pasangan Usia Subur di Kota Bukittinggi sebanyak 16.421 pasang yang berarti berkurang sebanyak 34 pasang.

- **Contraceptive Prevalence Rate dan Mix Kontrasepsi**

- **Pengetahuan Mengenai Alat/Cara KB**

Pengetahuan tentang metode kontrasepsi untuk semua wanita, wanita pernah kawin dan pria berstatus kawin. Hampir semua wanita dan wanita pernah kawin di Indonesia (98 persen dan 99 persen) pernah mendengar dan mengetahui



paling tidak satu alat/cara KB. Persentase ini relatif tidak mengalami perubahan yang signifikan sejak SDKI 2007.

- **Pemakaian kontrasepsi dan kecenderungannya**

Program Keluarga Berencana berkaitan dengan dapat ditekannya angka kematian ibu dan anak dan dapat mempengaruhi Pertumbuhan ekonomi. Memiliki anak lebih sedikit dan lebih sehat dapat mengurangi beban ekonomi pada keluarga miskin, dan memungkinkan mereka menginvestasikan sumberdayanya dalam pengasuhan, perawatan dan sekolah anak, sehingga nantinya dapat memutuskan mata rantai kemiskinan. Investasi KB juga membuka “*a window of opportunity*” (jendela kesempatan) bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat melalui penurunan fertilitas dan perubahan struktur umur populasi dan angka ketergantungan (dependency ratio). Perencanaan jumlah keluarga dengan pembatasan yang bisa dilakukan dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran seperti kondom, spiral, IUD, dan sebagainya.

- **Pencapaian tahun 2018.**

Berdasarkan pencapaian tahun 2018 dan target PPM tahun 2018 sebanyak 3.570, dapat kita lihat perbandingan pencapaian tahun 2018 ini sebagai berikut :

1. Jumlah pencapaian Peserta KB Baru sampai dengan Desember 2018 adalah sebanyak 3.581 akseptor atau sebanyak 100.31 % dari PPM, ($(3581 : 3.570) \times 100 \% = 100,31 \%$).
2. Akseptor tersebut dibagi dalam alat kontrasepsi sebagai berikut:
 - IUD sebanyak 1.014 Akseptor
 - MOW sebanyak 176 Akseptor
 - MOP sebanyak 4 Akseptor
 - Kondom sebanyak 258 Akseptor
 - Implan sebanyak 1017 Akseptor
 - Suntik sebanyak 4025 Akseptor
 - Pil sebanyak 1029 Akseptor



4. Selanjutnya dari 16.421 Pasangan Usia Subur yang tercatat pada tahun 2018 ini Pencapaian Peserta KB Aktif adalah sejumlah 10.604 peserta dengan perincian, IUD sebanyak 3.226 peserta, MOW 484 peserta, MOP 70 Peserta, Kondom 753 peserta, Implan sebanyak 1017 Peserta, Suntik sebanyak 4.025 peserta dan Pil sebanyak 1.029 peserta. Sehingga dapat ditampilkan bahwa pencapaian Peserta KB Aktif Kota Bukittinggi tahun 2018 adalah sebanyak 64,58 %.



BAB IV

PENUTUP

Pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Bukittinggi yang termuat dalam RPJMD Kota Bukittinggi tahun 2018-2021 merupakan tanggung jawab seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi yang telah dituangkan pada Renstra masing-masing SKPD dalam menyelenggarakan pembangunan daerah. Pembangunan tersebut merupakan pelaksanaan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk merealisasikan pembangunan tersebut, Pemerintah Kota Bukittinggi telah menetapkan target kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi dalam suatu penetapan kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi yang memuat sasaran strategis dan indikator sasaran untuk mengukur pencapaiannya. LKIP Pemerintah Kota Bukittinggi pada hakekatnya merupakan hasil dari pencapaian kinerja SKPD dalam mencapai sasaran berdasarkan program dan kegiatan pendukungnya yang dianggarkan dalam APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018.

Pencapaian kinerja sasaran selama tahun anggaran 2018 umumnya dapat dicapai sesuai target kinerja yang ditetapkan. Hal ini dapat diwujudkan karena program dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung pencapaian sasaran strategis dan dapat dilaksanakan sesuai target kinerja.

Capaian kinerja yang belum atau kurang memenuhi target disebabkan antara lain kurang sesuainya data yang tersedia dibandingkan dengan data yang dibutuhkan dalam indikator kinerja dari sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD, perubahan kebijakan atau aturan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Beberapa persoalan yang ditemui dalam mewujudkan kinerja sasaran umumnya berkaitan dengan persoalan kebijakan teknis dari pemerintah, keterbatasan sumber dana dan SDM serta hal lainnya diluar perkiraan sebelumnya.

Untuk masa yang akan datang perlu kiranya diambil langkah-langkah dalam meningkatkan kinerja pemerintahan antara lain : meningkatkan koordinasi lintas SKPD dalam penyusunan program perencanaan, peningkatan wawasan dan SDM



Pemerintah Kota Bukittinggi

aparatur melalui bimbingan teknis dan sosialisasi terkait peraturan perundang-undangan maupun dalam hal penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan.

Kita berharap dengan semakin lengkapnya data yang tersedia dan semakin pahamnya aparatur terhadap aturan, kebijakan dan regulasi yang dibuat oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah, maka pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai visi dan misi pemerintah dan memberikan dampak yang baik bagi kesejahteraan masyarakat.

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018 ini dibuat sebagai perwujudan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja.

Bukittinggi, Maret 2019

WALIKOTA BUKITTINGGI,

M. RAMLAN NURMATIAS



HASIL PENGUKURAN PENETAPAN KINERJA PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET	REALISAI	%
1	Melibatkan Pemangku kepentingan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah	1	Persentase usulan pemangku kepentingan yang diakomodir dalam Perencanaan Pembangunan	90%	98%	108,8%
2	Meningkatnya dukungan pembiayaan pemangku kepentingan dalam pembangunan	2	Rasio Corporate Social Responsibility dengan Belanja Langsung APBD dalam pembiayaan Pembangunan	1,75%	1,58%	105%
3	Terlaksana reformasi birokrasi	3	Nilai SAKIP	BB	BB	100%
		4	Peringkat LPPD	40	29	137,9%
		5	Indeks RB	B	BB	125%
		6	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP	WTP	100%
		7	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan public	75%	87,35%	116%
4	Terpenuhinya RTH Kota	8	Persentase RTH Publik	14%	1,079%	7,7%
5	Fasilitas Publik yang memenuhi standar lingkungan	9	Persentase Fasum yang representative dan memenuhi standar lingkungan	65%	67,94%	104



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET	REALISAI	%
6	Pemenuhan target universal access (sanitasi, air bersih dan permukiman kumuh)	10	Persentase Penyediaan air minum layak	90%	92	102
7	Pemenuhan target universal access (sanitasi, air bersih dan permukiman kumuh)	11	Kawasan Kumuh	6 ha	8,2 ha	73
		12	Persentase sanitasi layak	95%	96	101
8	Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Kota	13	Kesesuaian pemanfaatan ruang kota	65%	60%	93
9	Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi	14	Pertumbuhan ekonomi	6,30%	6,04	95
		15	PDRB Perkapita	53,25 juta	58,73	110
		16	Indeks Gini	<0,3	0,32	93
		17	Jumlah Investasi	40%	27%	67
10	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	18	Tingkat Kemiskinan	3,5	5,48	68
11	Meningkatkan pelayanan pariwisata	19	Kunjungan Wisatawan	533.555	577.857	108
12	Meningkatnya akses layanan bidang pendidikan	20	Harapan lama sekolah	14,9	14,92	100,8
13	Meningkatkan kualitas pendidikan	21	Persentase Sekolah yang berakreditasi A tingkat SD	78,50%	72,88	92,8
		22	Persentase Sekolah yang berakreditasi A tingkat SMP	70,75%	61,53	86,9
14	Peningkatan kualitas	23	Angka Harapan	72,85	72,88	92,8



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET	REALISAI	%
	layanan kesehatan		Hidup			
15	Meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan serta sumber daya kesehatan	24	Persentase Puskesmas yang terakreditasi	70	61,53	86,9
16	Terjaganya stabilitas harga	25	Tingkat Inflasi	5	1,37	437,9
17	Terkendalinya jumlah penduduk	26	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,55	1,56	100
Rata-rata Capaian						110,50%